



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MENGURAI DETERMINAN KETIMPANGAN SOSIAL DAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT



**DIREKTORAT KEPENDUDUKAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS**

2025



Mengurai Determinan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Jawa Barat

Tim Pengarah:

Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas)

Koordinator:

Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA (Bappenas)

Penulis:

Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas)

Qori'atul Septiavin, SE (Tanga Ahli, Bappenas)

Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA (Bappenas)

Rizka Utari Karlinda, S.Tr.Sos. (Bappenas)

Dea Yahya Ghotama, S.Si. (Bappenas)

Yogi Yuniarto, S.Stat, MA (Bappenas)

Nizar Istighfarli Ramadhan, ST (Bappenas)

Nurul Aini, SE (Bappenas)

Kontributor:

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (Bappenas)

Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Bappenas)

Rusiti, SE (Kementerian Sekretariat Negara)

Editor:

Martoni Ariadirja (Pakar Kebijakan Publik)

Desain Sampul:

Rizkia Raihana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku **Mengurai Determinan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Jawa Barat**. Indikator ketimpangan yang diukur dengan *Gini Ratio* menjadi isu nasional dan merupakan salah sasaran Visi Indonesia 2045 nomor 2 yaitu “Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang”. Ketimpangan nasional pada prinsipnya adalah cerminan masalah di daerah-daerah dengan berbagai penyebab yang berbeda apabila dikupas per provinsinya. Dengan pemilihan satu lokasi khusus permasalahan ketimpangan daerah dapat dianalisis lebih mendalam. Pemilihan Provinsi Jawa Barat tepat karena kecenderungan *Gini Ratio*-nya yang cenderung meningkat. Selain itu juga menarik karena adanya temuan bahwa *Gini Ratio* rendah tidak berarti menggambarkan kesejahteraan yang merata tetapi bisa jadi kemiskinan yang merata.

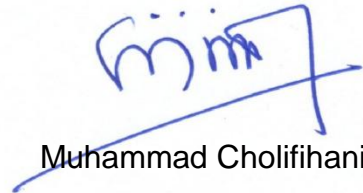
Penyebab ketimpangan di Jawa Barat termasuk kompleks. Disparitas perdesaan dengan perkotaan dan antar kelompok kesejahteraannya mencolok, sehingga membutuhkan kelengkapan data dan akurasi perhitungan. Uraian buku ini cukup lengkap meliputi determinan ekonomi; kebijakan fiskal dan regulasi; sumber daya manusia (SDM); ketenagakerjaan; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); demografi dan migrasi; akses keuangan dan jaminan sosial dengan variabel yang banyak pada setiap dimensinya. Dengan menggunakan model regresi panel dan logit telah berhasil mengurai tingkat dan pola determinan sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab ketimpangan berdasarkan perbedaan wilayah, karakteristik penduduk, dan kelompok kesejahteraan di Jawa Barat.

Kajian ini juga diperkaya dengan kunjungan lapangan dan berdiskusi dengan Pakar Kebijakan Publik, pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa Kabupaten/kota, dan desa. Kunjungan ke daerah membantu mensinkronkan antara data dan perhitungan data dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Martoni Ariadirja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bandung, Purwakarta, Subang, Kecamatan Cimanggung, dan Desa Dangdeur (Kabupaten Purwakarta) yang telah bersedia membantu kelengkapan informasi bagi tersusunnya kajian ini.

Analisis berbasis data, perhitungan, dan realitas di lapangan menjadi penguat pada usulan kebijakan penurunan ketimpangan di Jawa Barat. Apabila pengendalian ketimpangan Jawa Barat berhasil maka akan membantu menurunkan ketimpangan nasional.

Kajian tentang *Gini Ratio* akan terus dikembangkan untuk memperbaiki penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan dalam menganalisis masalah yang sama di provinsi-provinsi lainnya.

Jakarta, 15 Desember 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Cholifhani', written over a horizontal line.

Muhammad Cholifhani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB 1 ENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Kajian	4
1.4. Keluaran Kajian	4
1.5. Manfaat Kajian	5
1.6. Keterbatasan Kajian	5
1.7. Ruang Lingkup Kajian	5
1.8. Sistematika Laporan.....	5
1.9. Pelaksana Kegiatan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PROFIL JAWA BARAT	8
2.1 Ketimpangan: Konsep dan Teori	8
2.1.1 Teori Klasik	8
2.1.2. Teori Modern	9
2.2. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan dalam Literatur.....	10
2.3. Profil Jawa Barat	12
2.3.1. Profil Geografis	12
2.3.2. Profil Kependudukan.....	16
2.3.3. Profil Ekonomi.....	19
BAB III METODOLOGI	24
3.1. Desain Kajian	24
3.2. Sumber dan Jenis Data	24
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel	26
3.4. Metodologi Analisis Kuantitatif.....	28
3.5. Metodologi Analisis Kualitatif	30
3.6. Keterbatasan Analisis.....	31
BAB IV HASIL PERHITUNGAN DAN ESTIMASI MODEL.....	33
4.1. Analisis Makro	33
4.2. Analisis Mikro	38
BAB V DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI EKONOMI	41
5.1. Pertumbuhan Ekonomi	41
5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	41
5.3. Kedalaman Kemiskinan.....	49
5.4. Investasi.....	52
5.5. Proporsi Pengeluaran Makanan	52
BAB VI DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA	54
6.1. Pendidikan	57

6.2. Kesehatan	69
6.3. Pengeluaran Riil Per kapita	83
BAB VII DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI KEBIJAKAN FISKAL DAN REGULASI.....	105
7.1 Pendapatan Asli Daerah	105
7.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa & Dana Alokasi Umum	107
7.3. Upah Minimum Kabupaten/Kota	110
7.4. Bantuan Sosial dan Subsidi.....	113
BAB VIII DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI KETENAGAKERJAAN DAN UMKM	116
8.1. Usaha Kecil dan Menengah	116
8.2. Ketenagakerjaan	121
BAB IX DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI DEMOGRAFI DAN URBANISASI	131
9.1. Kepadatan Penduduk	131
9.2. Urbanisasi	134
9.3. Demografi Rumah Tangga	137
9.4. Akses Keuangan dan Jaminan Sosial	139
BAB X PENUTUP	144
10.1. Simpulan	144
10.2. Rekomendasi	146
DAFTAR REFERENSI.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Provinsi Jawa Barat.....	13
Tabel 2 Proporsi Pekerja Formal Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	18
Tabel 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024	21
Tabel 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024	22
Tabel 5 Deskriptif Statistik Variabel Analisis Makro	25
Tabel 6 Determinan Ketimpangan pada Analisis Makro	26
Tabel 7 Determinan Ketimpangan pada Analisis Mikro	27
Tabel 8 Hasil Estimasi Panel Statis, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Pemilihan Model	34
Tabel 9 Uji Diagnostik Model System GMM.....	36
Tabel 10 Hasil Estimasi Short Run dan Long Run Model Dinamis Ketimpangan Jawa Barat	37
Tabel 11 Hasil Regresi Logit.....	38
Tabel 12 TPT dan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan	46
Tabel 13 Jumlah SD, SMP, SMA/SMK Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia Semester Ganjil 2024.....	65
Tabel 14 Provinsi dengan Jumlah Perguruan Tinggi Terbanyak di Indonesia 2024	65
Tabel 15 Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jawa Barat, 2024	66
Tabel 16 Beban Mengajar Guru SD Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024.....	67
Tabel 17 Beban Mengajar Guru SMP Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024.....	67
Tabel 18 Beban Mengajar Guru SMA Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024.....	67
Tabel 19 Beban mengajar guru SMK Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024.....	68
Tabel 20 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota dan Desa Jawa Barat 2024 (Rupiah).....	91
Tabel 21 Kategori Kota/Kabupaten Berdasarkan Besaran Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun	92
Tabel 22 Lapangan Usaha Utama dan Share Terhadap PDRB, 2024.....	99
Tabel 23 Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Gini Ratio di Jawa Barat Tahun 2023.....	118
Tabel 24 Rangkuman Isu Strategis dan Rekomendasi per Dimensi	146
Tabel 25 Rangkuman Isu Strategis dan Rekomendasi per Kabupaten/Kota	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat	12
Gambar 2. Tutupan Lahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	14
Gambar 3. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	16
Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 (persen)	17
Gambar 5. Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	18
Gambar 6. TPAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	19
Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2024	20
Gambar 8. Diagram Kependudukan.....	42
Gambar 9. TPT 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	43
Grafik 10. TPT Indonesia dan Tiga Kabupaten dengan TPT Tertinggi di Provinsi Jawa Barat	44
Gambar 11. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	45
Gambar 12. TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat.....	47
Gambar 13. TPT Menurut Pendidikan Pada Februari 2025 dan Perkembangan TPT Lulusan SMK Pada Februari 2023 Hingga Februari 2025	48
Gambar 14. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Struktur Pendidikan per Kabupaten/Kota	49
Gambar 15. Analisis Kuadran Peta Daerah “Merata Miskin” dengan “Kaya Timpang”	51
Gambar 16. Perbedaan Konsep IPM dan IMM	56
Gambar 17. HLS dan RLS Jawa Barat 2020-2024	58
Gambar 18. HLS per Kabupaten/kota Jawa Barat 2024.....	59
Gambar 19. RLS per Kabupaten/kota Jawa Barat 2024.....	59
Gambar 20. Persentase Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023	60
Gambar 21. Analisis Kuadran: Rata Lama Sekolah vs Gini Ratio di Jawa Barat, 2024.....	61
Gambar 22. Rata-rata Gaji yang Diperoleh Berdasarkan Pendidikan 2024 (Dalam Juta).....	63
Gambar 23. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Perkerjaan Utama (Jiwa) 2024	63
Gambar 24. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Di Provinsi Jawa Barat, 2021-2024	68
Gambar 25. Umur Harapan Hidup Jawa Barat dan Indonesia, 2020–2024.....	70
Gambar 26. Umur Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Jawa Barat	71
Gambar 27. Jumlah Rumah Sakit di Jawa Barat 2021	73
Gambar 28. Jumlah Puskesmas di Jawa Barat 2021	73
Gambar 29. Jumlah Posyandu Jawa Barat.....	75
Gambar 30. Angka Kematian Bayi Per Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 2017	77
Gambar 31. Angka Kematian Balita Per Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 2017	78
Gambar 32. Heatmap Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Barat, 2024.....	80

Gambar 33. Heatmap Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Barat, 2024	81
Gambar 34. Pengeluaran Riil Per Kapita Jawa Barat, Jakarta, Indonesia (Juta Rupiah), 2019–2024.....	83
Gambar 35. Analisis Kuadran Pengeluaran Per Kapita vs Gini Ratio, 2024	85
Gambar 36. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Sebulan Per Kapita Untuk Makanan dan Non Makanan di Jawa Barat 2020- 2024.....	88
Gambar 37. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan, Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat, 2024	89
Gambar 38. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten dan kota Jawa Barat, 2024.....	89
Gambar 39. Pengeluaran Riil Per Orang Per Kapita Indonesia, Jawa Barat, Kota Bandung, Bekasi, Depok, (Ribu Rupiah), 2019–2024	93
Gambar 40. Indeks Gini Kota Bandung, Bekasi, Depok 2019-2024.....	95
Gambar 41. Pengeluaran riil per orang per kapita Kota Cimahi, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, 2019–2024	96
Gambar 42. Gini Ratio Kota Cimahi, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi 2023-2024	97
Gambar 43. Kabupaten/Kota dengan Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun di Bawah Rp12,000 Juta, 2024	100
Gambar 44. Gini Ratio kota Banjar, Tasikmalaya; dan kabupaten Subang, Sumedang, Bogor, Cirebon, Bandung, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cianjur, Tasikmalaya.	101
Gambar 45. Persentase Penduduk Miskin	102
Gambar 46. Kuadran PAD dan Ketimpangan di Jawa Barat, 2024.....	105
Gambar 47. Analisis Kuadran TKDD dan Ketimpangan di Jawa Barat, 2024... ..	108
Gambar 48. Analisis Kuadran UMK dan Ketimpangan di Jawa Barat, 2024	110
Gambar 49. Distribusi Penerima Bansos (PKH dan BPNT) Menurut Kuintil Pengeluaran Jawa Barat.....	114
Gambar 50. Jumlah Pelaku UMKM di Jawa Barat Tahun 2023	116
Gambar 51. Persentase Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Barat Tahun 2023	117
Gambar 52. Analisis Kuadran Usaha Kecil dan Menengah vs Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024	119
Gambar 53. Heatmap Proporsi KRT yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024	121
Gambar 54. Analisis Kuadran Persentase KRT Sektor Pertanian Vs Gini Ratio Jawa Barat, 2024	123
Gambar 55. Heatmap Proporsi KRT yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024	126
Gambar 56. Heatmap Proporsi KRT yang Berstatus Setengah Menanggung Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024	129
Gambar 57. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2024) Dibandingkan dengan Zona Ideal Daya Dukung	132
Gambar 58. Kuadran Kepadatan Penduduk vs Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	133
Gambar 59. Hunian Layak dan Tidak Layak Menurut Kuintil Perkotaan dan Perdesaan Jawa Barat, 2024	135

Gambar 60. Persentase Hunian Tidak Layak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat.....	136
Gambar 61. Heatmap Kepemilikan Akun Bank Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024.....	139
Gambar 62. Analisis Kuadran Kepemilikan Akun Bank dan Gini Ratio di Jawa Barat, 2024.....	141

DAFTAR SINGKATAN

BPS	Badan Pusat Statistik
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PAD	Pendapatan Asli Daerah
DAU	Dana Alokasi Umum
DAK	Dana Alokasi Khusus
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
KRT	Kepala Rumah Tangga
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
B40	<i>Bottom</i> 40 (kelompok 40 persen penduduk terbawah)
U20	<i>Upper</i> 20 (kelompok 20 persen penduduk teratas)
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
PKH	Program Keluarga Harapan
PLN	Perusahaan Listrik Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika ketimpangan sosial dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat serta faktor-faktor utama yang membentuk pola ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok penduduk. Dengan memadukan analisis makro antar kabupaten dan kota serta analisis mikro tingkat rumah tangga berbasis data Susenas, kajian ini mengidentifikasi determinan struktural yang mendorong perbedaan kesejahteraan dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah berjalan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan di Jawa Barat memiliki sifat persistensi yang kuat, tercermin dari pengaruh signifikan kondisi ketimpangan tahun sebelumnya terhadap ketimpangan tahun berjalan. Di tingkat makro, variabel seperti rata-rata lama sekolah, perkembangan UMK, struktur tenaga kerja, urbanisasi, investasi, dan kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan bermakna dengan variasi ketimpangan antarwilayah. Beberapa temuan menunjukkan bahwa peningkatan variabel pembangunan tertentu belum sepenuhnya inklusif, sehingga manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan menengah atas.

Analisis mikro mengungkapkan disparitas yang lebar antara kelompok rentan (*Bottom 40* persen) dan sejahtera (*Upper 20* persen) dalam dimensi pendidikan, kondisi tenaga kerja, akses layanan dasar, dan karakteristik demografis. Distribusi bantuan sosial dan subsidi belum optimal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, sehingga kontribusinya terhadap penurunan ketimpangan masih terbatas. Kunjungan lapangan ke empat kabupaten dan kota memperlihatkan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural daerah, kualitas pelayanan publik, peluang ekonomi lokal, serta efektivitas kebijakan di tingkat tapak.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa penurunan ketimpangan di Jawa Barat memerlukan strategi multidimensi yang mengintegrasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi lokal yang inklusif, perbaikan tata kelola fiskal daerah, serta pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi dan perlindungan sosial. Rekomendasi disusun secara spesifik per dimensi dan per kabupaten atau kota agar dapat menjadi panduan kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan inklusif merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pembangunan inklusif diarahkan untuk menurunkan kemiskinan dalam berbagai dimensi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata antarkelompok dan antarwilayah. Untuk mencapai agenda tersebut, diperlukan strategi seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan layanan publik dasar, serta memastikan partisipasi aktif kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mencapai target RPJMN 2025–2029. Target pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan ditetapkan sebesar 8 persen. Akselerasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila pemerataan ekonomi terwujud di seluruh wilayah. Pemerataan tersebut tecermin dari rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan, yang salah satunya didorong oleh penciptaan lapangan kerja yang merata. Ketersediaan pekerjaan yang luas dan setara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menurunkan kesenjangan ekonomi dan sosial melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menempatkan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai prioritas strategis, antara lain melalui penguatan layanan kesehatan dan pendidikan. Investasi pada dua sektor ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing, dan mampu berinovasi dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional.

Pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh daerah menjadi agenda strategis dalam RPJMN 2025–2029 sekaligus bagian dari upaya jangka panjang mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, cita-cita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan. Tingkat ketimpangan suatu wilayah menjadi penanda penting bagi pemerataan ekonomi dan sosial, yang salah satunya diukur melalui *Gini Ratio* dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Indikator ini berada pada rentang 0 hingga 1, nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sedangkan

nilai yang semakin dekat dengan 0 mencerminkan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), *Gini Ratio* Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, menurun dari 0,381 pada September 2024. Meskipun terjadi perbaikan di tingkat nasional, Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang menonjol antara wilayah Barat dan Timur, antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antarprovinsi bahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi. RPJMN 2025–2029 menetapkan target *Gini Ratio* di bawah 0,380 sebagai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk dan memperkuat fondasi pemerataan pembangunan nasional.

Dalam konteks regional, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi di Indonesia. Angka *Gini Ratio* di provinsi ini cenderung mengalami peningkatan selama periode 2018 – 2024, meskipun pada tahun 2021 sudah mencapai 0,406 namun pada 2024 kembali meningkat menjadi 0,428.

Sebagai salah satu provinsi yang berdampingan dengan Kota Jakarta, Jawa Barat menjadi tujuan menarik investasi nonmigas baik dari pihak asing maupun dalam negeri. Realisasi investasi nonmigas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Barat pada 2024 mencapai Rp 251,1 triliun atau sekitar 14,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Namun, besarnya investasi ternyata belum dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduknya secara merata.

Jawa Barat juga menghadapi ketimpangan sosial yang nyata, salah satunya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan. Dari sisi sosial, tantangan ketimpangan Jawa Barat juga tercermin pada rendahnya kualitas pendidikan di sebagian wilayah. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah anak putus sekolah dasar tertinggi di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2024 mencatat terdapat 5.189 siswa sekolah dasar (SD) yang putus sekolah di Jawa Barat atau mencapai 0,11 persen dari total peserta didik SD nasional yang jumlahnya 24 juta orang. Masih banyaknya penduduk dengan pendidikan rendah akan berdampak langsung pada rendahnya upah minimum yang diterima. Sebagai konsekuensi logis, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah akan menerima upah terendah dibandingkan dengan pekerja dengan pendidikan tinggi. Upah minimum Jawa Barat 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495 naik 3,57 persen dari 2023 yang senilai Rp1.986.670. Dibandingkan dengan provinsi lain termasuk rendah. Upah minimum rendah disebabkan oleh banyak faktor antara lain rendahnya produktivitas dan daya tawar pekerja, tingkat pendidikan dan keahlian yang masih terbatas. Disparitas upah yang diterima antar kota/kabupaten di Jawa Barat juga terjadi karena sebagian daerah secara ekonomi ditopang oleh sektor industri, dan sebagian masih pertanian/perikanan tradisional. Dampak dari

besar kecilnya upah yang diterima berpengaruh pada pengeluaran riil per kapita per tahun per kabupaten/kotanya.

Penduduk miskin Jawa Barat menduduki jumlah terbesar kedua setelah Jawa Timur, meskipun secara proporsi bukan yang terbesar. Pada bulan September 2024 penduduk miskin Jawa Barat berjumlah 3.668,35 ribu menurun dari bulan Maret pada tahun yang sama yang mencapai jumlah 3.848,67 ribu. Implikasi dari besarnya jumlah penduduk miskin, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima bantuan sosial pangan terbesar. Rencana jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2024 sebanyak 15.578.437 keluarga atau mencapai 20,75 persen total rencana KPM penerima bansos pangan nasional yang tercatat 75.073.000 keluarga. Dari rencana tersebut, telah terealisasikan 15.381.114 KPM atau mencapai 98,73 persen.

Selain masalah ketertinggalan pendidikan dan besarnya penduduk miskin, Jawa Barat juga menghadapi masalah migrasi penduduk yang menjadi tenaga kerja di luar negeri atau pekerja migran Indonesia (PMI). PMI menjadi sumber pendapatan keluarga dari remitansi yang dikirim ke keluarganya, namun tidak selalu menciptakan roda perekonomian yang dinamis baik bagi keluarganya maupun daerahnya. Beberapa daerah yang menjadi kantong PMI justru timbul masalah baru dengan tingginya perceraian yang meninggalkan anak-anak yang tidak berpendidikan, sehingga menciptakan masalah sosial yang baru.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dinamika kesejahteraan Jawa Barat memiliki dampak strategis terhadap kesejahteraan nasional. Beragam persoalan yang dihadapi provinsi ini menunjukkan kompleksitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Atas dasar tersebut, isu ketimpangan di Jawa Barat ditetapkan sebagai fokus kajian tahun 2025 oleh Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), guna memperdalam pemahaman dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif.

1.2. Rumusan Masalah

Meskipun secara nasional ketimpangan menunjukkan tren penurunan, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tingkat ketimpangan yang relatif tinggi, terutama antarwilayah perkotaan dan perdesaan serta antarkabupaten/kota. *Gini Ratio* Jawa Barat tercatat berada diatas rata-rata nasional dan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun lokasinya dekat dengan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi penyangga Jakarta, ketimpangan Jawa Barat cukup kompleks yang meliputi ketimpangan ekonomi dan sosial. Berdasarkan kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan

pembangunan di Jawa Barat serta tujuan kajian yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

- (i) Bagaimana tingkat dan pola ketimpangan sosial serta ekonomi di Jawa Barat berdasarkan perbedaan wilayah, karakteristik penduduk, dan kelompok kesejahteraan.
- (ii) Variabel struktural dan karakteristik rumah tangga apa saja yang memengaruhi ketimpangan sosial ekonomi di Jawa Barat, serta bagaimana arah dan besaran pengaruhnya dalam kerangka analisis makro dan mikro.
- (iii) Wilayah kabupaten dan kota mana yang memiliki tingkat kerentanan ketimpangan lebih tinggi dan memerlukan prioritas intervensi dalam upaya pemerataan pembangunan.
- (iv) Bagaimana menyediakan dasar evidensial yang memadai untuk mendukung proses perumusan kebijakan penurunan ketimpangan di Jawa Barat oleh pemangku kepentingan.
- (v) Bagaimana merumuskan opsi rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi penurunan ketimpangan pada tingkat daerah maupun provinsi.

1.3. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

- (i) Mengidentifikasi tingkat dan pola ketimpangan sosial serta ekonomi di Jawa Barat berdasarkan perbedaan wilayah, karakteristik penduduk, dan kelompok kesejahteraan.
- (ii) Menganalisis faktor determinan ketimpangan secara makro dan mikro untuk memahami pengaruh variabel struktural maupun karakteristik rumah tangga.
- (iii) Menghasilkan pemetaan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi percepatan pemerataan pembangunan.
- (iv) Menyediakan dasar evidensial bagi perumusan kebijakan penurunan ketimpangan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
- (v) Memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks Jawa Barat

1.4. Keluaran Kajian

Keluaran yang dihasilkan berupa satu dokumen kajian untuk mendukung upaya penurunan ketimpangan di Jawa Barat. Kajian ini menyajikan profil ketimpangan sosial dan ekonomi menurut wilayah dan kelompok kesejahteraan, disertai analisis determinan ketimpangan melalui pendekatan makro dan mikro. Seluruh temuan tersebut dirangkum untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

1.5. Manfaat Kajian

Manfaat kajian ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Jawa Barat, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi provinsi lainnya dalam melakukan analisis ketimpangan. Temuan mengenai berbagai persoalan ketimpangan di Jawa Barat memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan rekomendasi kebijakan penurunan ketimpangan, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada penguatan perumusan kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih terarah, responsif, dan berkelanjutan.

1.6. Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data dan dinamika kebijakan terkini. Beberapa kebijakan fiskal dan sosial yang diterbitkan pada akhir tahun 2024 belum dapat diukur dampaknya secara empiris dalam model karena belum tersedianya data yang merepresentasikan implementasi dan hasil kebijakan tersebut di tingkat kabupaten/kota. Keterbatasan data kuantitatif pada tingkat daerah menghambat pengukuran yang komprehensif terhadap dimensi-dimensi tersebut, sehingga hasil kajian perlu dipahami sebagai gambaran yang utamanya mencerminkan ketimpangan berdasarkan indikator sosial ekonomi yang tersedia.

1.7. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini mencakup analisis ketimpangan sosial dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dari data makro dan mikro, serta dilengkapi dengan pendalaman lapangan pada beberapa kabupaten dan kota terpilih. Kajian ini mencakup seluruh wilayah administrasi Jawa Barat dan membandingkan kondisi antarwilayah perkotaan dan perdesaan serta antarkelompok kesejahteraan menggunakan kuintil pengeluaran. Selain memetakan tingkat dan pola ketimpangan, ruang lingkup kajian juga meliputi identifikasi faktor determinan, analisis dinamika ketimpangan antar waktu, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

1.8. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan kajian, rumusan masalah, tujuan kajian, keluaran kajian, manfaat kajian, keterbatasan kajian, ruang lingkup, sistematika penulisan, serta pelaksana kegiatan.

Bab II Kajian Pustaka dan Profil Jawa Barat

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan empiris mengenai ketimpangan, mencakup teori klasik dan modern, faktor-faktor penyebab ketimpangan berdasarkan literatur, serta profil geografis,

kependudukan, dan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebagai konteks wilayah kajian.

Bab III Metodologi

Bab ini menguraikan desain kajian, sumber dan jenis data, definisi serta pengukuran variabel, dan metodologi analisis untuk pendekatan makro dan mikro.

Bab IV Hasil Perhitungan dan Estimasi Model

Bab ini menyajikan hasil estimasi kuantitatif, baik makro maupun mikro. Analisis makro mencakup hasil regresi panel statis dan dinamis, termasuk uji asumsi dan diagnostik model. Analisis mikro menggunakan data Susenas untuk menggambarkan karakteristik rumah tangga berdasarkan kelompok kesejahteraan.

Bab V Determinan Ketimpangan pada Dimensi Ekonomi

Bab ini mendalami faktor ekonomi yang memengaruhi ketimpangan, meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kedalaman kemiskinan, investasi, serta proporsi pengeluaran makanan. Setiap indikator dianalisis dengan mengaitkan hasil regresi dan bukti empiris lain.

Bab VI Determinan Ketimpangan pada Dimensi Sumber Daya Manusia

Bab ini membahas pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketimpangan, mencakup pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran riil per kapita. Analisis dilakukan dengan memadukan data makro, mikro, serta hasil visualisasi kuadran dan *Heatmap*.

Bab VII Determinan Ketimpangan pada Dimensi Kebijakan Fiskal dan Regulasi

Bab ini mengulas bagaimana faktor fiskal, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah dan Dana Desa termasuk DAU, upah minimum kabupaten/kota, serta bantuan sosial dan subsidi berkontribusi terhadap variasi ketimpangan antarwilayah.

Bab VIII Determinan Ketimpangan pada Dimensi Ketenagakerjaan dan UMKM

Bab ini menganalisis hubungan antara pasar kerja dan aktivitas UMKM terhadap ketimpangan. Pembahasan mencakup struktur usaha kecil-menengah, kualitas pekerjaan, sektor pertanian dan informal, serta dinamika ketenagakerjaan antarkabupaten/kota.

Bab IX Determinan Ketimpangan pada Dimensi Demografi dan Urbanisasi

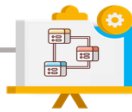
Bab ini menjelaskan pengaruh faktor kependudukan seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, karakteristik demografi rumah tangga, serta akses keuangan dan jaminan sosial dalam membentuk ketimpangan sosial ekonomi di Jawa Barat.

Bab X Penutup

Bab ini memuat simpulan utama hasil kajian dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk menurunkan ketimpangan sosial ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis makro, mikro, dan temuan lapangan.

1.9. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan kajian ini dilakukan secara swakelola oleh Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.



Ringkasan Bab

- Ketimpangan di Jawa Barat merupakan isu strategis yang membutuhkan analisis menyeluruh untuk memperkuat arah kebijakan pemerataan pembangunan.
- Kompleksitas faktor penyebab ketimpangan menuntut penggunaan pendekatan makro dan mikro secara terpadu.
- Kajian ini memberikan dasar konseptual dan ruang lingkup analisis sebagai pijakan bagi pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PROFIL JAWA BARAT

2.1 Ketimpangan: Konsep dan Teori

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu utama dalam literatur pembangunan, baik pada tingkat global maupun nasional. Ketimpangan tidak hanya mencerminkan perbedaan distribusi pendapatan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Badan Pusat Statistik mendefinisikan ketimpangan sebagai distribusi pengeluaran atau pendapatan yang tidak merata, dengan *Gini Ratio* sebagai ukuran utama. World Bank (2016) menekankan bahwa ketimpangan berhubungan erat dengan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, sehingga berdampak pada mobilitas sosial. Sementara itu, UNDP (2019) menyoroti ketimpangan sebagai fenomena multidimensi yang mencakup kesenjangan dalam capaian pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, hingga perlindungan sosial.

Ketimpangan bukan hanya merupakan persoalan ekonomi semata, tetapi juga persoalan sosial dan kelembagaan yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kompleksitas inilah yang menjadikan ketimpangan sebagai topik penting dalam kajian pembangunan. Sejalan dengan itu, berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan, mulai dari teori klasik seperti hipotesis Kuznets, trickle-down, dan dualisme Lewis, hingga pendekatan modern yang menekankan ketimpangan sebagai persoalan multidimensi.

2.1.1 Teori Klasik

Pembahasan awal mengenai ketimpangan dalam literatur ekonomi banyak dipengaruhi oleh teori-teori klasik yang menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural, dan distribusi pendapatan. Salah satu teori paling berpengaruh adalah Hipotesis Kuznets (Kuznets, 1955) yang menggambarkan hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan berbentuk kurva U terbalik (*inverted-U*). Menurut Kuznets, pada tahap awal pembangunan, ketimpangan meningkat karena pertumbuhan lebih cepat terjadi di sektor modern, sementara sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor tradisional dengan produktivitas rendah. Namun, pada tahap selanjutnya, ketika pendapatan per kapita meningkat dan tenaga kerja berpindah ke sektor modern, ketimpangan akan menurun seiring dengan membaiknya kapasitas redistribusi pemerintah.

Teori lain yang berpengaruh adalah Teori *Trickle-down*, yang berangkat dari anggapan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan “menetes ke bawah” kepada kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dan akumulasi kapital dianggap akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan kelompok miskin tanpa perlu intervensi redistributif yang besar. Namun, kritik terhadap teori ini menekankan bahwa manfaat pertumbuhan tidak selalu otomatis mengalir ke bawah. Dalam banyak kasus, keuntungan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, sehingga ketimpangan justru semakin melebar, terutama ketika akses kelompok miskin terhadap pendidikan, modal, dan pasar kerja masih terbatas.

Selain itu, Teori Dualisme Lewis (1954) juga memberikan kontribusi penting dalam memahami ketimpangan. Lewis membagi perekonomian negara berkembang ke dalam dua sektor, yaitu sektor tradisional (pertanian subsisten) dan sektor modern (industri kapitalis). Pada tahap awal, hanya sebagian tenaga kerja yang dapat masuk ke sektor modern, sehingga ketimpangan meningkat akibat adanya kesenjangan pendapatan antarsektor. Namun, seiring dengan akumulasi modal dan perluasan sektor modern, lebih banyak tenaga kerja terserap, dan ketimpangan berangsur menurun. Meski demikian, dalam praktiknya banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan transformasi struktural karena hambatan institusional, keterampilan, dan akses pendidikan, sehingga ketimpangan justru bersifat terus menerus (persisten).

Ketiga teori klasik ini menekankan bahwa ketimpangan erat kaitannya dengan dinamika pembangunan dan transformasi struktural. Akan tetapi, dalam perkembangannya, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan tidak selalu mengikuti pola yang diprediksi teori klasik. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan-pendekatan modern yang memandang ketimpangan sebagai fenomena yang lebih kompleks, tidak hanya terbatas pada dimensi pendapatan.

2.1.2. Teori Modern

Seiring perkembangan literatur, kajian ketimpangan kemudian bergeser ke arah pendekatan modern yang menekankan bahwa ketimpangan bukan sekadar persoalan distribusi pendapatan, melainkan fenomena yang bersifat multidimensi. Pendekatan ini dipengaruhi oleh gagasan Amartya Sen (1992) tentang *capability approach* yang menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya

ditentukan oleh seberapa besar pendapatan seseorang, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial.

Dalam kerangka multidimensi, ketimpangan dipahami sebagai keterbatasan akses sebagian kelompok masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pengukuran ketimpangan tidak seharusnya hanya berfokus pada indikator moneter seperti *Gini Ratio*, tetapi juga mencakup dimensi nonmoneter, seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hunian, dan perlindungan sosial. Pandangan ini semakin relevan dalam konteks negara berkembang dimana disparitas sosial ekonomi seringkali terlihat lebih nyata dalam akses terhadap layanan dasar dibandingkan hanya melalui perbedaan pendapatan.

Pendekatan modern ini mendukung perlunya analisis deskriptif berbasis data mikro seperti Susenas dan Sakernas untuk menangkap realitas ketimpangan antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan dapat dipahami secara lebih menyeluruh, baik dari sisi distribusi pendapatan maupun dari sisi akses terhadap berbagai dimensi kesejahteraan.

2.2. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan dalam Literatur

Kajian mengenai ketimpangan pendapatan umumnya menggunakan *Gini Ratio* sebagai indikator utama distribusi pendapatan yang mencerminkan tingkat ketimpangan konsumsi atau pendapatan antarpenduduk dalam suatu wilayah. Literatur menjelaskan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kebijakan fiskal, dinamika pasar kerja, serta karakteristik demografis dan spasial. Sejalan dengan Hipotesis Kuznets, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal cenderung meningkatkan ketimpangan karena manfaatnya lebih dulu terkonsentrasi di wilayah produktif (Afif Dika, 2022; Andhiani & Bhakti, 2018), sementara literatur lintas negara menegaskan bahwa efek tersebut dapat berkurang ketika kualitas institusi dan kebijakan publik membaik (Canh dkk, 2020).

Dalam ranah kebijakan fiskal, sejumlah penelitian menyoroti peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam mempengaruhi ketimpangan antarwilayah. PAD ditemukan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan karena memperkuat kapasitas fiskal daerah (Jamiel dkk, 2022). Sebaliknya, DAU sering tidak signifikan atau bahkan positif bila penggunaannya kurang tepat sasaran (Ridho & Wijayanti, 2022). Belanja bantuan sosial daerah dapat menurunkan ketimpangan apabila dilaksanakan secara akuntabel (Yasni & Yulianto, 2020). Investasi publik dan swasta juga berpengaruh atau memiliki dampak positif terhadap

pemerataan apabila diarahkan pada sektor padat karya (Andhiani & Bhakti, 2018).

Modal manusia berperan penting dalam menekan ketimpangan. Indeks Pengetahuan dan Angka Harapan Hidup (UHH) terbukti menurunkan *Gini Ratio* karena peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memperluas produktivitas masyarakat (Rahayu & Febriaty, 2018; Ariasta & Setiawati, 2017). Pengeluaran per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga dan berhubungan erat dengan distribusi konsumsi (Vionita & Artha, 2022). Jumlah penduduk miskin juga menjadi variabel kunci karena proporsinya yang besar memperburuk distribusi pendapatan di daerah (Afif Dika, 2022).

Dalam literatur pasar kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara konsisten meningkatkan ketimpangan (Firdaus & Hasmarini, 2019). Sebaliknya, proporsi pekerja formal berhubungan negatif dengan ketimpangan karena akses pada jaminan sosial dan kepastian pendapatan (Jamiel dkk, 2022). Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menghasilkan temuan beragam: dalam beberapa kasus meningkatkan ketimpangan karena menekan penyerapan tenaga kerja berkemampuan rendah (Yasni & Yulianto, 2020). Sementara itu, program bantuan sosial dan subsidi secara umum menurunkan ketimpangan bila targeting tepat dan cakupan memadai (Ridho & Wijayanti, 2022).

Karakteristik spasial dan demografis juga diperhatikan. Urbanisasi sering meningkatkan ketimpangan pada tahap awal aglomerasi (Andhiani & Bhakti, 2018), namun efeknya dapat berbalik menjadi negatif jika manfaat urbanisasi menyebar melalui integrasi pasar kerja dan pelayanan publik (Canh dkk, 2020). Kepadatan penduduk berhubungan positif dengan ketimpangan di wilayah metropolitan bila tidak diimbangi infrastruktur yang memadai (Afif Dika, 2022), tetapi dalam konteks wilayah agraris dengan kepadatan moderat, distribusi cenderung lebih merata. Proyeksi UMKM dianggap berperan menurunkan ketimpangan karena memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja lokal (Vionita & Artha, 2022). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan *Gini Ratio* sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah Indeks Pengetahuan, Pengeluaran Per kapita, UHH, TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, Investasi, PAD, TKDD, DAU, UMK, Bantuan Sosial dan Subsidi, Pekerja Formal, Proyeksi UMKM, Urbanisasi, dan Kepadatan Penduduk. Semua variabel tersebut merujuk pada bukti empiris dari literatur terdahulu sebagaimana telah dipaparkan.

Dari sisi metodologi, studi-studi ketimpangan di Indonesia banyak menggunakan Generalized Least Squares (GLS) untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada data panel (Afif Dika, 2022; Jamiel dkk, 2022). Sementara itu, literatur internasional maupun nasional yang memperhatikan dinamika dan potensi endogenitas antarvariabel

ketimpangan, pertumbuhan, dan kebijakan fiskal kerap menerapkan System-GMM (Canh dkk, 2020). Oleh karena itu, penerapan GLS dan System-GMM dalam studi ini sejalan dengan standar analitis yang diakui dalam literatur.

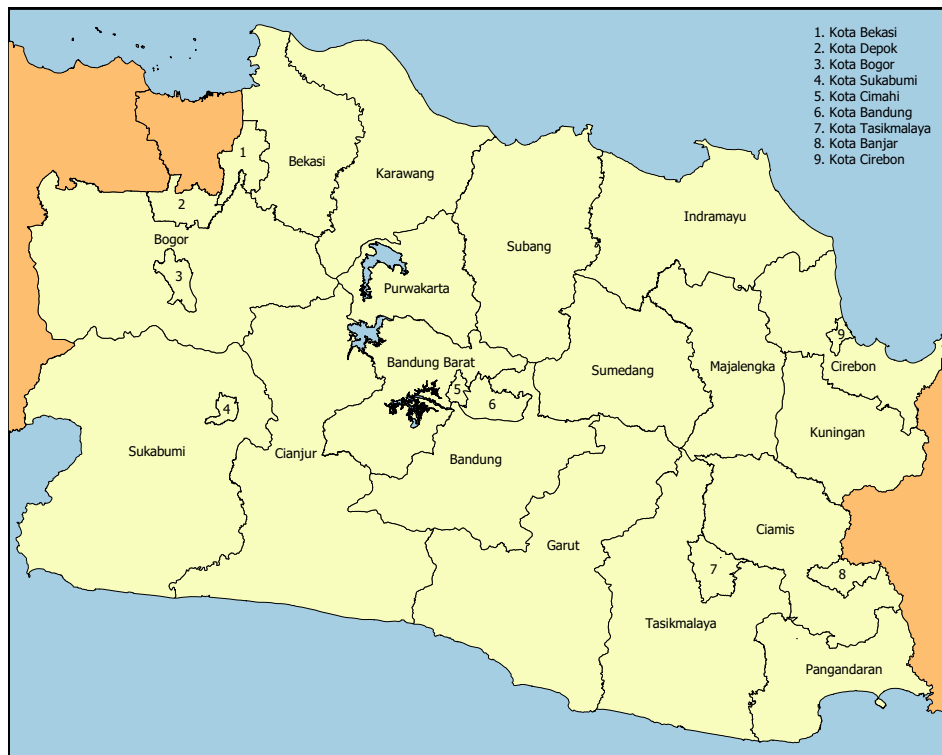
2.3. Profil Jawa Barat

2.3.1. Profil Geografis

Posisi geografis Provinsi Jawa Barat terletak di Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Pulau Jawa. Terletak di antara $106^{\circ} 22' 13''$ - $108^{\circ} 50' 1,4''$ Bujur Timur, dan $5^{\circ} 54' 49,58''$ - $7^{\circ} 49' 15,52''$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1. Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Penulis

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi atas 27 kabupaten/kota yang meliputi 18 kabupaten dan sembilan kota

(Gambar 1), 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Total luas 27 kabupaten/kota sebesar 5.349.484 hektar, dengan luas wilayah darat di Provinsi Jawa Barat seluas 3.704.067 hektar, dimana luasan tersebut termasuk daratan berupa pulau-pulau kecil sebanyak 19 pulau. Secara luasan, Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah paling besar sedangkan Kota Cirebon memiliki luas wilayah paling kecil (Tabel 1).

Tabel 1 Luas Wilayah dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Provinsi Jawa Barat

<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas Wilayah (km²)</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Desa</i>
Bogor	2.991,78	40	19	416
Sukabumi	4.164,15	47	5	381
Cianjur	3.631,92	32	6	354
Bandung	1.740,84	31	10	270
Garut	3.101,24	42	21	421
Tasikmalaya	2.705,86	39	-	351
Ciamis	1.595,94	27	7	258
Kuningan	1.192,90	32	15	361
Cirebon	1.071,95	40	12	412
Majalengka	1.330,17	26	13	330
Sumedang	1.566,20	26	7	270
Indramayu	2.076,06	31	8	309
Subang	2.165,55	30	8	245
Purwakarta	993,09	17	9	183
Karawang	1.913,71	30	12	297
Bekasi	1.251,02	23	7	180
Bandung Barat	1.283,44	16	-	165
Pangandaran	1.128,18	10	-	93
Kota Bogor	111,37	6	68	-
Kota Sukabumi	48,31	7	33	-
Kota Bandung	166,59	30	151	-
Kota Cirebon	39,44	5	22	-
Kota Bekasi	213,04	12	56	-
Kota Depok	199,91	11	63	-
Kota Cimahi	42,43	3	15	-
Kota Tasikmalaya	183,94	10	69	-
Kota Banjar	131,01	4	9	-

Sumber: Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022

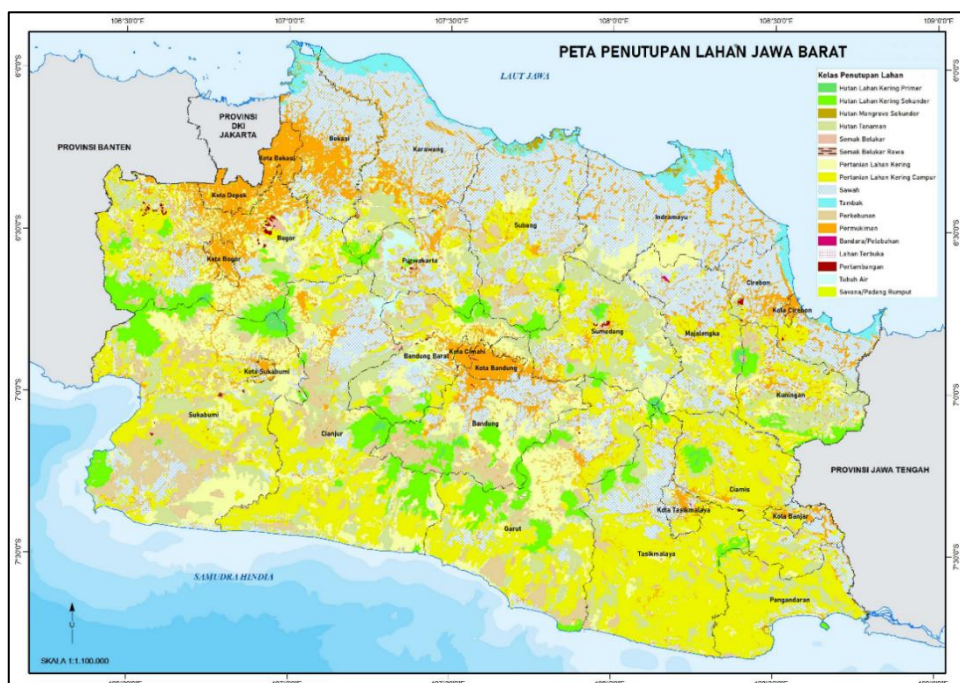
Selain wilayah daratan, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah perairan laut berdasarkan kewenangan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, adalah seluas 1.645.417 hektar. Wilayah perairan laut di Provinsi Jawa Barat berada di wilayah perairan Pantai Utara yang berada di Laut Jawa dan perairan Pantai Selatan yang berada di Laut Samudera Hindia.

Secara geografis, kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah pantai selatan terdiri atas Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten

Pangandaran. Sementara itu, wilayah pantai utara terdiri atas Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Pantura dan Pansela tersebut terdapat Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Indramayu dan Sukabumi.

Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota yang ada, ditambah dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi di Indonesia, membuat variasi tutupan lahan di Jawa Barat menjadi dinamis dan kompleks. Tutupan lahan sendiri adalah suatu objek biofisik, seperti pertanian, perkebunan, dan bangunan, yang ada pada suatu wilayah di permukaan bumi (Lambin *et al.*, 2001). Sedangkan menurut Pauleit *et al.* (2005), tutupan lahan adalah bentuk permukaan fisik yang ada di suatu lahan. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa tutupan lahan adalah suatu objek fisik, baik berupa objek vegetasi dan non vegetasi, yang menempati suatu lahan.

Gambar 2. Tutupan Lahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Secara umum wilayah provinsi Jawa Barat terdiri dari kombinasi tutupan lahan pertanian, hutan, perkebunan, kawasan terbangun, serta tubuh air. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa Jawa Barat memiliki dinamika pemanfaatan lahan yang dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus karakteristik wilayahnya. Pertanian menjadi salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang paling luas. Tutupan lahan sawah terdistribusi secara dominan di beberapa

bagian, terutama pada wilayah dataran di bagian utara (Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon) yang relatif luas, sedangkan pertanian lahan kering dan campuran lebih menyebar ke berbagai daerah. Selain itu, terdapat area perkebunan dengan luasan yang cukup signifikan, yang menandakan adanya diversifikasi aktivitas budidaya di luar sawah.

Hutan, baik primer maupun sekunder, juga hadir sebagai elemen penting penutupan lahan. Kawasan ini umumnya tersebar dalam kantong-kantong tertentu yang berdekatan dengan daerah lain, seperti pertanian atau Perkebunan. Hutan lahan kering primer/sekunder dan hutan tanaman banyak terdapat di wilayah selatan (Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis). Hal ini sejalan dengan karakteristik topografi wilayah Jawa Barat bagian selatan yang bervariasi karena sepanjang bagian selatan merupakan dataran tinggi. Selain itu, terdapat kawasan pemukiman yang cukup padat di sekitar kota-kota besar, menandakan pertumbuhan wilayah perkotaan dan peningkatan aktivitas manusia di titik-titik tertentu. Kawasan permukiman di Jawa Barat utamanya terkonsentrasi di sepanjang utara hingga barat (Bogor, Depok, dan Bekasi) yang juga menjadi bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek serta wilayah metropolitan Bandung Raya yang mendukung keberadaan Kota Bandung sebagai ibukota dari Jawa Barat.

Elemen lain yang terlihat adalah badan air berupa waduk, sungai, serta garis pantai, disertai keberadaan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan agraris atau permukiman, tetapi juga melibatkan fungsi strategis untuk transportasi, penyediaan sumber daya air, serta aktivitas ekonomi lain. Merujuk kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, kawasan badan air memiliki luas kurang lebih 41.050 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan badan air terbesar di luar wilayah laut adalah Waduk Jatiluhur dengan luas sebesar 8.300 Ha.

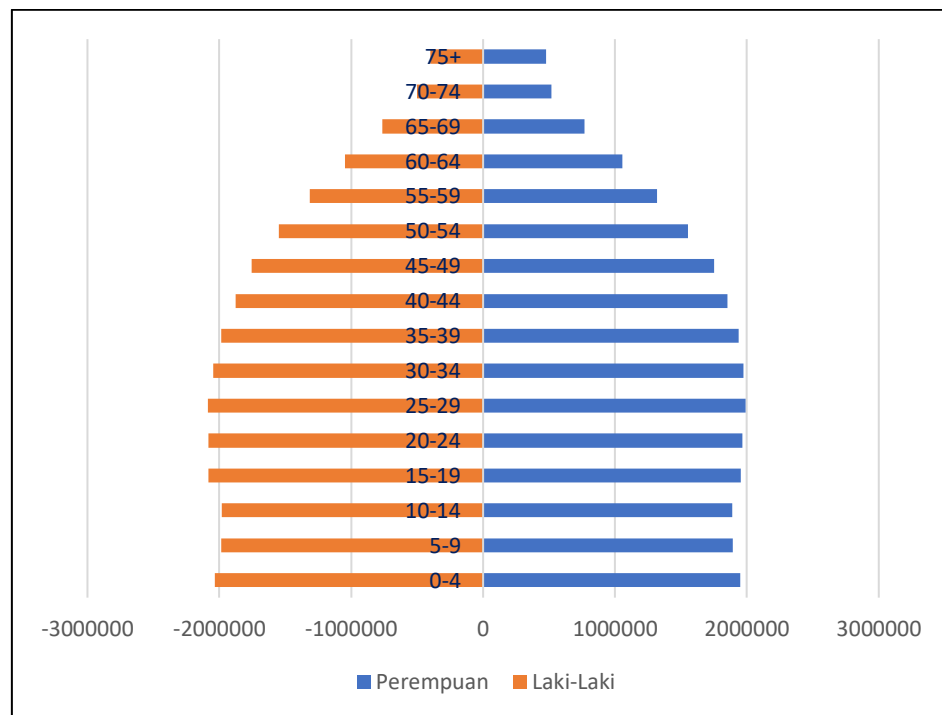
Secara garis besar, terlihat perbedaan yang cukup jelas antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat. Bagian utara didominasi oleh sawah dan kawasan terbangun yang relatif luas, mencerminkan intensitas pemanfaatan lahan untuk pertanian padi serta perkembangan kawasan perkotaan dan industri. Sementara itu, wilayah selatan lebih banyak ditutupi oleh hutan, perkebunan, serta pertanian lahan kering, yang menunjukkan karakter ruang dengan tingkat keterbangunan lebih rendah dan pemanfaatan lahan yang cenderung ekstensif. Perbedaan ini menggambarkan adanya variasi

pemanfaatan ruang di Jawa Barat, dimana utara lebih berkembang sebagai pusat agraris-urban, sedangkan selatan tetap memiliki peran penting dalam fungsi ekologi dan budidaya non-sawah. Variasi pemanfaatan ruang ini yang berpotensi dapat menciptakan ketimpangan di Jawa Barat karena pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah utara, sedangkan di wilayah selatan pembangunan terkesan cenderung lambat.

2.3.2. Profil Kependudukan

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS, populasi Jawa barat mencapai 18 persen dari total populasi nasional. Piramida penduduk Jawa Barat 2024 berjenis stasioner (*stationary*) (Gambar 3). Jenis piramida penduduk stasioner terjadi karena adanya tingkat kelahiran yang cukup rendah, jumlah penduduk pada setiap kategori atau kelompok usia hampir sama, tingkat kematian hampir rendah serta pertumbuhan penduduk sangat kecil atau lambat.

Gambar 3. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

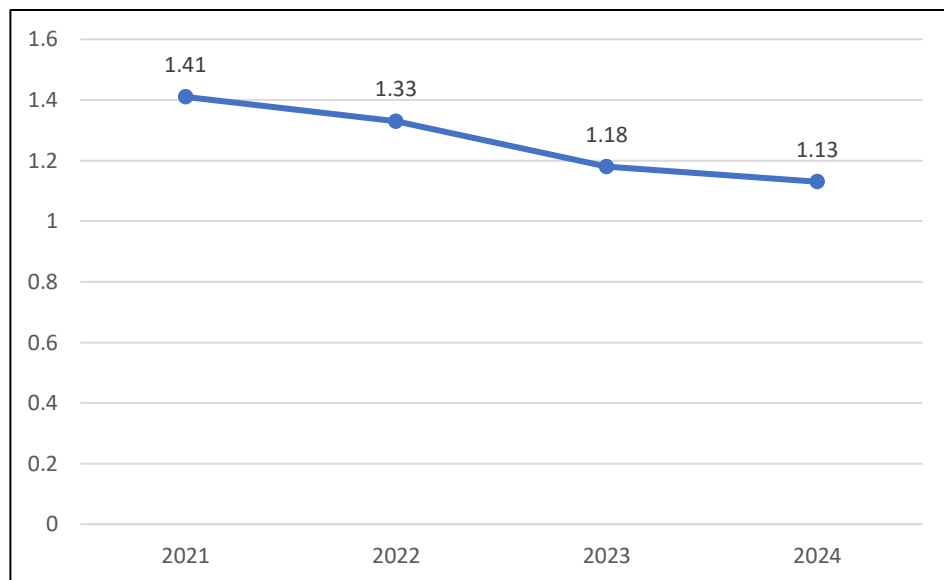


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat 2021-2024 cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk memiliki anak lebih sedikit. Meskipun demikian, laju pertumbuhan yang mencapai 1,13 persen pada 2024 masih pada kategori sedang (Gambar 4). Laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat sedang ini sebagai akibat jumlah kelahiran dan

kematian yang cukupimbang. Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Jawa Barat meningkat dari 73,23 tahun pada 2021 menjadi 74,07 tahun pada 2024. Apabila kembali melihat piramida penduduk di atas, terlihat jelas lebar garis antara kelompok usia muda (0–14), usia produktif (15–64), dan usia lanjut (65+) relatif sama. Artinya, tidak terdapat kesenjangan yang mencolok dari proporsi penduduk bagi suatu kelompok umur tertentu. Dengan demikian, telah terjadi transisi demografi ke arah yang lebih baik.

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 (persen)

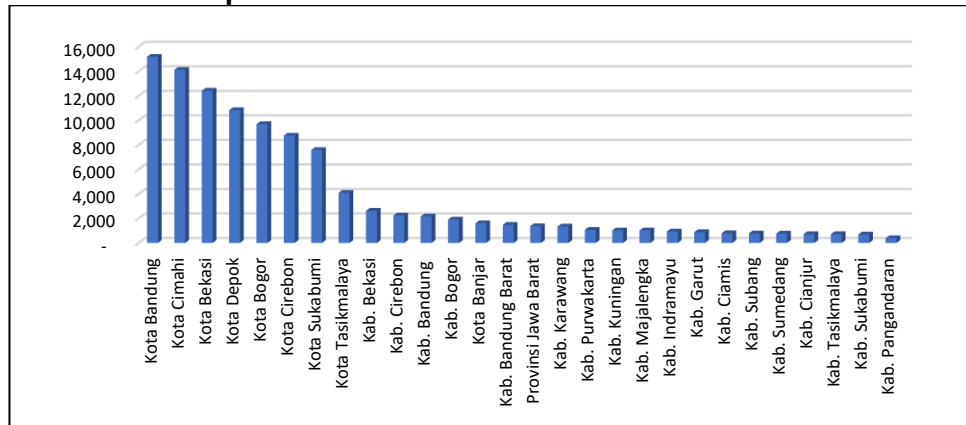


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Dari sisi kepadatan penduduk yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan dinyatakan dalam satuan jiwa per km persegi (km^2), Kota Bandung merupakan kota terpadat di Provinsi Jawa Barat. Angka kepadatan penduduk Kota Bandung yang mencapai 15.176 jiwa/km^2 tidak berbeda jauh dengan kota Daerah Khusus Jakarta yang merupakan kota terpadat di Indonesia, mencapai 16.165 jiwa/km^2 . Semakin padat penduduk suatu wilayah, semakin kompleks permasalahan penduduknya yang meliputi antara lain penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, keamanan yang menghambat pemerataan pembangunan. Kota Bandung juga menghadapi masalah kemacetan yang mencapai 48 persen pada 2024 (TomTom Traffic Index) sehingga membutuhkan penataan kota yang lebih baik dan membutuhkan penyediaan jalan yang lebih banyak untuk kemudahan mobilitas barang dan manusia. Selain itu, Bandung menghadapi masalah sampah yang perlu segera mendapatkan

solusi dengan penyiapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memadai.

Gambar 5. Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Kepadatan penduduk dan lapangan pekerjaan

Besarnya jumlah penduduk Jawa Barat berimplikasi pada penyediaan lapangan kerja. Persentase pekerja formal 2020-2024 laki-laki lebih besar dari perempuan dan cenderung meningkat (Tabel 2). Sementara itu, terjadi penurunan proporsi pekerja formal perempuan pada tahun 2024. Hal itu menunjukkan adanya ketimpangan dalam dunia kerja formal antara laki-laki dan perempuan yang semakin melebar. Ketimpangan ini merefleksikan belum inklusifnya pekerjaan pada sektor formal bagi semua penduduk.

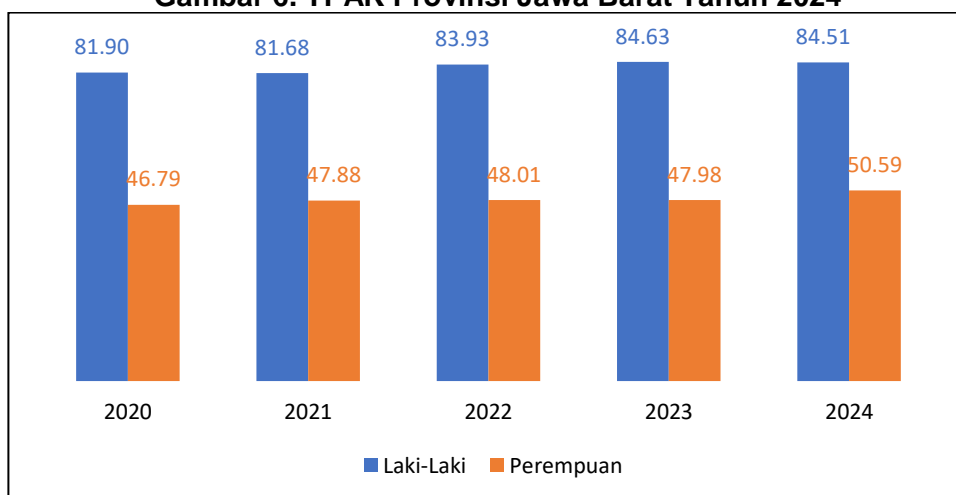
Tabel 2 Proporsi Pekerja Formal Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2020	47.50	38.96
2021	47.78	41.26
2022	48.82	39.33
2023	48.37	38.62
2024	50.25	37.78

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Selama periode 2020-2024 terjadi peningkatan TPAK di Provinsi Jawa Barat, namun secara proporsi TPAK perempuan masih di bawah laki-laki (Gambar 6). Keterlibatan perempuan di Provinsi Jawa Barat dalam aktivitas perekonomian masih belum tinggi.

Gambar 6. TPAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Masih rendahnya kontribusi perempuan yang bekerja secara formal dapat berdampak pada perekonomian dan kesetaraan gender. Masuknya perempuan dalam angkatan kerja merupakan sumber daya yang dapat menjadi penggerak dan pendorong pembangunan suatu negara yang merupakan kunci untuk menuju keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan (Septiawan, A. & Wijaya, S. H., 2021:451). Perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dari upah yang mereka peroleh.

2.3.3. Profil Ekonomi

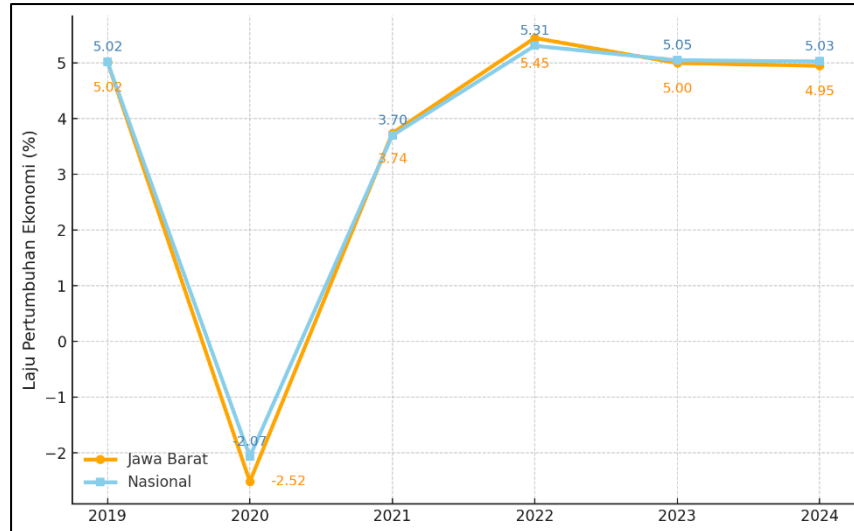
Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat

Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ekonomi makro tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu dan dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Indikator ini juga dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di suatu wilayah kedepannya.

Provinsi Jawa Barat sendiri dalam enam tahun terakhir memiliki persentase laju pertumbuhan ekonomi yang terbilang stabil. Menurut data dari BPS Provinsi Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 hingga 2024 konsisten berada di rentang 3-5% seperti yang terlihat pada Gambar 7, dengan pengecualian untuk

tahun 2020 mengalami tren negatif karena bertepatan dengan fenomena pandemi COVID-19 di Indonesia.

Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 7). Namun pada 2021 dan 2022 persentase laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di atas persentase rata-rata keseluruhan nasional. Pertumbuhan yang tinggi pada dua tahun tersebut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat merupakan hasil agregasi dari pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kotanya. Pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat secara umum selama periode empat tahun terakhir pasca pandemi menunjukkan angka yang positif. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Majalengka menjadi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat, pada tahun 2024 mencapai 6,38 persen (Tabel 3). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Majalengka salah satunya dipengaruhi oleh perubahan status yang dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Kabupaten Majalengka akan menjadi Kawasan Metropolitan Rebana yang akan mulai bergeser dari sector pertanian ke sektor industri. Sementara itu, Kabupaten Indramayu dan Subang merupakan daerah yang paling lambat pertumbuhannya di Jawa Barat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer serta keterbatasan diversifikasi kegiatan industri sehingga pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut berjalan lebih lambat.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>			
	2021	2022	2023	2024
Bogor	3,55	5,25	5,19	5,21
Sukabumi	3,74	5,12	5,17	5,15
Cianjur	3,48	5,04	5,16	5,14
Bandung	3,56	5,35	4,97	5,04
Garut	3,58	5,08	4,94	4,95
Tasikmalaya	3,43	4,70	4,69	4,64
Ciamis	3,66	5,02	4,99	4,97
Kuningan	3,56	5,53	5,25	5,61
Cirebon	2,47	4,09	4,85	5,83
Majalengka	4,75	6,63	6,15	6,38
Sumedang	3,17	5,03	5,01	4,05
Indramayu	0,58	2,88	9,76	2,18
Subang	2,18	4,21	4,64	4,81
Purwakarta	3,42	5,24	4,97	4,64
Karawang	5,85	6,31	5,40	4,20
Bekasi	3,62	5,30	5,32	5,17
Bandung Barat	3,46	5,34	5,00	4,94
Pangandaran	3,67	5,03	5,26	5,12
Kota Bogor	3,76	5,65	5,10	5,19
Kota Sukabumi	3,71	5,35	5,12	5,11
Kota Bandung	3,76	5,41	5,07	4,99
Kota Cirebon	3,05	5,10	5,01	5,02
Kota Bekasi	3,22	4,96	5,43	5,19
Kota Depok	3,76	5,24	5,05	5,47
Kota Cimahi	4,19	5,92	5,19	5,26
Kota Tasikmalaya	3,57	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	3,49	4,19	4,63	5,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Selain Kabupaten Majalengka, daerah-daerah metropolitan seperti area Bodebek (Kota Bogor, Depok, dan Bekasi), dan beberapa wilayah Metropolitan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang wilayah Barat Daya juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Khusus untuk Kabupaten Sumedang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada 2022 dan 2023 merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur pada masa pembangunan konstruksi jalan tol. Dengan terbangunnya ruas jalan tol Jakarta-Cikampek-Palimanan, Jakarta-Cikampek-Bandung, dan kereta cepat Jakarta-Bandung memberikan keuntungan konektivitas Jawa barat ke Jakarta.

Laju pertumbuhan ekonomi pada 2024 di Jawa Barat berdasarkan lapangan usahanya terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan; dan sektor informasi dan komunikasi. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sebagai implikasi atas beroperasinya tol Cisumdawu,

ekspansi *e-commerce* dan logistik digital. Meningkatnya sektor administrasi pemerintahan terjadi sebagai akibat dari kenaikan belanja atau kenaikan pengeluaran pemerintah daerah, seperti penyelenggaraan pemilu presiden dan kepala daerah; serta digitalisasi layanan publik. Sedangkan kenaikan laju pertumbuhan pada sektor informasi dan komunikasi sebagai dampak dari peningkatan pengguna internet dan smart phone. Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir di Jawa Barat di perkotaan mencapai 92,83 persen dan perdesaan 82,20 persen.

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usahanya pada 2024, Jawa Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan (41,39 persen); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,46 persen); dan sektor konstruksi (8,45 persen) (Tabel 4). Namun demikian, khusus untuk sektor industri pengolahan mengalami kecenderungan penurunan selama 2021-2024.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>				<i>Distribusi PDRB (%)</i>			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	4,41	0,11	1,59	8,55	8,57	8,44	8,42
Pertambangan dan Penggalian	0,82	-0,36	-0,10	-0,28	1,16	1,15	0,99	0,97
Industri Pengolahan	4,11	7,00	4,74	3,52	41,80	42,24	41,87	41,39
Pengadaan Listrik dan Gas	11,66	5,42	0,18	-0,60	0,51	0,50	0,47	0,43
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,63	2,60	2,62	5,48	0,11	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	6,47	-0,46	5,84	7,09	8,69	8,35	8,42	8,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,19	4,22	4,36	4,85	14,50	14,40	14,43	14,46
Transportasi dan Pergudangan	-0,17	11,09	10,93	12,34	5,01	5,37	5,91	6,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,04	11,27	8,72	6,43	2,73	2,88	3,03	3,07
Informasi dan Komunikasi	7,30	6,09	7,86	8,20	3,96	3,82	3,81	3,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,69	-0,70	3,72	4,20	2,94	2,88	2,82	2,78
Real Estate	11,75	4,35	6,23	6,64	1,20	1,17	1,17	1,16
Jasa Perusahaan	8,54	12,73	7,30	2,49	0,42	0,45	0,46	0,46
Administrasi Pemerintahan	-2,02	-1,79	2,44	8,73	2,06	1,84	1,76	1,79

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>				<i>Distribusi PDRB (%)</i>			
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Jasa Pendidikan	0,02	2,79	5,04	5,95	3,51	3,32	3,29	3,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	5,82	5,86	5,98	0,81	0,79	0,80	0,81
Jasa Lainnya	0,81	10,07	7,58	7,93	2,06	2,15	2,23	2,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat



Ringkasan Bab

- Ketimpangan merupakan fenomena multidimensi yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan kelembagaan.
- Teori klasik dan teori modern, serta literatur menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, demografi, dan kebijakan fiskal berperan besar terhadap variasi ketimpangan.
- Profil Jawa Barat memperlihatkan perbedaan wilayah yang signifikan sehingga relevan untuk dianalisis determinan ketimpangan pada bab berikutnya.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Desain Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan pendalaman kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketimpangan sosial ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Pada sisi kuantitatif, analisis dilakukan melalui dua level, yaitu makro dan mikro. Analisis makro digunakan untuk mengidentifikasi determinan ketimpangan antarkabupaten dan kota dengan memanfaatkan variasi indikator pembangunan daerah, sehingga dapat menangkap peran faktor struktural yang memengaruhi perbedaan tingkat ketimpangan antarwilayah. Analisis mikro kemudian menggali karakteristik rumah tangga berdasarkan kelompok kesejahteraan, khususnya *Bottom* 40 persen (B40) dan *Upper* 20 persen (U20) untuk menjelaskan bagaimana kondisi demografi, pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan dasar yang berkontribusi terhadap perbedaan kesejahteraan antarkelompok. Kombinasi analisis makro dan mikro ini memberikan bukti empiris yang kuat mengenai faktor penyebab ketimpangan pada tingkat wilayah maupun rumah tangga.

Temuan kuantitatif tersebut diperdalam melalui pendekatan kualitatif yang mencakup analisis kuadran dan grafik *heatmap* serta kunjungan lapangan. Analisis kuadran digunakan untuk memetakan posisi kabupaten dan kota berdasarkan rasio gini dan determinan tertentu, sehingga pola ketimpangan regional dapat terlihat secara jelas dan daerah prioritas dapat teridentifikasi. Analisis melalui grafik *heatmap* membantu menelusuri variasi capaian indikator menurut kuintil kesejahteraan, memungkinkan identifikasi celah akses layanan atau kondisi sosial ekonomi yang belum merata. Selain itu, kajian ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke empat kabupaten, yaitu Sumedang, Purwakarta, Bandung, dan Subang, untuk memahami konteks lokal, dinamika pelaksanaan kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh data kuantitatif. Integrasi antara bukti statistik dan temuan lapangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai ketimpangan di Jawa Barat serta memperkuat dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

3.2. Sumber dan Jenis Data

a. Analisis Makro

Analisis makro menggunakan data panel 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2015–2024 dengan total 270 observasi. Statistik deskriptif variabel yang digunakan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Deskriptif Statistik Variabel Analisis Makro

Variabel	Mean	Std. dev.	Min	Max	Satuan	Sumber
Gini Ratio	0.37	0.043	0.26	0.49	Rasio	BPS
Indeks Pengetahuan	63.68	6.82	51.79	78.58	Persen	BPS
Pengeluaran Per kapita	11,841	2,944	6,908	21,342	Ribu Rupiah/Tahun	BPS
UHH	72.23	1.55	68.36	76.12	Persen	BPS
TPT	8.1	2.24	1.52	14.29	Persen	BPS
Pertumbuhan Ekonomi	4.56	2.29	-3.8	9.76	Persen	BPS
Jumlah Penduduk Miskin	147.29	99.93	10.1	491.2	Ribu Jiwa	BPS
Investasi	5,400	11,100	0	71,800	Miliar Rupiah	BKPM
P1	1.3	0.54	0.23	2.85	Persen	BPS
PAD	861	871	54	3918	Miliar Rupiah	Kementerian Keuangan
TKDD	1876	824	451	4705	Miliar Rupiah	Kementerian Keuangan
DAU	1,180	458	347	2,450	Miliar Rupiah	DJPK Kementerian Keuangan
UMK	2,735,450	1,008,309	1,177,000	5,343,430	Rupiah	Disnakertrans
Bantuan Sosial dan Subsidi	22	34	0	213	Miliar Rupiah	Kementerian Keuangan
Pekerja Formal	52.71	13.8	24.16	81.02	Persen	Susenas
Proyeksi UMKM	214,960	129,321	24,387	606,268	Unit	BPS
Urban	73.28	24.03	28	100	Persen	Susenas
Kepadatan Penduduk	3,875	4,612	314	15,643	Jiwa/Km2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jabar

Sumber: Penulis

b. Analisis Mikro

Analisis mikro menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 yang diproduksi oleh BPS. Data Susenas dipilih karena menyediakan informasi komprehensif mengenai karakteristik demografi, pendidikan, kondisi perumahan, pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, serta akses terhadap berbagai layanan dasar dan sosial.

Setelah proses pembersihan dan penyatuan variabel, diperoleh sebanyak 26.012 rumah tangga hasil ekstraksi dari blok rumah tangga. Jumlah ini mencerminkan keseluruhan rumah tangga yang teridentifikasi memiliki kepala rumah tangga (KRT). Dari total tersebut, sebagian observasi tidak memiliki data lengkap pada sejumlah variabel kunci yang digunakan dalam model, seperti rata-rata lama sekolah anggota rumah tangga usia ≥ 15 tahun), rasio ketergantungan, dan status setengah menganggur (*underemployed*). Ketidaklengkapan data pada variabel-variabel tersebut menyebabkan sekitar 4.500 rumah tangga tidak dapat diikutsertakan dalam analisis regresi.

Setelah dilakukan penyaringan terhadap observasi yang memiliki data lengkap pada seluruh variabel, tersisa 21.450 rumah tangga yang digunakan dalam estimasi model. Jumlah tersebut mewakili sekitar 11,8 juta rumah tangga populasi Jawa Barat setelah penerapan bobot survei (population size = 11.785.166). Proses estimasi dilakukan dengan pendekatan survey-weighted logit model untuk memastikan hasil mencerminkan kondisi populasi secara representatif. Model ini mempertimbangkan desain survey Susenas yang bersifat kompleks, mencakup pembobotan, stratifikasi, dan penarikan sampel bertingkat, sehingga hasil estimasi tetap merepresentasikan populasi secara akurat. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dengan nilai statistik F sebesar 4.245,16 dan p-value $< 0,01$, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap probabilitas rumah tangga tergolong dalam kelompok B40 dan U20.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

a. Analisis Makro

Untuk memastikan analisis mampu menangkap determinan ketimpangan secara komprehensif, penelitian ini mendefinisikan serta mengukur seluruh variabel yang digunakan dalam model secara sistematis. Variabel dependen berupa *Gini Ratio*, sedangkan variabel independen mencakup:

Tabel 6 Determinan Ketimpangan pada Analisis Makro

Kategori	Variabel	Keterangan
Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Investasi	Menggambarkan kondisi dan dinamika ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.
Sumber Daya Manusia	Indeks Pengetahuan, Pengeluaran Per Kapita, Umur Harapan Hidup (UHH)	Mewakili kualitas pendidikan, daya beli, dan kesehatan penduduk yang berkontribusi pada ketimpangan jangka panjang.

Kategori	Variabel	Keterangan
Kebijakan Fiskal dan Regulasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Sosial/Subsidi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Menggambarkan kapasitas fiskal daerah dan intervensi pemerintah dalam menekan ketimpangan.
Struktur Pasar Kerja	Persentase Pekerja Formal, Jumlah UMKM	Mewakili kapasitas penciptaan lapangan kerja dan inklusi ekonomi di tingkat daerah.
Demografi dan Urbanisasi	Persentase Penduduk Perkotaan, Kepadatan Penduduk	Menggambarkan karakteristik wilayah dan tekanan penduduk yang memengaruhi kesenjangan antar daerah.

Sumber: Penulis

b. Analisis Mikro

Variabel dependen didefinisikan sebagai status rumah tangga berdasarkan kelompok kesejahteraan:

- B40 (*Bottom 40%*): bernilai 1 jika rumah tangga termasuk dalam 40 persen terbawah distribusi pengeluaran per kapita;
- U20 (*Upper 20%*): bernilai 1 jika rumah tangga termasuk dalam 20 persen teratas.

Model logit dijalankan secara terpisah untuk kedua kelompok B40 dan U20 dengan probabilitas keanggotaan dalam kelompok tersebut sebagai variabel dependen. Sementara variabel penjelas dipilih untuk merepresentasikan aspek demografi, pendidikan, pekerjaan, migrasi, konsumsi, akses layanan, dan program sosial, yaitu:

Tabel 7 Determinan Ketimpangan pada Analisis Mikro

Kategori	Variabel	Keterangan
Demografi Rumah Tangga	Jenis kelamin KRT, umur, status lansia (≥ 65 tahun), status perkawinan (tidak kawin), ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan	Mewakili karakteristik dasar rumah tangga
Pendidikan	KRT lulus SMA atau lebih, rata-rata lama sekolah (RLS) anggota usia ≥ 15 tahun	Mengukur kapasitas sumber daya manusia
Pekerjaan & Aktivitas Ekonomi	Rumah tangga memiliki usaha sendiri, KRT bekerja di sektor pertanian, KRT bekerja di sektor informal, KRT setengah menganggur	Menggambarkan kondisi dan stabilitas pekerjaan
Migrasi & Kependudukan	Migran di wilayah perkotaan dan migran di wilayah perdesaan.	Mewakili mobilitas penduduk dan beban tanggungan

Kategori	Variabel	Keterangan
Konsumsi dan Struktur Pengeluaran	Proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran	Menggambarkan pola konsumsi rumah tangga
Akses Keuangan dan Jaminan Sosial	Memiliki rekening di lembaga keuangan, memiliki jaminan kesehatan/asuransi	Mewakili dimensi inklusi keuangan dan perlindungan sosial
Akses Layanan Dasar dan Hunian	Akses air minum tidak layak, sanitasi tidak layak, sumber listrik non-PLN, bangunan fisik tidak layak	Mengukur kondisi tempat tinggal dan fasilitas dasar
Program Bantuan Sosial	Pernah menerima BPNT, pernah menerima PKH	Menggambarkan penerimaan program sosial pemerintah

Sumber: Penulis

Seluruh variabel diubah menjadi kode dalam bentuk dummy (0 atau 1) kecuali variabel kontinu seperti usia kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, rata-rata lama sekolah, rasio ketergantungan, dan proporsi pengeluaran makanan.

3.4. Metodologi Analisis Kuantitatif

a. Analisis Makro

Analisis makro menggunakan estimasi model statis dan model dinamis. Kedua model ini digunakan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan secara empiris, baik dalam kerangka hubungan langsung antarvariabel maupun dalam dinamika antarwaktu.

Model Statis

Model statis digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap ketimpangan dengan menggunakan tiga alternatif estimasi, yaitu Pooled Least Squares (PLS), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Selain itu, untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas dan autokorelasi, digunakan juga estimator Generalized Least Squares (GLS).

Variabel independen yang digunakan mencakup berbagai aspek yang diperkirakan berpengaruh terhadap ketimpangan. Dimensi pertama yaitu indikator ekonomi meliputi TPT, LPE, P1, dan total investasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Dari sisi sumber daya manusia, penelitian memasukkan Indeks Pengetahuan, Pengeluaran Per kapita, serta UHH yang merepresentasikan kualitas pendidikan, daya beli, dan kesehatan

penduduk. Selanjutnya, dari sisi kebijakan fiskal dan regulasi, penelitian mempertimbangkan variabel PAD, TKDD, Bantuan Sosial/Subsidi, DAU, serta UMK. Faktor-faktor ini mencerminkan peran pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan dan menekan ketimpangan. Selain itu, struktur pasar kerja juga diwakili oleh persentase tenaga kerja formal dan jumlah UMKM yang menunjukkan kapasitas penciptaan lapangan kerja dan inklusi ekonomi. Terakhir, aspek demografi dan urbanisasi turut dipertimbangkan melalui variabel persentase penduduk perkotaan dan kepadatan penduduk yang dapat memengaruhi disparitas antarwilayah, sehingga diperoleh model sebagai berikut.

$$GINI_{it} = \alpha + \beta_1 IE_{it} + \beta_2 SDM_{it} + \beta_3 FISKAL_{it} + \beta_4 KETENAGAKERJAAN_{it} + \beta_5 KEPENDUDUKAN_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- $GINI_{it}$: ketimpangan di provinsi i pada tahun t
- β_1 Indikator Ekonomi $_{it} + \beta_2$ SDM $_{it} + \beta_3$ KEBIJAKAN FISKAL $_{it} + \beta_4$ KETENAGAKERJAAN $_{it} + \beta_5$ KEPENDUDUKAN $_{it}$: variabel independen
- μ_i : efek individual yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*)
- ϵ_{it} : *error term*

b. Analisis Mikro

Analisis dilakukan melalui dua tahap utama: (1) analisis deskriptif dan (2) analisis inferensial menggunakan model logit.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan profil sosial ekonomi rumah tangga di Jawa Barat tahun 2024 berdasarkan kelompok kesejahteraan (B40 dan U20). Indikator yang dianalisis meliputi proporsi, rata-rata (*mean*), dan *median* setiap variabel utama. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik antarkelompok serta mendukung interpretasi hasil regresi logit secara empiris.

Pengolahan dilakukan dengan memperhatikan *sampling weight* dari Susenas (variabel WERT) agar hasil yang diperoleh mewakili populasi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat secara agregat.

Model Regresi Logit

Model logit digunakan untuk menganalisis pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap probabilitas menjadi kelompok Bottom 40% (B40) maupun Upper 20% (U20). Model ini sesuai digunakan karena variabel dependen bersifat dikotomis (1 = termasuk kelompok sasaran; 0 = tidak termasuk). Secara umum, model logit dinyatakan dalam bentuk:

$$\ln\left(\frac{P_i}{(1 - P_i)}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- P_i = probabilitas rumah tangga ke-i tergolong dalam kelompok B40 atau U20;
- X_{ki} = variabel independen ke-k;
- β_k = koefisien yang menggambarkan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap probabilitas kesejahteraan rumah tangga;
- ε_i = komponen galat.

Nilai koefisien β_k diinterpretasikan sebagai perubahan *log odds* terhadap peluang rumah tangga termasuk dalam kelompok tertentu akibat perubahan satu unit variabel independen, dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk variabel *dummy*, koefisien menunjukkan perubahan peluang ketika kondisi tersebut terpenuhi dibandingkan dengan kategori referensi.

Hasil logit kemudian disajikan bersama *marginal effects* untuk memudahkan interpretasi perubahan probabilitas (dy/dx) dari masing-masing variabel independen terhadap peluang rumah tangga menjadi B40 atau U20.

3.5. Metodologi Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam kajian ini digunakan untuk memperkaya hasil analisis kuantitatif sekaligus menangkap dinamika sosial ekonomi di tingkat daerah yang tidak sepenuhnya terobservasi melalui data statistik. Pendekatan ini dilakukan melalui dua komponen utama, yaitu analisis berbasis visualisasi data (analisis kuadran dan heatmap) serta pengumpulan informasi kualitatif melalui kunjungan lapangan ke empat kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Pertama, analisis kuadran digunakan untuk memetakan posisi kabupaten dan kota berdasarkan rasio gini dan variabel determinan tertentu. Metode ini memungkinkan identifikasi pola relatif, seperti wilayah dengan ketimpangan tinggi namun kapasitas ekonomi rendah atau wilayah dengan ketimpangan rendah namun tekanan demografis tinggi. Pemanfaatan analisis kuadran memberikan pemahaman eksploratif mengenai keterkaitan antarvariabel sekaligus mendukung penentuan wilayah prioritas untuk intervensi kebijakan. Selain itu, analisis heatmap digunakan untuk menggambarkan variasi kondisi sosial ekonomi rumah tangga menurut kuintil kesejahteraan, seperti akses pendidikan, kondisi hunian, pola konsumsi, dan struktur pekerjaan. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi celah akses layanan antar kelompok B40 dan U20 yang tidak selalu terlihat pada analisis rata-rata agregat.

Kedua, pendekatan kualitatif diperkuat melalui kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumedang, Purwakarta, Bandung, dan Subang. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai praktik kebijakan di tingkat daerah, tantangan struktural yang dihadapi, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat. Informasi diperoleh melalui wawancara terarah dengan perangkat daerah, observasi kondisi lapangan, serta diskusi mengenai penyebab dan karakteristik ketimpangan yang spesifik pada masing-masing wilayah. Temuan lapangan kemudian digunakan untuk memvalidasi hasil model kuantitatif, mengidentifikasi faktor yang tidak terukur (*unobserved factors*), serta memperjelas konteks lokal yang relevan bagi perumusan rekomendasi.

Integrasi berbagai metode kualitatif ini memberikan konteks yang kaya dan komprehensif terhadap temuan empiris, memperkuat proses triangulasi antara bukti statistik dan realitas di tingkat daerah, serta memastikan bahwa hasil kajian tidak hanya akurat secara metodologis tetapi juga relevan bagi penyusunan kebijakan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

3.6. Keterbatasan Analisis

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai dasar interpretasi hasil. Pertama, data Susenas bersifat *cross-sectional*, sehingga hubungan yang diidentifikasi bersifat asosiatif dan belum tentu mencerminkan kausalitas antarvariabel. Kedua, meskipun analisis makro menggunakan data panel yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, model ini belum sepenuhnya mampu menangkap pengaruh faktor kelembagaan atau spasial yang mungkin turut memengaruhi ketimpangan antarwilayah. Ketiga, sebagian variabel seperti status pekerjaan informal, kualitas hunian, dan kepemilikan aset bersumber dari *self-report* responden, sehingga potensi reporting bias tidak dapat dihindari. Keempat, indikator fiskal yang digunakan masih terbatas pada sisi nominal anggaran dan belum mencerminkan efektivitas serta kualitas belanja publik dalam mengurangi ketimpangan.

Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, kombinasi analisis makro dan mikro tetap memberikan gambaran yang luas dan mendalam mengenai determinan ketimpangan di Jawa Barat. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran yang lebih utuh antara faktor struktural di tingkat wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan yang lebih inklusif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



Ringkasan Bab

- Kajian menggunakan pendekatan makro dan mikro untuk menangkap gambaran ketimpangan dari tingkat daerah sampai tingkat rumah tangga. Dua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif.
- Model statis dan dinamis digunakan agar pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dapat diidentifikasi. Pilihan metodologi ini memperkuat ketepatan analisis dan interpretasi hasil.
- Metodologi yang disusun memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami pola ketimpangan secara menyeluruh.

BAB IV

HASIL PERHITUNGAN DAN ESTIMASI MODEL

Bab ini menyajikan hasil estimasi empiris ketimpangan sosial ekonomi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan pendekatan makro dan mikro. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi variasi ketimpangan antarkabupaten/kota serta antarkelompok rumah tangga. Hasil yang dipaparkan mencakup uji diagnostik model, hasil regresi panel statis dan dinamis, serta temuan utama dari estimasi mikro berbasis Data Susenas. Pemaparan ini menjadi landasan empiris bagi pembahasan determinan sektoral pada bab selanjutnya.

4.1. Analisis Makro

Hasil Uji Asumsi Klasik dan Diagnostik Model

Sebelum dilakukan interpretasi hasil estimasi regresi, dilakukan terlebih dahulu serangkaian uji asumsi klasik dan diagnostik model. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang diestimasi memenuhi kriteria estimator yang baik dan tidak menghasilkan bias estimasi (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE). Pada model statis, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa rata-rata nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 10, sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas serius antarvariabel. Uji heteroskedastisitas dan autokorelasi mengindikasikan adanya pelanggaran, sehingga digunakan estimator GLS untuk menghasilkan estimasi yang efisien. Uji normalitas residual juga mendukung bahwa distribusi error mendekati normal. Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi dasar, hasil estimasi panel statis dapat dianalisis lebih lanjut.

Pemilihan model panel dilakukan melalui Chow test, Hausman test, dan Breusch–Pagan Lagrange Multiplier test. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model Random Effects (REM) dinyatakan lebih sesuai dibandingkan Pooled Least Square (PLS) maupun Fixed Effect Model (FEM). Hal ini ditunjukkan oleh probabilitas Uji Hausman yang lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen, serta hasil LM test yang mengindikasikan keunggulan REM dibanding PLS.

Pada model dinamis dengan pendekatan System Generalized Method of Moments (SystemGMM), validitas instrumen diuji melalui Hansen test yang tidak menolak hipotesis nol, sehingga instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam estimasi. Uji Arellano-Bond (AR) mengindikasikan tidak adanya autokorelasi serial orde kedua (AR(2)), sehingga estimasi GMM dapat dianggap konsisten. Dengan demikian, model dinamis memberikan gambaran yang lebih *robust* mengenai hubungan antarvariabel dan dinamika ketimpangan di Jawa Barat.

Hasil Estimasi Model Statis

Analisis kuantitatif dalam kajian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu estimasi model statis dan model dinamis, guna menangkap hubungan struktural sekaligus dinamika ketimpangan antarwaktu. Model statis digunakan untuk melihat hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan ketimpangan, sementara model dinamis digunakan untuk menangkap sifat persisten dan dinamika antarwaktu.

Pada model statis, hasil regresi ditampilkan dalam tiga spesifikasi (Model 1–3 pada Tabel 8). Penyajian lebih dari satu model bertujuan untuk menguji konsistensi hasil estimasi sekaligus mengurangi potensi bias akibat multikolinearitas antarvariabel. Selain itu, pengelompokan variabel dalam model yang berbeda dilakukan karena beberapa indikator memiliki keterkaitan erat, sehingga jika digabungkan dalam satu persamaan berpotensi menimbulkan distorsi dalam estimasi.

Tabel 8 Hasil Estimasi Panel Statis, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Pemilihan Model

Aspek	Variables	Model 1	Model 2	Model 3
Indikator Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	0.00865*** (0.00249)	0.00748*** (0.00215)	0.00797*** (0.00211)
	TPT	0.00728** (0.00345)		
	P1		0.0493*** (0.0133)	0.0525*** (0.0130)
	Total Investasi		-0.000815 (0.00112)	-0.00101 (0.00110)
SDM	Indeks Pengetahuan	0.00655*** (0.00217)	0.00691*** (0.00215)	0.00792*** (0.00213)
	Pengeluaran Per kapita	-0.0839* (0.0475)	-0.0794* (0.0442)	-0.0905** (0.0428)
	UHH	-0.00876 (0.00575)	-0.0171*** (0.00581)	-0.0146*** (0.00564)
Instrumen Kebijakan Fiskal Daerah & Regulasi	PAD	0.0368*** (0.0136)		
	TKDD		0.0525** (0.0228)	
	DAU			0.159*** (0.0372)
	Bantuan Sosial & Subsidi	-0.00668* (0.00393)		
	UMK		0.109*** (0.0244)	0.156*** (0.0253)
Struktur Pasar Kerja & UMKM	Pekerja Formal	-0.000793 (0.000737)		
	UMKM	-0.0250* (0.0134)	-0.0403** (0.0161)	-0.107*** (0.0242)
Dinamika Demografi dan Urbanisasi	Kepadatan Penduduk	0.0238 (0.0170)	0.0463*** (0.0144)	0.0514*** (0.0109)
	Urban	0.00111** (0.000460)	0.000721* (0.000418)	
	Constanta	-0.239	-1.458***	-4.379***

Aspek	Variables	Model 1	Model 2	Model 3
		(0.427)	(0.398)	(0.769)
	Observasi	270	270	270
	Wilayah	27	27	27
Uji Asumsi Klasik	Normalitas (Prob>chi2)	0.1194	0.3248	0.0480
	Multikolinearitas (Mean)	5.22	4.83	5.94
	Heteroskedastis (Prob>chi2)	0.0000	0.0000	0.0000
	Autokorelasi (Prob > F)	0.0051	0.0092	0.0066
Uji Pemilihan Model	Hausman	0.2617	0.9123	0.2840
	Breusch dan Pagan Lagrangian Multiplier	0.0000	0.0000	0.0000

Sumber: Penulis

Hasil estimasi dengan metode Generalized Least Squares (GLS) memperlihatkan bahwa ketimpangan di Jawa Barat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang signifikan. Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, mulai dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, hingga dinamika demografi. Faktor yang cenderung memperburuk ketimpangan meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kedalaman kemiskinan, indeks pengetahuan, PAD, TKDD, DAU, kepadatan penduduk, dan urbanisasi. Sementara faktor yang berperan menekan ketimpangan antara lain pengeluaran per kapita, bantuan sosial, UMK, dan UMKM. Analisis lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing faktor tersebut akan diperdalam pada sub-bab berikut, dengan mengaitkan hasil estimasi regresi dengan data deskriptif Susenas, Sakernas, serta sumber-sumber pendukung lainnya pada tiap dimensi variabel penentu ketimpangan.

Hasil Analisis Model Dinamis

Hasil uji diagnostik menunjukkan bahwa model dinamis yang diestimasi dengan System GMM telah memenuhi seluruh kriteria teknis yang diperlukan. Uji Sargan atau Hansen memberikan nilai probabilitas sebesar 0,0671, sehingga instrumen dinyatakan valid karena tidak berkorelasi dengan *error term*. Validitas ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan *lag* variabel sebagai instrumen benar-benar mampu mengatasi masalah endogenitas. Pengujian Arellano Bond menunjukkan bahwa autokorelasi orde pertama signifikan, suatu kondisi yang wajar dalam model dinamis karena keberadaan *lag* variabel dependen. Sebaliknya, autokorelasi orde kedua tidak signifikan yang menegaskan bahwa tidak terdapat korelasi serial pada *error* lintas dua periode dan model terspesifikasi dengan benar. Estimasi dengan *robust standard errors* memastikan konsistensi koefisien meskipun terdapat heteroskedastisitas. Secara keseluruhan, uji diagnostik ini mengonfirmasi bahwa model System GMM yang digunakan sudah valid serta dapat dipercaya untuk menarik inferensi ekonomi terkait determinan ketimpangan di Jawa Barat.

Dalam model regresi dinamis, ketimpangan di Jawa Barat menunjukkan sifat persistensi, yaitu kondisi ketimpangan pada satu periode cenderung berlanjut dan memengaruhi ketimpangan pada periode berikutnya. Persistensi ini ditangkap melalui keberadaan lag variabel dependen dalam model, yang memungkinkan estimasi membedakan antara dampak yang terjadi segera (*short run*) dan dampak kumulatif antarperiode (*long run*). Efek jangka pendek menggambarkan perubahan ketimpangan yang muncul pada periode berjalan akibat perubahan suatu variabel independen. Sementara itu, efek jangka panjang merefleksikan total pengaruh variabel tersebut setelah mempertimbangkan bahwa ketimpangan yang terjadi saat ini turut membawa pengaruh ke periode selanjutnya melalui mekanisme persistensi. Dengan demikian, perbedaan antara *short run* dan *long run* penting untuk memahami apakah suatu faktor memiliki dampak sesaat atau berakumulasi seiring waktu dalam membentuk dinamika ketimpangan di Jawa Barat.

Tabel 9 Uji Diagnostik Model System GMM

Jenis Uji	Nilai	Interpretasi
Hansen/Sargan Test	Prob. 0,0671	Instrumen valid dan tidak berkorelasi dengan error
Arellano-Bond AR(1)	Signifikan	Wajar dalam model dinamis
Arellano-Bond AR(2)	Tidak signifikan	Tidak ada autokorelasi orde dua sehingga model valid
Robust Standard Errors	Digunakan	Mengatasi heteroskedastisitas dan memastikan konsistensi estimasi

Sumber: Penulis

Model dinamis memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi di Jawa Barat memiliki sifat persistensi yang kuat, ditunjukkan oleh koefisien lag ketimpangan (*Igini L1*) sebesar 0,2506 yang signifikan pada taraf lima persen. Koefisien ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pada tahun sebelumnya memberi pengaruh langsung terhadap ketimpangan pada tahun berjalan, sehingga ketimpangan cenderung menetap dan sulit berubah tanpa intervensi yang konsisten.

Pendidikan yang diwakili oleh RLS memiliki koefisien positif signifikan pada jangka pendek maupun jangka panjang. Koefisien *short run* menunjukkan bahwa peningkatan RLS pada tahun berjalan diikuti oleh kenaikan ketimpangan pada periode yang sama. Ketika memperhitungkan koefisien lag ketimpangan, efek *long run* menjadi lebih besar, yang mencerminkan bahwa peningkatan pendidikan tidak terdistribusi merata antarwilayah. Dengan demikian, respons ketimpangan terhadap peningkatan RLS bersifat akumulatif seiring waktu, terutama karena wilayah dengan basis pendidikan lebih tinggi mengalami pertumbuhan RLS yang lebih cepat dibanding wilayah tertinggal.

Koefisien *short run* yang positif menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pengangguran langsung meningkatkan ketimpangan pada tahun berjalan.

Efek long run yang lebih besar mengindikasikan bahwa dampak pengangguran terhadap ketimpangan bersifat persisten. Hal ini terjadi karena kelompok berpendapatan rendah dan pekerja informal lebih rentan terhadap penurunan kesempatan kerja, sehingga efek distribusionalnya berlanjut pada periode berikutnya melalui mekanisme propagasi ketimpangan.

Koefisien pertumbuhan ekonomi yang positif signifikan pada jangka pendek menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi dalam satu periode cenderung memperlebar ketimpangan pada periode tersebut. Ketika memperhitungkan persistensi ketimpangan, efek *long run* menjadi lebih besar, mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan di Jawa Barat cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang sudah memiliki keunggulan struktural, misalnya kawasan metropolitan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap divergensi antarwilayah dalam jangka panjang melalui efek kumulatif yang dibawa oleh dinamika ketimpangan.

Koefisien *short run* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan bantuan sosial dan subsidi segera menurunkan ketimpangan dalam periode berjalan. Efek *long run* yang lebih besar secara absolut mengindikasikan bahwa intervensi perlindungan sosial memiliki dampak yang bersifat akumulatif dalam jangka panjang. Hal ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi memerlukan waktu untuk menghasilkan efek penuh, terutama ketika target program mencakup kelompok rentan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Tabel 10 Hasil Estimasi *Short Run* dan *Long Run* Model Dinamis Ketimpangan Jawa Barat

Variabel	<i>Short Run Coefficient</i>	<i>Prob.</i>	<i>Long Run Coefficient</i>	<i>Prob.</i>
Lag Gini (L1)	0,251	0,012	–	–
Rata-rata Lama Sekolah	0,041	0,001	0,055	0,000
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,013	0,001	0,017	0,003
Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,006	0,001	0,008	0,005
Bantuan Sosial dan Subsidi	-0,012	0,002	-0,017	0,004

Sumber: Penulis

Secara keseluruhan, pola koefisien *short run* dan *long run* menunjukkan bahwa variabel yang memperlebar ketimpangan (RLS, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi) memiliki efek yang terakumulasi seiring adanya persistensi ketimpangan, sedangkan variabel yang menurunkannya (bantuan sosial dan subsidi) menunjukkan dampak yang semakin kuat pada horizon jangka panjang. Interpretasi ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan dinamika temporal dalam merumuskan kebijakan ketimpangan di tingkat daerah.

4.2. Analisis Mikro

Analisis ini menggunakan data *Susenas* 2024 Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga yang termasuk dalam kelompok *Bottom* 40 persen (B40) dan *Upper* 20 persen (U20) berdasarkan distribusi pengeluaran. Analisis dilakukan secara deskriptif dan inferensial melalui regresi logit, dengan tujuan memahami faktor-faktor yang memengaruhi probabilitas rumah tangga berada pada masing-masing kelompok kesejahteraan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, hasil analisis regresi logit disajikan bersamaan dengan statistik deskriptif dalam Tabel 11. Tabel ini memuat nilai proporsi untuk variabel bersifat kategori atau biner (0–1), sedangkan rata-rata (*mean*) dan nilai tengah (*median*) digunakan untuk variabel bersifat kontinu, serta koefisien hasil estimasi model logit yang menunjukkan arah dan signifikansi pengaruh variabel terhadap peluang rumah tangga tergolong dalam kelompok *Bottom* 40 persen (B40) maupun *Upper* 20 persen (U20).

Tabel 11 Hasil Regresi Logit

Variabel	<i>Bottom</i> 40%		<i>Upper</i> 20%	
	Proportion (%)	Coef / SE	Proportion (%)	Coef / SE
Demografi Rumah Tangga				
Kepala Rumah Tangga (KRT) Perempuan	9.14	0.253**	12.46	-0.424***
Umur KRT	Mean: 49.59 Median: 48	-0.095 -0.014***	Mean: 49.56 Median: 49	-0.118 0.010***
KRT Lansia	16.27	-0.046	14.7	0.245**
Status Pernikahan (Tidak Kawin)	11.17	-0.08 0.114***	17.09	-0.101 -0.061**
Ukuran Rumah Tangga	Mean: 4.09 Median: 4	-0.019 0.523***	Mean: 3.34 Median: 3	-0.023 -0.517***
Rasio Dependensi	Mean: 0.64 Median: 0.5	0.615*** -0.055	Mean: 0.40 Median: 0.33	-0.556*** -0.098
Pendidikan				
KRT Lulus SMA atau Lebih	32.35	-0.289***	62.04	0.161**
RLS Anggota Usia ≥ 15 Tahun	Mean: 8.14 Median: 8	-0.07 -0.141*** -0.016	Mean: 10.59 Median: 11	-0.072 0.175*** -0.019
Pekerjaan & Aktivitas Ekonomi				
Rumah Tangga Memiliki Usaha Sendiri	11.22	-0.517***	14.53	0.460***

Variabel	Bottom 40%		Upper 20%	
	Proportion (%)	Coef / SE	Proportion (%)	Coef / SE
KRT Bekerja di Sektor Pertanian	18.8	-0.086 0.131	8.33	-0.106 0.188
KRT Bekerja di sektor Informal	54.9	-0.112 0.310***	37.24	-0.165 -0.420***
KRT Setengah Menganggur (<35 jam kerja/minggu)	17.39	-0.06 0.353***	13.03	-0.051 -0.025
		-0.092		-0.093
Migrasi & Kependudukan				
Migran di wilayah Perkotaan	0.4	-0.270* -0.136	0.21	0.178 -0.185
Migran di wilayah Perdesaan	9.98	-0.590*** -0.155	35.04	0.429*** -0.142
Konsumsi Dan Struktur Pengeluaran				
Proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga	Mean: 62.35 Median: 62.87	0.037*** -0.005	Mean: 50.37 Median: 51.31	-0.073*** -0.007
Akses Keuangan Dan Jaminan Sosial				
Memiliki rekening di lembaga keuangan (bank/koperasi)	72.35	-0.652*** -0.098	88.84	0.974*** -0.126
Memiliki jaminan kesehatan atau asuransi	75.57	-0.222** -0.09	85.04	-0.009 -0.114
Akses Layanan Dasar Dan Kondisi Hunian				
Akses air minum tidak layak	4.81	0.242 -0.263	1.42	-0.222 -0.23
Akses sanitasi tidak layak	44.51	0.267** -0.121	44.51	-0.340*** -0.106
Sumber listrik non-PLN	6.22	0.397*** -0.104	2.21	-0.693*** -0.173
Bangunan fisik rumah tidak layak (atap, lantai, dinding)	32.34	0.195*** -0.063	20.5	-0.411*** -0.129
Program Bantuan Sosial				
Pernah Menerima BPNT	34.49	0.357*** -0.088	15.19	-0.565*** -0.109
Pernah Menerima PKH	20.77	0.220**	7.4	-0.276*

Variabel	Bottom 40%		Upper 20%	
	Proportion (%)	Coef / SE	Proportion (%)	Coef / SE
		-0.081		-0.149

Sumber: Penulis

Hasil perhitungan dan estimasi model pada bab ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan sosial ekonomi di Jawa Barat. Temuan dari analisis makro memperlihatkan pengaruh variabel struktural antarwilayah, sementara analisis mikro menegaskan perbedaan karakteristik rumah tangga pada kelompok kesejahteraan yang berbeda. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kondisi ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, dinamika pasar kerja, kebijakan fiskal, serta karakteristik sosial demografi rumah tangga. Dengan tersedianya bukti kuantitatif yang komprehensif ini, pembahasan pada bab berikutnya akan menguraikan determinan ketimpangan menurut berbagai dimensi secara lebih mendalam. Analisis tersebut disusun untuk menggambarkan bagaimana setiap dimensi berkontribusi terhadap ketimpangan, sekaligus memberikan konteks yang lebih jelas bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.



Ringkasan Bab

- Hasil makro menunjukkan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, SDM, fiskal, dan struktur pasar kerja. Kondisi ketimpangan tahun sebelumnya juga terbukti mempengaruhi ketimpangan tahun berikutnya.
- Hasil mikro mengungkapkan perbedaan nyata antara kelompok miskin dan mampu dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan dasar. Perbedaan ini menjelaskan mengapa kesenjangan kesejahteraan antar kelompok tetap tinggi.
- Temuan dari kedua pendekatan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyebab ketimpangan. Bab ini menjadi dasar untuk membedah setiap dimensi ketimpangan secara lebih spesifik.

BAB V

DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI EKONOMI

5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode penelitian belum inklusif, karena manfaatnya masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas.

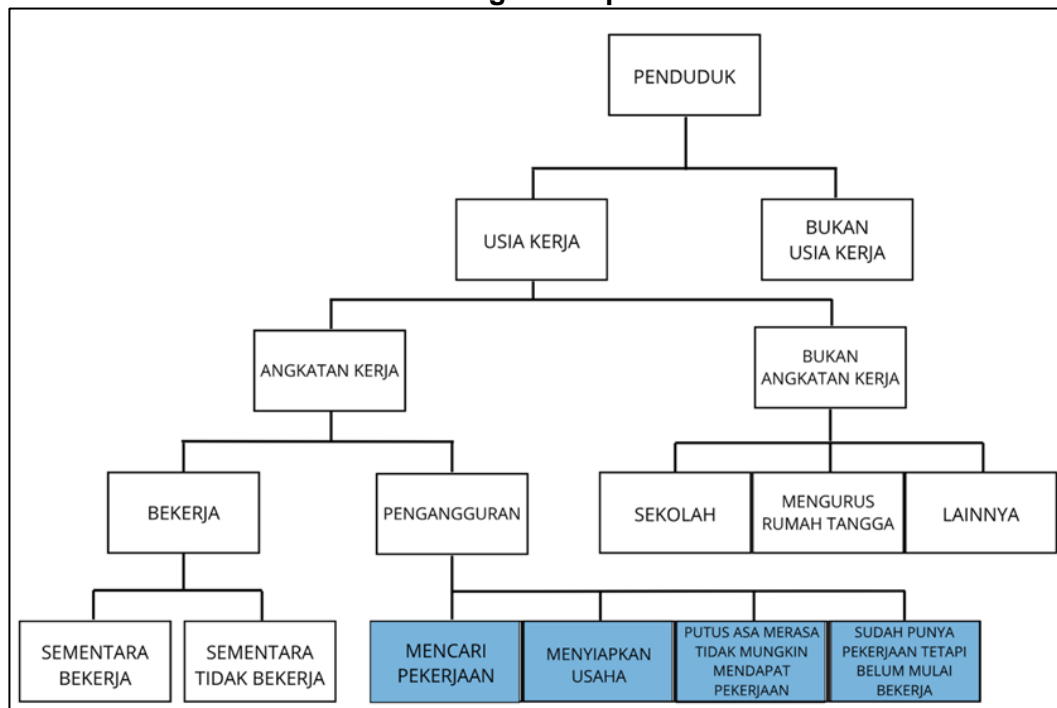
Fenomena ini konsisten dengan Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi justru cenderung memperlebar ketimpangan karena kelompok berpendapatan tinggi lebih mampu memanfaatkan peluang investasi dan akumulasi modal. Sementara itu, kelompok miskin masih terhambat oleh keterbatasan akses pendidikan, modal, maupun pasar tenaga kerja. Data Susenas dan Sakernas juga memperlihatkan bahwa distribusi pengeluaran masih timpang: 20 persen penduduk terkaya di Jawa Barat menguasai hampir 50 persen pengeluaran, sementara 20 persen terbawah hanya sekitar 6–7 persen. Hal ini memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan belum mengalir secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat relatif stabil sepanjang 2015–2024 dengan rata-rata 4,56 persen per tahun, dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masih relatif terbatas. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang bersifat *pro-poor* dan *pro-job*, tren pertumbuhan ini berpotensi memperbesar kesenjangan antar kelompok pendapatan.

5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berikut ini merupakan diagram kependudukan yang dapat membantu proses memahami definisi dari TPT. Bagan berwarna biru merupakan kategori penduduk yang tergolong sebagai pengangguran. Dapat dikatakan bahwa besar kecilnya penduduk yang berada pada bagan biru akan mempengaruhi jumlah TPT pada suatu wilayah dalam periode tertentu.

Gambar 8. Diagram Kependudukan



Sumber: BPS

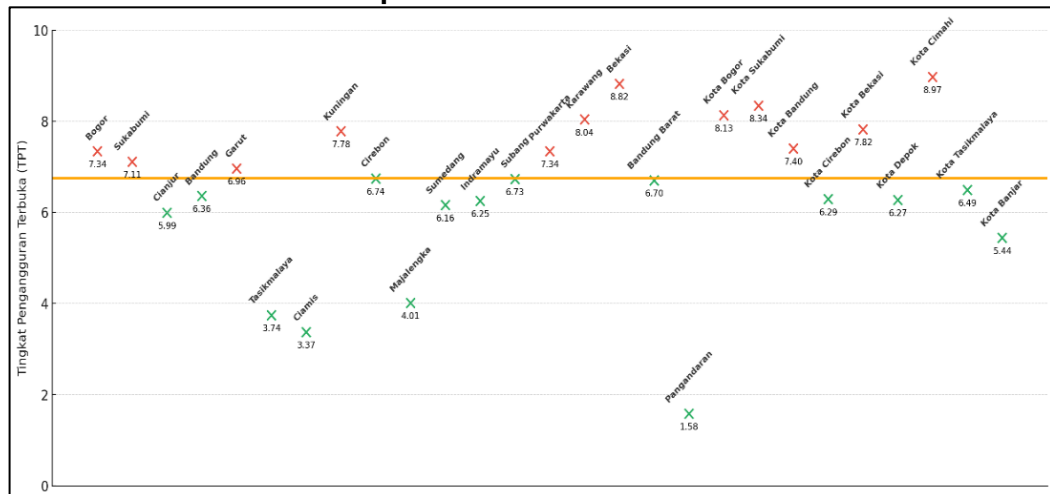
Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja terhadap angkatan kerja mungkin saja disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja, dengan kata lain banyak angkatan kerja yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena pada kenyataannya, dalam setiap lowongan pekerjaan sudah dituliskan keahlian spesifik yang dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu pun dapat mendorong rendahnya keterserapan angkatan kerja. Dengan adanya daerah-daerah khusus seperti ini akan membuat semakin berkurangnya lapangan kerja di daerah lain. Tidak berhenti di situ, angkatan kerja cenderung tidak terserap secara penuh pada pasar tenaga kerja karena adanya otomatisasi (*capital intensive*). Secara tidak langsung, kebutuhan tenaga kerja manual akan terus menurun.

Dengan penjelasan di atas, jelas sekali pengaruh TPT terhadap *Gini Ratio*, yaitu semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar tenaga kerja maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang ada. Dikatakan demikian karena angkatan kerja yang belum terserap pasar tenaga kerja memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sederhananya, angkatan kerja yang belum diserap pasar tenaga kerja belum berkontribusi pada pendapatan rumah tangga, tetapi selalu berpartisipasi pada pengeluaran rumah tangga. Sehingga cepat atau lambat, kemiskinan merupakan hal yang nyata bagi rumah tangga yang

dibebani tersebut. Tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan karena menurunkan pendapatan total di kalangan masyarakat yang menganggur, menekan upah, dan memperdalam kemiskinan struktural (Hindun et al., 2019). Kondisi ini dikarenakan pengangguran berdampak langsung pada pengurangan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kemudian menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan (Sejati, 2020). Pengangguran yang berkepanjangan dapat memicu lingkaran kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang memperburuk situasi.

Menilik Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target TPT di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 ialah sebesar 7,11-7,79%. Faktanya, target tersebut memang tercapai dengan baik, mengingat TPT Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 ialah sebesar 6,75%. Namun, apabila melakukan penelaahan terhadap angka TPT di 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, maka akan mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berikut ini merupakan grafik TPT kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024.

Gambar 9. TPT 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

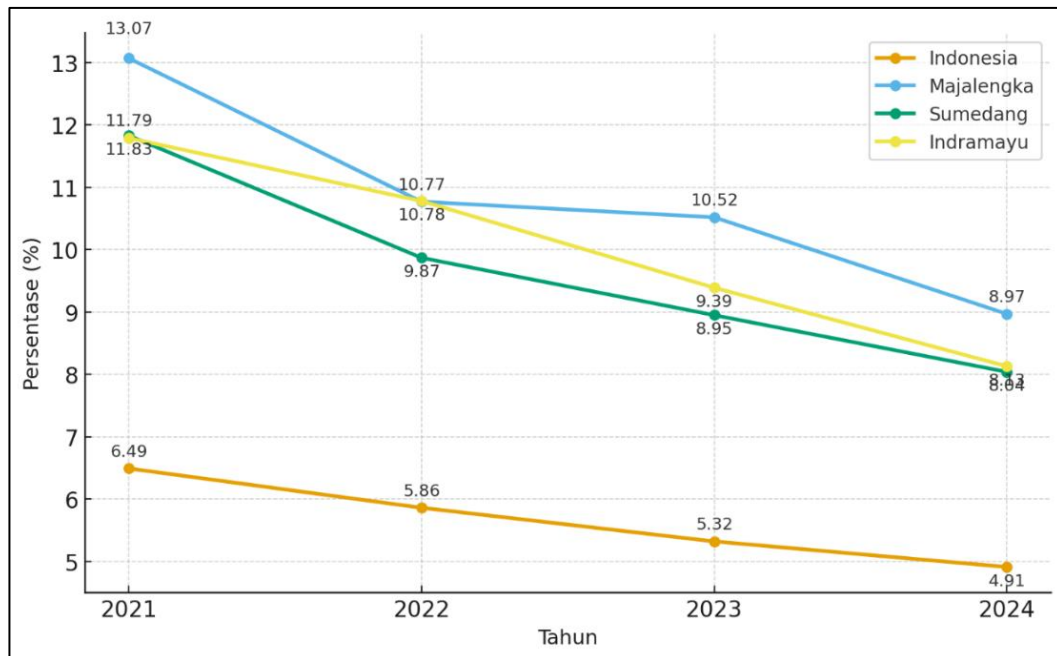


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki TPT di atas TPT provinsi. Bahkan apabila diurutkan, Provinsi Jawa Barat dengan TPT sebesar 6,75% berada di urutan ke-13 dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini menunjukkan masih adanya kesenjangan tingkat penyerapan angkatan kerja antara kabupaten/kota satu dengan lainnya. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya TPT di Jawa Barat disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu merupakan tiga kabupaten yang secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai tahun 2024 berada di 5 kabupaten dengan TPT tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Bahkan, TPT ketiga kabupaten tersebut jauh di atas TPT nasional. Berikut ini merupakan grafik TPT Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Indramayu yang disandingkan dengan TPT Indonesia.

Grafik 10. TPT Indonesia dan Tiga Kabupaten dengan TPT Tertinggi di Provinsi Jawa Barat



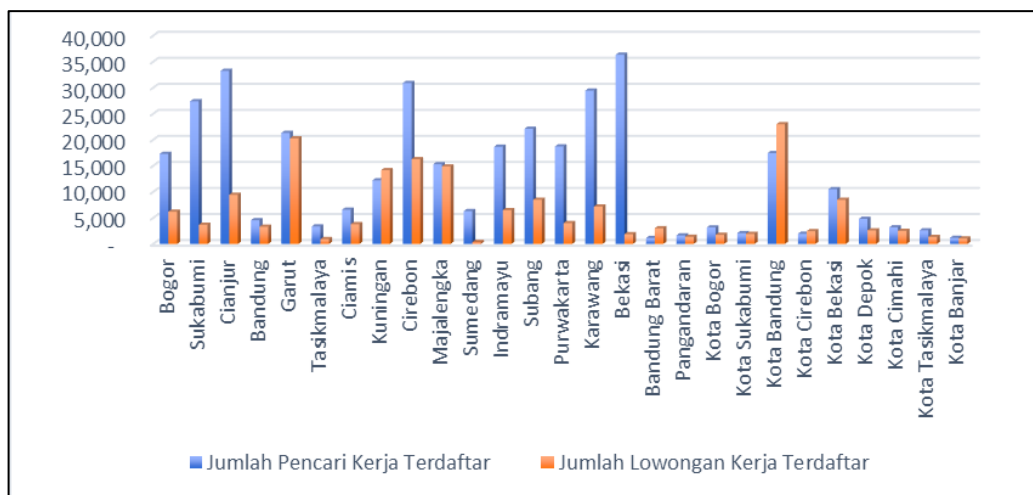
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Meskipun grafik tersebut menunjukkan pola yang cenderung menurun, namun TPT Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Indramayu tetap berada di atas TPT Indonesia. Misalnya saja pada tahun 2024, TPT Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Indramayu secara berturut-turut adalah sebesar 8,97%, 8,04%, dan 8,13%. Sementara itu, TPT Indonesia hanya berada di angka 4,91%. Hal ini menunjukkan keadaan angkatan kerja di ketiga kabupaten tersebut yang tidak terserap secara sempurna oleh pasar tenaga kerja, yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan penduduk. Pada akhirnya, ketimpangan pendapatan tersebut membuat kesejahteraan penduduk menurun bahkan hingga terjadi kemiskinan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah merespons permasalahan ketenagakerjaan ini melalui berbagai program, seperti program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta program penempatan tenaga kerja. Pemerintah setempat melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, menyatakan bahwa target kinerja dari program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ialah 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Sementara itu, program penempatan tenaga kerja yang

diukur melalui jumlah pencari kerja yang ditempatkan memiliki target kinerja sebesar 88.305 orang. Realisasi capaian kinerja dari target tersebut ialah sebesar 180,934 orang atau setingkat 100%. Kedua program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut secara tertulis menunjukkan prestasi Provinsi Jawa Barat yang begitu mengesankan dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan. Akan tetapi, data di lapangan menunjukkan hal yang berlawanan. Masih terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar tenaga kerja serta masih banyaknya kasus *skill mismatch*, yaitu kondisi ketika keahlian yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan yang ada.

Gambar 11. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Gambar 11 di atas membantu kita untuk memahami besarnya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan peluang kerja di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah para pencari kerja terdaftar paling banyak di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, yaitu sebanyak 36,340 jiwa. Namun, jumlah lowongan kerja terdaftar di kabupaten tersebut hanya sebesar 1,862 jiwa. Tidak meratanya penyerapan tenaga kerja seperti inilah yang membuat angka TPT di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terbilang masih tinggi. Dengan adanya ketidakterserapan angkatan kerja yang pada akhirnya berdampak terhadap tingginya angka TPT, maka akan menciptakan kehidupan penduduk dengan pendapatan yang tidak merata. Penduduk yang terserap lapangan pekerjaan akan memiliki pendapatan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya. Sementara itu, penduduk yang tidak terserap lapangan pekerjaan akan menggantungkan hidup kepada keluarganya tanpa memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alur ini akhirnya menciptakan angka ketimpangan pendapatan atau *Gini Ratio* yang tak kalah tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, TPT di perkotaan jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Hal ini terjadi karena jumlah angkatan kerja di daerah perkotaan lebih banyak dari jumlah angkatan kerja di perdesaan. Namun, mirisnya lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Sementara itu, tidak banyak angkatan kerja yang memilih untuk mencari pekerjaan di daerah perdesaan. Upah yang lebih besar, fasilitas penunjang yang lebih memadai, serta lingkungan yang lebih modern merupakan beberapa alasan mendasar yang membuat besarnya perpindahan angkatan kerja dari desa ke kota.

Tabel 12 TPT dan *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Tahun	Daerah	TPT (Persen)	<i>Gini Ratio</i> (Poin)
2022	Perkotaan	8.92	0.428
	Perdesaan	6.17	0.322
2023	Perkotaan	7.92	0.439
	Perdesaan	5.65	0.321
2024	Perkotaan	6.98	0.434
	Perdesaan	5.84	0.325

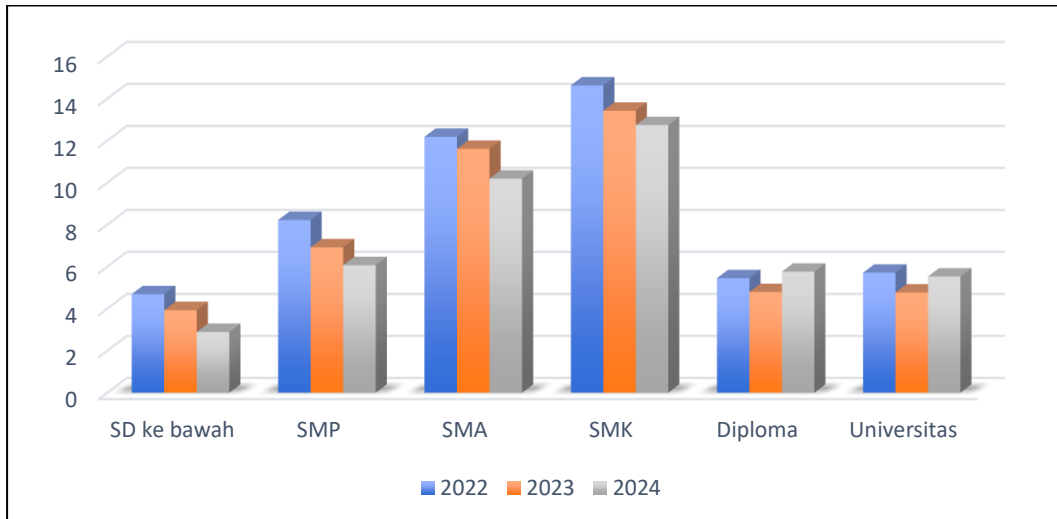
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak hanya TPT yang memiliki nilai lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding dengan daerah perdesaan. Fenomena ini juga terjadi pada indeks *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat. Daerah perkotaan memiliki *Gini Ratio* lebih besar daripada daerah perdesaan diyakini berkat adanya gap pendapatan yang begitu besar. Di perkotaan, struktur penduduk lebih beragam sehingga menciptakan “si kaya” dan “si miskin” terlihat nyata. Pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi umumnya ada di daerah perkotaan, sehingga tercipta kondisi pekerja dengan gaji sangat besar dan pekerja dengan gaji sangat kecil. Keadaan ini menggiring angka *Gini Ratio* terus naik, karena ada ketimpangan pendapatan yang realistis. Berbeda halnya dengan *Gini Ratio* perdesaan yang cenderung lebih kecil, hal ini terjadi karena pendapatan para pekerja di daerah perdesaan umumnya rata. Para pekerja di daerah perdesaan tidak terbagi menjadi pekerja dengan pendapatan sangat tinggi dan pekerja dengan pendapatan sangat rendah. Lapangan usaha yang identik dengan sektor informal membuat ketimpangan pendapatan antar pekerja di daerah perdesaan tidak begitu kentara.

Di bawah ini merupakan grafik TPT berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Barat pada 3 tahun terakhir. Grafik tersebut memberikan informasi bahwa penduduk dengan pendidikan terakhir SD ke bawah, SMP, SMA dan SMK memiliki tren menurun. Artinya, ada kemajuan berupa keterserapan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Sedangkan, penduduk dengan pendidikan terakhir diploma dan universitas memiliki tren

yang fluktuatif, yaitu menurun pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024. Artinya, penyerapan tenaga kerja untuk lulusan kedua jenjang pendidikan ini sempat berlangsung baik pada tahun 2023, namun menurun keterserapannya pada tahun 2024.

Gambar 12. TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat



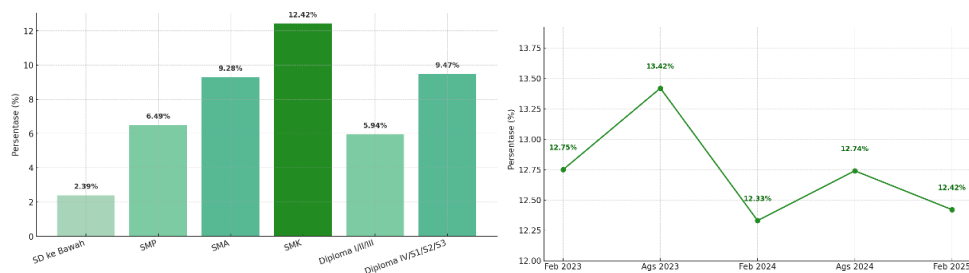
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Jawa Barat dengan pendidikan terakhir SMK merupakan kelompok penduduk yang menyumbang angka TPT paling besar. Meskipun SMK dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, nyatanya angka penganggurannya justru paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri atau mungkin terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor kejuruan. Adanya fenomena *mismatch* ini tidak terlepas dari penggunaan kurikulum SMK yang mungkin tidak selalu sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri terkini. Akibatnya, lulusan SMK seringkali memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, sehingga sulit terserap oleh dunia kerja.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan pelatihan vokasi yang diberikan oleh pihak sekolah mungkin belum cukup mendalam atau spesifik untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Terlebih tidak sedikit lulusan SMK yang kesulitan untuk mengakses pelatihan lanjutan atau sertifikasi profesi setelah lulus sekolah. Alasan berikutnya ialah berkat adanya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang begitu ketat pada masa ini. Lulusan SMK dituntut untuk bersaing dengan lulusan dari jenjang pendidikan lain, termasuk lulusan perguruan tinggi, untuk posisi pekerjaan yang sama. Itulah beberapa penyebab tingginya TPT penduduk lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat.

Maka dari itu, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan platform digital khusus untuk mempermudah pencari kerja. Dengan adanya platform ini, para pencari kerja tidak perlu lagi berdesakan di *job fair* atau mengantre di berbagai tempat. Cukup dengan mengakses platform tersebut, pencari kerja dapat langsung terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Melalui platform ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya agar warga Jawa Barat yang ingin mencari pekerjaan cukup mengisi data diri di platform tersebut. Perusahaan juga bisa memasukkan informasi tentang lowongan pekerjaan, yang akan memudahkan pencari kerja menemukan peluang yang tepat.

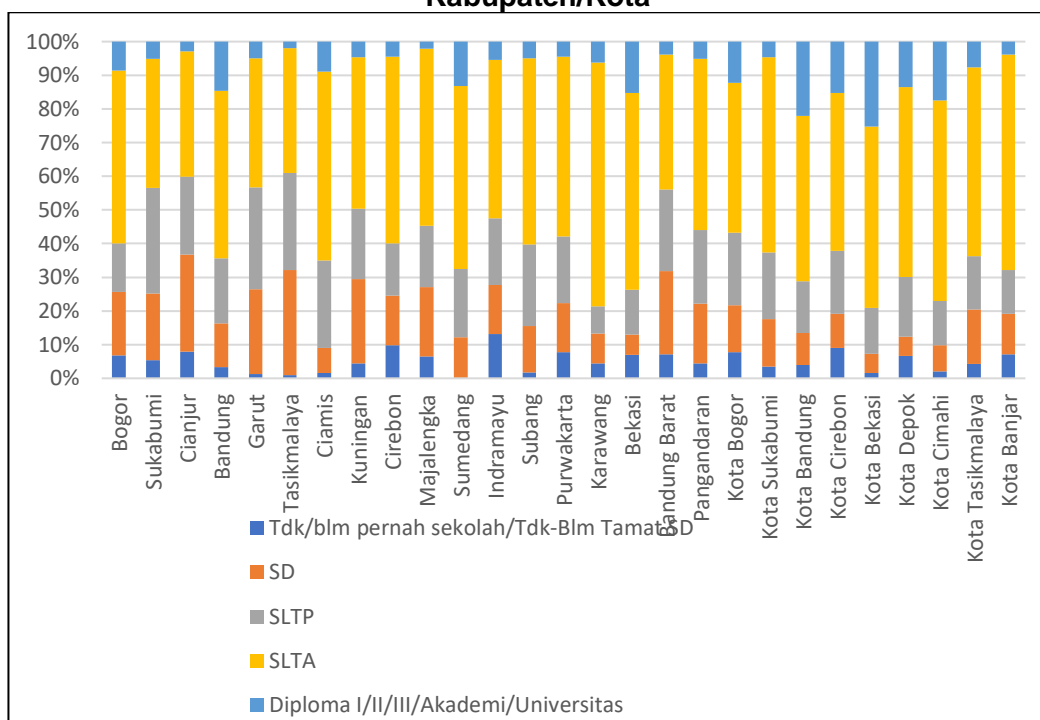
Gambar 13. TPT Menurut Pendidikan Pada Februari 2025 dan Perkembangan TPT Lulusan SMK Pada Februari 2023 Hingga Februari 2025



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil perhitungan, TPT secara signifikan meningkatkan *Gini Ratio* sekitar 0,7 persen ($p < 0,05$), sejalan dengan teori bahwa pengangguran memperburuk distribusi pendapatan. Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 6,75 persen merupakan TPT tertinggi nasional (4,91 persen). Lebih lanjut, grafik 13 di atas menegaskan bahwa TPT di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh lulusan SMK. Pada Februari 2025, diketahui bahwa TPT terendah terdapat pada lulusan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,39%. Sementara itu, TPT tertinggi pada lulusan SMK sebesar 12,42%. Fenomena ini mencerminkan adanya *mismatch* keterampilan antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Sedangkan, lulusan berpendidikan rendah relatif mudah terserap di sektor informal, meski dengan kualitas pekerjaan rendah.

Gambar 14. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Struktur Pendidikan per Kabupaten/Kota



Sumber: BPS (Diolah)

5.3. Kedalaman Kemiskinan

Selanjutnya, indikator kedalaman kemiskinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang menandakan bahwa semakin dalam tingkat kemiskinan suatu wilayah, semakin tinggi pula ketimpangan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan indikator yang tidak hanya menghitung jumlah penduduk miskin, tetapi juga sejauh mana rata-rata pengeluaran mereka berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin dalam jurang kemiskinan yang dialami kelompok miskin. Oleh karena itu, P1 menjadi penting untuk memahami apakah suatu wilayah menghadapi masalah “merata miskin” atau “kaya timpang.”

Kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan berada pada kategori tinggi dengan nilai P1 di atas dua yang mencerminkan bahwa rata-rata penduduk miskin berada cukup jauh dari garis kemiskinan dan memerlukan intervensi peningkatan daya beli yang lebih intensif. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Majalengka Kabupaten Subang Kabupaten Cianjur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori cukup tinggi sehingga menggambarkan kondisi kemiskinan yang masih dalam dan membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif terutama pada kelompok rentan.

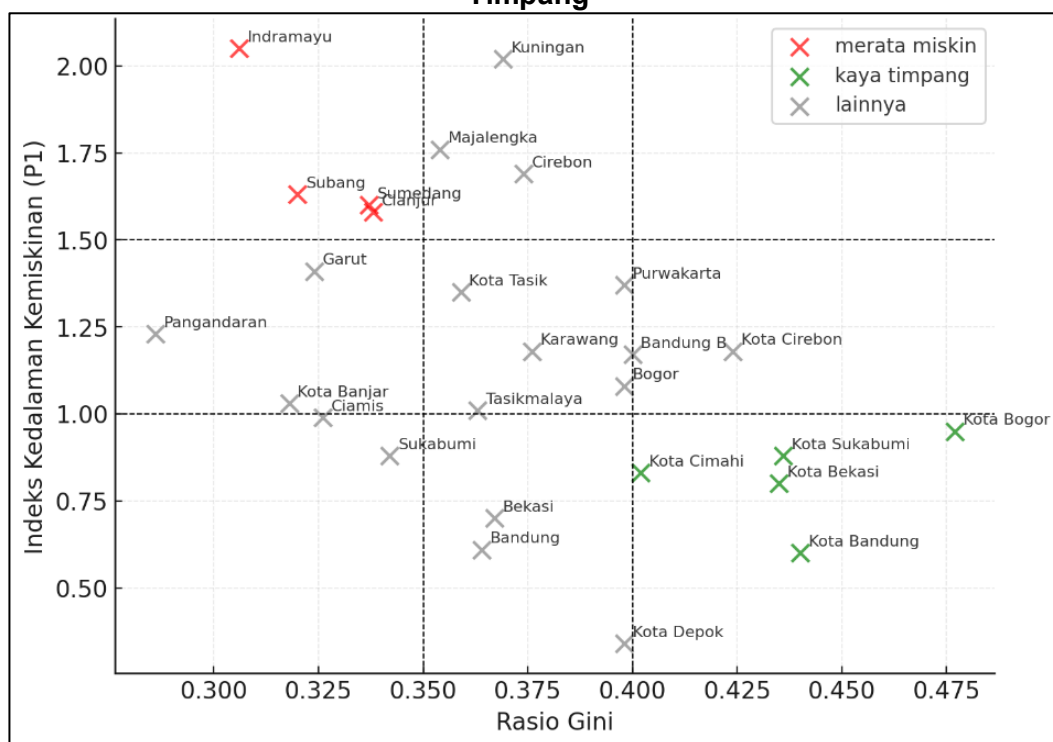
Kategori sedang mencakup kabupaten dan kota dengan nilai P1 sekitar satu hingga mendekati satu setengah seperti Kabupaten Garut Kabupaten

Purwakarta Kota Tasikmalaya Kabupaten Pangandaran Kabupaten Karawang Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bogor Kabupaten Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor. Wilayah wilayah ini memiliki tingkat kedalaman kemiskinan yang tidak terlalu ekstrem namun masih menunjukkan adanya kesenjangan daya beli di kalangan rumah tangga miskin.

Sementara itu beberapa kota besar seperti Kota Sukabumi Kota Bekasi Kota Cimahi Kota Bandung dan Kota Depok masuk ke dalam kategori rendah. Nilai P1 yang berada di bawah satu menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di wilayah ini relatif dekat dengan garis kemiskinan sehingga kebutuhan intervensi lebih bersifat peningkatan akses layanan dasar dan stabilisasi pendapatan. Secara keseluruhan pola ini menunjukkan bahwa wilayah pedesaan dan agraris cenderung memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan di Jawa Barat. Oleh karena itu, P1 menjadi penting untuk memahami apakah suatu wilayah menghadapi masalah “merata miskin” atau “kaya timpang.”

Grafik di bawah ini menggambarkan pola ini dengan jelas: titik merah (merata miskin) terkonsentrasi di kiri-atas (Gini rendah, P1 tinggi), sedangkan titik hijau (kaya timpang) berada di kanan-bawah (Gini tinggi, P1 rendah). Artinya, wilayah pedesaan terutama menghadapi menghadapi persoalan kedalaman kemiskinan, sementara wilayah perkotaan lebih menghadapi persoalan pelebaran jurang antar kelompok pendapatan. Sebagian besar kabupaten/kota berada di zona tengah. Misalnya Kuningan (0,369; 2,02) masih menghadapi kemiskinan dalam meskipun Gini sedang, sementara Kota Depok (0,398; 0,34) punya kemiskinan sangat dangkal tetapi Gini relatif moderat. Data yang digunakan berasal dari Sakernas Maret 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil estimasi dan pemetaan *Gini Ratio* terhadap P1 di kabupaten/kota Jawa Barat memperlihatkan dua pola besar sebagai berikut.

Gambar 15. Analisis Kuadran Peta Daerah “Merata Miskin” dengan “Kaya Timpang”



Sumber: BPS (Diolah)

Hasil estimasi dan pemetaan *Gini Ratio* terhadap kedalaman kemiskinan (P1) di kabupaten/kota Jawa Barat memperlihatkan dua pola besar yang menggambarkan karakter ketimpangan wilayah, yaitu kategori “merata miskin” dan “kaya timpang.” Kategori “merata miskin” mencakup daerah dengan *Gini Ratio* rendah ($<0,35$) namun kedalaman kemiskinan tinggi ($P1 > 1,5$). Pola ini terlihat pada Kabupaten Indramayu (Gini 0,306; P1 2,05), Subang (0,320; 1,63), Cianjur (0,338; 1,58), dan Sumedang (0,337; 1,60). Ketimpangan di wilayah-wilayah tersebut tampak rendah bukan karena seluruh penduduk hidup sejahtera, melainkan karena mayoritas rumah tangga berada dalam kondisi yang sama-sama miskin. Dengan kata lain, distribusi pengeluaran di kelompok ini relatif merata pada tingkat pendapatan yang rendah atau “rata di bawah garis kemiskinan.” Tingginya kedalaman kemiskinan memperlihatkan bahwa masyarakat miskin di daerah ini sangat sulit naik kelas ekonomi, karena jarak antara pendapatan aktual dan garis kemiskinan masih lebar.

Sebaliknya, kategori “kaya timpang” ditemukan di wilayah dengan *Gini Ratio* tinggi ($>0,40$) tetapi kedalaman kemiskinan rendah ($P1 < 1,0$). Pola ini tampak jelas di Kota Bogor (0,477; 0,95), Kota Bandung (0,440; 0,60), Kota Bekasi (0,435; 0,80), Kota Cimahi (0,402; 0,83), dan Kota Sukabumi (0,436; 0,88). Kota-kota tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, namun kesenjangan antar kelompok pendapatan sangat lebar. Kelompok berpendapatan tinggi menguasai porsi pengeluaran yang jauh

lebih besar dibandingkan kelas menengah dan bawah. Fenomena ini mencerminkan pola “kaya timpang”, di mana jurang ketimpangan bukan disebabkan oleh tingginya kemiskinan, tetapi oleh meningkatnya disparitas antara kelompok kaya dan miskin di kawasan perkotaan yang lebih maju.

Secara keseluruhan, dua pola tersebut menegaskan bahwa ketimpangan di Jawa Barat memiliki karakter ganda: di satu sisi terdapat wilayah dengan kemiskinan yang homogen (merata miskin), sementara di sisi lain muncul wilayah dengan kemakmuran yang terpusat pada segelintir kelompok (kaya timpang). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang berbeda: pengentasan kemiskinan di wilayah agraris dan redistribusi ekonomi di wilayah metropolitan.

5.4. Investasi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Padahal, Jawa Barat merupakan provinsi dengan realisasi investasi terbesar secara nasional dalam lima tahun terakhir, dengan capaian Rp251,1 triliun pada 2024, naik dari Rp210,6 triliun pada 2023, Rp174,6 triliun pada 2022, dan Rp136,1 triliun pada 2021 (BKPM, 2025). Investasi ini sebagian besar terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan dan infrastruktur di wilayah perkotaan dan koridor industri (Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bogor, Bandung Raya). Besarnya nilai investasi tidak serta merta berimplikasi pada penurunan ketimpangan karena sifatnya lebih padat modal, manfaatnya tidak merata ke daerah rural, serta keterkaitannya dengan UMKM lokal masih terbatas. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun investasi tumbuh pesat, pengangguran terbuka di Jawa Barat tetap menjadi yang tertinggi nasional, dan ketimpangan relatif tidak banyak berubah.

5.5. Proporsi Pengeluaran Makanan

Analisis logit Susenas 2024 memperlihatkan kesenjangan pola konsumsi dan sumber pendapatan. Rumah tangga miskin (B40) mengalokasikan rata-rata 62,3 persen pengeluaran untuk kebutuhan makanan, jauh lebih tinggi dibanding kelompok sejahtera (U20) sebesar 50,4 persen. Koefisien logit positif (0,037; $p < 0,01$) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran untuk pangan, semakin tinggi kemungkinan rumah tangga tergolong miskin. Kondisi ini menggambarkan rendahnya kemampuan rumah tangga B40 untuk melakukan diversifikasi pengeluaran ke kebutuhan produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi usaha.



Ringkasan Bab

- Pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Kelompok berpendapatan tinggi memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding kelompok lainnya.
- Pengangguran dan kemiskinan berperan penting dalam memperlebar ketimpangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penciptaan peluang ekonomi yang lebih merata.
- Investasi dan pola konsumsi warga turut mempengaruhi ketimpangan antarwilayah. Pembenahan struktur ekonomi lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemerataan.

BAB VI

DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dimensi Pendidikan dengan proksi Indeks Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan di Jawa Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian pendidikan selama periode penelitian belum sepenuhnya inklusif, karena akses terhadap menengah dan tinggi masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

Temuan di tingkat makro tersebut diperkuat oleh hasil analisis mikro Susenas 2024 yang menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi pembeda antar kelompok kesejahteraan rumah tangga. Proporsi KRT yang lulus SMA atau lebih hanya sebesar 32,4 persen pada kelompok B40, sementara pada kelompok U20 mencapai 62 persen. Hasil regresi logit memperlihatkan bahwa pendidikan menengah ke atas secara signifikan menurunkan probabilitas menjadi kelompok miskin (koefisien $-0,289$; $p < 0,01$) dan meningkatkan peluang tergolong dalam kelompok sejahtera (koefisien $0,161$; $p < 0,05$).

Pola yang sama terlihat pada variabel RLS anggota rumah tangga usia 15 tahun ke atas. Rata-rata RLS pada B40 hanya 8,1 tahun (setara dengan SMP kelas dua), sedangkan kelompok U20 mencapai 10,6 tahun (setara SMA kelas satu). Peningkatan satu tahun masa sekolah menurunkan probabilitas rumah tangga untuk tergolong dalam kelompok miskin sebesar 0,14 poin dan meningkatkan peluang tergolong kelompok Sejahtera sebesar 0,18 poin, dengan keduanya signifikan pada taraf 1 persen.

Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya penentu utama produktivitas individu, tetapi juga instrumen mobilitas sosial vertikal yang paling efektif dalam memutus rantai ketimpangan antar generasi. Rumah tangga dengan pendidikan rendah cenderung terperangkap dalam pekerjaan berproduktivitas rendah dan berpenghasilan kecil, sementara rumah tangga berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar mengakses pekerjaan formal dengan upah layak serta fasilitas jaminan sosial.

Disparitas pendidikan ini juga beririsan dengan dimensi spasial dan gender. Proporsi KRT perempuan di kelompok miskin lebih rendah (9,1 persen) dibanding kelompok sejahtera (12,5 persen), namun perempuan kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan menengah ke atas menunjukkan peluang lebih besar keluar dari kemiskinan dibanding laki-laki dengan pendidikan rendah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan

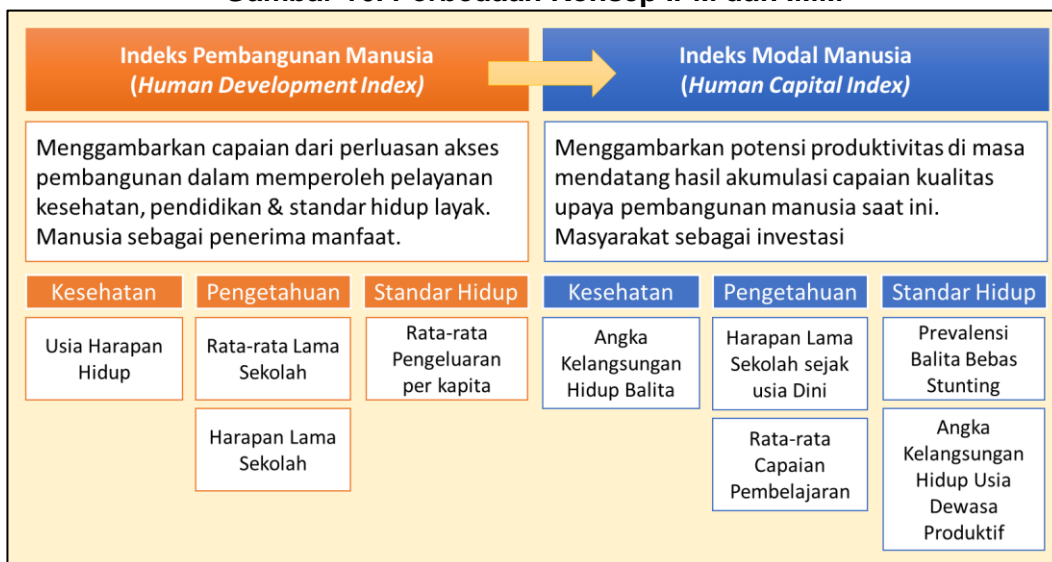
memiliki efek multiplikatif terhadap kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan partisipasi kerja dan kualitas pengasuhan anak. Dengan demikian, hasil analisis makro dan mikro konsisten menunjukkan bahwa ketimpangan SDM adalah akar ketimpangan ekonomi di Jawa Barat. Peningkatan rata-rata indikator pendidikan dan kesehatan tidak akan cukup tanpa pemerataan kualitas antarwilayah dan antarkelompok pendapatan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas. Kualitas SDM yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Secara teori, peningkatan kualitas SDM berkorelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan (yang dalam hal ini diukur dengan *Gini Ratio*), artinya bahwa semakin tinggi kualitas SDM akan menurunkan *Gini Ratio*. Modal manusia merupakan suatu bentuk modal fisik dan teknologi yang dapat menghasilkan *output* yang berbeda (Alfa, 2014).

Untuk mengukur indeks SDM, Bank Dunia sejak 2018 mulai memperkenalkan konsep baru dengan menggunakan indikator *Human Capital Index* (HCI) atau Indeks Modal Manusia (IMM), sebelumnya UNDP dan BPS menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat beberapa perbedaan variabel yang digunakan keduanya. Untuk mengukur IPM menggunakan empat komponen yakni RLS, HLS atau yang disebut dengan komponen pengetahuan, UHH, dan pengeluaran riil per kapita; sedangkan IMM menggunakan pendekatan *lifecycle* yang lebih kompleks. Beberapa indikator IPM seperti RLS, HLS, dan UHH menjadi bagian dari penghitungan IMM.

HCI atau IMM menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. IMM mengukur produktivitas pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap tolok ukur kesehatan yang baik dan pendidikan yang lengkap. Pendekatan *lifecycle* menunjukkan investasi modal manusia melalui empat tahapan kelompok usia yang dimulai dari tahapan anak usia dini (*earlychildhood*), masa sekolah (*school age*), remaja (*youth*), sampai dengan dewasa (*adult*). Cakupan yang dinilai mulai usia dini sampai dengan dewasa meliputi indikator kelangsungan hidup anak (*child survival*), pendaftaran sekolah (*school enrolment*), kualitas pembelajaran (*quality of learning*), pertumbuhan yang sehat (*health growth*), dan kelangsungan hidup orang dewasa (*adult survival*). Skor indeks akhir berkisar antara nol hingga satu (skala 0-1). Skor 1 mewakili skenario ideal di mana seorang anak mencapai potensi penuh mereka dalam kesehatan dan pendidikan.

Gambar 16. Perbedaan Konsep IPM dan IMM



Sumber: Bappenas, 2025

Di dalam RPJMN 2025-2029, untuk mengukur kualitas SDM Indonesia sudah menggunakan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) dan sudah ditetapkan targetnya sebesar 0,59. Sebagai konsep baru, terdapat beberapa data untuk mengukur IMM daerah yang masih terkendala kelengkapannya. Oleh karena itu, untuk mengukur ketimpangan SDM pada kajian ini masih menggunakan IPM dan diperkuat dengan pendalaman beberapa data kondisi kesehatan dan pendidikan yang mengacu pada indikator-indikator yang mendukung IMM secara lokus per kabupaten/kota dan berdasarkan desilnya, serta ketimpangan antar kabupaten/kota.

Indeks Modal Manusia Indonesia

Indeks Modal Manusia (IMM) telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai bagian tahapan dari upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan target mencapai 0,59 pada tahun 2029. Dalam RPJPN 2025-2045, HCI Indonesia pada tahun 2045 ditargetkan mencapai angka 0,73. Berdasarkan laporan World Bank's Human Capital Index 2020, nilai (score) IMM Indonesia tahun 2020 mencapai 0,54, meningkat dari tahun 2010 dengan nilai 0,50 (The World Bank, November 2024). Artinya bahwa rata-rata produktivitas seorang anak Indonesia yang lahir pada tahun 2020 sebagai pekerja di masa depan relatif terhadap tolok ukur kesehatan dan pendidikan mencapai 0,54.

Indonesia berada pada urutan ke 81 dari 133 negara yang disurvei. Artinya seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini diperkirakan hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya pada kondisi ideal. Hal ini menandakan, masih banyak kesenjangan yang mendasar seperti kualitas pendidikan dasar yang belum merata, gizi anak yang masih rendah, serta keterbatasan sistem kesehatan yang berdampak pada perkembangan sumber daya manusia. Bila terus dibiarkan, anak-

anak Indonesia berisiko kehilangan potensi besar dalam hal keterampilan, kesehatan, dan produktivitas, yang pada akhirnya akan kesulitan mengejar bonus demografi dan berisiko tertinggal dalam persaingan global.

Skor IMM tertinggi dicapai oleh Singapura dengan nilai 0,88; urutan kedua adalah Jepang 0,81, sedangkan Malaysia dan Thailand berada pada urutan ke 52 dan 57 dengan skor sama 0,61.

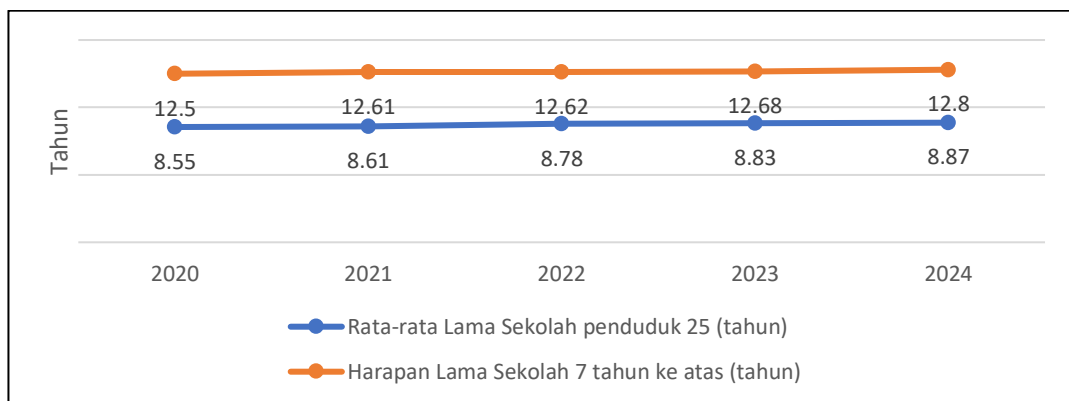
- Berdasarkan laporan HCI Bank Dunia, untuk penilaian pada tahap anak usia dini (*earlychildhood*), pada komponen angka kematian neonatal Indonesia sudah menurun, pada tahun 2017 mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2022 menjadi 11. Capaian target vaksinasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) belum mencapai 100 persen baru mencapai 83 persen bayi pada 2023.
- Tahap masa sekolah (*school age*). Angka kematian anak usia 5-14 tahun adalah 5 per 1.000 anak usia 5 tahun pada 2022. Terdapat 2 persen anak-anak (usia 5-17 tahun) yang terlibat dalam pekerja anak adalah pada 2021.
- Tahap remaja (*youth*). Angka literasi pemuda, persentase pemuda (usia 15-24) yang melek huruf mencapai 100 persen pada 2020. Pemuda yang tidak bekerja, mengenyam pendidikan, atau mengikuti pelatihan pada tahun 2023 mencapai 21 persen dari pemuda usia 15-24. Untuk angka fertilitas remaja, jumlah kelahiran untuk setiap 1.000 perempuan usia 15-19 tahun adalah 33 pada 2022, menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 36.
- Tahap dewasa (*adult*). Harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2022 adalah 68 tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai persentase dari populasi perempuan usia kerja (diatas 25 tahun) adalah 57 persen (2023). Tingkat pengangguran dewasa merupakan bagian dari angkatan kerja dewasa usia di atas 25 adalah 2 persen (2023).

6.1. Pendidikan

Salah satu indikator utama yang menentukan IPM dan IMM adalah pendidikan. Tidak terlalu berbeda jauh untuk penilaian pendidikan di IPM dan IMM karena keduanya meliputi indikator HLS dan RLS. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Merujuk pada definisi BPS, angka HLS menunjukkan lamanya waktu belajar di sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Sedangkan RLS mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh individu yang berusia 25 tahun ke atas.

Angka HLS dan RLS di Jawa Barat terus meningkat selama periode tahun 2020 hingga 2024. HLS di Jawa Barat mencapai 12,8 tahun pada 2024, yang berarti bahwa penduduk yang berusia 7 tahun diharapkan dapat menempuh pendidikan selama 12,8 tahun atau setara dengan level perguruan tinggi di tahun pertama atau dapat mengenyam pendidikan Diploma 1 tahun (D1). Peningkatan HLS pada 2024 cukup tinggi sebesar 0,95 persen terhadap 2023 atau kenaikan lama sekolah 0,12 tahun. Pada tahun 2023 hanya meningkat 0,48 persen terhadap 2022. Dengan demikian dari dimensi pengetahuan, pertumbuhan yang cukup tinggi pada HLS 2024 sebesar 0,95 persen berperan terhadap peningkatan IPMnya.

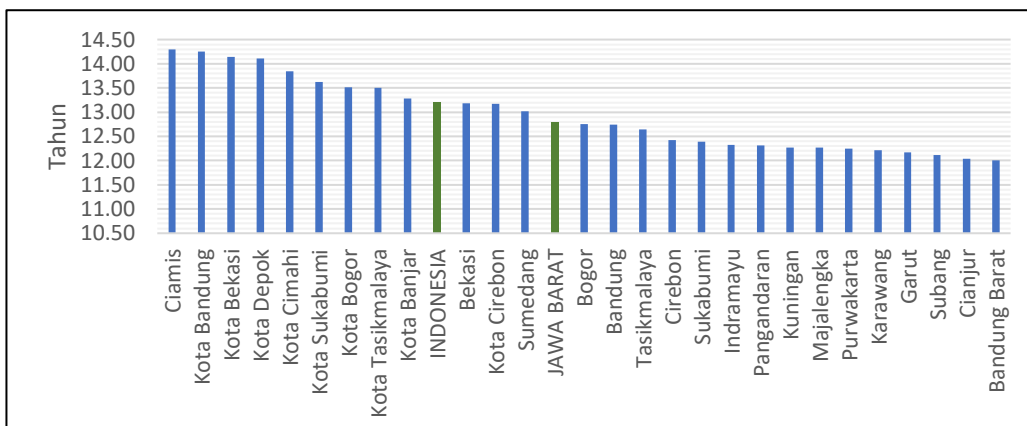
Gambar 17. HLS dan RLS Jawa Barat 2020-2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Dari 27 kabupaten/kota Jawa Barat terdapat 9 kabupaten/kota yang HLS 2024 sudah cukup tinggi dan melampaui rata-rata Indonesia. Jika capaian HLS tersebut dapat direalisasikan maka akan semakin banyak anak-anak yang kelak dapat mencapai sekolah tinggi. Untuk mencapai SDM yang berkualitas tinggi melalui pendidikan membutuhkan proses waktu yang panjang. Untuk mencapai S1 apabila sekolah dimulai dari PAUD, taman kanak-kanak (TK) sampai dengan strata 1 minimal 14 tahun. Dengan catatan pada jenjang PAUD dan TK hanya ditempuh masing-masing 1 tahun dan tidak pernah menunggak selama sekolah.

Gambar 18. HLS per Kabupaten/kota Jawa Barat 2024

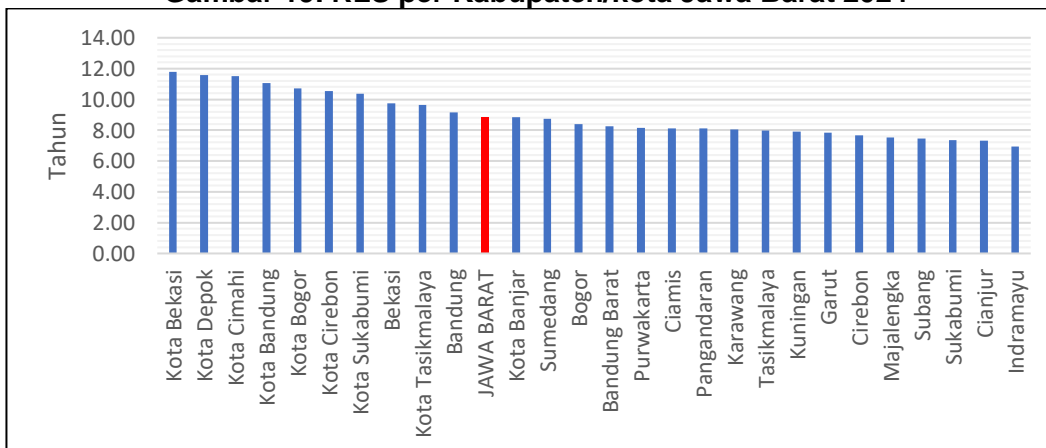


Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Dibandingkan dengan kinerja HLS, kinerja RLS selama 5 tahun mengalami perlambatan pertumbuhan. Rata-rata pendidikan yang dicapai selama 5 tahun terakhir masih pada kisaran 8 tahun, artinya penduduk Jawa Barat usia 25 tahun ke atas rata-rata berpendidikan setingkat SMP kelas 2. Bahkan terjadi pertumbuhan yang melambat pada RLS pada 2024 sebesar 0,45 persen dibandingkan dengan 2023 yang mencapai pertumbuhan 0,57 persen. Rendahnya RLS Jawa Barat dikarenakan RLS di kabupaten/kotanya juga belum tinggi bahwa belum mencapai 12 tahun artinya belum menamatkan SMA.

Di perkotaan, penduduk menempuh pendidikan lebih tinggi atau RLS-nya (rata-rata lama sekolah) dibandingkan di kabupaten. Hal tersebut berkorelasi positif dengan akses pendidikan yang lebih banyak dan mudah dijangkau di perkotaan. Dari diskusi dengan Bappeda Sumedang diperoleh informasi bahwa masih terdapat wilayah kecamatan yang belum memiliki SMA. Akses ke sekolah yang lebih tinggi sulit dicapai karena secara geografis berupa pegunungan dan hutan.

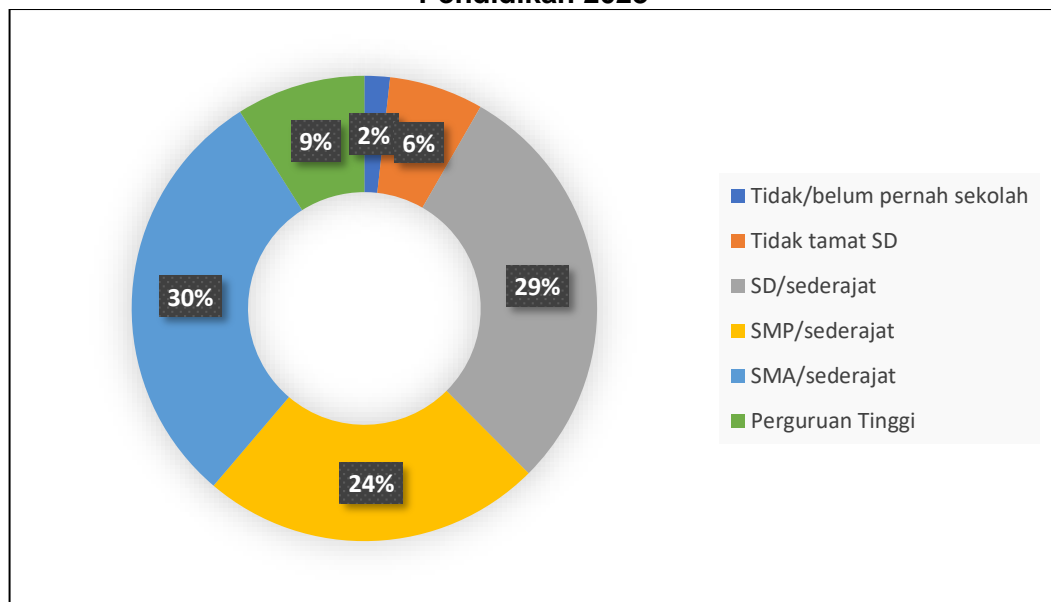
Gambar 19. RLS per Kabupaten/kota Jawa Barat 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Berdasarkan persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat, mayoritas penduduk Jawa Barat merupakan lulusan SMA/ sederajat yang mencapai 29,80 persen. Namun yang lulus SD/ sederajat juga hampir sama mencapai 29,20 persen. Selanjutnya, penduduk yang lulus SMP/ sederajat 23,69 persen. Hanya 8,97 persen penduduk yang berpendidikan mencapai perguruan tinggi. Kejadian anak tidak lulus SD di Jawa Barat mencapai 6,55 persen dan masih terdapat anak tidak/ belum pernah sekolah 1,77 persen (Grafik 20).

Gambar 20. Persentase Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023



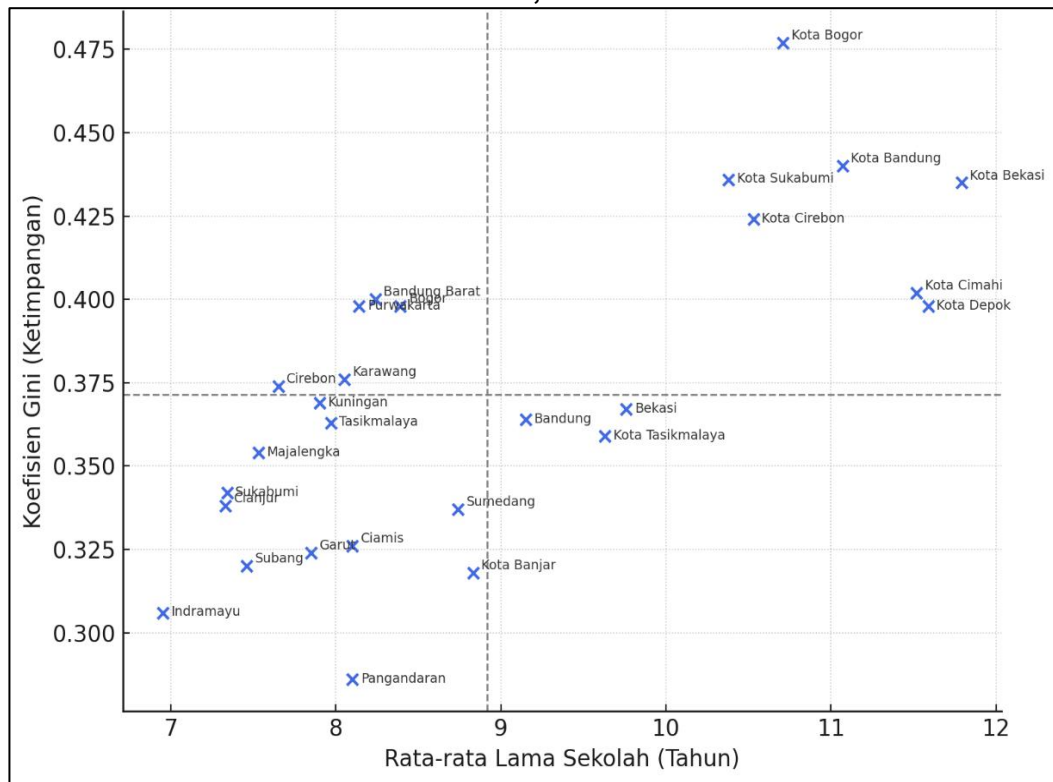
Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2023

Berdasarkan data Susenas 2024, dari semua tingkat ekonomi rumah tangga terdapat 4,21 persen individu di atas 5 tahun tidak/ belum pernah bersekolah yang mencapai jumlah 2.002.384 orang. Dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangganya, pada desil 1 terdapat 6,04 persen atau mencapai 278.549 orang. Pada desil 2 sampai dengan 7 terdapat diatas 4 persen, desil 8 sampai 10 menurun. Persentase penduduk di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah SD terbanyak terjadi pada desil 1 mencapai 6,52 persen sebanyak 336.420 orang.

Terdapat tujuh kabupaten yang persentase penduduk di atas 5 tahun tidak/ belum pernah bersekolah mencapai diatas rata-rata provinsi Jawa Barat atau diatas 4,21 persen. Kabupaten Indramayu (10,12 persen), Cirebon (6,54 persen), Subang (5,15 persen), Karawang (4,99 persen), dan Bekasi (4,93 persen) merupakan 5 kabupaten dengan persentase penduduknya tertinggi yang tidak bersekolah. Secara karakteristik daerah kabupaten yang terdiri dari desa-desa masih banyak anak diatas 5 tahun tidak/ belum pernah bersekolah. Berdasarkan tinjauan lapangan ke BP4D

Subang, penyebab utama anak putus SD di tingkat kabupaten adalah ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan yang mensyaratkan tingkat kelulusan sekolah dan ijazah, perundungan (*bullying*), pernikahan dini, dan *mindset* penduduk setempat yang tidak merasa penting berpendidikan tinggi.

Gambar 21. Analisis Kuadran: Rata Lama Sekolah vs *Gini Ratio* di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Grafik kuadran yang menggambarkan hubungan antara Rata-rata Lama Sekolah dan *Gini Ratio* di Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan kabupaten dengan struktur ekonomi agraris. Garis vertikal menandai rata-rata RLS provinsi sekitar 9 tahun, sementara garis horizontal menunjukkan rata-rata *Gini Ratio* sekitar 0,37. Pembagian kuadran ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kualitas pendidikan berkorelasi dengan ketimpangan pada tingkat kabupaten dan kota.

Wilayah yang berada di kuadran kanan atas, seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Cirebon, memperlihatkan kombinasi RLS tinggi namun ketimpangan juga tinggi. Hal ini mencerminkan pola umum di wilayah perkotaan besar, di mana tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, tetapi heterogenitas pendapatan juga besar sehingga menghasilkan rentang ekonomi yang lebih lebar. Fenomena ini konsisten dengan wilayah metropolitan yang memiliki

akses pendidikan baik, tetapi struktur pasar kerja yang kompleks menyebabkan perbedaan penghasilan antarkelompok semakin melebar.

Berbeda dengan itu, kuadran kanan bawah, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Banjar, menunjukkan RLS tinggi namun ketimpangan rendah. Daerah-daerah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik dan pada saat yang sama mampu menjaga ketimpangan tetap terkendali. Hal ini menandakan keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan yang diiringi oleh struktur pendapatan yang relatif merata di masyarakat.

Wilayah di kuadran kiri bawah seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Pangandaran, Subang, Garut, Ciamis, dan beberapa wilayah lainnya menunjukkan RLS rendah dan ketimpangan rendah. Daerah ini sebagian besar merupakan wilayah agraris dengan tingkat pendidikan lebih terbatas, namun struktur pendapatan cenderung seragam sehingga ketimpangan tidak terlalu tinggi. Homogenitas sumber penghidupan di sektor pertanian menyebabkan distribusi ekonomi relatif lebih merata.

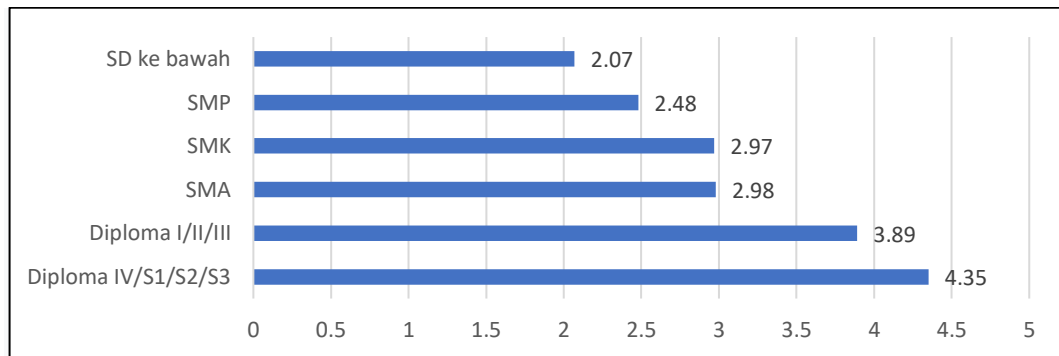
Adapun kuadran kiri atas, yang mencakup wilayah seperti Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Kuningan, dan sebagian Kabupaten Cirebon, memperlihatkan kondisi pendidikan rendah tetapi ketimpangan tinggi. Wilayah ini umumnya berada pada fase transisi ekonomi, di mana sebagian masyarakat masih memiliki pendidikan rendah sementara sebagian lainnya terlibat dalam sektor industri atau jasa yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Ketidakseimbangan ini menghasilkan ketimpangan yang lebih besar dibanding wilayah agraris murni.

Secara keseluruhan, pola yang terlihat dalam grafik menunjukkan bahwa pendidikan berhubungan erat dengan ketimpangan, tetapi arah korelasinya tidak selalu linier. RLS yang tinggi tidak otomatis menurunkan Gini, terutama pada wilayah urban, karena ketimpangan lebih banyak dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan komposisi tenaga kerja. Sebaliknya, wilayah agraris dengan RLS rendah tetap bisa memiliki ketimpangan rendah karena keseragaman sumber pendapatan. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendidikan, tetapi juga pemerataan kesempatan ekonomi agar peningkatan kualitas SDM benar-benar diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan.

Implikasi dari masih tingginya anak-anak berpendidikan rendah adalah pada tingkat kesejahteraan kedepannya. Secara umum mereka tidak mampu berkompetisi pada pasar kerja yang semakin menuntut tingkat keilmuan dan keterampilan tinggi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Orang dengan pendidikan semakin rendah, maka gaji yang diperolehpun juga rendah (Gambar 22). Sebaliknya mereka hanya

akan bekerja pada sektor yang tingkat kompetensinya rendah, dan tidak memerlukan syarat kelulusan sekolah.

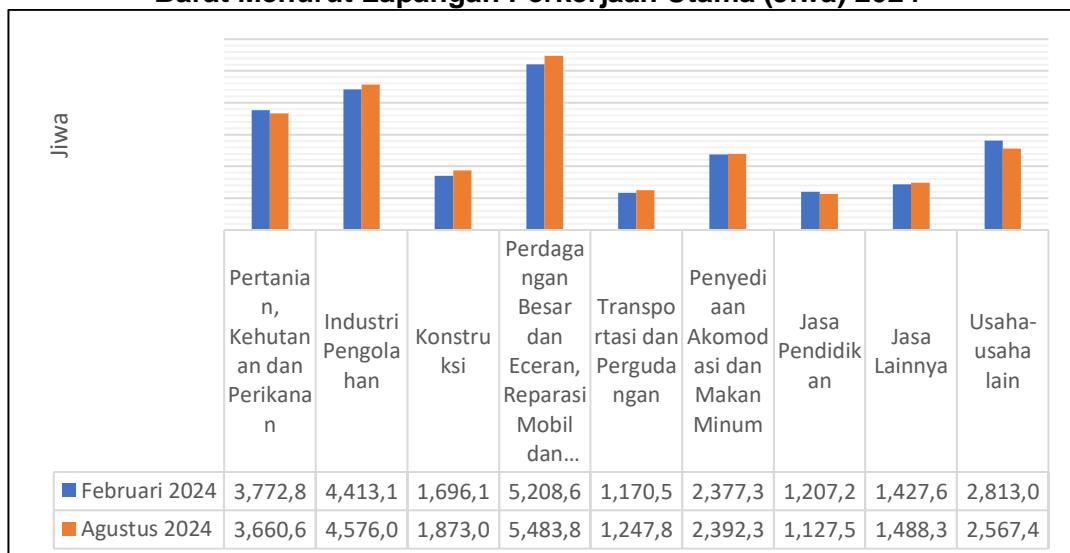
Gambar 22. Rata-rata Gaji yang Diperoleh Berdasarkan Pendidikan 2024 (Dalam Juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Februari 2025

Rendahnya pendidikan berimbas pada lapangan pekerjaan yang dapat menampung mereka. Dilihat dari lapangan pekerjaannya untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar pada lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil; industri pengolahan; dan pertanian (Gambar 22). Dengan banyaknya penduduk berpendidikan SMA/ sederajat kemungkinan mereka yang bekerja pada sektor industri adalah karyawan pabrik yang memerlukan ijazah tingkat SMA. Hanya kelompok berpendidikan tinggi (lulusan D1 sampai dengan S3) sekitar 8,97 persen (Gambar 22) dapat menduduki tingkat manajerial atau menjadi pemilik usaha dan dapat menikmati ekonomi layak. Kelompok ini terutama tinggal di perkotaan seperti kota Bogor, Bandung, Depok (grafik diatas).

Gambar 23. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa) 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Sektor pertanian masih menduduki lapangan kerja ketiga meskipun semakin menurun jumlahnya. Penduduk yang bekerja di pertanian berkorelasi dengan masih banyaknya penduduk berpendidikan SD. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian bahwa petani Indonesia sampai dengan saat ini masih didominasi oleh petani kolonial dengan tingkat pendidikan rendah. Sebanyak 70 persen petani Indonesia hanya tamatan SD, bahkan tidak tamat SD atau tak sekolah, 17 persen lulus SMP, 15 persen lulus SMA, dan kurang dari 2 persen lulus perguruan tinggi (Tuter, 2023). Petani di Jawa Barat sesuai dengan lokasi pekerjaannya bertempat tinggal di perdesaan di kabupaten, dengan status pendidikan rendah, dan secara ekonomi termasuk masyarakat rentan. Di perdesaan angka ketimpangannya rendah disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan rendahnya pendapatan petani.

Masalah pendidikan provinsi Jawa Barat tampaknya cukup serius karena masih rendahnya pendidikan akhir tinggi yang dicapai masyarakatnya bahkan belum mencapai wajib belajar 12 tahun. Untuk mencari penyebab RLS masih belum tinggi dan meningkatkan HLS agar lebih tinggi kedepannya, perlu dicermati juga data pendidikan yang lainnya untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai profil SDM di Jawa Barat.

Akses Layanan Pendidikan

Gambaran persoalan pendidikan di Indonesia secara umum telah dituangkan dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045, bahwa faktor utama penyebab dari tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS) antara lain yaitu keterbatasan akses dan jangkauan layanan pendidikan, serta kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja selain ekonomi dan kemiskinan, hambatan sosial budaya dan persepsi yang salah terhadap pendidikan.

Salah satu penyebab masih banyaknya anak yang tidak bersekolah adalah ketersediaan infrastruktur pendidikan. Dilihat dari ketersediaan jumlah infrastruktur pendidikannya, berdasarkan data BPS jumlah sekolah SD, SMP dan SMA/SMK dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Dapodik (data semester ganjil 2024), terdapat sebanyak 30.331 sekolah Jawa Barat terdiri dari 19.775 negeri dan 10.556 swasta atau mencapai 13,72 persen dari sekolah di Indonesia (tabel 1). Jumlah tersebut belum termasuk pesantren atau sekolah agama yang berada dibawah kewenangan Kementerian Agama. Untuk jenjang pendidikan mulai dasar sampai menengah atas baik negeri maupun swasta jumlah sekolah di Jawa Barat merupakan yang terbanyak di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan kepadatan penduduknya yang merupakan yang terpadat di Indonesia.

Tabel 13 Jumlah SD, SMP, SMA/SMK Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia Semester Ganjil 2024

Provinsi	SD			SMP			SMA dan SMK		
	Negeri	Swasta	Negeri & Swasta	Negeri	Swasta	Negeri & Swasta	Negeri	Swasta	Negeri & Swasta
Jawa Barat	16,980	2,558	19,538	1,993	4,058	6,051	802	3,940	4,742
Jawa Tengah	17,254	1,343	18,597	1,771	1,685	3,456	601	1,814	2,415
Jawa Timur	16,864	2,111	18,975	1,737	3,311	5,048	720	2,956	3,676
Indonesia	129,284	19,750	149,034	24,076	19,022	43,098	10,888	18,112	29,000

Sumber: BPS, Kemendik Ristek

Namun demikian, berdasarkan hasil tinjauan lapangan ke Kabupaten Sumedang diperoleh informasi bahwa kondisi geografi Jawa Barat di beberapa wilayahnya berupa hutan dan berbukit. Penduduk yang tinggal di perbukitan dan hutan sulit mengakses pendidikan formal yang tinggi karena letak sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Dengan demikian anak-anak mengalami kesulitan mencapai sekolah. Kesenjangan pendidikan antar kabupaten/kota juga terjadi karena masih terdapat 14 kecamatan yang belum memiliki sekolah jenjang SMA/SMK sebagaimana disampaikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Jadi faktor geografis berpengaruh pada tingkat pendidikan.

Untuk pendidikan tinggi, Jawa Barat sebenarnya memiliki perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Dari data BPS yang berasal dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pada bulan Desember 2024 tercatat sebanyak 367 perguruan tinggi yang terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berjumlah 12 dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berjumlah 355. Untuk jumlah perguruan tinggi negeri, Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah Jawa Timur.

Tabel 14 Provinsi dengan Jumlah Perguruan Tinggi Terbanyak di Indonesia 2024

Provinsi	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta
Jawa Barat	12	355	367
Jawa Timur	17	327	344
DKI Jakarta	4	246	250
Jawa Tengah	9	232	241
DI Yogyakarta	5	100	105
Indonesia	125	2.812	2.937

Sumber: BPS dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dilihat dari lokasinya, dari 12 perguruan tinggi negeri yang ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 5 diantaranya berada di kota Bandung, dan 7 lainnya tersebar di 2 kota lainnya yakni Depok dan Bekasi; dan 5 kabupaten Bogor, Sumedang, Indramayu, Kerawang, Tasikmalaya. Selain perguruan tinggi negeri, kota Bandung menjadi pusat perguruan tinggi swasta, terdapat 84 kampus. Di kota dan kabupaten Bekasi masing-masing terdapat 25 dan 24 perguruan tinggi swasta.

Sedangkan di kota Depok terdapat 18 dan kabupaten Bogor 31 perguruan tinggi swasta. Terdapat 173 perguruan tinggi swasta lainnya berlokasi tersebar di kota dan kabupaten lainnya. Pangandaran adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, hanya terdapat 1 perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Agama. Sebaran perguruan tinggi lebih terpusat di perkotaan. Daerah-daerah yang banyak perguruan tingginya seperti kota Bandung, Bekasi, dan Depok sebagian perekonomiannya juga memiliki pola keterkaitan dengan aktivitas perguruan tinggi seperti percetakan dan foto *copy*, kost-kostan, rumah sakit, warung makan, *laundry*.

Tabel 15 Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jawa Barat, 2024

Kabupaten/Kota	Negeri	Swasta	Negeri dan Swasta
Kota Bandung	5	84	89
Kota Bekasi		25	25
Kota Depok	1	18	19
Kota Bogor		16	16
Kota Cirebon		13	13
Kota Sukabumi		11	11
Kota Cimahi		7	7
Kota Tasikmalaya	1	11	12
Bogor	1	31	32
Bekasi		24	24
Cirebon		17	17
Karawang	1	13	14
Purwakarta		13	13
Indramayu	1	9	10
Subang	1	7	8
Kabupaten/kota lainnya	1	56	57
Provinsi Jawa Barat	12	355	367

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Beban Guru

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah belum meratanya distribusi dan kualitas guru. Peran guru sangat sentral dalam menentukan capaian pendidikan. Dengan jumlah penduduk terbesar, jumlah murid SD di Jawa Barat juga terbanyak. Pada data Dapodik semester ganjil 2024 menunjukkan bahwa beban guru SD negeri di Jawa Barat adalah yang terbesar, rata-rata seorang guru SD mengajar 22 murid. Jika jumlah tersebut dikumpulkan dalam satu kelas, maka setiap guru wali kelas SD negeri menangani sekitar 22 murid. Beban rata-rata setiap guru SD negeri Jabar terbesar dibandingkan dengan SD swastanya sebanyak 16 murid,

bahkan dibandingkan dengan rata-rata beban guru negeri nasional yang hanya 14 murid. Berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, beban mengajar guru negeri lebih kecil dibandingkan dengan SD swasta. Beban mengajar guru SD juga terbesar dibandingkan dengan jenjang sekolah menengah.

Tabel 16 Beban Mengajar Guru SD Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024

Provinsi	Guru		Murid		Beban guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jawa Barat	176.060	38.508	3.892.560	620.397	22,11	16,11
Jawa Tengah	149.403	17.716	2.259.455	319.228	15,12	18,02
Jawa Timur	156.671	25.269	2.097.016	404.776	13,38	16,02
Indonesia	1.403.632	237.232	20.133.151	3.865.281	14,34	16,29

Sumber: BPS, Kemendik Ristek (Dapodik)

Jika diperhatikan tabel 15, 16, dan 17, beban mengajar guru negeri menurun, dan terendah adalah guru SMK negeri sebanyak 19,09 murid. Namun beban mengajar guru negeri di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan guru swasta pada setiap jenjang pendidikan dan jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tabel 17 Beban Mengajar Guru SMP Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024

Provinsi	Guru		Murid		Beban guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jawa Barat	55.077	42.062	1.175.708	685.056	21,35	16,29
Jawa Tengah	51.534	18.095	936.459	282.405	18,17	15,61
Jawa Timur	48.181	31.707	820.294	421.917	17,03	13,31
Indonesia	533.197	188.683	7.350.167	2.753.336	13,79	14,59

Sumber: BPS, Kemendik Ristek (Dapodik)

Tabel 18 Beban Mengajar Guru SMA Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024

Provinsi	Guru		Murid		Beban guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jawa Barat	26.885	17.673	541.246	301.514	20,13	17,06
Jawa Tengah	18.396	7.698	347.588	115.960	18,89	15,06
Jawa Timur	21.353	13.634	358.942	200.372	16,81	14,70
Indonesia	263.498	96.512	3.984.997	1.415.170	15,12	14,66

Sumber: BPS, Kemendik Ristek (Dapodik)

Tabel 19 Beban mengajar guru SMK Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia di Semester Ganjil 2024

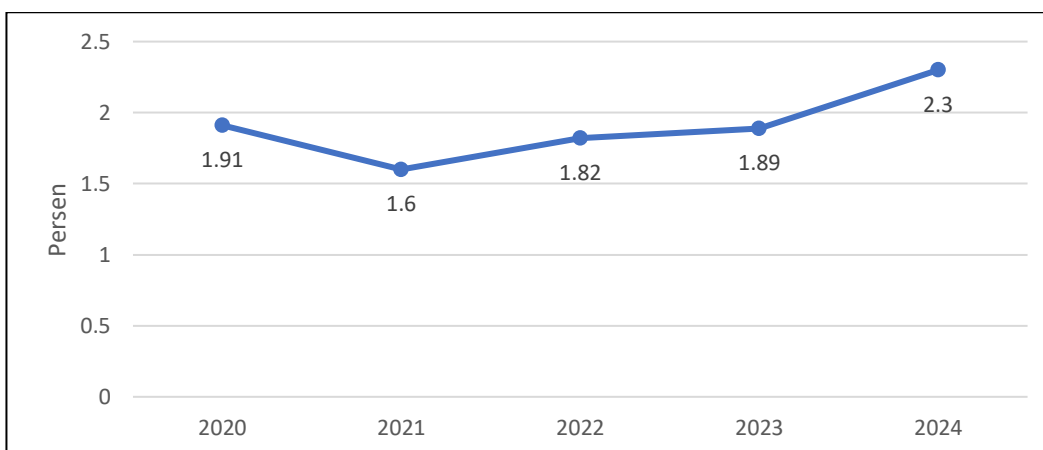
Provinsi	Guru		Murid		Beban guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jawa Barat	18.326	38.948	349.760	708.862	19,09	18,20
Jawa Tengah	16.996	28.710	303.453	519.577	17,85	18,10
Jawa Timur	21.302	27.337	352.073	433.914	16,53	15,87
Indonesia	176.235	161.071	2.433.182	2.633.242	13,81	16,35

Sumber: BPS, Kemendik Ristek (Dapodik)

Masalah Keluarga

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya fungsi keluarga dalam memberikan motivasi kepada anak untuk menempuh pendidikan tinggi. Data Kementerian Agama yang dihimpun BPS menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati posisi tertinggi angka perceraian nasional, yakni 88.842 kasus dari total 304.608 kasus pada 2024 (22,5 persen). Di sejumlah kabupaten seperti Indramayu dan Bandung Barat, yang menjadi kantong pekerja migran, banyak anak ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Kondisi keluarga yang tidak utuh ini meningkatkan kerentanan perkembangan psikososial anak. Anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri atau mengalami perceraian umumnya tinggal bersama nenek atau kerabat. Dalam banyak kasus, mereka turut bekerja membantu perekonomian keluarga meskipun masih berusia sekolah. Data BPS menunjukkan bahwa proporsi anak bekerja usia 10–17 tahun di Jawa Barat meningkat dari 1,6 persen pada 2021 menjadi 2,3 persen pada 2024. Tren ini berpotensi memperbesar jumlah anak yang putus sekolah.

Gambar 24. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Di Provinsi Jawa Barat, 2021-2024



Sumber: BPS (Diolah)

Minimnya dukungan dari keluarga utamanya dari orang tua kandung dapat menghambat perkembangan anak dan menciptakan demotivasi anak untuk sekolah. Bahkan kondisi yang lebih buruk dari anak-anak tanpa pengawasan orang tua dapat memicu munculnya berbagai masalah sosial seperti ketidakstabilan sosial dalam masyarakat, sehingga mendorong anak-anak terjerumus ke dalam masalah sosial serius yang merugikan dirinya sendiri dan negara. Berbagai macam masalah ini mengakibatkan banyaknya anak yang menghadapi kesulitan beradaptasi di lingkungan pendidikan, mengalami penurunan prestasi, dan lebih rentan terhadap risiko putus sekolah. Hal itu mungkin menjadi salah satu penyebab masih banyaknya anak-anak yang tidak/belum pernah mengenyam pendidikan atau berpendidikan rendah. Selain itu, tercatat dari data BPS yang menunjukkan angka tawuran anak pelajar di Jawa Barat adalah yang tertinggi yang terjadi di 37 desa/kelurahan pada 2021.

Permasalahan pendidikan di Jawa Barat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, meskipun jumlah sekolah dan perguruan tinggi sudah relatif memadai. Kondisi geografis yang beragam dan menantang turut memengaruhi aksesibilitas siswa dan guru serta menghambat pemerataan layanan pendidikan. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan telepon genggam oleh peserta didik, sebagaimana disampaikan Pemerintah Kabupaten Sumedang, menjadi faktor tambahan yang memengaruhi kualitas proses belajar. Tantangan sosial juga semakin besar akibat tingginya angka perceraian serta meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja sebagai migran luar negeri, yang berdampak pada stabilitas dan fungsi pendampingan keluarga terhadap anak. Dalam konteks tersebut, beban kerja guru menjadi semakin kompleks, bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas tetapi juga dalam memberikan perhatian terhadap dinamika informasi yang diakses siswa serta kondisi keluarga yang beragam.

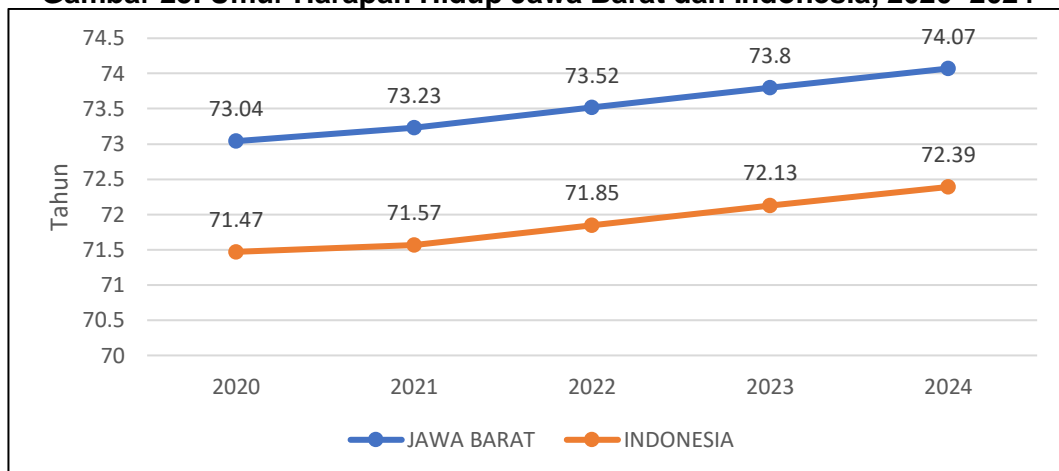
6.2. Kesehatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada Indeks Modal Manusia (IMM) sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH penduduk Indonesia diukur berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan saat ini yang diasumsikan akan berlanjut. UHH yang pendek secara luas mengindikasikan belum tersentuhnya masyarakat terhadap program pembangunan di bidang kesehatan yang mencakup pentingnya kecukupan gizi dan kalori, akses mendapatkan layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, pemahaman terhadap kesehatan lingkungan, kepemilikan fasilitas jaminan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan secara optimal. Jadi UHH bukan hanya mendiskripsikan kondisi kesehatan tetapi juga kondisi ekonomi penduduknya dan infrastruktur yang

mendukungnya. Untuk kajian ini menggunakan data UHH dari BPS karena sudah tersedia data series yang lebih lengkap baik Indonesia maupun provinsi Jawa Barat sampai dengan kabupaten/kotanya.

Berdasarkan perhitungan makro, tingkat kesehatan yang meningkat dapat menurunkan ketimpangan secara signifikan. Secara statistik, peningkatan UHH 1 persen dapat menurunkan *Gini Ratio* sebesar sekitar 1,46-1,71 persen. Umur harapan hidup (UHH) bayi Jawa Barat yang lahir pada 2024 diperkirakan mencapai 74,07 tahun, lebih lama 0,27 tahun dibandingkan dengan UHH pada tahun 2023 (Gambar 25). Sedikit melambat dibandingkan dengan 2022 yang meningkat 0,28 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, UHH Jawa Barat meningkat 1,03 tahun (1,41 persen), lebih panjang dibandingkan UHH Indonesia pada periode yang sama yang meningkat 1,29 tahun (0,92 persen). Peningkatan UHH di Jawa Barat diikuti oleh semua kabupaten/kotanya. Dari 27 kabupaten/kota, sudah 19 kabupaten/kota UHHnya diatas Indonesia.

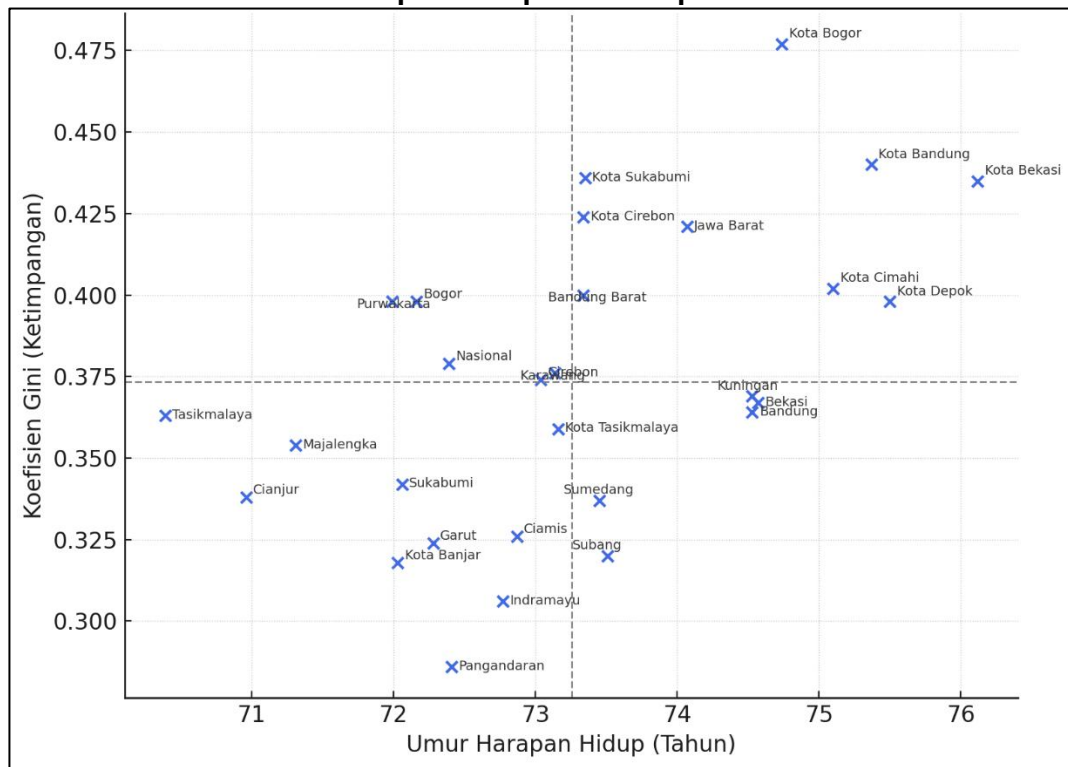
Gambar 25. Umur Harapan Hidup Jawa Barat dan Indonesia, 2020–2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Berdasarkan kabupaten/kotanya, penduduk kota Bekasi memiliki UHH tertinggi yakni 76,12 tahun sedangkan kabupaten Tasikmalaya memiliki UHH terendah yaitu 70,39 tahun. UHH kota Bekasi yang panjang kemungkinan berkorelasi positif dengan fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit (RS). Terdapat 40 RS yang terdiri dari 36 RS umum dan 4 RS khusus (BPS), dan termasuk yang terbanyak jumlah RSnya. Sementara itu, kabupaten Tasikmalaya hanya memiliki 2 RS umum. Kondisi kesehatan penduduk dipengaruhi oleh ketersediaan layanan kesehatan antara lain berupa rumah sakit, meskipun bukan satu-satunya.

Gambar 26. Umur Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Jawa Barat



Sumber: BPS (Diolah)

Grafik kuadran di atas menggambarkan hubungan antara Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Gini Ratio* di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Garis vertikal dan horizontal menunjukkan nilai rata-rata provinsi, yaitu UHH sebesar 73,26 tahun dan *Gini Ratio* sebesar 0,373. Posisi setiap wilayah pada grafik ini mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesejahteraan hidup penduduk dan tingkat ketimpangan ekonomi di daerah tersebut.

Daerah-daerah yang berada di kuadran kanan bawah, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kuningan, menampilkan kombinasi UHH tinggi dan ketimpangan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut menikmati kualitas hidup yang baik dengan distribusi kesejahteraan yang relatif merata. Wilayah seperti ini dapat dikategorikan sebagai daerah berprestasi dalam aspek pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi.

Sementara itu, kuadran kanan atas ditempati oleh daerah seperti Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bogor. Wilayah ini memiliki UHH di atas rata-rata, tetapi dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Artinya, meskipun secara umum masyarakatnya hidup lebih lama, terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup besar di dalamnya. Fenomena ini umumnya muncul di wilayah perkotaan besar yang mengalami pertumbuhan pesat, namun belum diikuti dengan pemerataan pendapatan.

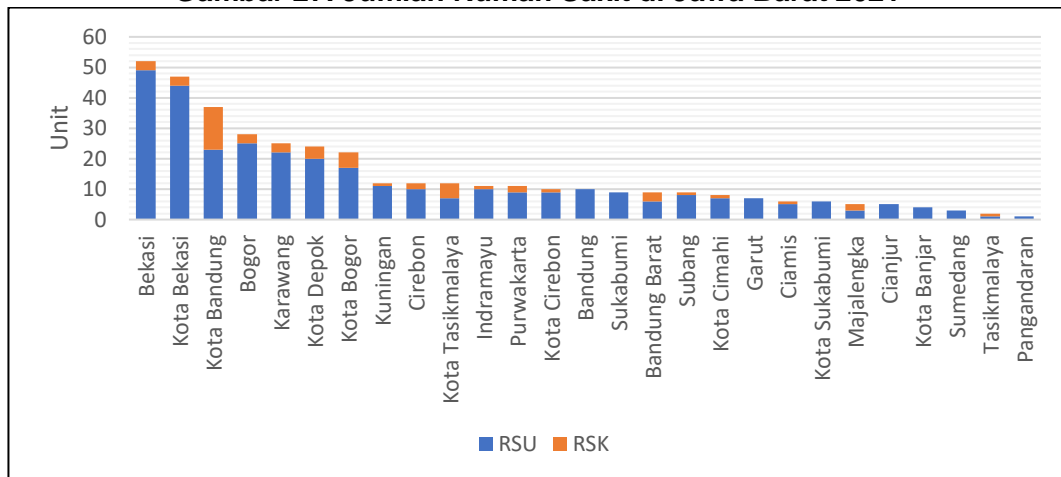
Sebaliknya, kuadran kiri bawah, yang meliputi Kabupaten Pangandaran, Cianjur, Garut, dan Kota Banjar, menggambarkan wilayah dengan UHH rendah dan ketimpangan rendah. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang seragam, namun masih terbatas dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi produktif yang dapat memperpanjang usia harapan hidup.

Terakhir, kuadran kiri atas dihuni oleh beberapa wilayah seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, dan Bandung Barat, yang memiliki ketimpangan tinggi namun UHH di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan pembangunan, di mana sebagian kecil penduduk memperoleh manfaat ekonomi jauh lebih besar dibanding mayoritas penduduk lainnya.

Secara keseluruhan, pola pada grafik ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan di Jawa Barat belum selalu berjalan seiring dengan pemerataan ekonomi. Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa perbaikan kualitas hidup, yang ditunjukkan oleh meningkatnya UHH, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di setiap kabupaten dan kota.

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kemudahan dan ketersediaan fasilitas layanan. Dengan jumlah penduduk terbesar, Jawa Barat memiliki layanan kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang terbanyak di Indonesia. Pada 2023, di Jawa Barat terdapat 345 rumah sakit (RS) yang terdiri dari 281 RS umum dan 4 RS khusus, terdapat 1.100 puskesmas atau mencapai 10,56 persen dari 10.416 puskesmas di Indonesia. Klasifikasi rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi rumah sakit (RS) menyatakan bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus adalah RS yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit. Ketersediaan rumah sakit dan puskesmas merupakan kebutuhan dasar layanan kesehatan bagi masyarakat.

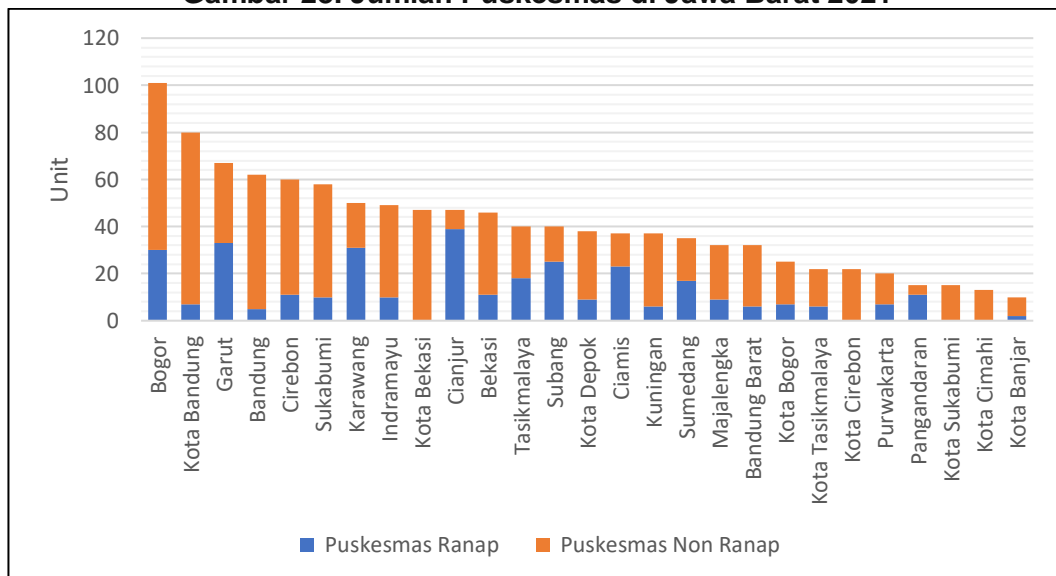
Gambar 27. Jumlah Rumah Sakit di Jawa Barat 2021



Sumber: BPS (Diolah)

Semua kota di Jawa Barat sudah memiliki rumah sakit umum. Kabupaten dan kota Bekasi, kota Bandung, dan kabupaten Bogor memiliki rumah sakit terbanyak baik umum maupun khusus. Daerah yang paling sedikit memiliki rumah sakit adalah Kabupaten Pangandaran yang hanya memiliki 1 unit yaitu RSUD Pandega dan baru diresmikan pada tanggal 4 April 2020. Jumlah puskesmas Pangandaran juga termasuk terbatas. Pangandaran termasuk daerah yang terbatas dalam penyediaan fasilitas rumah sakit dan puskesmas.

Gambar 28. Jumlah Puskesmas di Jawa Barat 2021



Sumber: BPS (Diolah)

Secara umum semua kabupaten/kota Jawa Barat telah terlayani puskesmas. Sebaran puskesmas lebih banyak di kabupaten dibandingkan di perkotaan. Sebagian besar puskesmas sudah menyediakan rawat inap (ranap), hanya 4 kota yang tidak memiliki puskesmas ranap. Kota Bekasi cukup banyak puskesmas namun non ranap kemungkinan karena sudah

banyak tersedia rumah sakit. Dibandingkan dengan daerah lainnya, kota Bandung dan kota Bekasi termasuk daerah yang banyak memiliki rumah sakit dan puskesmas. Puskesmas sebagian besar tidak melayani rawat inap kecuali di kabupaten Cianjur, Garut, dan Karawang.

Berdasarkan buku Profil Kesehatan Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rasio puskesmas terhadap kecamatan Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 1,75, sudah di atas Indonesia yang berada pada 1,4. Rasio puskesmas per kecamatan menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer, minimal terdapat 1 (satu) puskesmas di setiap kecamatan. Dengan adanya puskesmas agar masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan primer. Aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah (Kementerian Kesehatan, 2023). Rasio ideal puskesmas menurut Kemeskes terhadap kecamatan adalah 1,0 yaitu minimal terdapat satu puskesmas di satu kecamatan.

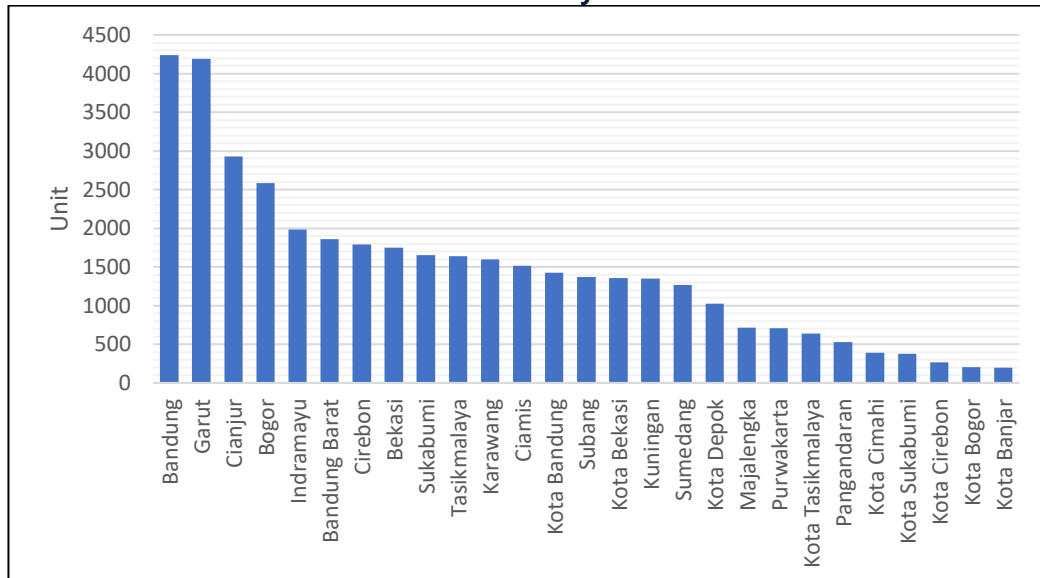
Jawa Barat yang memiliki ratio 1,75 artinya secara regional sudah terpenuhi standar idealnya bahkan kemungkinan terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas, tetapi juga perlu diperhatikan distribusi dari puskesmas tersebut dan kelengkapan obat, tenaga medis, dan cakupan kemampuan memberikan pelayanan. Sebuah Puskesmas dianggap memadai atau memenuhi syarat menurut Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) jika memiliki setidaknya satu orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan yang meliputi: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian (Kementerian Kesehatan, 2024). Hanya 51,8 persen puskesmas di Jawa Barat yang memadai layanan kesehatan primer berdasarkan laporan SISDMK 2023.

Provinsi-provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (100 persen), Kalimantan Selatan (88,8 persen), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (88,4 persen). Jawa Barat dengan penduduk terbanyak (18 persen) di Indonesia ditinjau dari ketersediaan layanan kesehatan berupa puskesmas yang memadai layanan kesehatan primer masih sangat kurang. Kemungkinan masih banyak kecamatan yang belum lengkap tenaga kesehatannya.

Layanan kesehatan selain rumah sakit dan puskesmas terdapat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan kegiatan masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Salah satu tujuan posyandu adalah untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (hamil, melahirkan, nifas). Berdasarkan Permendagri 18 tahun

2018, posyandu termasuk dalam lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (LKD/K) yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa/kelurahan. menurut Laporan Program Prioritas Microsite Promkes tahun 2023, terdapat 304.263 posyandu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Posyandu terbanyak di Jawa Barat terdapat 53.455 posyandu. Posyandu banyak di tingkat kabupaten. Kota Banjar dan kabupaten Pangandaran tidak banyak memiliki posyandu.

Gambar 29. Jumlah Posyandu Jawa Barat



Sumber: BPS (Diolah)

Selain rumah sakit, puskesmas, dan posyandu, ketersediaan sarana penunjang fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan agar paripurna dibutuhkan laboratorium dan obat-obatan yang lengkap. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2023, provinsi Jawa Barat memiliki 290 laboratorium kesehatan atau terbanyak dari 1.487 Laboratorium yang ada di Indonesia. Secara kuantitas, Jawa Barat sudah memiliki banyak laboratorium kesehatan, namun secara lokasi kemungkinan lebih banyak berada di perkotaan. Mencermati masih kurangnya tenaga medis di Jawa Barat utamanya di puskesmas yang tingkat layanan kesehatan primernya baru mencapai 51,8 persen, maka laboratorium-Laboratorium tersebut mayoritas berada di perkotaan.

Ketersediaan obat esensial sangat penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di setiap puskesmas. Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang setiap saat selalu diperbaharui. Ketersediaan obat esensial di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2023 untuk Jawa Barat baru mencapai 81,5 persen, masih dibawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan

Jawa Timur yang sudah mencapai 100 persen. Sedangkan ketersediaan obat esensial untuk tingkat puskesmas di Jawa Barat sudah mencapai 96,2 persen. Namun demikian masih di bawah DI Yogyakarta yang sudah mencapai 100 persen, DKI Jakarta 99,4 persen dan Jawa Timur 99 persen.

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, kepemilikan fasilitas jaminan kesehatan yang cukup akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pengobatan/perawatan kesehatan. Dari sisi kepesertaan jaminan sosial kesehatan, kepesertaan BPJS kesehatan di Jawa Barat tercatat sudah mencapai angka 95,97 persen, dengan sekitar 49 juta peserta hingga April 2024. Meskipun cakupan tinggi, keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Barat baru sekitar 75 persen. Artinya, tidak semua peserta yang terdaftar rutin membayar iuran. Tidak aktifnya peserta diperkuat dengan data BPS bahwa pada 2023 terdapat sekitar 31,99 persen penduduk Jawa Barat tidak mempunyai jaminan kesehatan, jadi kemungkinan mereka adalah peserta yang menunggak iuran (Ahdiat, 2023). Salah satu penyebab belum aktifnya pembayar iuran adalah belum dirasakannya manfaat memiliki jaminan kesehatan BPJS karena belum meratanya puskesmas dan RS, keberadaan laboratorium, kelengkapan tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat esensial sehingga penduduk belum sepenuhnya dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Penduduk masih menghadapi kesulitan menjangkau puskesmas dan rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut kemungkinan juga menjadi pemicu tingginya pengeluaran kesehatan dari kantong pribadi (*Out of Pocket/OOP*) di Jawa Barat.

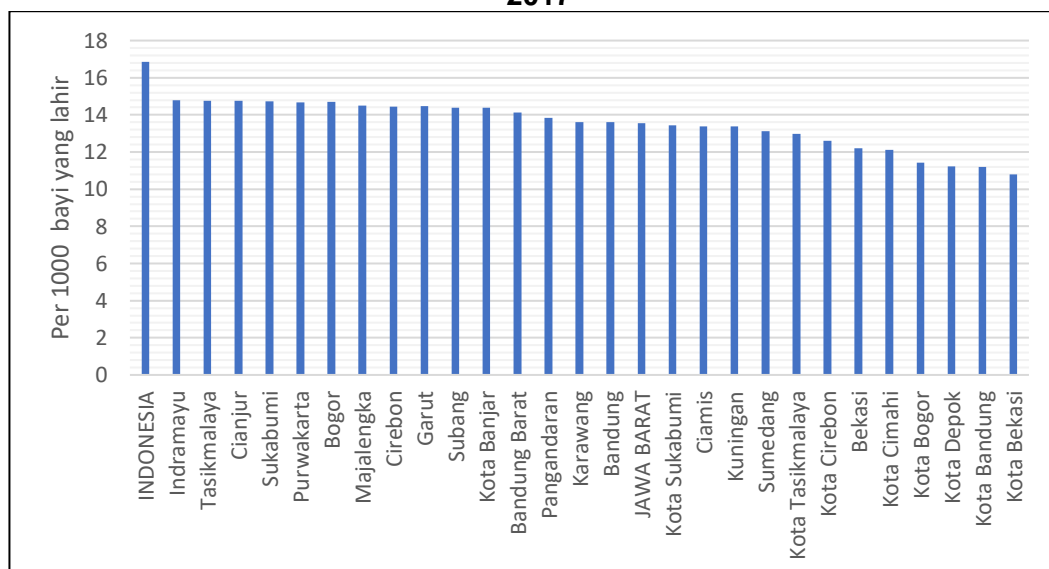
Meskipun jumlah rumah sakit, puskesmas, posyandu, laboratorium termasuk yang terbanyak di Indonesia, namun berdasarkan data BPS tahun 2022, penduduk Jawa Barat berada di peringkat ketiga dengan pengeluaran kesehatan dari kantong pribadi atau OOP dalam skala nasional. Rata-rata OOP untuk kesehatan per kapita Jawa Barat mencapai Rp19.439,00 per bulan atau lebih mahal dari rata-rata nasional yaitu Rp16.286,00 per bulan (Shafina, 2023). Menurut BPS, pengeluaran dari kantong pribadi (OOP) merupakan pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan oleh rumah tangga secara mandiri untuk pelayanan kesehatan. OOP adalah pengeluaran langsung yang dilakukan oleh individu ke penyedia layanan kesehatan pada saat menggunakan layanan, bukan merupakan *pre-payment* untuk layanan kesehatan seperti premi atau kontribusi asuransi tertentu (WHO, 2020). Biaya langsung atau OOP dapat dibagi menjadi dua yaitu biaya langsung medis yang berupa biaya pendaftaran, obat, perawatan, laboratorium; dan biaya langsung non medis meliputi transportasi, biaya informal lainnya (Thomas dkk., 1982; Yousefi dkk., 2014) dari (Amalia, Endarti, & Widayanti, 2021).

Masih tingginya OOP di Jawa Barat kemungkinan ada kaitannya dengan sebaran/lokasi puskesmas yang tidak semuanya mudah dijangkau

masyarakat, karena kurang lengkapnya fasilitas di puskesmas yang ada, dan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan. Dengan banyaknya penduduk yang belum memiliki BPJS, menghadapi OOP yang masih tinggi, serta belum lengkapnya obat-obatan dan tenaga kesehatan di puskesmas maka kemungkinan menjadi penyebab pada angka kematian bayi (AKB) di Jawa Barat termasuk yang tertinggi diantara provinsi-provinsi di Jawa yang relatif lebih maju dibandingkan dengan provinsi di luar pulau Jawa. Angka kematian bayi (AKB) Jawa Barat berdasarkan BPS longform 2020 yang telah diperbaharui pada 18 Juli 2023 mencapai 13,56 bayi, artinya dari setiap 1.000 bayi yang lahir dengan selamat, sekitar 13 bayi di antaranya meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Angka kematian bayi Jawa Barat lebih rendah dari Indonesia yang berjumlah 16,85 bayi, namun tertinggi diantara provinsi-provinsi di Jawa, DKI Jakarta 10,38 bayi, DI Yogyakarta 10,90 bayi, Jawa tengah 12,77 bayi.

Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat terdapat 12 kabupaten/kota yang telah mencapai dibawah AKB rata-rata provinsinya. AKB yang masih tinggi sebagian besar di kabupaten, terdapat 14 kabupaten dan 1 kota yang AKB-nya masih diatas rata-rata provinsinya. AKB terendah adalah kota Bekasi 10,80, dan di hampir semua kota di Jawa Barat sudah rendah kecuali kota Banjar yang masih pada angka 14,37 dari 1.000 bayi yang lahir. AKB tertinggi di kabupaten Indramayu yang mencapai 14,78 dari 1.000 bayi yang lahir hidup. Dari sisi lokus, secara umum perkotaan memiliki kinerja AKB yang lebih baik. Kementerian Kesehatan mencatat penyebab utama kematian bayi di Indonesia karena gangguan pernapasan, kelahiran prematur, infeksi darah (sepsis neonatorum), serta kelainan bawaan sejak lahir (*malformasi kongenital*).

Gambar 30. Angka Kematian Bayi Per Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 2017

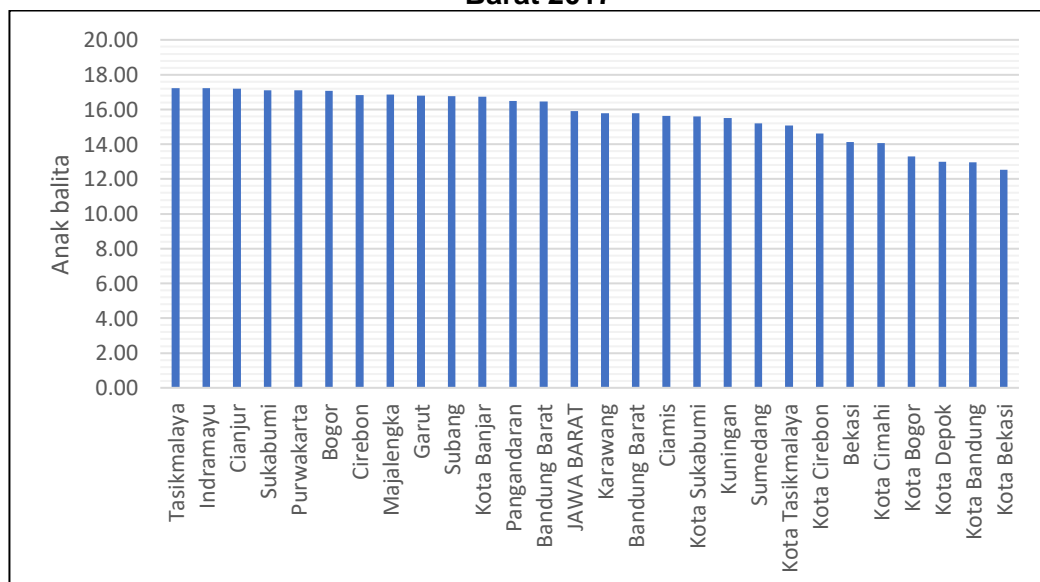


Sumber: SDKI BPS, 2017

Angka Kematian Balita (*Under Five Mortality Rate/U5MR*) hasil long form SP2020 menurut provinsi/kabupaten/kota tahun 2020, provinsi Jawa Barat mencapai 15,91 balita dari 1000 balita lahir hidup, posisinya sudah dibawah angka Indonesia 19,83 balita. Artinya terdapat 16 balita Jawa Barat yang tidak dapat mencapai ulang tahun ke limanya. Angka tersebut apabila disandingkan dengan negara lain termasuk masih tinggi dan tertinggi di antara negara ASEAN. Angka Kematian Balita Jawa Barat merupakan yang tertinggi kedua diantara provinsi-provinsi di pulau Jawa setelah provinsi Banten yang menunjukkan angka 16,15 balita, sedangkan Jakarta 12,02; DI Yogyakarta 12,62; Jawa Tengah 14,81; Jawa Timur 15,64.

Pada tingkat kabupaten kota, baik AKB dan Angka Kematian Balita menunjukkan pola kinerja yang sama, kabupaten/kota yang AKBnya rendah, maka Angka Kematian Balita juga rendah. Terdapat 5 (lima) kota di Jawa Barat (kota Bekasi, Bandung, Depok, Bogor dan Cimahi) yang rendah AKB dan Angka Kematian Balitanya. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, wilayah perkotaan cenderung lebih rendah angka kematian bayi dan balitanya. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan sebaran rumah sakit yang lengkap tenaga medis, laboratorium, dan ketersediaan obat-obatannya.

Gambar 31. Angka Kematian Balita Per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2017



Sumber: SDKI BPS, 2017

Angka kematian bayi dan balita dengan angka kematian ibu (AKI) saling berkaitan. AKI mengukur jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas bukan karena kecelakaan atau penyebab lain. AKI menjadi indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu negara. Berdasarkan longform 2020 SP2020 BPS, AKI Jawa Barat 187 orang sedikit di bawah Indonesia 189 orang, namun lebih tinggi dari Jawa Timur yang mencapai 184 orang,

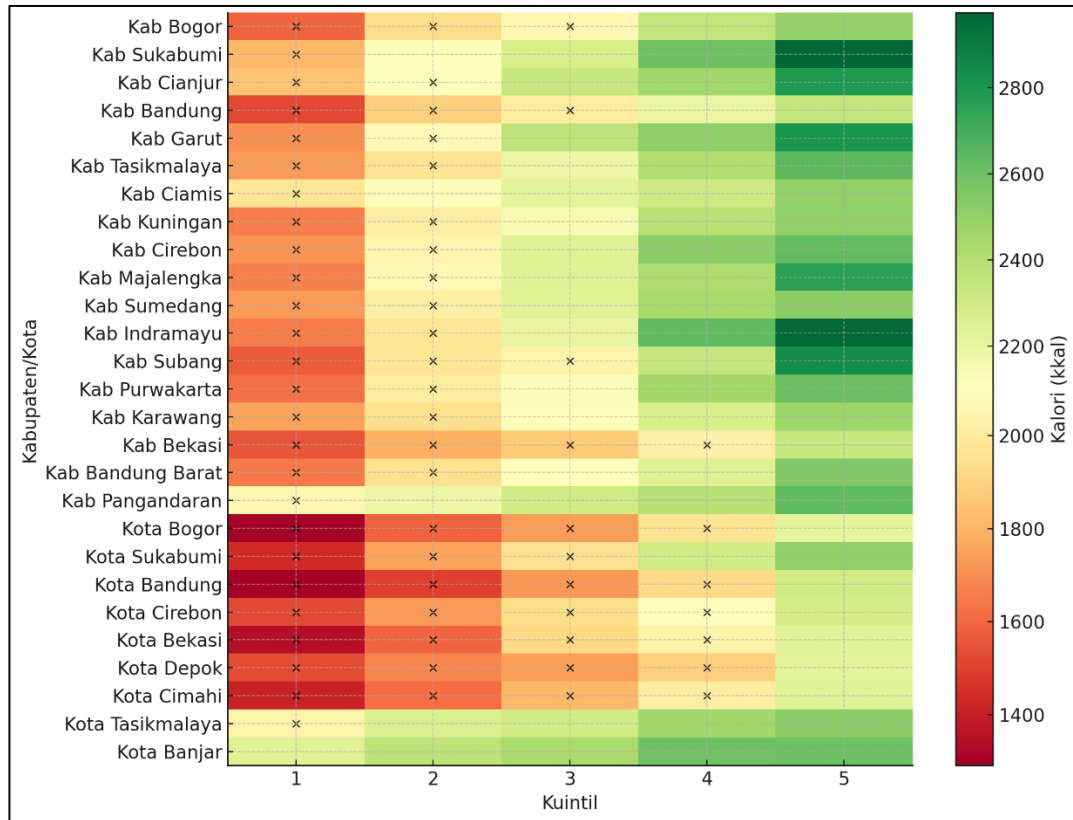
dan jauh lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta yang hanya 48 orang dan Daerah Istimewa Yogyakarta 58 orang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi AKI dan AKB selain ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, biaya kesehatan, dan kualitas pelayanan kesehatan adalah keterpenuhan gizi pada ibu hamil dan bayi. Kondisi gizi berkaitan antara dengan konsumsi sejumlah kalori, dan protein. Asupan makanan yang bergizi akan mendukung fungsi tubuh yang optimal, meningkatkan imunitas, membantu mencegah penyakit. Merujuk pada Permenkes No. 28 tahun 2019 bahwa rata-rata AKG energi adalah 2100 kalori per orang per hari, dan AKG protein adalah 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Asupan kalori nasional secara rata-rata baru mencapai 2051,532 kalori, dan Jawa Barat 2069,916 kalori. Jadi secara nasional dan Jawa Barat masih dibawah standar.

Konsumsi rata-rata kalori Jawa Barat berdasarkan daerahnya, 13 dari 17 kabupaten sudah mencapai diatas 2100 kalori atau sudah memenuhi target yang ditetapkan Kemenkes. Sebaliknya pada tingkat perkotaan baru kota Banjar, Tasikmalaya dan Bekasi yang dapat memenuhi target kalori dari Kemenkes.

Jika dicermati berdasarkan tingkat kesejahteraan kelompok masyarakatnya, hanya kota Banjar, Tasikmalaya, dan kabupaten Pangandaran yang hampir semua penduduknya telah tercukupi target kalori Kemenkes. Secara persebaran ketimpangan kalori cenderung terjadi di kota. Sebagian besar penduduk dengan tingkat penghasilan tinggi di kota belum mampu memenuhi kebutuhan basis penetapan kalori nasional. Di tingkat perkotaan dari kuintil 1 sampai dengan 4 masih belum mencapai standar kalori Kemenkes. Kondisi tersebut terjadi karena ketimpangan pendapatan yang tajam di perkotaan. Sedangkan pada tingkat kabupaten, desil tertinggi hanya sampai kuintil 2 yang belum mencapai standar nasional. Hal tersebut terjadi karena ketimpangan pendapatan di perdesaan yang lebih rendah dan tersedianya pangan dari hasil bumi.

Gambar 32. Heatmap Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Barat, 2024

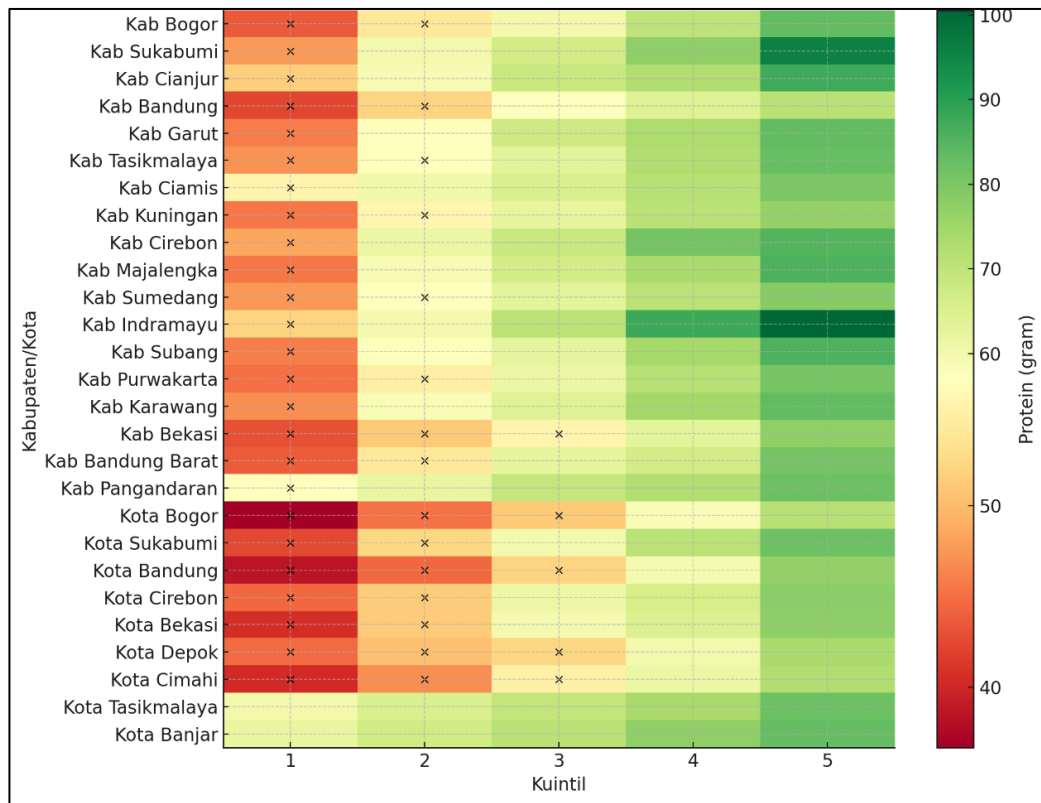


Sumber: BPS, Susenas 2024 (diolah)

Untuk konsumsi protein per kapita per hari penduduk Jawa Barat mencapai 62,25 gram pada 2024 sudah melampaui yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar 57 gram, dan berada di atas rata-rata nasional 61,69 gram per orang per hari. Konsumsi protein penduduk Jawa Barat juga lebih tinggi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun lebih rendah dari DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta. Namun jika dibandingkan dengan capaian kecukupan protein dengan negara sekawasan, Indonesia masih di bawah Malaysia yang sudah mencapai 79 gram per orang per hari.

Konsumsi protein per kapita per hari di perkotaan 61,71 gram per orang per hari, sedangkan perdesaan 64,48 gram. Kecukupan protein dan kalori menunjukkan kecenderungan yang sama, tingkat perkotaan lebih rendah dari perdesaan.

Gambar 33. Heatmap Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS, Susenas 2024 (diolah)

Berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya, konsumsi protein semua kota justru sampai dengan kuintil 3 masih belum mencapai standar protein yang ditetapkan Kemenkes, kondisi tersebut terjadi di kota Bogor, Bandung, dan Depok. Penduduk Kota Banjar dan Tasikmalaya telah mampu memenuhi konsumsi protein di atas ketetapan Kemenkes dan merata sampai dengan kuintil terendah. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Pangandaran dan Ciamis hanya pada desil 1 saja yang belum mencapai standar.

Mengacu pada HCI Bank Dunia, yang menilai kesehatan balita dengan vaksinasi DPT, karena keterbatasan data maka pada kajian ini menggunakan indikator anak umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat imunisasi campak. Di Jawa Barat, Balita yang telah mendapatkan imunisasi campak mencapai 70,7 persen pada 2024. Kinerja tersebut termasuk yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, hanya sedikit di atas Banten (69,32 persen), sedangkan Jakarta 79,7 persen, Jawa Tengah 77,56 persen, dan Yogyakarta 77,86 persen. Bahkan Jawa Barat masih dibawah capaian Indonesia yang mencapai 72,45 persen.

Dari semua indikator kesehatan yang telah dibahas di atas, banyak indikator yang berkaitan dengan kesehatan Jawa Barat yang masih

dibawah capaian kinerja provinsi-provinsi lain di Jawa. Dari kinerja kesehatan bayi dan balita masih di bawah derajat capaian provinsi di Jawa, hal tersebut kemungkinan berkaitan dengan penerimaan imunisasi yang masih rendah. Persebaran rumah sakit antar daerah di Jawa Barat masih belum merata. Rumah sakit yang lengkap masih banyak terfokus di kota-kota dibandingkan dengan di kabupaten. Bahkan Pangandaran hanya memiliki 1 rumah sakit umum dan masih baru saja dibangun. Masih tingginya OPP dan kurang meratanya rumah sakit kemungkinan berpengaruh pada kesehatan ibu, sehingga AKI masih termasuk tinggi. Angka kecukupan gizi di Jawa Barat dan khususnya di perkotaan masih rendah, padahal kota secara umum berpenduduk besar. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa kemungkinan di kota banyak penduduk yang lebih rendah daya belinya, sehingga terjadi jurang kesejahteraan yang besar masyarakatnya.

Untuk meningkatkan UHH penduduk Jawa Barat yang sehat agar berperan lebih besar dalam meningkatkan IPM dan IMMnya maka diperlukan peningkatan distribusi fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan posyandu serta dilengkapi obat, tenaga medis, dan laboratorium kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau penduduk. Perlu juga meningkatkan kelas puskesmas dan posyandu agar pelayanan kesehatan lebih baik dan mengurangi OOP. Untuk memudahkan penduduk dalam mengakses layanan kesehatan perlu tersedianya transportasi yang mudah, dan murah. Dengan demikian penduduk akan semakin menyadari pentingnya memiliki dan memanfaatkan BPJS kesehatan, serta memperoleh edukasi kesehatan untuk keluarga dan lingkungannya.

Dari kinerja pendidikan dan kesehatan yang masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi di Jawa lainnya menjadi penyebab utama ketertinggalan penduduk Jawa Barat. Selanjutnya disparitas kondisi dan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terfokus di perkotaan akan akan menciptakan kesenjangan yang berkepanjangan.

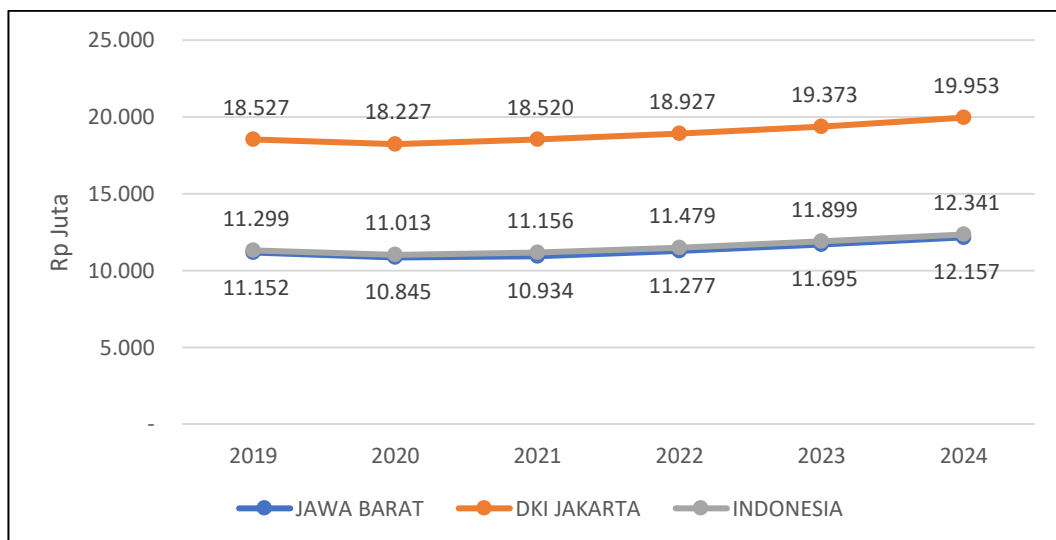
Untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga penduduk Jawa Barat, maka sektor pendidikan harus menjadi prioritas dan dilakukan terus menerus melalui ketersediaan sekolah yang layak dengan guru yang ditingkatkan kualitasnya. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan memberikan penghasilan yang lebih baik, sehingga keinginan penduduk menjadi tenaga migran yang tidak terampil (*unskilled labour*) dapat ditekan. Kondisi keluarga yang kondusif akan meningkatkan kesadaran keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pendidikan yang tinggi dan merata akan berperan meningkatkan kualitas SDM dan membantu menurunkan *Gini Ratio*.

6.3. Pengeluaran Riil Per kapita

Pengeluaran riil per kapita merupakan indikator standar hidup yang terbentuk dari rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Paritas daya beli (PPP) akan membantu membandingkan daya beli barang dan jasa di berbagai negara dengan mengonversikannya ke mata uang yang sama. Selain itu, PPP juga berlaku untuk membandingkan daya beli barang dan jasa antardaerah. Pengeluaran riil per kapita memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan standar hidup dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Besarnya pengeluaran ini menunjukkan seberapa tinggi standar hidup dan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasarnya.

Pengeluaran riil per kapita per tahun Jawa Barat pada tahun 2024, mencapai Rp12,157 juta (grafik 34). Angka ini meningkat sebesar Rp462 ribu (3,95 persen) dibandingkan tahun 2023. Artinya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan daya beli masyarakat Jawa Barat sebesar Rp462 ribu dibandingkan tahun 2023. Dengan meningkatnya daya beli, maka menggambarkan standar hidup dan akses masyarakat Jawa Barat terhadap kebutuhan dasarnya pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,95 persen dibandingkan tahun 2023. Selama periode 2019-2024 pengeluaran riil per kapita Jawa Barat telah meningkat 9,0 persen, sementara nasional yang tumbuh 9,2 persen, dan DKI Jakarta hanya 7,7 persen.

Gambar 34. Pengeluaran Riil Per Kapita Jawa Barat, Jakarta, Indonesia (Juta Rupiah), 2019–2024



Sumber: BPS Jawa Barat

Kinerja pengeluaran riil per kapita per tahun Jawa Barat merupakan rerata dari agregasi per wilayah administratifnya. Pengeluaran riil per kapita per tahun Jawa Barat yang mencapai Rp12,157 juta pada tahun 2024 apabila direrata per bulannya mencapai Rp1,013 juta. Sementara itu, garis

kemiskinan (GK) Jawa Barat pada September 2024 tercatat sebesar Rp535.509/kapita/bulan, artinya bahwa secara rerata masyarakat Jawa Barat mampu membelanjakan di atas garis kemiskinannya. Namun dengan *Gini Ratio* 0,421 yang mulai menuju kategori tinggi, mengindikasikan bahwa terjadi disparitas yang sangat tinggi antara kemampuan daya beli masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah.

Pengeluaran riil per kapita Jakarta tertinggi di Indonesia karena statusnya masih sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Karena lokasinya yang sangat strategis, Jakarta juga tumbuh menjadi kota perdagangan antardaerah dan negara, serta menjadi pusat aktivitas berbagai *event* nasional dan internasional.

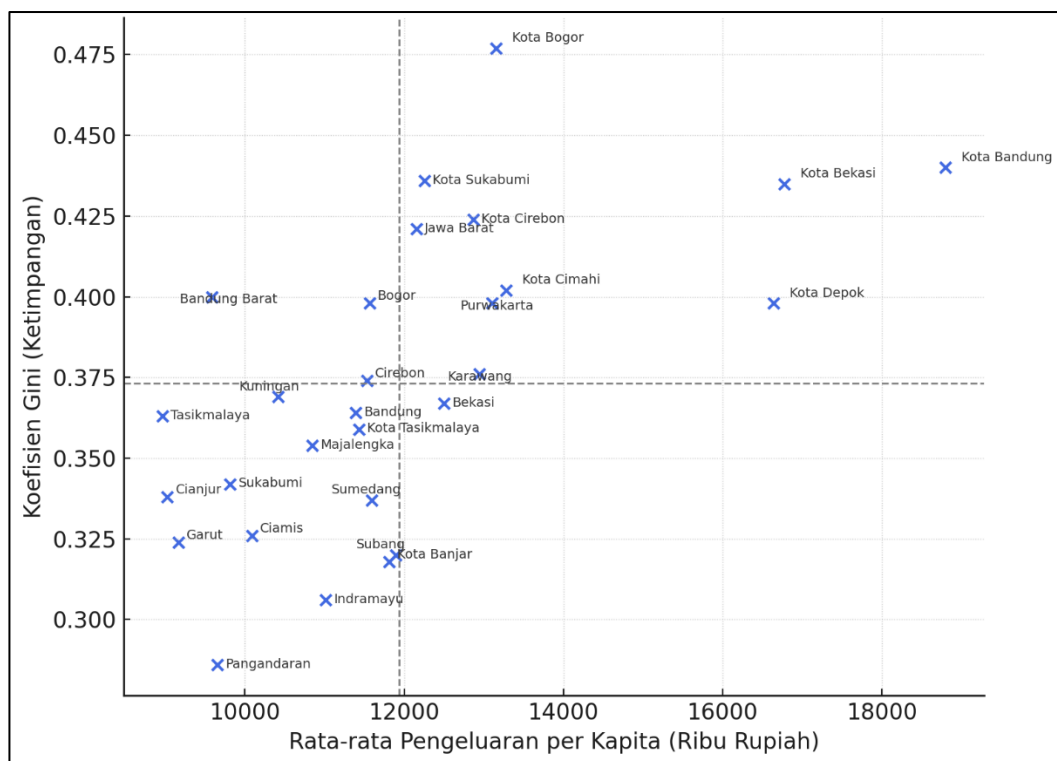
Rata-rata per tahun kontribusi ekonomi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16-17 persen dengan perputaran uang mencapai 70 persen pada 2024 (BPS, 2024). Besarnya jumlah uang beredar selain mengindikasikan besarnya aktivitas ekonomi, juga menggambarkan besarnya potensi daya beli masyarakat. Sebagai kota multiperan, Jakarta menciptakan berbagai aktivitas yang menawarkan berbagai lapangan pekerjaan. Jakarta dihuni oleh masyarakat yang beragam pekerjaannya dari tingkat manajerial sampai dengan keterampilan tingkat bawah atau *unskilled labour*, para pebisnis tingkat nasional dan global berpendapatan tinggi sampai dengan penjual makanan keliling. Semakin beragamnya tingkat ekonomi penduduknya maka memicu tingginya kesenjangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan *Gini Ratio* Jakarta yang merupakan tertinggi di Indonesia, mencapai 0,431 (2024).

Apabila dibandingkan dengan Jakarta, pengeluaran riil per kapita Jawa Barat berada masih jauh di bawahnya, meskipun sangat dekat lokasinya dan menjadi daerah penyangga secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, Jawa Barat menjadi pusat investasi karena memiliki 3 kawasan industri besar seperti Jababeka Cikarang di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, serta KIIC Karawang, dan MM2100 Bekasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, Jawa Barat sedang dipersiapkan untuk dibangun klaster industri dan metropolitan baru yang disebut daerah “Rebana” yang mencakup tujuh kabupaten/kota, yaitu kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon. Kawasan ini diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut akan menjadi penggerak ekonomi yang menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya kawasan industri, Jawa Barat menjadi daerah yang paling menarik bagi investasi. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2024 mencapai 14,7 persen dari total investasi di Indonesia atau senilai Rp251,1 triliun.

Selain menjadi daerah penyangga ekonomi Jakarta, Jawa Barat juga merupakan daerah penyangga sosial. Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, kota Depok, kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi merupakan tempat tinggal bagi para pekerja yang bekerja di Jakarta. Dengan karakteristik umum sebagai hunian para komuter, daerah-daerah tersebut memiliki infrastruktur yang memudahkan mobilitas penduduknya, dan tumbuh menjadi kota-kota satelit. Kota-kota yang menjadi pusat industri dan mengandalkan mayoritas ekonominya pada industri pengolahan cenderung memiliki pengeluaran per kapita tinggi, namun juga diikuti dengan ketimpangan yang tinggi.

Dari 27 kabupaten/kota Jawa Barat, terdapat tujuh kota dan tiga kabupaten yang memiliki pengeluaran riil di atas Rp12,200 juta atau sudah di atas Provinsi Jawa Barat (Gambar 35). Dari sepuluh kabupaten/kota tersebut terdapat tiga kota dengan pengeluaran riil per kapita di atas Rp15,000 juta per tahun (Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok). Sementara itu, terdapat 17 kabupaten/kota dengan pengeluaran riil per kapita masih di bawah Rp12,200 juta atau di bawah pengeluaran riil per kapita pada tingkat provinsi.

Gambar 35. Analisis Kuadran Pengeluaran Per Kapita vs *Gini Ratio*, 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Grafik kuadran di atas memperlihatkan hubungan antara pengeluaran per kapita dan *Gini Ratio* di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Garis vertikal dan horizontal menunjukkan nilai rata-rata provinsi, yaitu sekitar Rp12 juta per kapita per tahun untuk pengeluaran dan 0,37 untuk

Gini Ratio. Posisi tiap daerah pada grafik menggambarkan keseimbangan antara tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Daerah yang berada di kuadran kanan atas, seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang tinggi namun disertai dengan ketimpangan yang besar. Kondisi ini lazim terjadi di kawasan perkotaan besar dan pusat ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya diikuti pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Sementara itu, daerah di kuadran kiri atas seperti Kota Bogor dan Kota Cirebon memiliki ketimpangan yang tinggi, tetapi dengan tingkat pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah dibandingkan kota-kota metropolitan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi cukup berkembang, distribusi kesejahteraan belum merata dan sebagian besar penduduk masih berada pada tingkat konsumsi menengah ke bawah.

Sebaliknya, wilayah yang berada di kuadran kanan bawah, seperti Subang, Sumedang, dan Karawang, menampilkan kondisi yang lebih ideal. Daerah-daerah ini memiliki tingkat pengeluaran yang relatif tinggi dengan ketimpangan di bawah rata-rata provinsi, menggambarkan kesejahteraan yang lebih merata di antara penduduknya. Pola ini dapat menjadi contoh positif bagi wilayah lain dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Adapun wilayah di kuadran kiri bawah, seperti Garut, Cianjur, Sukabumi, dan Pangandaran, menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang rendah disertai dengan ketimpangan yang juga rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang seragam, meskipun masih tergolong rendah.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan di Jawa Barat meningkat seiring naiknya urbanisasi, namun diikuti dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Tantangan utama bagi Jawa Barat ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah perkotaan dapat diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kabupaten dan kota.

Hasil regresi panel menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana peningkatan daya beli masyarakat bekerja dalam konteks sosial ekonomi provinsi ini. Pada dasarnya, peningkatan pengeluaran per kapita yang terjadi secara lebih merata di kabupaten/kota berasosiasi dengan penurunan ketimpangan antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kesejahteraan di Jawa Barat bukan hanya terpusat pada

kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berada pada lapisan pendapatan rendah dan menengah.

Dalam kerangka pembangunan Jawa Barat, karakteristik daerah sangat beragam: wilayah metropolitan seperti Bandung Raya dan Bodebek (Bogor–Depok–Bekasi) memiliki pengeluaran per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten di wilayah Priangan Timur atau daerah selatan seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Pada satu titik waktu, keragaman tersebut membuat scatterplot terlihat berpola positif. Namun ketika variasi struktural ini dikendalikan melalui regresi panel, pengeluaran per kapita terbukti menjadi faktor pendorong pemerataan. Artinya, daerah yang mengalami peningkatan pengeluaran per kapita relatif lebih merata dalam jangka waktu panjang menunjukkan penurunan ketimpangan. Dengan demikian, peningkatan daya beli bukan hanya sekadar dampak dari aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan di tingkat lokal.

Di Jawa Barat, peningkatan pengeluaran per kapita seringkali berkaitan dengan sejumlah program dan dinamika pembangunan, seperti penguatan jaring pengaman sosial, peningkatan upah minimum, berkembangnya UMKM, serta ekspansi lapangan kerja industri dan jasa modern. Ketika program-program ini mendorong peningkatan pengeluaran kelompok rentan, efeknya cenderung menekan ketimpangan. Selain itu, peningkatan pengeluaran per kapita di daerah berkembang seperti Subang, Karawang, dan Purwakarta juga berperan dalam mempersempit ketimpangan antarwilayah, terutama melalui pertumbuhan industri dan integrasi ekonomi yang lebih kuat.

Lebih jauh, hasil regresi panel mencerminkan bahwa pengeluaran per kapita dapat berfungsi sebagai indikator kapasitas konsumsi yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi regional. Kabupaten/kota yang mampu meningkatkan daya beli secara merata biasanya memiliki ketimpangan yang lebih terkendali. Sebaliknya, daerah yang pengeluarannya meningkat hanya pada kelompok tertentu cenderung mengalami ketimpangan yang bertahan atau bahkan meningkat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan peningkatan konsumsi kelompok bawah merupakan strategi yang efektif untuk menekan ketimpangan jangka panjang di Jawa Barat.

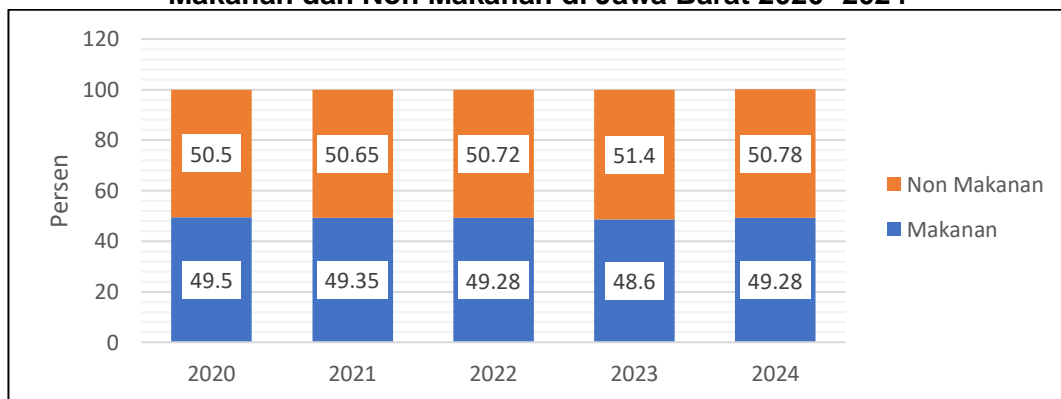
Dengan demikian, temuan regresi panel memperkuat kesimpulan bahwa pengeluaran per kapita bukan hanya indikator kesejahteraan, tetapi juga mekanisme penting dalam proses distribusi pendapatan yang lebih adil. Dalam konteks Jawa Barat, variabel ini menjadi salah satu determinan signifikan penurunan ketimpangan sepanjang waktu, dan memperlihatkan pentingnya kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan sosial yang adaptif guna memperkuat kapasitas konsumsi masyarakat secara luas.

Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan

Persentase rata-rata pengeluaran sebulan per kapita untuk makanan dan non makanan di Jawa Barat pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa pola konsumsi penduduk Jawa Barat cukup seimbang selama lima tahun terakhir, namun sudah cenderung bergeser untuk kebutuhan non makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran tidak terkonsentrasi pada kebutuhan makanan.

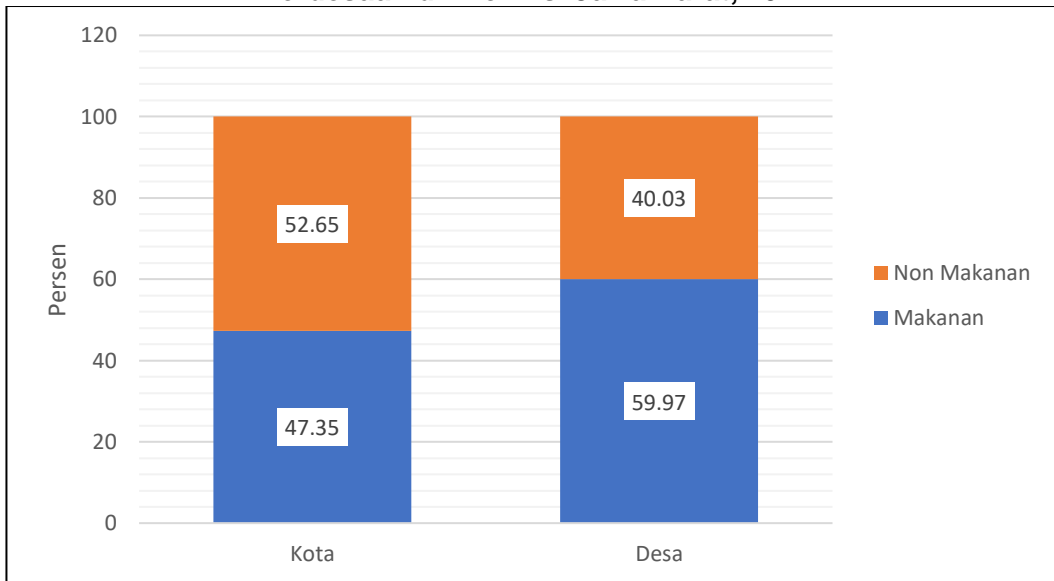
Gambar 36. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Sebulan Per Kapita Untuk Makanan dan Non Makanan di Jawa Barat 2020- 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan non makanan, klasifikasi kota dan desa di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan pola yang berbeda. Meskipun secara provinsi pola belanja penduduknya sudah mulai bergeser untuk memenuhi kebutuhan non makanan, namun dari sisi kabupaten/kotanya menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan yang lebih tinggi cenderung terjadi di perkotaan (52,65 persen dari total pengeluaran di perkotaan), sedangkan pengeluaran di perdesaan masih didominasi untuk kebutuhan makanan (59,97 persen dari total pengeluaran di perdesaan).

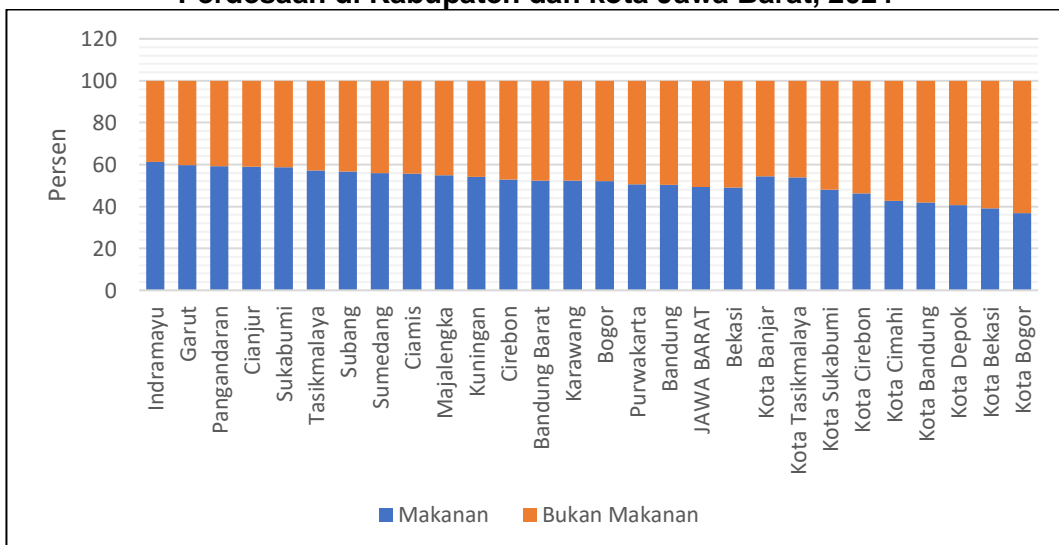
Gambar 37. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan, Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Mayoritas penduduk kabupaten membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan makanan, hanya kabupaten Bekasi yang pengeluaran non makanan lebih tinggi dari makanan pada 2024. Sebaliknya penduduk kota memiliki pola belanja lebih banyak ke non makanan hanya kota Banjar dan Tasikmalaya yang pengeluaran makanan yang lebih tinggi dari non makanan.

Gambar 38. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten dan kota Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Adapun persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di kota dan desa di Jawa Barat pada tahun 2024 untuk dua pengeluaran terbesar menunjukkan pola yang sama, dengan sebagian

besar pengeluaran digunakan untuk membayar perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga di kota mencapai 26,59 persen dari total pengeluaran (makanan dan non makanan) di kota, sedangkan di perdesaan mencapai 21,43 persen dari total pengeluaran (makanan dan non makanan) di perdesaan. Pengeluaran untuk komoditas kedua terbesar selanjutnya adalah makanan dan minuman jadi yang mencapai 17,27 persen di perkotaan dan 18,01 persen di perdesaan.

Berbeda dengan dua pengeluaran terbesar, pengeluaran untuk komoditas terbesar ketiga tidak menunjukkan pola yang sama antara di kota dengan di desa. Di kota, pengeluaran menurut komoditas terbesar ketiga adalah aneka barang dan jasa yang mencapai 13,79 persen, sedangkan di perdesaan adalah rokok dengan angka sebesar 10,10 persen. Di kota, rokok menjadi komoditas terbesar keempat yang dibeli penduduk (mencapai 6,12 persen). Meskipun terdapat perbedaan, persentase belanja rokok di kota dan desa memiliki pola yang sama, yaitu lebih besar daripada pengeluaran untuk beras. Belanja beras di kota mencapai 5,08 persen, sedangkan di desa mencapai 9,01 persen. Adapun pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi menduduki persentase terbesar ketiga di kelompok non makanan, baik di kota maupun di desa (Tabel 20).

Tabel 20 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota dan Desa Jawa Barat 2024 (Rupiah)

Kelompok Komoditas	Kota (Rp)	Desa (Rp)
Makanan		
Padi-padian	88.065	110.353
Umbi-umbian	7.153	6.075
Ikan/udang/cumi/kerang	46.987	41.375
Daging	44.519	30.865
Telur dan susu	43.479	29.246
Sayur-sayuran	54.976	48.234
Kacang-kacangan	16.532	15.883
Buah-buahan	43.600	38.777
Minyak dan kelapa	16.144	15.342
Bahan minuman	21.614	23.739
Bumbu-bumbuan	15.847	14.709
Konsumsi lainnya	16.410	15.801
Makanan dan minuman jadi	299.408	220.617
Rokok	106.174	123.782
Jumlah makanan	820.909	734.798
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	461.035	262.519
Aneka barang dan jasa	239.139	107.655
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	41.758	29.638
Barang tahan lama	67.064	33.429
Pajak, pungutan, dan asuransi	72.964	33.630
Keperluan pesta dan upacara	30.966	23.552
Jumlah bukan makanan	912.925	490.424
Jumlah	1.733.834	1.225.221

Sumber: BPS

Untuk memudahkan melihat profil dan menganalisis per kabupaten/kotanya, maka kondisi pengeluaran riil per kapita per tahun akan dikelompokkan berdasarkan besarnya sebagai berikut:

- Kelompok kabupaten/kota dengan pengeluaran riil per kapita per tahun lebih besar dari Rp15,000 juta;
- Kelompok kabupaten/kota dengan pengeluaran riil per kapita per tahun antara Rp12,000 juta – Rp15,000 juta; dan
- Kelompok kabupaten/kota dengan pengeluaran riil per kapita per tahun lebih kecil dari Rp12,000 juta.

Tabel 21 Kategori Kota/Kabupaten Berdasarkan Besaran Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun

No	Kategori Besaran Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun	Kota/Kabupaten
1	> Rp15,000 juta	Tiga kota: Kota Bandung, Bekasi, dan Depok.
2	Rp12,000 juta - Rp15,000 juta	Empat kota: Cimahi, Bogor, Cirebon, Sukabumi. Tiga kabupaten: Purwakarta, Karawang, dan Bekasi
3	< Rp12,000 juta	Dua kota: Banjar dan Tasikmalaya. 15 kabupaten yakni Subang, Sumedang, Bogor, Cirebon, Bandung, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cianjur, Tasikmalaya.

Sumber: BPS (Diolah)

Kabupaten/kota dengan pengeluaran riil di atas Rp15,000 ribu per kapita per tahun

Terdapat tiga kota dengan pengeluaran riil per kapita per tahun mencapai di atas Rp15,000 juta yaitu Kota Bandung, Bekasi, dan Depok. Selain memiliki pengeluaran riil per kapita per tahun di atas Rp15,000 juta rupiah, angka pengeluaran di ketiga kota tersebut juga mendekati angka pengeluaran di Jakarta (Gambar 35). Bahkan, pengeluaran riil per kapita ketiga kota ini pada tahun 2019 sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita di 24 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat pada 2024. Gap pengeluaran riil per kapita ketiga kota ini dengan 24 kabupaten/kota lainnya sudah tinggi dan sudah berlangsung lama.

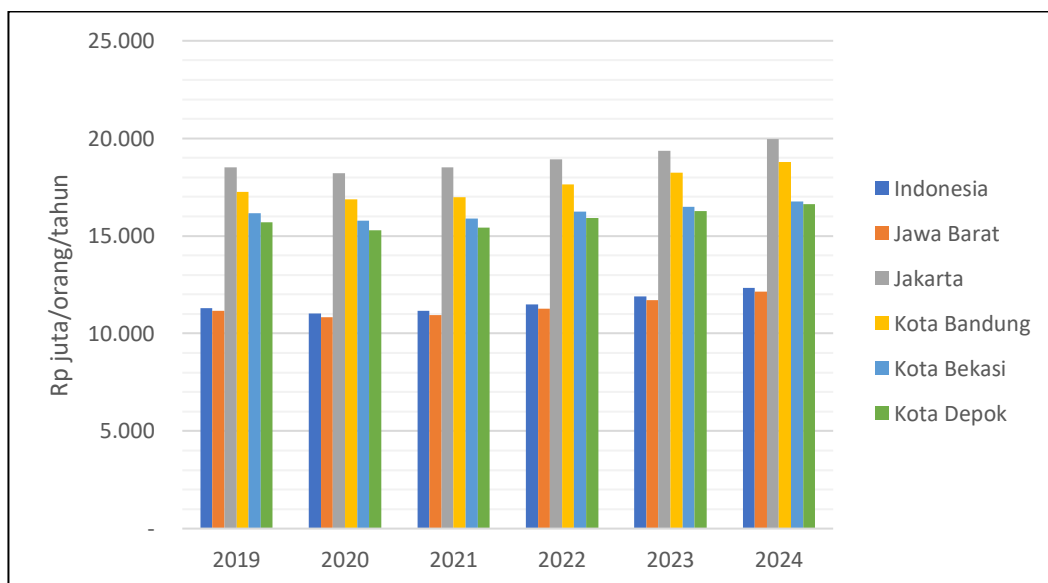
Kota Bandung sebagai ibukota Jawa Barat secara geografis memiliki kelebihan karena berada di jalur utama ekonomi untuk berbagai komoditas barang dan jasa. Hampir semua ibukota provinsi di Indonesia menjadi pusat semua kegiatan dan memiliki kelengkapan infrastruktur yang baik di dalam kotanya, serta keterhubungan dengan provinsi yang lain, begitu pula dengan Kota Bandung. Kota ini memiliki akses dari dan ke Jakarta melalui berbagai moda seperti bus, kereta api, hingga kereta cepat. Selain akses yang mudah ke Jakarta, Bandung juga terhubung dengan Jawa Tengah melalui berbagai moda transportasi.

Selain keterhubungan melalui moda transportasi, Bandung juga memiliki kelebihan pemandangan alam yang indah, pusat perdagangan, dan menjadi tujuan pendidikan karena memiliki banyak perguruan tinggi. Bahkan, jumlah perguruan tinggi di Bandung merupakan terbanyak jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat. Keberadaan perguruan tinggi menjadi magnet bagi berkembangnya industri kreatif, seperti desain grafis, pembuatan konten digital, dan seni pertunjukan yang mendukung ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi sumber perekonomian tersendiri yang dapat memperkuat ekonomi yang sudah ada dan menciptakan perekonomian baru yang lebih menarik. Sehingga, Kota Bandung menjadi

destinasi berbagai aktivitas yang berdampak langsung pada perekonomiannya.

Berdasarkan data BPS, selama periode 2019 – 2024 pengeluaran riil di Kota Bandung adalah yang tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2019, pengeluaran riil di kota ini sebesar Rp17,254 juta per orang, dan meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 18,795 ribu per orang atau tumbuh 9 persen. Seiring dengan peningkatan pengeluaran riil per kapita pertahun, pada kurun waktu yang sama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung juga meningkat sebesar 28,91 persen, dari Rp288,46 juta menjadi Rp371,85 triliun atas dasar harga berlaku (BPS), atau secara rata-rata meningkat 5,78 persen per tahun.

Gambar 39. Pengeluaran Riil Per Orang Per Kapita Indonesia, Jawa Barat, Kota Bandung, Bekasi, Depok, (Ribu Rupiah), 2019–2024



Sumber: BPS (Diolah)

Kota Bekasi dan Kota Depok merupakan dua kota di Jawa Barat yang tingkat pengeluaran riil per kapita pertahunnya tertinggi setelah kota Bandung (grafik 3). Keduanya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta dan menjadi kota penyangga. Besarnya perekonomian Jakarta berdampak langsung ke Provinsi Jawa Barat terutama ke kedua kota tersebut. Sebagai kota penyangga, Kota Bekasi dan Kota Depok dihuni oleh penduduk yang biasanya bekerja di Jakarta. Bahkan, Kota Bekasi dihuni oleh penduduk dengan jumlah terpadat di Indonesia dan menjadi kota terbesar di Jawa Barat. Mayoritas pekerja di Jakarta memilih tinggal di dua kota ini karena biaya hidup dan harga rumah di Jakarta yang semakin tinggi. Selain itu, ditunjang pula oleh kemudahan dan semakin banyaknya alternatif akses transportasi menuju Jakarta.

Selain berdampingan dengan Jakarta, Kota Bekasi juga berdampingan dengan Kabupaten Bekasi. Sebagai kota penyangga dan kota industri, Kota

Bekasi memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang baik karena terdapat 25 perguruan tinggi swasta dan 40 rumah sakit yang terdiri dari 36 rumah sakit umum (RSU) dan empat rumah sakit khusus (RSK). Sebagai kota industri, kota dan kabupaten Bekasi khususnya Cikarang menjadi daerah kawasan industri padat karya.

Pengeluaran riil per kapita per tahun Kota Bekasi selama 2019-2024 tumbuh 3,82 persen, dari Rp16,157 juta menjadi Rp17,775 juta (Gambar 39). Pertumbuhan pengeluaran riil Kota Bekasi termasuk rendah dibandingkan dengan Kota Bandung dan Depok pada periode tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah terjadinya masa pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada penurunan operasional perusahaan selama pandemi dan *recovery* pascapandemi. Penurunan aktivitas perusahaan berdampak pada tenaga kerja yang berhenti bekerja sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan kemungkinan perusahaan melakukan efisiensi jumlah pegawai setelah itu. Meskipun mengalami pertumbuhan pengeluaran riil yang lebih rendah dibandingkan Kota Depok dan Kota Bandung, pada periode yang sama PDRB atas dasar harga berlaku (BPS) Kota Bekasi memiliki tren meningkat cukup tinggi. Pada 2019, PDRB kota Bekasi sebesar Rp 98.107,70 triliun, dan pada 2024 menjadi Rp129.531,90 triliun atau meningkat 31,85 persen serta rata-rata per tahun meningkat 6,34 persen.

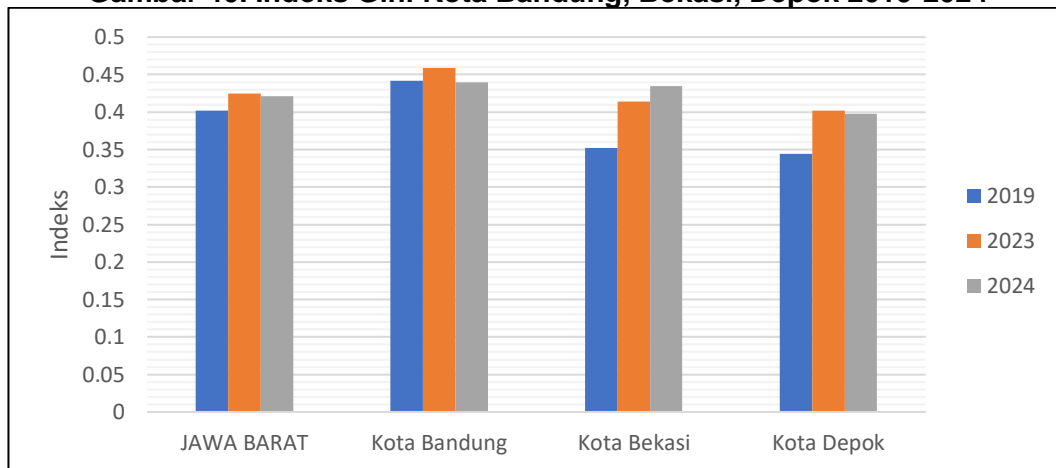
Berbeda dengan Kota Bekasi, pengeluaran riil per kapita per tahun Kota Depok meningkat enam persen selama 2019-2024, dari Rp15,696 juta (2019) menjadi Rp16,640 juta (2024). PDRB Kota Depok juga meningkat pada kurun waktu yang sama, dari Rp70.964,04 miliar menjadi Rp94.149,54 miliar atau tumbuh sebesar 32,67 persen atau rata-rata tumbuh 6,54 persen per tahun. Perekonomian Kota Depok ditopang oleh lapangan usaha industri yang utamanya adalah industri makanan dan minuman, kerajinan, dan pakaian jadi (BPS, 2025).

Kota Depok juga merupakan kota tujuan kuliah karena memiliki satu perguruan tinggi negeri dan 18 swasta di bawah Kementerian Ristek dan Dikti (2021). Adanya perguruan tinggi mendorong tumbuhnya sektor jasa terkait pendidikan antara lain industri percetakan, penyedia buku, alat tulis, dan perlengkapan belajar. Selain itu, sebagai daerah kampus maka mendorong tumbuhnya sektor ritel dan jasa pendukung seperti pusat perbelanjaan dan kuliner berupa restoran, kafe, termasuk warung makan. Dengan adanya kampus maka mendorong pertumbuhan sektor transportasi untuk mobilitas mahasiswa dan staf universitas. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta keunggulan aksesibilitas transportasi yang baik karena terhubung dengan Jakarta melalui jalan tol, angkutan umum kereta listrik dan bus, menjadi daya tarik Kota Depok sebagai pilihan hunian bagi penduduk yang bekerja di Jakarta.

Dengan PDRB tinggi, ditunjang akses pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik, pengeluaran riil per kapita per tahun ketiga kota ini sudah tidak lagi terfokus pada belanja makanan, tetapi sudah ke non makanan. Secara makro, penduduk sudah tercukupi kebutuhan makanannya.

Keterkaitan tingginya IPM dengan *Gini Ratio* 2024 untuk tiga kota tersebut ternyata tidak menunjukkan performa gap pemerataan pendapatan yang sepenuhnya sama. Diantara ketiga kota ini, hanya Kota Depok yang memiliki *Gini Ratio* terendah dibandingkan dengan Kota Bandung dan Kota Bekasi. Bahkan, *Gini Ratio* Kota Depok masih di bawah *Gini Ratio* Jawa Barat (Gambar 50). Pada tahun 2024, capaian *Gini Ratio* Kota Depok sebesar 0,398, sedangkan *Gini Ratio* Jawa Barat sebesar 0,421. Kota Depok merupakan kota dengan IPM tinggi yang didukung oleh komponen pengetahuan, kesehatan, dan pengeluaran riil yang tinggi mampu menekan ketimpangan pendapatan penduduknya. Masyarakat kota Depok relatif memperoleh penghasilan yang merata dan dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan hidup yang layak. Selain itu, jumlah penduduk miskin Kota Depok tahun 2024 menurut BPS mencapai 62,6 ribu jiwa, merupakan jumlah terkecil dibandingkan dengan Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Gambar 40. Indeks Gini Kota Bandung, Bekasi, Depok 2019-2024



Sumber: BPS (Diolah)

Gini Ratio Kota Bandung dan Kota Bekasi lebih tinggi dari Jawa Barat dan sudah di atas 0,4 (masing-masing 0,440 dan 0,435). Kota Bandung menghadapi masalah ketimpangan yang tinggi, namun sudah menunjukkan pola penurunan pada tahun 2024, berbeda dengan Kota Bekasi yang menghadapi ketimpangan dengan tren meningkat. Berdasarkan data BPS 2024, jumlah penduduk miskin Kota Bandung mencapai 101,1 ribu jiwa dan Kota Bekasi mencapai 128,8 ribu jiwa. Sejumlah penduduk miskin Kota Bandung dan Bekasi ini kemungkinan menghadapi keterbatasan akses untuk belajar dan memperoleh layanan kesehatan, sehingga menjadi penyebab tinggi ketimpangan. Apabila tidak segera diatasi maka kelompok miskin semakin sulit menggapai graduasi yang lebih baik secara ekonomi

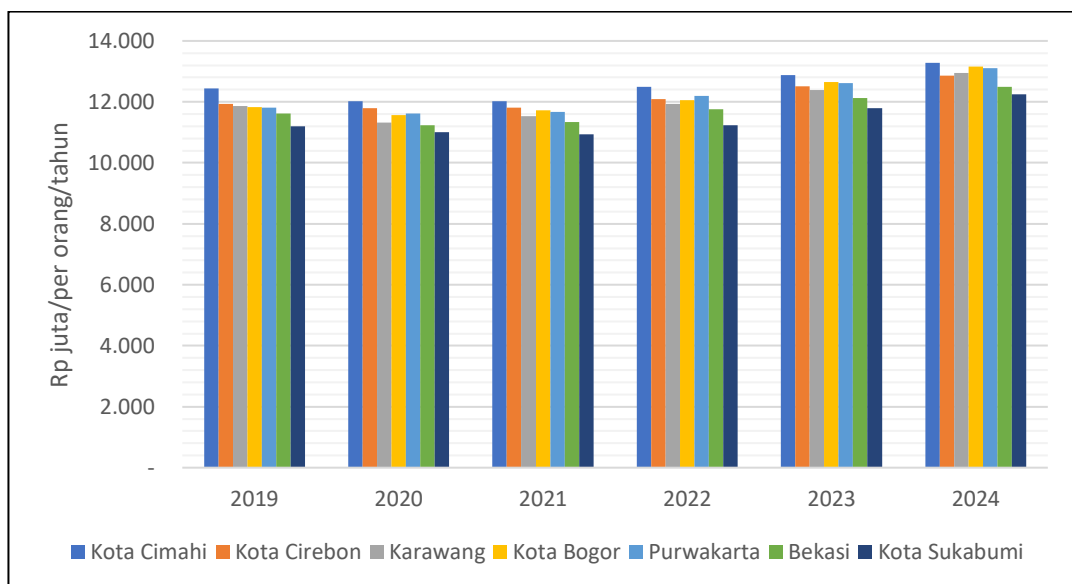
melalui akses pendidikan, dan kesehatan yang selanjutnya akan memicu potensi munculnya kriminalitas dan ketidakstabilan sosial.

Kabupaten/kota dengan pengeluaran riil Rp12,000 juta-Rp15,000 juta per kapita per tahun

Terdapat kelompok kabupaten/kota di Jawa Barat yang besaran pengeluaran riil per orang per kapita per tahunnya pada 2024 berada pada kisaran Rp12,000 juta sampai dengan Rp15,000 juta atau di atas provinsi Jawa Barat namun di bawah kota Bandung, Depok, dan Bekasi yaitu Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Secara umum, IPM daerah tersebut berada di atas Jawa Barat, kecuali Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Keduanya memiliki kinerja pendidikan RLS masih di bawah Jawa Barat.

Dari tujuh kabupaten/kota ini, Kota Cimahi konsisten mampu menjaga besaran pengeluaran riil per orang per tahunnya tertinggi selama 2019-2024 dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya. Pada periode tersebut, pertumbuhan pengeluaran riil Kota Cimahi mencapai 6,67 persen dari Rp12,448 juta menjadi Rp13,278 juta (Gambar 41). Daya beli masyarakat kembali pulih pasca pandemi Covid-19 pada 2022 setelah sempat mengalami penurunan.

Gambar 41. Pengeluaran riil per orang per kapita Kota Cimahi, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, 2019–2024



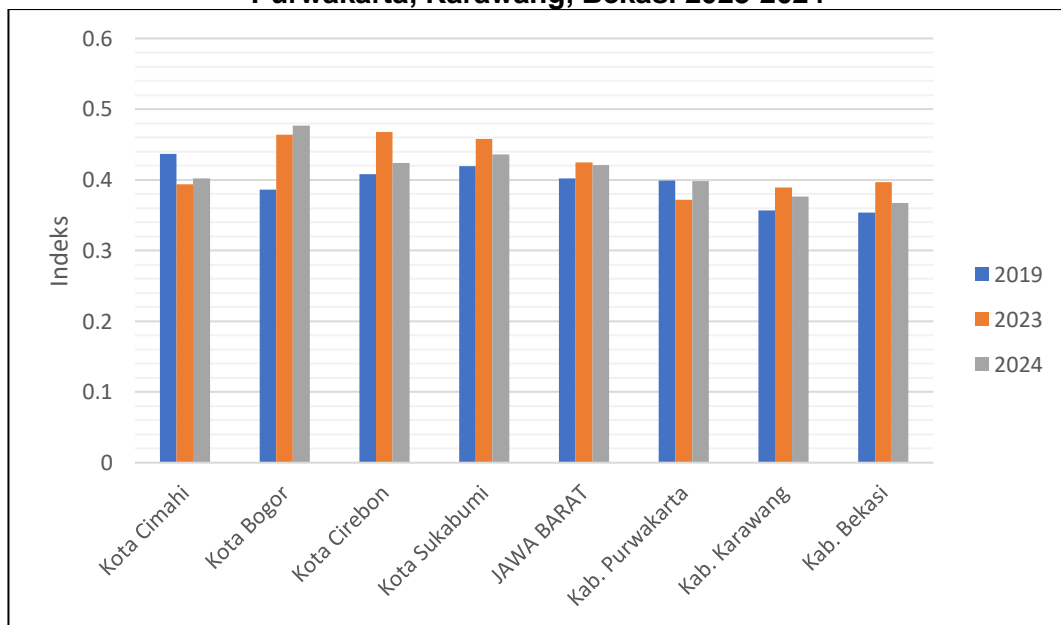
Sumber: BPS (Diolah)

Perekonomian Kota Cimahi didominasi sekitar 44 persen oleh lapangan usaha industri pengolahan yang meliputi tekstil, farmasi, dan makanan minuman; dan 15 persen usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perekonomian yang didominasi industri

pengolahan akan menciptakan inovasi produk yang bernilai tambah, dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Merujuk pada teori 5 tahap menuju ekonomi modern Rostow (1960), Kota Cimahi sudah berada pada fase prakondisi lepas landas karena sudah lebih bertumpu pada sektor industri, meskipun belum sepenuhnya lepas landas. Karakteristik ekonomi menuju modern ditandai masyarakat yang lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Ada pergeseran nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai yang lebih modern dan berorientasi pada kemajuan.

Mencermati kinerja pengeluaran riil Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor sepanjang tahun 2019-2024 yang terlihat sangat progresif. Keduanya pada 2019 masih di bawah Kota Cirebon dan Kabupaten Karawang, namun sejak pasca pandemi 2022 sudah melampaui. Selama periode itu, pengeluaran riil Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta meningkat sangat pesat masing-masing mencapai 11,24 persen dan 10,83 persen. Pengeluaran riil Kota Bogor pada 2024 mencapai Rp13,154 juta meningkat 3,9 persen terhadap 2023, sedangkan Kabupaten Purwakarta mencapai Rp13.099 juta meningkat 3,8 persen.

Gambar 42. Gini Ratio Kota Cimahi, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi 2023-2024



Sumber: BPS (Diolah)

Untuk pengeluaran riil per kapita Kota Cirebon selama kurun waktu 2019-2024 tumbuh 7,6 persen dari Rp11,856 juta menjadi Rp12,942 juta. Penurunan selama masa pandemi Covid-19 sebenarnya tidak serendah enam daerah lainnya, namun pemulihan tidak secepat yang lainnya. Bahkan, sejak 2023 pengeluaran riil kota ini sudah tertinggal dari Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Pada 2024, selain sudah lebih rendah dari Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon juga tertinggal

dari Kabupaten Karawang. *Gini Ratio* Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 0,424, artinya ketimpangannya sudah harus dikendalikan.

Kabupaten Karawang merupakan daerah industri pengolahan dan didukung konektivitas berupa akses tol Jakarta - Cikampek, tol layang MBZ, tol Japek Selatan, Stasiun Kereta Cepat di Karawang, terkoneksi dengan Bandara Soekarno – Hatta, dan Pelabuhan Patimban di Subang. Penurunan pengeluaran riil yang terjadi akibat pandemi Covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakatnya karena kebijakan *lockdown* pabrik-pabrik harus tutup beroperasi sehingga pegawai-pegawainya kembali ke kampung. Pascapandemi, aktivitas industri di Kabupaten Karawang mulai bergerak kembali dan mendorong peningkatan pengeluaran riil per kapitanya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pengeluaran riil Kabupaten Karawang tumbuh 9,2 persen dari Rp11,930 juta (2019) menjadi Rp12,869 juta (2024), bahkan sudah mampu melampaui Kota Cirebon.

Kota Sukabumi merupakan kota yang perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 22,58 persen dari PDRB (harga berlaku). Selain itu, lapangan usaha lainnya cukup beragam dan seimbang dengan peran sektor industri pengolahan 17,13 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16,25 persen; dan konstruksi 11,95 persen. Kota Sukabumi merupakan kota pariwisata dan sebagai pusat pendidikan kedinasan seperti kepolisian, keimigrasian, sekolah kedinasan IPDN, STIN, dan STAN. Pengeluaran riil per kapita per tahun Kota Sukabumi selama 2019-2024 meskipun meningkat dari Rp 11,204 ribu menjadi Rp 12,252 ribu atau tumbuh 9,35 persen, merupakan yang terkecil dari enam daerah pada kelompok ini. Pengeluaran riil per kapita per tahunnya lebih kecil dibandingkan Kabupaten Bekasi karena Kabupaten Bekasi adalah daerah kawasan industri.

Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri pengolahan yang bergerak di bidang peralatan rumah tangga, logam, suku cadang otomotif, elektronika, kendaraan bermotor, komputer, bahan kimia, dan farmasi yang berpusat di Cikarang. Pengeluaran riil Kabupaten Bekasi selama 2019-2024 meningkat dari Rp11,610 juta menjadi Rp12,500 juta atau tumbuh 7,67 persen. Kabupaten Bekasi memiliki angka *Gini Ratio* yang rendah, yaitu sebesar 0,367 pada 2024. Capaian *Gini Ratio* tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi lebih sejahtera dan lebih merata ekonominya dibandingkan Kota Sukabumi.

Kabupaten /kota dengan pengeluaran riil di bawah Rp12,000 juta per kapita per tahun

Terdapat 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Jawa Barat yang pengeluaran per kapita per tahunnya berada di bawah Rp12,000 juta atau di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat. Ketujuhbelas kabupaten/kota

ini terdiri dari 2 kota yakni Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya; dan 15 kabupaten yakni Kabupaten Subang, Sumedang, Bogor, Cirebon, Bandung, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya. Terdapat sembilan daerah dengan dominasi ekonomi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni kota dan kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Cianjur, Subang, Pangandaran, Kuningan, Sukabumi, dan Ciamis yang mencapai kisaran 20-37 persen dari PDRBnya. Terdapat tujuh daerah yakni Kabupaten Bandung, Bogor, Indramayu, Bandung Barat, Majalengka, Cirebon, dan Sumedang yang 19-53 persen PDRB-nya sudah didominasi lapangan usaha industri pengolahan. Hanya Kabupaten Banjar yang ekonominya didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 23,4 persen. Meskipun beberapa daerah tidak didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetapi pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi lapangan usaha terbesar kedua.

Tabel 22 Lapangan Usaha Utama dan Share Terhadap PDRB, 2024

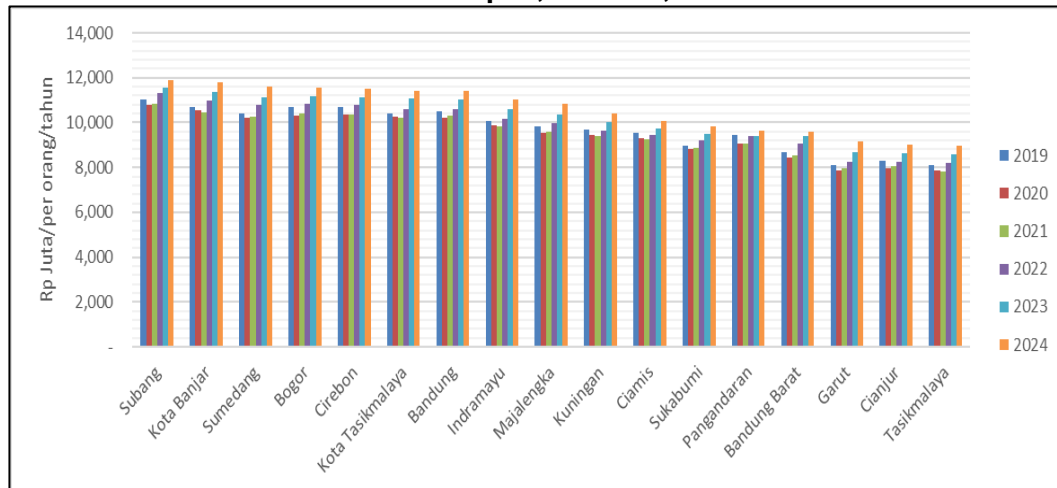
No	Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha Utama		
		Pertanian, kehutanan, perikanan (%)	Industri Pengolahan (%)	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (%)
1	Kab. Tasikmalaya	36,81		18,00
2	Kab. Garut	36,00		18,42
3	Kab. Cianjur	32,03		15,15
4	Kota Tasikmalaya	31,1		17,99
5	Kab. Subang	30,08		13,77
6	kab. Pangandaran	25,6		19,38
7	Kab. Kuningan	23,23		13,42
8	Kab. Sukabumi	22,58	17,13	
9	Kab. Ciamis	20,76		20,38
10	Kab. Bandung		52,91	13,46
11	Kab. Bogor		51,65	12,31
12	Kab. Indramayu	18,03	43,89	
13	Kab. Bandung Barat	12,63	40,82	
14	Kab. Majalengka	20,95	25,57	
15	Kab. Cirebon	14,76	20,49	
16	Kab. Sumedang	19,27	19,32	
17	Kota. Banjar	12,96		23,40

Sumber: BPS (Diolah)

Semua daerah ini pengeluaran riil per kapitanya selama 2019-2024 meningkat dan menunjukkan pola yang sama artinya tidak ada dinamika istimewa antardaerahnya meskipun terdapat tujuh kabupaten yang ekonominya sudah didominasi sektor industri, sebagaimana yang terjadi kelompok diatas Rp15.000 juta dan Rp12.000 juta – Rp15.000 juta. Bahkan Kabupaten Bandung dan Bogor yang ekonominya sudah didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dan mencapai lebih dari 50 persen dari PDRB-nya ternyata belum ada peningkatan pengeluaran riilnya yang lebih

signifikan yang dapat melampaui daerah pertanian lainnya pasca pandemi Covid-19 (grafik 8). Daerah yang tertinggi pengeluaran riilnya pada kelompok ini adalah Kabupaten Subang dan Kota Banjar yang ekonominya tidak didominasi oleh sektor industri.

Gambar 43. Kabupaten/Kota dengan Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun di Bawah Rp12,000 Juta, 2024



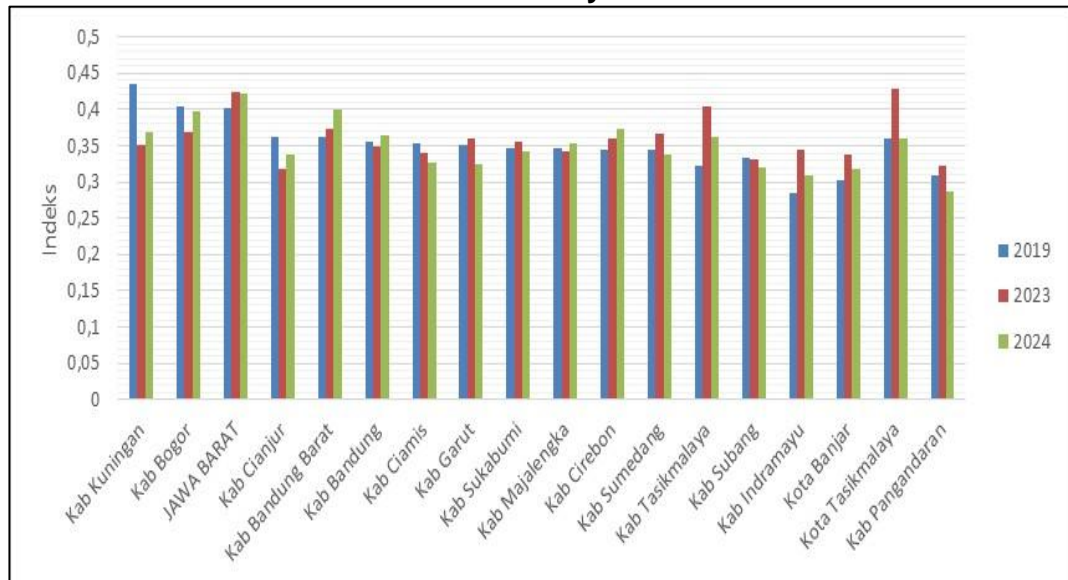
Sumber: BPS (Diolah)

Daerah dengan pengeluaran riil per kapita terendah di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp8,965 juta pada 2024, meningkat dari Rp8,092 juta (2019) tumbuh 10,79 persen selama periode tersebut. Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya 2024 sangat didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 36,81 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 18,00 persen. Masih banyaknya penduduk miskin di kabupaten Tasikmalaya kemungkinan yang menjadi salah satu penyebab pengeluaran per kapitanya masih rendah. Indeks giniya 0,363 termasuk rendah namun menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Tasikmalaya secara merata cenderung tidak memiliki penghasilan tinggi dengan daya beli rendah baik untuk pendidikan maupun kesehatan.

Daerah dengan keterbatasan baik sarana kesehatan berupa rumah sakit maupun pendidikan berupa perguruan tinggi, adalah Kabupaten Pangandaran. Pangandaran adalah daerah laut, perekonomiannya didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 25,6 persen; diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 19,38 persen; dan transportasi dan pergudangan 13,89 persen. Penduduk miskin mencapai 8,75 persen diatas Jawa Barat dan Indonesia. AKB mencapai 13,85 di atas Jawa Barat 13,56 per 1000 kelahiran bayi pada 2024. Konsumsi pengeluaran per kapita per bulan masih didominasi kelompok makanan 59,22 persen. *Gini Ratio* Pangandaran adalah 0,286 merupakan yang terendah di Jawa Barat artinya ekonominya merata, namun kondisinya kurang sejahtera karena

pengeluaran per kapitanya rendah, sarana penunjang kesehatan dan pendidikan terbatas. Dapat diperkirakan bahwa perekonomiannya yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih bersifat tradisional dengan produktivitas belum tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

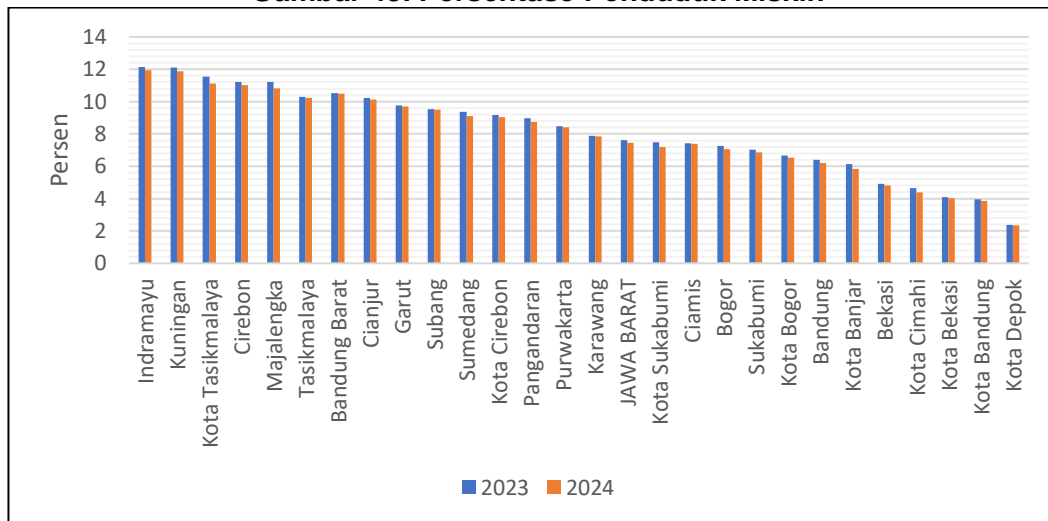
Gambar 44. Gini Ratio kota Banjar, Tasikmalaya; dan kabupaten Subang, Sumedang, Bogor, Cirebon, Bandung, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cianjur, Tasikmalaya.



Sumber: BPS (Diolah)

Dilihat dari kondisi kemiskinannya, dari 27 kabupaten/kota terdapat 14 kabupaten dan 1 kota yang persentase penduduk miskinnya di atas provinsi. Meskipun terjadi tren menurun pada 2024 terhadap 2023 tetapi belum mampu turun secara signifikan. Kota Tasikmalaya meskipun kategori kota namun memiliki beban persentase penduduk miskinnya yang masih tinggi mencapai 11,1 persen. Berbeda dengan kota Banjar, angka kemiskinannya termasuk rendah sebesar 5,85 persen. Daerah dengan angka kemiskinan tinggi juga tampak dari konsumsi utamanya masih didominasi makanan. Kota Depok merupakan daerah dengan persentase penduduk miskinnya tersendah dan *Gini Rationya* untuk perkotaan termasuk yang rendah juga dibandingkan dengan kota Bandung dan Bekasi. Konsumsi penduduk kota Depok juga sudah lebih banyak ke nonmakanan.

Gambar 45. Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS (Diolah)

Masih rendahnya pengeluaran riil per kapita Jawa Barat dibandingkan dengan Jakarta antara lain dikarenakan oleh perbedaan distribusi pendapatan antar kabupaten/kotanya. Masih banyaknya daerah dengan basis ekonomi pertanian tradisional menciptakan gap ekonomi tinggi dengan wilayah berbasis industri. Beberapa wilayah yang merupakan kota industri memiliki pengeluaran riil per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan/kelautan yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan dan jauh dari aktivitas ekonomi industri dan jasa. Kondisi tersebut kemungkinan menjadi penyebab masih rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat secara agregat. Sektor pertanian selama ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pertanian, ditambah dengan ketergantungan pada musim, masih rendahnya *skill* para petani, kepemilikan tanah pertanian yang terbatas atau hanya sebagai buruh tani, dan dipengaruhi oleh harga pupuk. Demikian halnya masalah yang dihadapi nelayan seperti penduduk Pangandaran. Hasil laut yang diperoleh nelayan sangat dipengaruhi oleh cuaca, kenaikan BBM, menghadapi *illegal fishing*.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat yang mencapai 6,74 persen (2025) termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dan di Jawa meskipun telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,91 persen. Terdapat 12 kabupaten/kota yang Tingkat pengangguran terbuka di bawah Jawa Barat. Pengangguran berpotensi terjadi baik di perkotaan maupun kabupaten. Tingkat pengangguran Kota Bandung dan Bekasi yang memiliki pengeluaran riil per kapita per tahunnya lebih tinggi dari provinsinya, juga menghadapi masalah pengangguran yang tinggi diatas provinsinya. Pengangguran yang tinggi tersebut yang menjadi sumber ketimpangan.

Kondisi pendidikan dan kesehatan akan memengaruhi produktivitas penduduknya. Faktor produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk dipertimbangkan. Jika tenaga kerja produktivitasnya rendah maka pendapatan yang dihasilkan juga rendah dan berimplikasi langsung pada pengeluarannya. Produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat pada tahun 2024 menurut Kementerian Ketenagakerjaan tercatat sebesar Rp71,76 juta per tenaga kerja per tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar Rp89,33 juta (Muhamad, Produktivitas Tenaga Kerja di 38 Provinsi Indonesia 2024, Jakarta Teratas, 2025). Penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi SDM baik pendidikan maupun latihan, dan budaya kerja tidak efisien.

Masih rendahnya capaian pendidikan penduduk Jawa Barat dan mungkin dengan *skill* rendah menjadi penghambat untuk bersaing memasuki pasar kerja industri yang ditawarkan. Produktivitas yang rendah akan mendorong mereka semakin terpinggirkan ketika berhadapan dengan migran masuk dari daerah lain dengan kapasitas daya saing yang lebih tinggi. Bahkan dengan masuknya investor asing, juga dapat memicu semakin terpinggirkannya mereka dari permintaan pasar kerja yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Hal tersebut juga diakui berdasarkan diskusi dengan BP4D Subang. Masuknya industri otomotif BYD dari China dan Vinfast dari Vietnam tidak serta merta dapat menyerap tenaga kerja di Subang.

Tingginya kesenjangan ekonomi yang terjadi harus diwaspadai karena menggambarkan distribusi kesejahteraan yang tidak merata. Terdapat sekelompok kecil yang menguasai ekonomi, memiliki pendapatan tinggi sehingga mudah memperoleh akses pengetahuan dan kesehatan yang baik, serta mendapatkan penghasilan yang tinggi. Sebaliknya untuk kelompok miskin dengan pendapatan kecil sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan mendapatkan penghasilan layak. Kelompok kedua akan semakin tertinggal dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi. Kesenjangan berpotensi meningkat dengan berkembangnya artificial intelligence (AI), karena akan menjadi faktor tambahan terjadinya ketimpangan karena untuk mengujarnya membutuhkan investasi sumber daya manusia yang membutuhkan waktu panjang.



Ringkasan Bab

- Peningkatan pendidikan belum dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Hal ini membuat pendidikan masih menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan.
- Kondisi kesehatan juga berkontribusi terhadap ketimpangan, terutama terkait akses layanan dasar. Masyarakat dengan kondisi kesehatan lebih baik terutama di perkotaan cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih besar.
- Kinerja pengeluaran riil per kapita menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga yang berbeda antara kota berbasis ekonomi sektor industri dengan kabupaten berbasis sektor primer. Ketimpangan pengeluaran ini memperkuat perbedaan kesejahteraan antar kelompok.

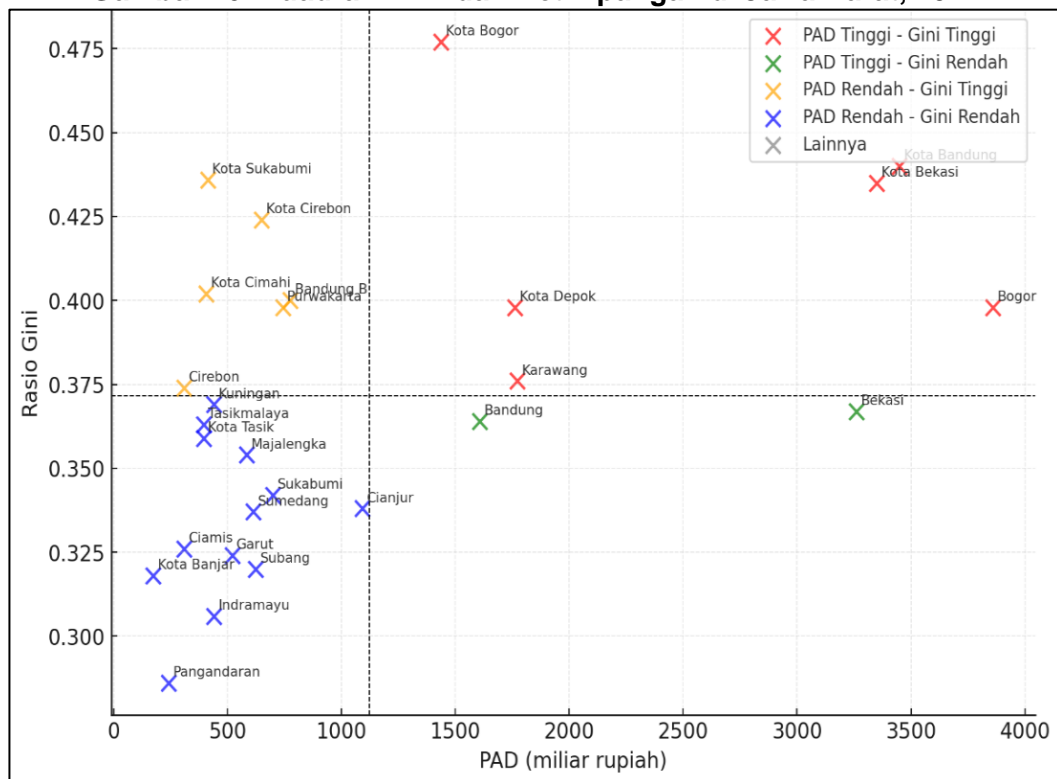
BAB VII

DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI KEBIJAKAN FISKAL DAN REGULASI

7.1 Pendapatan Asli Daerah

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Gini Ratio* di Jawa Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, semakin tinggi pula potensi ketimpangan yang terjadi. Fenomena ini sejalan dengan literatur tentang urban bias (Lipton, 1977), dimana peningkatan kapasitas fiskal di daerah perkotaan dan kawasan industri lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Untuk melihat pola hubungan tersebut secara lebih jelas, dilakukan pemetaan kuadran PAD–Gini yang membandingkan rata-rata PAD sebesar Rp 1,12 triliun dengan rata-rata *Gini Ratio* sebesar 0,372. Hasil pemetaan menunjukkan variasi kategori kabupaten/kota di Jawa Barat, mulai dari daerah dengan PAD tinggi–ketimpangan tinggi hingga PAD rendah–merata miskin.

Gambar 46. Kuadran PAD dan Ketimpangan di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (diolah)

Hasil pemetaan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat ketimpangan (*Gini Ratio*) di kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2024 memperlihatkan empat kelompok karakteristik daerah yang berbeda berdasarkan kapasitas fiskal dan tingkat pemerataannya. Peta kuadran pada Gambar di atas menunjukkan variasi pola yang menggambarkan dinamika fiskal dan distribusi kesejahteraan di tingkat lokal.

Kelompok pertama adalah PAD Tinggi – Gini Tinggi, yang mencakup daerah dengan PAD di atas Rp1,12 triliun dan *Gini Ratio* di atas 0,372, seperti Bogor, Karawang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Daerah-daerah ini memiliki basis ekonomi yang kuat, baik dari sektor industri, perdagangan, maupun jasa, yang menghasilkan PAD tinggi. Namun, ketimpangan di wilayah ini tetap besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal belum diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan. Peningkatan PAD banyak bersumber dari pajak kendaraan, properti, hotel, dan restoran yang umumnya dibayar oleh kelompok menengah atas. Tanpa kebijakan redistribusi yang memadai, fiskal daerah justru memperkuat bias perkotaan: layanan publik dan infrastruktur lebih terpusat di pusat kota, sementara kelompok berpendapatan rendah belum sepenuhnya menikmati manfaat pembangunan.

Kelompok kedua yaitu PAD Tinggi – Gini Rendah, diwakili oleh Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi. Kedua wilayah ini menjadi contoh positif karena memiliki kapasitas fiskal tinggi sekaligus ketimpangan relatif rendah. Kemungkinan besar, hal ini berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang lebih berimbang antara sektor industri dan pertanian. Bandung dan Bekasi memiliki ekosistem industri yang mampu menyerap tenaga kerja lintas kuintil secara lebih merata, sehingga distribusi manfaat fiskal lebih inklusif. Bekasi, misalnya, melalui kawasan industrinya mampu mengintegrasikan pekerja dari berbagai kalangan, sehingga pemerataan pendapatan lebih terjaga. Daerah-daerah dalam kategori ini dapat dijadikan best practice dalam mengelola PAD agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan.

Selanjutnya, kategori PAD Rendah – Gini Tinggi meliputi daerah seperti Cirebon, Purwakarta, Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi. Wilayah ini menghadapi tantangan ganda, yaitu kapasitas fiskal yang terbatas dan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rata-rata PAD di kelompok ini berada di bawah Rp1,12 triliun, sementara *Gini Ratio* berada di atas 0,372. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan daerah untuk melakukan intervensi fiskal terhadap kelompok miskin masih lemah. Misalnya, Kota Sukabumi memiliki PAD hanya sekitar Rp413 miliar, dengan *Gini Ratio* mencapai 0,436. Tanpa dukungan transfer fiskal dari pemerintah pusat atau kebijakan redistribusi lintas sektor, daerah-daerah dalam kategori ini berisiko mengalami stagnasi pembangunan sosial ekonomi:

kelompok kaya dan sektor formal terus tumbuh, sementara kelompok miskin tetap tertinggal.

Sementara itu, terdapat pula beberapa daerah dengan PAD Rendah – Gini Rendah, seperti Pangandaran, Garut, dan Indramayu, yang menunjukkan ketimpangan kecil namun juga tingkat kesejahteraan yang rendah. Rendahnya ketimpangan di wilayah-wilayah ini bukan karena pemerataan kemakmuran, melainkan karena sebagian besar penduduk berada dalam tingkat kesejahteraan yang sama-sama rendah.

Secara umum, hasil pemetaan ini menegaskan bahwa tinggi rendahnya PAD tidak secara otomatis mencerminkan tingkat pemerataan ekonomi daerah. Daerah dengan PAD tinggi tidak selalu lebih inklusif, sementara daerah dengan PAD rendah sering kali belum memiliki instrumen fiskal yang cukup untuk mengatasi ketimpangan. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu diimbangi dengan kebijakan belanja publik yang berpihak pada kelompok rentan, serta reformulasi transfer fiskal berbasis kebutuhan daerah agar efek pemerataan lebih terasa di seluruh wilayah Jawa Barat.

7.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa & Dana Alokasi Umum

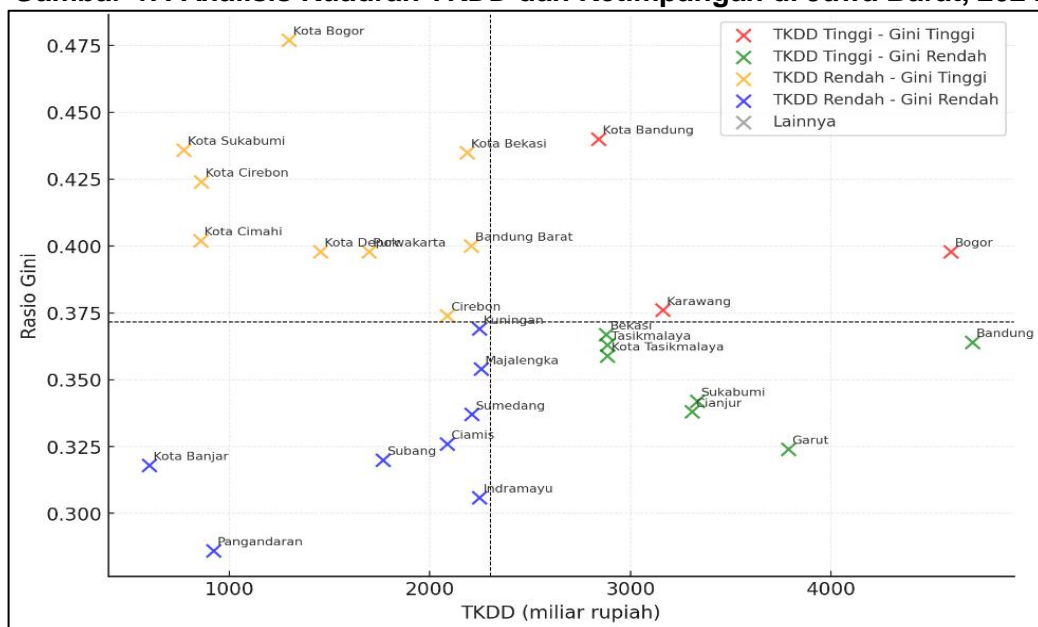
Demikian juga dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Dana Alokasi Umum (DAU), yang masing-masing memiliki korelasi positif signifikan dengan ketimpangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa instrumen fiskal daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi disparitas, karena alokasinya cenderung digunakan untuk belanja rutin ketimbang belanja yang bersifat *pro-poor*.

Secara normatif, TKDD dirancang sebagai instrumen fiskal nasional untuk memperkuat pemerataan pembangunan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. DAU diposisikan untuk menutup celah fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan mendukung layanan prioritas, sementara Dana Desa ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di level akar rumput. Dengan demikian, secara desain, TKDD diharapkan berfungsi sebagai alat untuk menekan ketimpangan sosial ekonomi.

Namun demikian, hasil estimasi empiris dalam kajian ini menunjukkan bahwa TKDD justru berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Fenomena ini memperlihatkan adanya *implementation gap* antara tujuan normatif TKDD dengan realisasi di lapangan. Kondisi ini dapat dijelaskan karena beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, formula alokasi yang belum *Pro-Poor*. Studi oleh Rodriguez-Pose dan Ezcurra (dikutip oleh Digdowiseiso et al., 2022) menunjukkan bahwa dalam kondisi governance yang masih lemah, desentralisasi fiskal dapat memperlebar ketimpangan daripada menurunkannya. Hal ini mencerminkan realitas bahwa formula TKDD di Indonesia belum sepenuhnya mengutamakan

daerah lebih miskin atau indikator pro-kemiskinan. Kedua, dominasi belanja rutin. Penelitian oleh Nasution (2020) mengungkap bahwa alokasi belanja pemerintah seringkali difokuskan pada pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Hal ini berdampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang sangat terbatas, sementara belanja modal yang memiliki potensi menekan ketimpangan masih kurang dominan. Ketiga, kapasitas tata kelola daerah yang bervariasi. Lessmann, 2009; Sepúlveda & Martinez-Vazquez, 2011 menjelaskan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan institusi lokal. Tanpa kemampuan administratif dan akuntabilitas yang memadai, TKDD bisa gagal menciptakan redistribusi yang diharapkan.

Gambar 47. Analisis Kuadran TKDD dan Ketimpangan di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (diolah)

Selanjutnya, dilakukan pemetaan kuadran TKDD–Gini (dengan rata-rata TKDD Rp 2,30 triliun dan Gini 0,372) membantu mengidentifikasi variasi karakteristik kabupaten/kota: ada yang transfernya besar tapi timpang, ada yang transfernya kecil tapi relatif merata.

Hasil pemetaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap *Gini Ratio* di kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2024 memperlihatkan pola yang hampir serupa dengan distribusi PAD, tetapi dengan dinamika yang berbeda karena karakter TKDD yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Secara umum, peta kuadran menunjukkan empat kelompok daerah berdasarkan besar kecilnya TKDD dan tingkat ketimpangan, yang menggambarkan efektivitas desentralisasi fiskal dalam menekan kesenjangan antardaerah.

Kelompok pertama yaitu TKDD Tinggi – Gini Tinggi, meliputi Bogor, Karawang, dan Kota Bandung. Daerah-daerah ini menerima transfer fiskal

yang besar, misalnya Bogor sekitar Rp4,6 triliun dan Bandung Rp4,7 triliun, tetapi tetap memiliki ketimpangan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya transfer fiskal belum otomatis menurunkan ketimpangan. Sebagian besar TKDD terserap untuk belanja rutin dan administratif, seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan, sementara porsi belanja produktif—misalnya untuk program pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas SDM, atau penguatan UMKM masih terbatas. Fenomena ini mencerminkan adanya implementation gap, di mana desain TKDD yang secara normatif bersifat redistributif belum diimplementasikan secara optimal dalam belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat bawah.

Kelompok kedua yaitu TKDD Tinggi – Gini Rendah, yang mencakup Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Daerah-daerah ini relatif berhasil memanfaatkan transfer fiskal besar untuk menjaga ketimpangan tetap rendah. Meskipun demikian, kondisi ini perlu ditafsir hati-hati, sebab sebagian daerah menunjukkan ketimpangan rendah karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih seragam pada level menengah bawah, fenomena yang sering disebut “merata miskin.” Transfer memang berperan dalam mendanai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, namun belum banyak menciptakan transformasi ekonomi struktural yang dapat mengangkat kelompok miskin ke kelas menengah. Meski begitu, kelompok daerah ini menunjukkan bahwa TKDD berpotensi efektif menekan ketimpangan apabila dikelola secara efisien dan diarahkan pada sektor produktif.

Kategori berikutnya yaitu TKDD Rendah – Gini Tinggi, mencakup Cirebon, Purwakarta, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi. Daerah-daerah ini berada dalam posisi yang paling rentan karena menghadapi double burden: kapasitas fiskal transfer yang rendah di satu sisi, serta ketimpangan yang tinggi di sisi lain. Misalnya, Kota Sukabumi hanya menerima TKDD sekitar Rp772 miliar namun memiliki *Gini Ratio* sebesar 0,436. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang sempit sehingga kemampuan intervensi terhadap kesenjangan sosial ekonomi menjadi terbatas. Tanpa adanya reformulasi kebijakan transfer fiskal yang berpihak pada kebutuhan daerah (*fiscal need approach*), wilayah dalam kategori ini berisiko mengalami stagnasi sosial ekonomi dan sulit keluar dari perangkap ketimpangan struktural.

Terakhir, kelompok TKDD Rendah – Gini Rendah terdiri atas Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Pangandaran, dan Kota Banjar. Daerah-daerah ini memiliki transfer fiskal rendah dan tingkat ketimpangan yang juga rendah. Namun, kondisi tersebut bukan cerminan kemakmuran yang merata, melainkan kondisi “equally poor”—

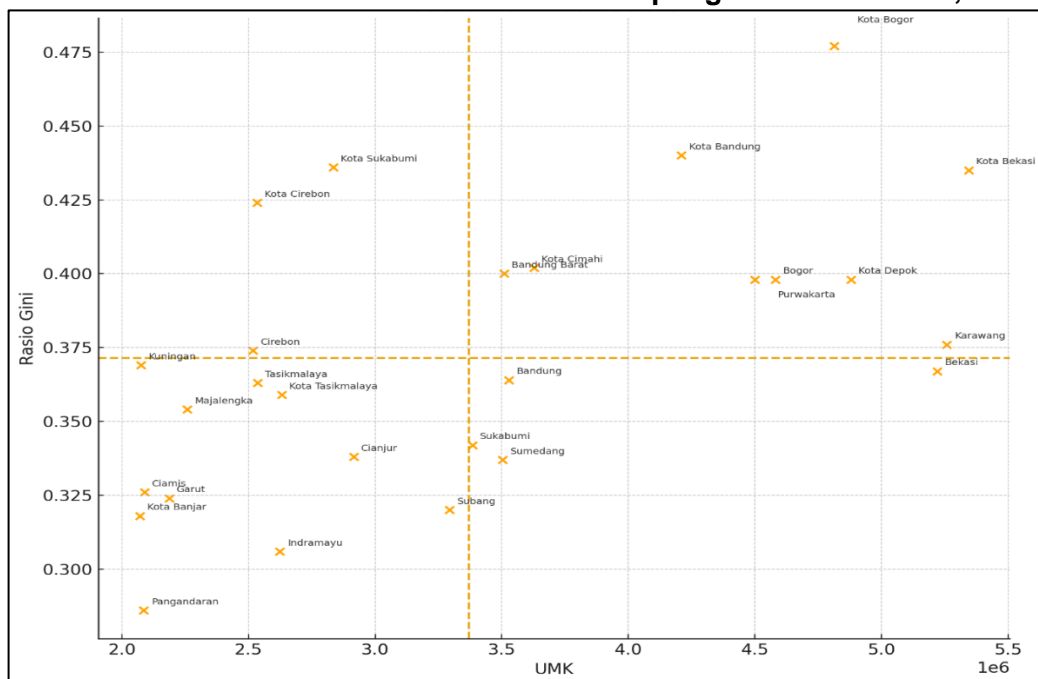
perekonomian lokal yang masih terbatas sehingga distribusi pendapatan merata pada level bawah. TKDD di wilayah ini belum cukup kuat untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika volume dan efektivitas alokasi TKDD tidak ditingkatkan, daerah-daerah ini berpotensi terjebak dalam stagnasi kemiskinan dan sulit mengakselerasi pembangunan manusia.

7.3. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. Artinya, kenaikan UMK cenderung berkaitan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui struktur pasar tenaga kerja dan komposisi sektor ekonomi di Jawa Barat. Peningkatan UMK terutama dinikmati oleh pekerja sektor formal, sementara sebagian besar pekerja berpendapatan rendah berada di sektor informal yang tidak terjangkau oleh regulasi upah minimum. Akibatnya, ketika UMK meningkat, manfaat ekonomi lebih banyak terserap oleh kelompok pekerja formal di daerah yang industrialisasi dan investasinya lebih maju. Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi agraris atau informal yang kuat tidak memperoleh manfaat serupa. Dampak ini menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih lebar antara pekerja formal dan informal maupun antarwilayah dengan struktur ekonomi berbeda.

Gambar 48. Analisis Kuadran UMK dan Ketimpangan di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Gambar 48 memetakan posisi wilayah-wilayah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan *Gini Ratio*, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan. Pembagian kuadran didasarkan pada nilai rata-rata kedua indikator tersebut, menghasilkan empat kelompok profil ekonomi dan sosial yang berbeda. Grafik ini terdiri atas empat kuadran yang memiliki kategori berbeda antara satu sama lain.

Kuadran I adalah kuadran yang berada di kanan atas, yang memiliki ciri UMK dan *Gini Ratio* di atas rata-rata. Kuadran ini ditempati oleh wilayah metropolitan dan sentra ekonomi besar, yaitu Kota Cimahi, Bandung Barat, Purwakarta, Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Karawang. UMK tinggi di wilayah-wilayah ini sering kali didorong oleh biaya hidup yang tinggi dan konsentrasi aktivitas industri dan jasa. Sementara itu, *Gini Ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan dan UMK yang tinggi hanya dinikmati oleh tenaga kerja terampil dan kelas atas, sementara sebagian besar masyarakat berjuang dengan biaya hidup tinggi, menciptakan disparitas pendapatan yang signifikan.

Kuadran II atau yang tepatnya berada di kiri atas merupakan kuadran yang bercirikan UMK rendah dan ketimpangan tinggi. Kuadran ini diisi oleh Cirebon, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi. Kabupaten/kota pada kuadran ini menghadapi tantangan struktural yang berat, yaitu UMK di bawah rata-rata tetapi dengan *Gini Ratio* di atas rata-rata. Hal ini berarti upah minimum yang rendah hadir di tengah ketimpangan pendapatan yang tinggi. Fenomena ini dapat disebabkan oleh rendahnya peluang kerja formal dengan upah layak dan kuatnya monopoli ekonomi oleh segmen kecil masyarakat, atau adanya ketimpangan antara sektor formal dan sektor informal yang besar, menekan UMK namun memperlebar jurang pendapatan.

Kuadran III yang berada di kiri bawah adalah rumah bagi kabupaten/kota yang memiliki UMK rendah dan ketimpangan rendah. UMK dan ketimpangan yang rendah menandakan upah minimum yang relatif rendah namun diimbangi oleh tingkat pemerataan pendapatan yang relatif baik. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah Pangandaran, Kuningan, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Ciamis, Garut, Majalengka, Indramayu, Cianjur, dan Subang. Posisi ini umumnya terjadi pada wilayah yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian atau jasa non-formal dan memiliki biaya hidup yang lebih rendah. Dengan demikian, tekanan untuk UMK tinggi tidak sekuat wilayah perkotaan besar, dan distribusi pendapatan cenderung lebih merata karena minimnya konsentrasi kekayaan industri pada wilayah-wilayah tersebut.

Kuadran IV yang terletak di kanan bawah dicirikan dengan UMK yang tinggi dan ketimpangan rendah. Kuadran ini mencerminkan profil ideal dengan UMK di atas rata-rata dan *Gini Ratio* di bawah rata-rata, yang menunjukkan

upah minimum yang tinggi disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Hanya Sukabumi, Sumedang, Bandung, dan Bekasi yang berada di sini. Wilayah-wilayah ini diasumsikan telah mencapai industrialisasi yang mapan, yang menuntut UMK tinggi, namun di saat yang sama memiliki kebijakan redistribusi atau struktur ketenagakerjaan yang berhasil menciptakan kelas menengah yang besar, menjaga agar kekayaan industri tidak terpusat pada segmen atas saja.

Sukabumi, Sumedang, Bandung, dan Bekasi sebagai kabupaten yang berada pada posisi ideal didukung oleh karakteristik dari masing-masing wilayah. Kabupaten Bekasi memiliki Kawasan Industri Cikarang yang menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Dengan adanya kawasan industri tersebut maka kebutuhan akan tenaga kerja buruh pabrik akan bertambah dan dapat dipastikan akan semakin merata pendapatan yang didapat penduduk karena bertambahnya pekerja di sektor formal. Maka dari itu, wilayah ini memiliki UMK yang sangat tinggi karena konsentrasi industri dan tingginya biaya hidup. Namun, tingginya angka UMK di Kabupaten Bekasi seringkali tidak dipatuhi oleh beberapa perusahaan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena rendahnya penjualan yang berujung ruginya perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengawasan ketat kepatuhan upah kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki riwayat tidak patuh pada standar UMK yang ditetapkan agar pekerja sektor formal bisa mendapatkan salah satu hak utamanya sebagai pekerja tanpa adanya kendala.

Kabupaten Sukabumi memiliki standar UMK yang didorong oleh pembangunan dan perkembangan kawasan industri di utara, tetapi ketimpangan di sana cenderung termasuk dalam kategori rendah karena adanya dominasi pada sektor pertanian. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukabumi berupa lahan pertanian, perkebunan dengan komoditas utama adalah teh dan sawit, dan perikanan. Selain itu, sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi penghasilan kepada banyak kepala keluarga dalam skala kecil dan menengah, yang secara struktural membuat pendapatan antar keluarga menjadi lebih merata daripada pendapatan dari gaji manajemen industri. Keadaan ini membuat pusat-pusat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, melainkan menyebar melalui pariwisata (Pelabuhan Ratu) dan pertanian. Agar sektor perekonomian tersebut tidak semakin tertinggal akibat kenaikan UMK untuk pekerja formal dan juga agar pekerja di sektor informal tidak semakin terhimpit maka perlu adanya penguatan rantai nilai produk hasil pertanian dan juga promosi pariwisata berkelanjutan.

Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Wilayah ini dapat mendekati posisi ideal dalam kuadran berkat pesatnya pembangunan infrastruktur yang terjadi disana. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), perkembangan Kawasan Industri

Dwipapuri, serta pembangunan kawasan industri baru (Sumedang Industrialpolis) secara perlahan dapat meningkatkan standar UMK. Sebagai akibatnya, terbentuk lapangan pekerjaan baru di sektor formal seperti pekerja konstruksi dan juga jasa logistik yang tersebar ke berbagai wilayah, baik di sekitar akses jalan tol dan juga sekitar kawasan industri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dampak dari kenaikan UMK ini dapat dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat, dan tidak hanya dinikmati oleh pekerja sektor industri saja. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga masih menjadi basis pertanian yang kuat yang berperan sebagai penyangga ekonomi bagi masyarakat di tingkat bawah. Stabilitas dari sektor pangan ini tentu saja membantu menjaga daya beli masyarakat di tingkat tersebut.

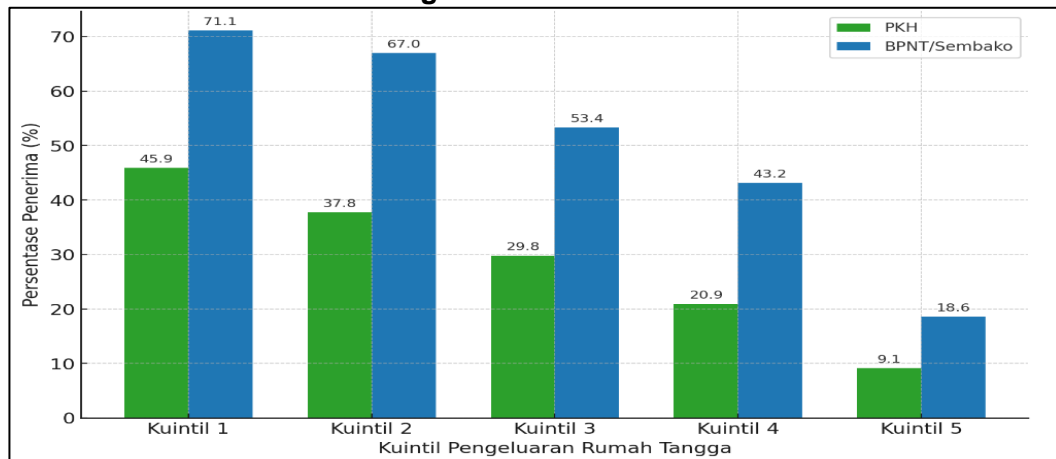
Posisi Kabupaten Bandung di kuadran ideal dapat dijelaskan oleh diversifikasi geografis yang terlihat. Terdapat pembagian peran ekonomi yang jelas antara daerah pusat perindustrian dimana di sepanjang wilayah barat hingga utara Kabupaten Bandung terdapat dominasi industri yang sebagian besar bergerak di bidang tekstil dan di sepanjang wilayah selatan, utamanya Ciwidey dan Pangalengan, merupakan pusat dari sektor peternakan, pertanian, serta perkebunan. Adanya basis industri formal yang besar di Kabupaten Bandung, mengindikasikan bahwa terdapat banyak pekerja formal karena banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja pada industri-industri yang tersebar disana. Lebih lanjut, kenaikan UMK yang terjadi di Kabupaten Bandung tiap tahunnya menjadikan pekerja sektor formal memiliki pendapatan yang bertambah pula. Sebaliknya, adanya dominasi industri di Kabupaten Bandung menyebabkan pekerja di sektor informal menjadi tertekan karena selain tidak adanya standar upah untuk pekerja di sektor informal, juga disebabkan karena minimnya program yang menasar pada kesejahteraan pekerja di sektor tersebut. Diperlukan suatu program yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari pekerja sektor informal dan juga pemberian insentif pada usaha sektor informal agar dapat membantu usaha informal berkembang dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal. Dengan kata lain, posisi ideal (UMK tinggi dengan ketimpangan rendah) dapat dicapai ketika tingginya upah formal akibat industrialisasi diimbangi oleh sektor non-formal/primer yang sehat, luas, dan inklusif, sehingga manfaat ekonomi terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

7.4. Bantuan Sosial dan Subsidi

Hasil regresi menunjukkan bahwa bantuan sosial dan subsidi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Artinya, program-program perlindungan sosial ini terbukti mampu berperan sebagai bantalan dalam menekan disparitas, khususnya melalui peningkatan daya beli rumah tangga miskin. Namun, analisis lebih lanjut berdasarkan Susenas 2024 dengan pendekatan kuintil pengeluaran mengungkapkan adanya persoalan dalam distribusi bansos, baik berupa keterbatasan cakupan maupun

kebocoran sasaran. Analisis distribusi penerima bansos menurut kuintil pengeluaran rumah tangga memperkuat temuan tersebut, sekaligus menyingkap persoalan dalam implementasi program.

Gambar 49. Distribusi Penerima Bansos (PKH dan BPNT) Menurut Kuintil Pengeluaran Jawa Barat



Sumber: BPS, Susenas 2024 (diolah)

Pada kuintil pertama, yaitu 20 persen rumah tangga termiskin, penerima PKH tercatat sebesar 45,9 persen, sementara penerima BPNT lebih tinggi, mencapai 71,1 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa program bansos memang menjangkau kelompok miskin, meskipun belum menyeluruh. Masih ada sebagian rumah tangga miskin yang tidak menerima bantuan (*exclusion error*), terutama pada PKH yang cakupannya lebih sempit.

Seiring naiknya kuintil, cakupan penerima bantuan menurun, tetapi penurunannya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kebijakan yang menargetkan hanya kelompok miskin. Pada kuintil kedua dan ketiga, proporsi penerima masih cukup besar: PKH masing-masing 37,8 persen dan 29,8 persen, sementara BPNT masih mencapai 67,0 persen dan 53,4 persen. Bahkan, pada kuintil kelima (20 persen terkaya), masih terdapat 9,1 persen rumah tangga menerima PKH dan 18,6 persen menerima BPNT. Fenomena ini menandakan adanya *inclusion error*, di mana bantuan sosial masih dinikmati oleh kelompok non-miskin.

Perbedaan antara kedua program juga terlihat jelas. PKH relatif lebih selektif dan menurun konsisten seiring naiknya kuintil, meskipun cakupannya di kelompok miskin masih belum ideal. Sementara itu, BPNT lebih luas tetapi juga lebih rawan bocor, karena distribusinya tidak hanya menyasar kuintil terbawah melainkan juga menjangkau kuintil menengah hingga kelompok terkaya. Karakteristik BPNT yang berbasis bantuan pangan membuat mekanisme targeting lebih sulit dikendalikan dibandingkan PKH yang berbasis komitmen pendidikan dan kesehatan.

Keterbatasan efektivitas fiskal di tingkat daerah ini tercermin pula pada kondisi rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis mikro Susenas 2024,

sekitar 34,5 persen rumah tangga B40 tercatat menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 20,8 persen menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua program tersebut secara statistik menurunkan probabilitas rumah tangga untuk tergolong dalam kelompok miskin. Koefisien logit untuk BPNT sebesar 0,357 ($p < 0,01$) dan untuk PKH sebesar 0,220 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa program sosial memang menjangkau rumah tangga miskin sesuai sasaran.

Namun, efektivitas program ini masih dihambat oleh adanya kebocoran (inclusion error), di mana sekitar 15 persen rumah tangga nonmiskin atau bahkan kelompok U20 masih menerima bantuan sosial. Fenomena ini menandakan kelemahan dalam sistem penargetan berbasis data. Dalam konteks fiskal makro, kebocoran tersebut membuat belanja sosial kehilangan daya redistributifnya, karena sebagian manfaat justru mengalir ke kelompok yang tidak memerlukan bantuan.

Dengan demikian, meskipun bansos terbukti menekan ketimpangan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh masalah akurasi targeting. Perbaikan data penerima melalui integrasi data, peningkatan validasi lapangan, serta penguatan mekanisme pengawasan distribusi perlu segera dilakukan agar bantuan sosial benar-benar menysasar kelompok miskin dan tidak bocor ke kuintil atas.



Ringkasan Bab

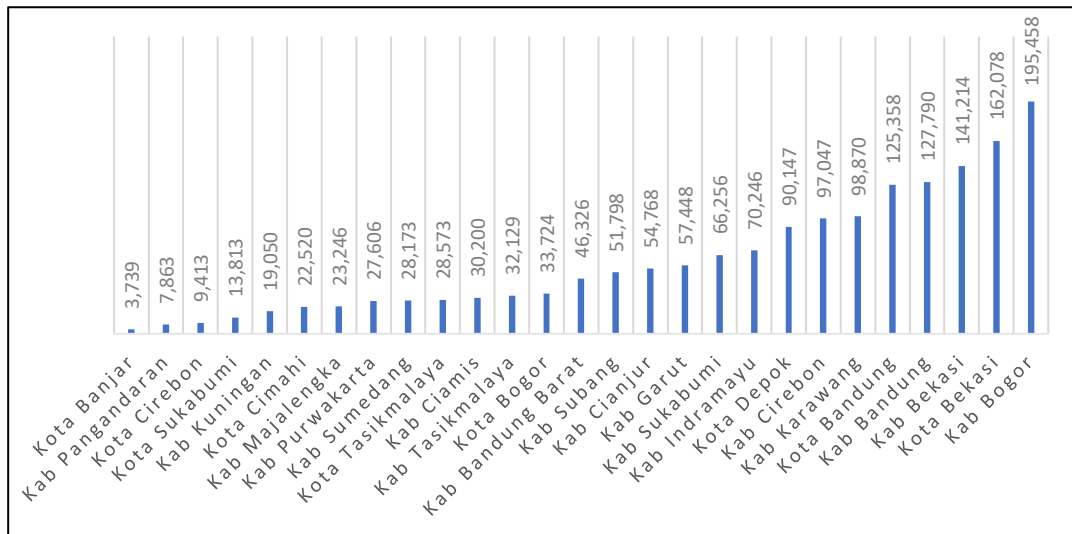
- Kapasitas fiskal daerah yang berbeda membuat beberapa wilayah lebih mampu menyediakan layanan publik dibanding yang lain. Kesenjangan kapasitas ini berdampak pada ketimpangan antarwilayah.
- Kebijakan upah minimum belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi lokal. Hal ini menyebabkan variasi upah yang tidak selalu mendukung pengurangan ketimpangan.
- Bantuan sosial berperan menekan ketimpangan, tetapi masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran. Perbaikan penargetan menjadi penting agar manfaatnya lebih optimal.

BAB VIII DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI KETENAGAKERJAAN DAN UMKM

8.1. Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Data Sakernas Tahun 2023, pelaku UMKM di Jawa Barat terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, seperti Bekasi, Bogor, dan Bandung sejalan dengan besarnya jumlah penduduk. Sebaliknya, wilayah yang relatif terpencil seperti Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran cenderung memiliki jumlah pelaku UMKM lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa target pasar UMKM lebih banyak berada di kota-kota besar dan prospek usaha dinilai lebih menguntungkan di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Rincian jumlah pelaku UMKM tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat disajikan pada Gambar 50.

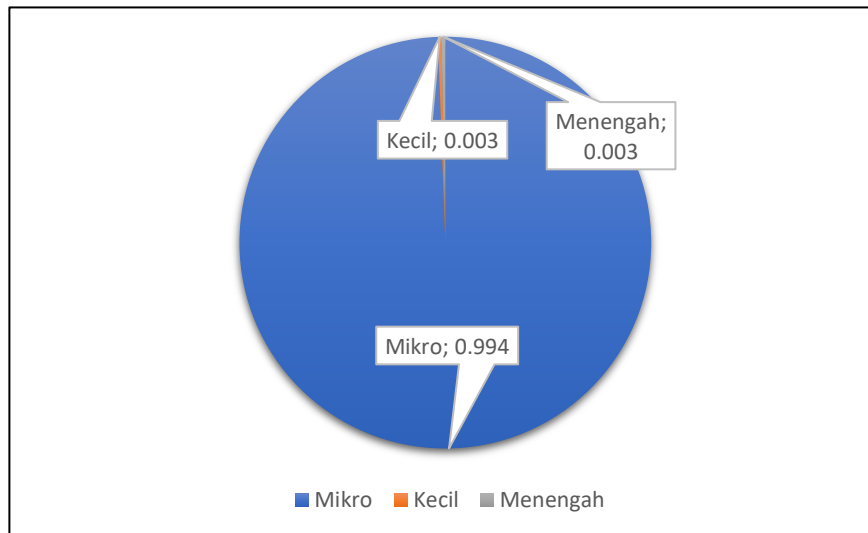
Gambar 50. Jumlah Pelaku UMKM di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Diolah)

Jika dilihat lebih dalam berdasarkan skala usahanya, mayoritas pelaku usaha di Jawa Barat merupakan pelaku usaha mikro (99,4%). Sedangkan sisanya, atau sekitar 0,6 persen, merupakan gabungan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah. Dengan besarnya persentase pelaku usaha mikro, mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro di Jawa Barat berada dalam “jebakan mikro” dan belum banyak yang berhasil untuk naik kelas ke tingkat kecil dan tingkat menengah. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa UMKM sulit naik kelas karena usahanya sejenis dan tak menggunakan teknologi produksi modern (Yohanes Valdi Seriang Ginta, 2024). Perbandingan persentase antara pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah terlihat pada Gambar 51.

Gambar 51. Persentase Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Diolah)

Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat, tampak pola bahwa pelaku usaha mikro mendominasi di hampir semua wilayah, sementara pelaku usaha menengah masih terpusat di kota-kota besar. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Bodebek dan Bandung Metropolitan, justru memiliki *gap* skala usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang tidak termasuk dalam pusat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, ada implikasi terjadinya *urban inequality effect*, dimana semakin maju sebuah wilayah maka ketimpangan semakin terlihat dan hal ini dapat terlihat pada rasio jumlah pelaku UMKM antar kabupaten/kota pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23 Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan *Gini Ratio* di Jawa Barat Tahun 2023

Kab/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Rasio Gini
Kab Bogor	853,252	7,942	17,082	0.369
Kab Sukabumi	519,528	17,174	3,375	0.355
Kab Cianjur	544,201	4,863	7,428	0.319
Kab Bandung	525,873	18,623	17,350	0.348
Kab Garut	554,316	8,423	3,834	0.361
Kab Tasikmalaya	420,182	4,771	3,612	0.404
Kab Ciamis	283,436	3,333	5,053	0.341
Kab Kuningan	229,202	1,362	2,152	0.351
Kab Cirebon	419,361	7,162	7,840	0.361
Kab Majalengka	283,850	2,419	3,151	0.342
Kab Sumedang	240,754	7,021	5,295	0.366
Kab Indramayu	393,045	6,716	3,990	0.344
Kab Subang	342,132	4,083	5,480	0.331
Kab Purwakarta	170,555	3,247	2,560	0.372
Kab Karawang	376,441	3,959	5,105	0.389
Kab Bekasi	425,620	10,091	15,201	0.397
Kab Bandung Barat	308,264	3,791	3,667	0.374
Kab Pangandaran	120,436	1,597	1,083	0.323
Kota Bogor	133,557	1,661	3,253	0.464
Kota Sukabumi	59,533	2,749	2,211	0.458
Kota Bandung	381,172	14,419	20,135	0.459
Kota Cirebon	56,383	566	572	0.468
Kota Bekasi	349,656	8,928	6,473	0.414
Kota Depok	239,353	4,907	7,179	0.402
Kota Cimahi	86,451	1,113	2,689	0.394
Kota Tasikmalaya	130,546	3,412	4,802	0.428
Kota Banjar	39,037	558	51	0.337

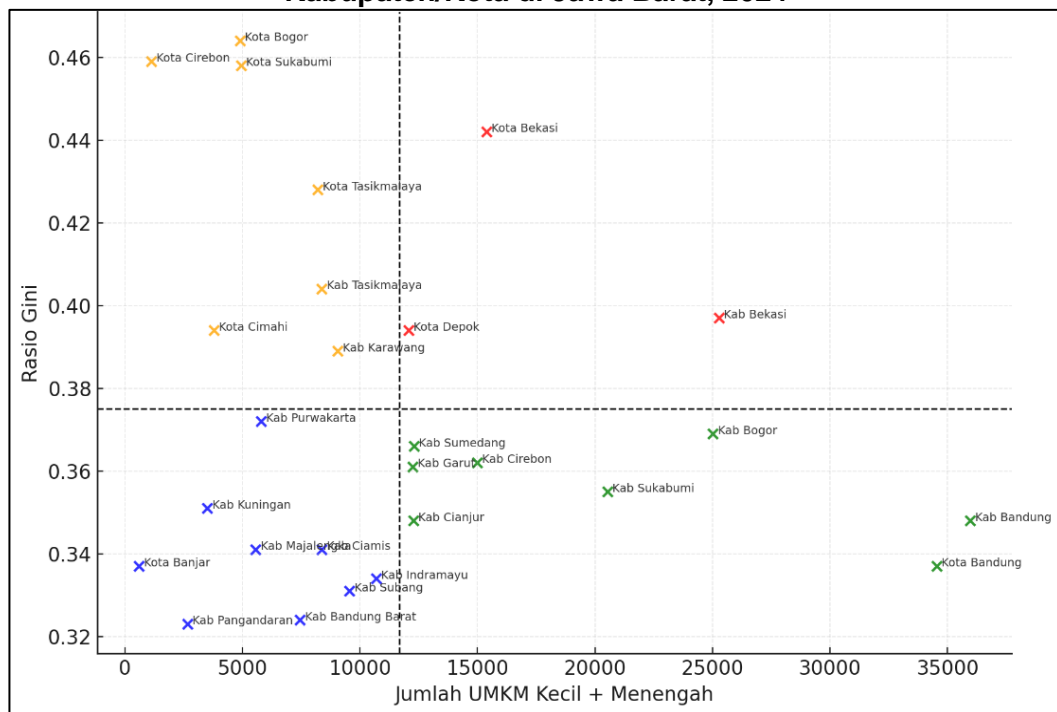
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Diolah)

Jika dikaitkan dengan angka *Gini Ratio* di kabupaten/kota, wilayah dengan *Gini Ratio* tinggi umumnya memiliki *gap* yang besar antara jumlah pelaku usaha mikro dengan gabungan jumlah pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana terjadi di Kota Bandung, dan Bekasi. Hal ini menandakan bahwa besarnya populasi pelaku usaha mikro belum tentu dapat menurunkan angka *Gini Ratio* suatu wilayah. Hal tersebut terjadi karena profil pelaku usaha mikro secara umum berada pada kelompok masyarakat terbawah sehingga cenderung memandang usahanya hanya untuk bertahan hidup dan bukan sebagai investasi untuk meningkatkan skala usahanya.

Selanjutnya, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel UMKM secara konsisten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan yang menegaskan peran penting UMKM dalam mendorong pemerataan

distribusi pendapatan. Artinya, semakin banyak UMKM yang berkembang, khususnya pada kategori kecil dan menengah, maka ketimpangan cenderung berkurang. Namun, pengaruh ini tidak berlaku seragam di seluruh wilayah. Kuadran ini memperlihatkan variasi spasial yang memperkuat sekaligus memperdalam interpretasi hasil regresi.

Gambar 52. Analisis Kuadran Usaha Kecil dan Menengah vs Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS (Diolah)

Grafik kuadran di atas memperlihatkan bagaimana temuan statistik tersebut terwujud secara spasial. Namun, pemetaan dilakukan pada usaha kecil dan menengah karena usaha mikro cenderung tersebar merata di seluruh wilayah baik kota maupun kabupaten sehingga tidak memberikan variasi yang signifikan dalam membaca pola ketimpangan. Dengan demikian, fokus pada usaha kecil dan menengah lebih mampu menunjukkan perbedaan struktur ekonomi antarwilayah.

Wilayah dengan kategori UMKM tinggi dan ketimpangan Gini rendah menggambarkan daerah yang berhasil menumbuhkan basis usaha kecil dan menengah yang luas sekaligus menjaga ketimpangan tetap rendah. Ekosistem usahanya relatif inklusif, pasar lokal hidup, dan penyerapan kerja meningkat sehingga pendapatan masyarakat naik secara seimbang. Dalam konteks ini efek redistributif UMKM tampak lebih kuat dan konsisten dengan temuan regresi yang menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi menurunkan ketimpangan.

Kategori UMKM tinggi dan ketimpangan Gini tinggi umumnya merujuk pada wilayah metropolitan dengan struktur ekonomi yang sangat dualistik. Sektor modern yang padat modal dan berproduktivitas tinggi berkembang pesat berdampingan dengan UMKM tradisional yang berproduktivitas rendah. Tanpa intervensi kebijakan yang secara khusus memperkuat UMKM, pertumbuhan ekonomi yang besar belum cukup untuk menutup jurang pendapatan.

Kategori UMKM rendah dan ketimpangan Gini rendah mencerminkan kondisi merata pada tingkat pendapatan yang relatif rendah. Basis usaha kecil dan menengah masih tipis serta didominasi usaha mikro dengan produktivitas dan akses pasar yang terbatas. Kebijakan sebaiknya diarahkan untuk mendorong usaha mikro naik kelas melalui peningkatan kapasitas manajerial serta digitalisasi agar produktivitas dapat meningkat.

Kategori UMKM rendah dan ketimpangan Gini tinggi merupakan kombinasi yang paling rentan. Basis usaha kecil dan menengah lemah sementara disparitas pendapatan tinggi. Daya dukung ekonomi lokal masih terbatas dan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas belum memadai sehingga kesenjangan lebih sulit ditekan tanpa penguatan struktur ekonomi lokal secara menyeluruh.

Analisis regresi logit menunjukkan kepemilikan usaha memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki usaha sendiri memiliki peluang 52 poin persentase lebih rendah untuk tergolong B40 (*Bottom 40*) dan 46 poin lebih tinggi untuk masuk ke kelompok U20 (*Upper 20*) atau sejahtera. Artinya, kepemilikan usaha berperan signifikan dalam meningkatkan graduasi ekonomi yang lebih tinggi. Namun, hanya sekitar 11 persen rumah tangga B40 yang memiliki usaha sendiri, dibandingkan 14,5 persen pada kelompok U20. Hal tersebut menunjukkan keterbatasan akses kelompok bawah terhadap modal, pelatihan, dan pasar.

Kondisi ini menjelaskan mengapa meskipun investasi makro di Jawa Barat cukup tinggi, hasil regresi menunjukkan koefisien investasi yang tidak signifikan terhadap ketimpangan. Investasi yang masuk ke industri besar belum terdistribusi ke sektor mikro dan kecil yang sebagian besar tenaga kerjanya berpendapatan rendah.

Diskusi di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang menegaskan bahwa wilayah ini berada pada fase transisi dari ekonomi berbasis pertanian menuju industri, terutama karena masuknya Kawasan Peruntukan Industri Cipali–Subang–Timur dan rencana operasi industri besar seperti Vinfast dan BYD. Sebagian besar masyarakat sebelumnya bekerja sebagai petani padi dan buruh perkebunan, sementara sebagian kecil bekerja sebagai buruh pabrik skala kecil. Namun, setelah adanya pembangunan bendungan dan kawasan industri, sebagian lahan pertanian berkurang sehingga

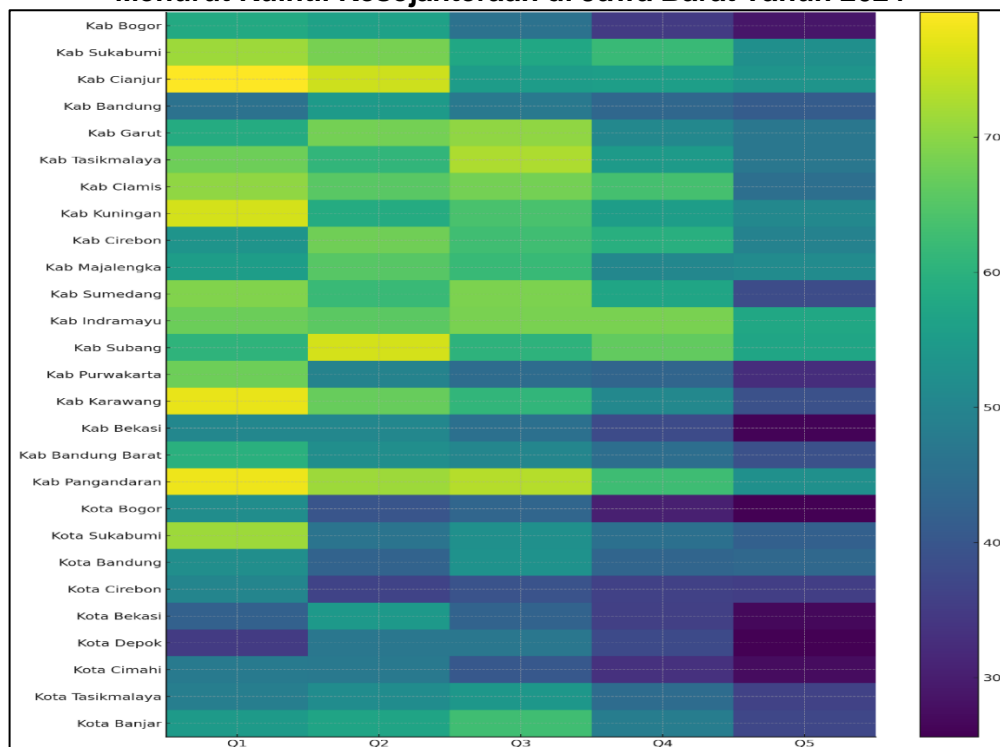
pendapatan petani tidak lagi stabil. Transformasi ini membuka peluang pekerjaan baru, tetapi belum menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat karena industri besar tersebut belum beroperasi penuh. Bahkan, masyarakat mengeluhkan rendahnya serapan tenaga kerja lokal karena rekrutmen dinilai lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar wilayah.

8.2. Ketenagakerjaan

Pekerja Sektor Informal

Hasil regresi logit menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal memiliki risiko lebih tinggi untuk tergolong dalam kelompok B40 (0,310; $p < 0,01$) dan peluang lebih kecil untuk berada di U20 (-0,420; $p < 0,01$), yang menandakan bahwa pekerjaan informal identik dengan pendapatan rendah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Proporsi kepala rumah tangga (KRT) yang bekerja di sektor informal menunjukkan perbedaan yang mencolok antara kelompok bawah dan atas. Berdasarkan hasil analisis, sebesar 54,9 persen rumah tangga pada kelompok B40 memiliki KRT yang bekerja di sektor informal, sementara pada kelompok U20 proporsinya jauh lebih rendah, yakni 37,24 persen. Grafik *Heatmap* di bawah ini akan menunjukkan sebaran pekerja informal menurut tingkat kesejahteraan dari kuintil satu sebagai kelompok termiskin hingga kuintil lima sebagai kelompok paling sejahtera.

Gambar 53. Heatmap Proporsi KRT yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Secara umum tampak pola yang menurun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal jauh lebih tinggi pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Beberapa kabupaten seperti Cianjur, Karawang, Pangandaran, dan Kuningan menonjol dengan persentase pekerja informal yang sangat tinggi pada kuintil satu, bahkan mendekati atau melampaui tujuh puluh hingga hampir delapan puluh persen. Kondisi ini menandakan ketergantungan yang besar pada pekerjaan informal dalam menopang kehidupan ekonomi kelompok berpendapatan rendah di wilayah tersebut.

Sementara itu, pada kuintil lima terlihat penurunan signifikan persentase pekerja informal di hampir seluruh kabupaten dan kota. Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor menunjukkan proporsi pekerja informal yang relatif lebih rendah dibanding wilayah lain, terutama pada kelompok masyarakat paling sejahtera. Pola ini mencerminkan karakteristik ekonomi perkotaan yang lebih formal serta akses yang lebih besar terhadap pekerjaan bergaji tetap bagi kelompok berpendapatan tinggi.

Perbandingan antarwilayah juga menegaskan adanya ketimpangan struktural antara kabupaten dengan dominasi aktivitas pertanian dan perdagangan kecil yang tenaga kerjanya cenderung pada sektor informal, dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh industri besar, dan jasa yang tenaga kerjanya lebih terserap pada sektor formal. Ketergantungan kelompok miskin terhadap pekerjaan informal dalam skala besar menjadi salah satu faktor yang memperlebar celah ketimpangan kesejahteraan, karena pekerjaan informal umumnya tidak memiliki pendidikan tinggi, pendapatan stabil, peluang mobilitas ekonomi terbatas, dan tidak memiliki perlindungan sosial. Dengan demikian, grafik *Heatmap* ini memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara tingkat kesejahteraan dan struktur pekerjaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada dinamika ketimpangan sosial ekonomi di Jawa Barat.

Pekerja Sektor Pertanian

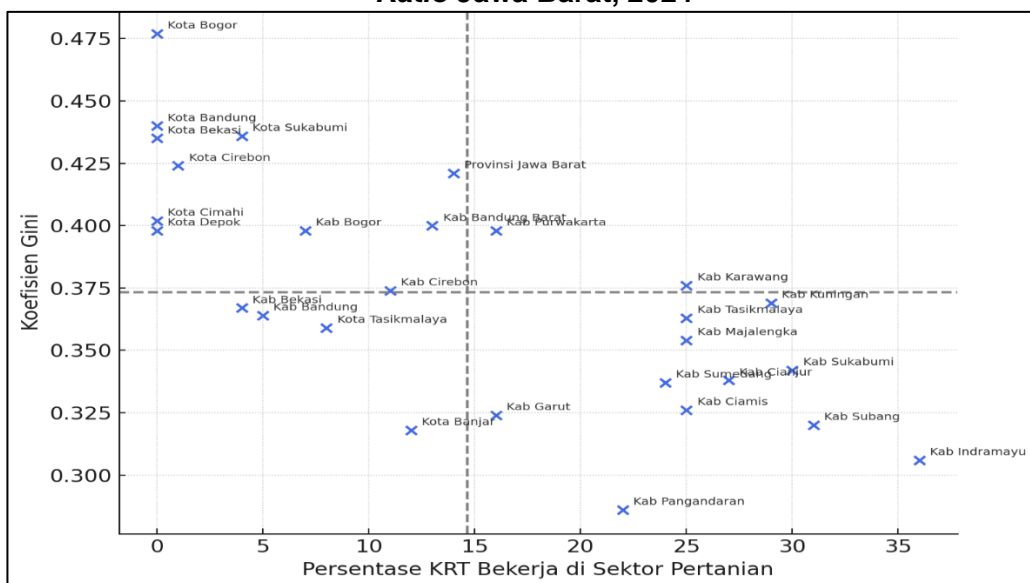
Data olahan Susenas 2024 pada Tabel 9 menunjukkan perbedaan signifikan proporsi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian antara kelompok B40 persen dan U20 persen. Sebanyak 18.8 persen KRT di B40 bekerja di sektor pertanian, sedangkan pada U20 hanya 8.33 persen. Pola ini mencerminkan bahwa pekerjaan pertanian lebih banyak dijalankan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Hasil regresi logit memperkuat gambaran tersebut. Koefisien sektor pertanian pada model B40 bernilai positif meskipun tidak signifikan, yang mengindikasikan kecenderungan meningkatnya peluang rumah tangga masuk ke kelompok bawah ketika KRT bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, pada model U20, koefisien juga tidak signifikan dan tidak menunjukkan kontribusi nyata bagi rumah tangga untuk mencapai kelompok paling sejahtera. Temuan ini konsisten dengan karakter struktural sektor pertanian yang masih

didominasi usaha kecil, produktivitas rendah, dan pendapatan yang fluktuatif sehingga tidak mampu mengangkat posisi ekonomi rumah tangga secara signifikan.

Keterkaitan kondisi ini dengan ketimpangan terlihat dari distribusi pekerja pertanian yang terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan rendah. Dominasi pekerja pertanian di B40 menunjukkan bahwa sektor ini belum memberikan peluang yang cukup bagi mobilitas kesejahteraan vertikal. Rumah tangga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian cenderung tertahan pada kelompok bawah, sementara kontribusinya pada U20 sangat terbatas. Ketimpangan yang muncul bukan hanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan antara sektor pertanian dan nonpertanian, tetapi juga oleh keterbatasan akses petani pada produktivitas tinggi, teknologi, pasar modern, dan diversifikasi sumber pendapatan. Dengan demikian, peran sektor pertanian dalam struktur ketimpangan di Jawa Barat terlihat jelas, di mana rumah tangga petani lebih rentan tertinggal secara ekonomi dan kurang memiliki peluang naik ke kelompok paling sejahtera, sehingga kesenjangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok makin melebar.

Grafik kuadran di bawah ini menggambarkan hubungan antara struktur mata pencaharian kepala rumah tangga dan tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. Garis batas vertikal menunjukkan rata-rata provinsi untuk persentase kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 15 persen, sementara garis horizontal menunjukkan rata-rata provinsi untuk Koefisien Gini sebesar 0,373. Pembagian kuadran ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan terhadap sektor pertanian dan ketimpangan ekonomi saling berkaitan di berbagai wilayah.

Gambar 54. Analisis Kuadran Persentase KRT Sektor Pertanian Vs Gini Ratio Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Wilayah yang berada di kuadran kanan bawah, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Sukabumi, menunjukkan karakteristik yang sangat agraris. Daerah-daerah tersebut memiliki proporsi kepala rumah tangga di sektor pertanian yang tinggi namun tingkat ketimpangannya relatif rendah. Hal ini mencerminkan homogenitas ekonomi pedesaan, di mana sebagian besar penduduk memiliki sumber pendapatan yang serupa dan kesenjangan ekonomi relatif kecil. Pola ini konsisten dengan karakteristik wilayah agraris tradisional yang masih mengandalkan pertanian sebagai sektor utama dan memiliki struktur sosial ekonomi yang lebih merata.

Sebaliknya, wilayah di kuadran kiri atas, seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, serta Kota Depok, menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi meskipun hampir tidak ada kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Ciri ini menggambarkan struktur ekonomi perkotaan yang lebih kompleks dengan ketergantungan tinggi pada sektor jasa, industri, dan informal. Ketimpangan di wilayah ini muncul akibat perbedaan pendapatan yang tajam antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Kehilangan ketergantungan pada sektor pertanian tidak selalu berarti pemerataan ekonomi, karena transformasi menuju sektor modern sering kali diikuti oleh kesenjangan pendapatan yang lebih besar.

Wilayah di kuadran kanan atas, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Majalengka, memperlihatkan kombinasi antara ketergantungan sektor pertanian yang tinggi dan tingkat ketimpangan yang juga tinggi. Kondisi ini dapat terjadi pada daerah yang tengah mengalami transisi ekonomi, di mana sebagian masyarakat tetap menggantungkan hidup pada pertanian tradisional, sementara sebagian lainnya telah masuk ke sektor ekonomi dengan pendapatan lebih tinggi. Ketimpangan dalam kuadran ini mencerminkan ketidakmerataan proses transformasi struktur ekonomi, di mana manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata.

Terakhir, wilayah di kuadran kiri bawah, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran, memiliki proporsi KRT sektor pertanian yang rendah sekaligus tingkat ketimpangan yang rendah. Daerah-daerah ini menunjukkan struktur ekonomi yang relatif baik dengan diversifikasi pekerjaan ke sektor nonpertanian tanpa menghasilkan kesenjangan pendapatan yang besar. Kondisi ini mencerminkan kemampuan wilayah tersebut untuk menciptakan mobilitas ekonomi yang lebih merata melalui perluasan sektor produktif nonpertanian.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara ketergantungan pada sektor pertanian dan ketimpangan ekonomi di Jawa Barat tidak bersifat linear. Daerah dengan basis pertanian kuat tidak selalu lebih timpang, sementara wilayah perkotaan modern bisa menghadapi

tingkat ketimpangan yang jauh lebih tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan transformasi struktural ekonomi secara inklusif agar pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor modern tidak memperlebar kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Temuan lapangan mendukung hasil analisis kuadran yang menunjukkan bahwa wilayah dengan porsi Kepala Rumah Tangga yang bekerja di sektor pertanian cenderung memiliki *Gini Ratio* yang lebih rendah, atau dengan kata lain ketimpangannya relatif kecil. Pola ini selaras dengan penjelasan Bappelitbangda Kabupaten Sumedang yang menyatakan bahwa ketimpangan lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara sekitar 20 dari 26 kecamatan di Sumedang masih didominasi kegiatan pertanian yang bersifat homogen dan subsisten, sehingga kesenjangan pendapatan relatif lebih rendah. Homogenitas mata pencaharian dan keterbatasan variasi pendapatan di wilayah agraris menyebabkan distribusi pengeluaran antarrumah tangga tidak jauh berbeda satu sama lain. Meskipun tingkat kesejahteraan absolut lebih rendah, struktur ekonomi yang seragam membuat ketimpangan menjadi kecil.

Kondisi serupa juga diungkapkan dalam diskusi dengan Bappeda Kabupaten Purwakarta. Mereka menegaskan bahwa wilayah selatan Purwakarta yang masih agraris justru menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah utara yang telah berkembang menjadi kawasan industri. Transformasi menuju industri menyebabkan struktur pendapatan semakin beragam dan rentang upah semakin lebar, sehingga ketimpangan meningkat. Sebaliknya, masyarakat di wilayah agraris selatan memiliki basis ekonomi yang lebih seragam, terutama pada sektor pertanian berproduktivitas rendah. Hal ini memperjelas bahwa struktur ekonomi yang belum terdiferensiasi kuat secara alami menghasilkan tingkat ketimpangan yang lebih kecil.

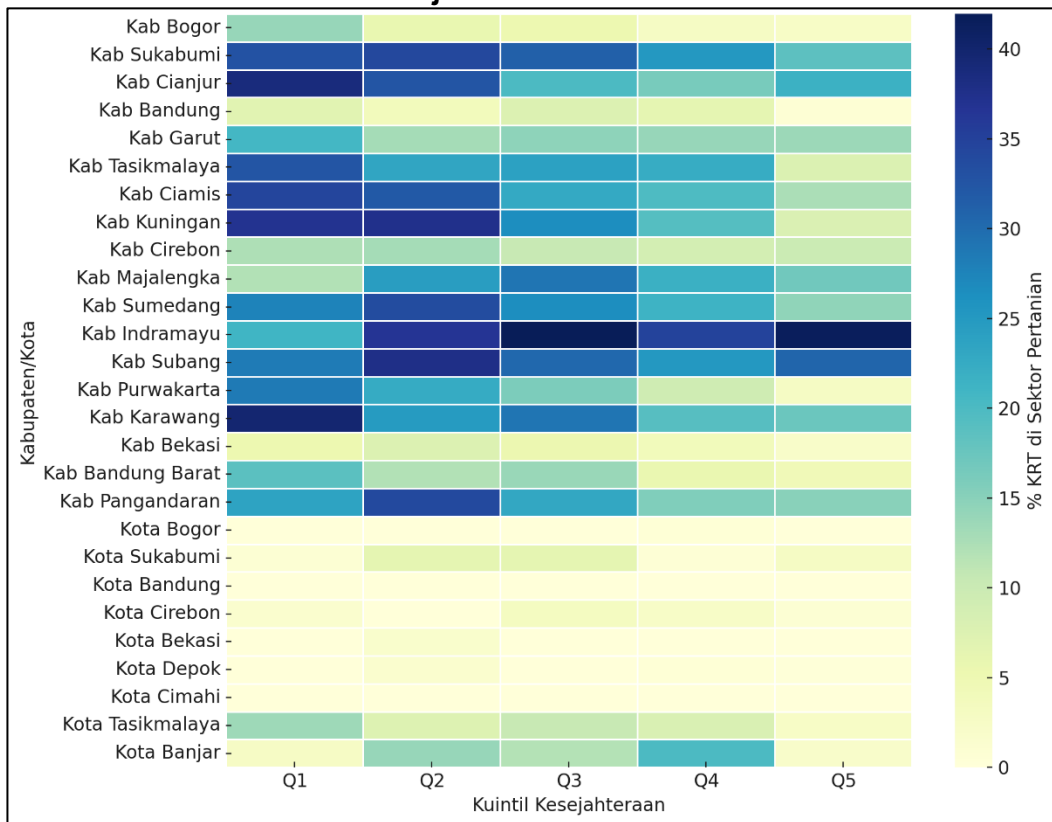
Narasi lapangan dari Kecamatan Cimanggung juga memperkuat hubungan tersebut. Pada desa-desa agraris seperti Tegalmanggung dan Cimanuk, mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani atau petani kecil, dengan pendapatan rata-rata yang relatif serupa. Sumber penghidupan yang homogen, keterbatasan akses lahan, dan minimnya diversifikasi usaha menciptakan struktur pendapatan yang sempit sehingga ketimpangan antar rumah tangga menjadi rendah. Dibandingkan dengan kawasan industri Jatinangor di bagian barat Cimanggung, distribusi ekonomi di desa-desa agraris jelas lebih merata meskipun pada tingkat pendapatan yang rendah.

Secara makro, Bappeda Provinsi Jawa Barat juga memberikan konteks penting bahwa ketimpangan provinsi terutama berasal dari kawasan industri dan perkotaan, bukan wilayah agraris. Mereka menegaskan bahwa sektor industri pengolahan yang mendominasi PDRB Jawa Barat menciptakan ceruk pendapatan yang sangat lebar antara pekerja formal

berubah tinggi dan pekerja informal atau buruh kasar. Sebaliknya, wilayah selatan Jawa Barat yang masih bergantung pada pertanian justru memiliki ketimpangan yang relatif rendah karena struktur pendapatan yang seragam, meskipun produktivitas sektor pertaniannya masih terbatas.

Seluruh temuan lapangan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hasil grafik kuadran, yaitu bahwa semakin besar proporsi rumah tangga yang menggantungkan hidup pada pertanian, semakin rendah tingkat ketimpangannya. Struktur ekonomi agraris yang homogen memang belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan, namun secara bersamaan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kondisi ini menunjukkan paradoks bahwa wilayah dengan kesejahteraan rendah justru lebih setara, sementara wilayah maju dan terindustrialisasi menghadapi tantangan ketimpangan yang lebih besar akibat diversifikasi ekonomi dan ketidakmerataan akses terhadap kesempatan ekonomi. Analisis selanjutnya, akan melihat pola KRT yang bekerja di sektor pertanian menurut tingkat kesejahteraan.

Gambar 55. Heatmap Proporsi KRT yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Grafik *Heatmap* yang disajikan menggambarkan proporsi Kepala Rumah Tangga yang bekerja di sektor pertanian berdasarkan kuintil kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun 2024. Pola umum yang terlihat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan

suatu rumah tangga, semakin kecil proporsi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Pada kuintil satu dan kuintil dua, sebagian besar wilayah kabupaten seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan memperlihatkan proporsi KRT yang bekerja di sektor pertanian pada kisaran tiga puluh hingga hampir empat puluh persen. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama bagi rumah tangga berpendapatan rendah di wilayah pedesaan. Kondisi ini mencerminkan keterkaitan yang kuat antara kerentanan ekonomi dan ketergantungan pada pekerjaan dengan produktivitas rendah. Kondisi kesejahteraan keluarga petani yang rentan juga diperkuat oleh sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki bahkan mereka hanya bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan. Narasi di lapangan dengan BP4D Subang menyatakan bahwa petani rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha.

Pada kelompok menengah, khususnya kuintil tiga, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang menunjukkan proporsi yang tetap tinggi bahkan mencapai lebih dari empat puluh persen. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang merupakan lumbung padi nasional kedua dan ketiga setelah Kabupaten Karawang. Pemerintah Kabupaten Sumbang juga mencatat adanya komoditas unggulan seperti nanas, kopi, cengkeh, dan teh khususnya di daerah pegunungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada wilayah agraris tertentu, sebagian masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan menengah pun masih menggantungkan pendapatan utama pada sektor pertanian. Keberadaan petani pemilik lahan atau petani dengan produktivitas lebih baik memungkinkan mereka untuk berada pada kategori kesejahteraan menengah dengan tetap bekerja di sektor pertanian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak serta merta mendorong perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, terutama pada wilayah dengan basis ekonomi agraris yang kuat.

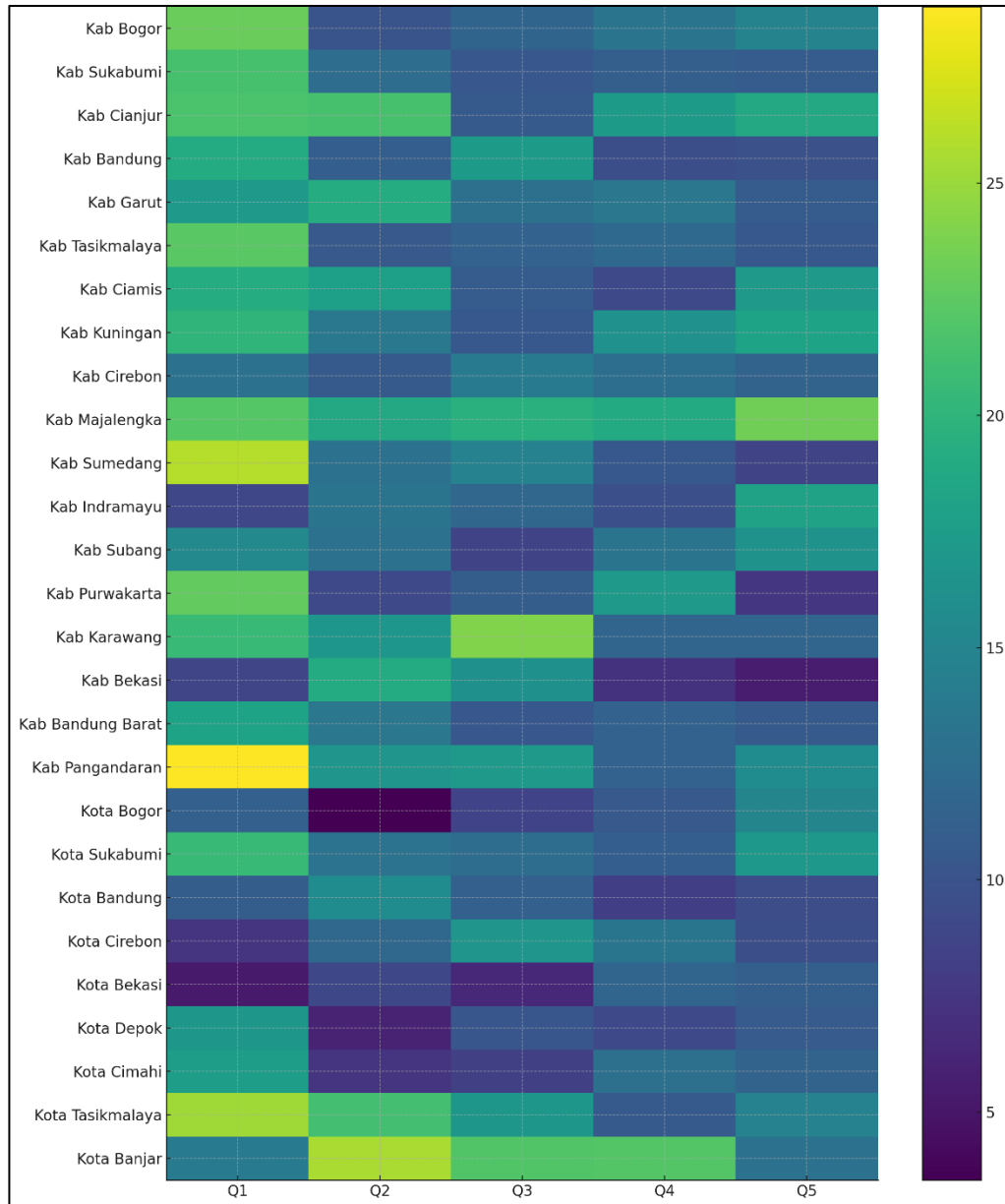
Berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi menunjukkan pola yang kontras dimana proporsi KRT yang bekerja di sektor pertanian mendekati nol pada seluruh kuintil. Hal ini mencerminkan struktur ekonomi perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri sehingga peluang kerja di sektor pertanian sangat terbatas. Pada kuintil empat dan kuintil lima, baik di wilayah kabupaten maupun kota, proporsi rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian menurun secara signifikan. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan umumnya diikuti dengan diversifikasi pekerjaan, terutama menuju sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi seperti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan.

Secara keseluruhan, pola yang tergambar dalam *Heatmap* ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat kesejahteraan dan ketergantungan sektor pertanian. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah masih sangat terikat pada sektor pertanian, sementara kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi cenderung terlibat pada sektor nonpertanian. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi struktural ekonomi yang mengarah pada pengurangan ketergantungan pada sektor pertanian berlangsung secara beriringan dengan peningkatan kesejahteraan. Pada saat yang sama, wilayah agraris yang tetap menunjukkan proporsi tinggi pada kuintil menengah mencerminkan pentingnya karakteristik lokal dalam memahami dinamika sektor pertanian. Temuan ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan peluang diversifikasi ekonomi yang inklusif terutama bagi rumah tangga petani agar peningkatan kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pekerja Setengah Menganggur

Sementara itu, proporsi KRT setengah menganggur (bekerja <35 jam/minggu) lebih tinggi di kelompok B40 (17,39 persen) dibandingkan U20 (13,03 persen). Hasil regresi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap peluang tergolong B40 (0,353; $p < 0,01$), namun tidak signifikan terhadap U20. Kondisi ini menegaskan bahwa rendahnya produktivitas dan jam kerja merupakan faktor yang memperbesar risiko kemiskinan. Secara keseluruhan, rumah tangga dengan usaha mandiri dan pekerjaan formal memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan, sedangkan pekerjaan informal dan setengah menganggur meningkatkan risiko kerentanan ekonomi yang akan tergambar pada grafik berikut.

Gambar 56. Heatmap Proporsi KRT yang Berstatus Setengah Menanggur Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Grafik *Heatmap* pekerja setengah menganggur menggambarkan seberapa besar penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari tiga puluh lima jam per minggu di setiap kuintil kesejahteraan. Polanya menunjukkan bahwa ketidakpastian jam kerja dan rendahnya ketercukupan jam kerja lebih banyak dialami oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Pada kuintil satu, beberapa kabupaten seperti Pangandaran, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Majalengka menempati posisi tertinggi dengan proporsi pekerja setengah menganggur di atas dua puluh persen. Kondisi ini menandakan adanya keterbatasan kesempatan kerja penuh di

wilayah tersebut, terutama bagi kelompok miskin yang umumnya bekerja pada sektor informal atau musiman.

Pergerakan menuju kuintil dua hingga kuintil empat menunjukkan penurunan yang relatif konsisten di banyak daerah, meskipun tetap terdapat variasi antarwilayah. Kabupaten Karawang dan beberapa kota seperti Kota Tasikmalaya menunjukkan lonjakan pada kuintil tiga, yang mencerminkan kondisi pasar kerja yang tidak sepenuhnya stabil bagi kelompok menengah. Pada kuintil lima, meskipun tampak nilai yang lebih rendah dibanding kelompok miskin, pekerja setengah menganggur masih ditemukan cukup tinggi di beberapa wilayah seperti Majalengka, Pangandaran, Sukabumi, dan Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakcukupan jam kerja tidak hanya menjadi isu bagi kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga menyentuh sebagian kelompok berpendapatan tinggi yang mungkin bekerja dalam sektor tertentu yang tidak menawarkan jam kerja penuh.

Secara keseluruhan, *Heatmap* ini menggambarkan hubungan yang erat antara tingkat kesejahteraan dan kecukupan jam kerja. Wilayah dengan beban setengah menganggur yang tinggi pada kuintil rendah menghadapi risiko ketimpangan yang lebih dalam karena pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak optimal. Ketidakstabilan jam kerja tersebut dapat memperburuk ketimpangan antarkelompok, terutama ketika kesempatan kerja penuh lebih terkonsentrasi pada kelompok sejahtera dan wilayah perkotaan.



Ringkasan Bab

- Struktur pasar kerja yang heterogen menyebabkan perbedaan besar dalam pendapatan pekerja yang umumnya terjadi di perkotaan. Pekerja sektor formal cenderung memperoleh pendapatan lebih tinggi dibanding sektor informal.
- UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar. Keterbatasan ini membuat kontribusinya terhadap pemerataan belum optimal.
- Kualitas pekerjaan masih belum merata antarwilayah dan sektor. Penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci untuk meningkatkan peluang ekonomi masyarakat.

BAB IX

DETERMINAN KETIMPANGAN PADA DIMENSI DEMOGRAFI DAN URBANISASI

9.1. Kepadatan Penduduk

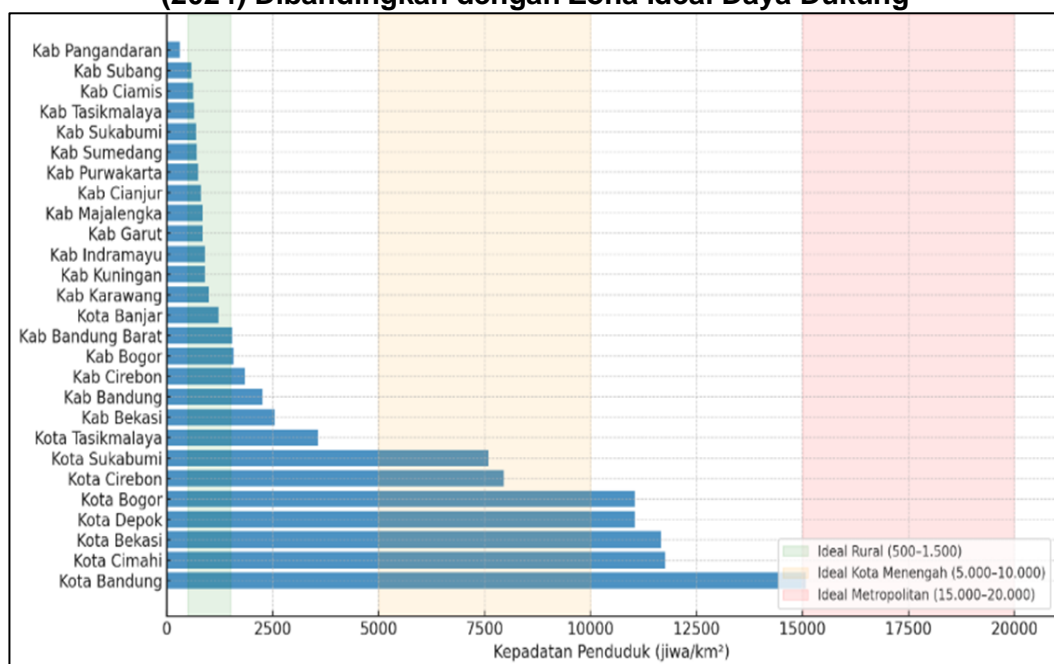
Kepadatan penduduk dipahami sebagai perbandingan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah administrasi dengan luas lahan (BPS, 2024). Hasil regresi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan. Artinya, semakin padat suatu wilayah, semakin besar potensi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dapat terjadi berkat persaingan yang ketat di antara masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan sumber daya (Damayanti, L., & Astuti, T., 2024).

Pada Gambar 5 (bab 2), menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh daerah perkotaan. Secara berurutan, kota-kota tersebut adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2024, Kota Bandung yang merupakan kota metropolitan, menjadi kota terpadat nomor satu di Provinsi Jawa Barat dengan kepadatan sebesar 15,176 jiwa/km². Angka ini lebih tinggi dibanding kepadatan penduduk nasional yang hanya sebesar 149 jiwa/km². Sedangkan, berdasarkan United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) zona kepadatan ideal daya dukung menurut fungsi wilayah metropolitan adalah 15.000–20.000 jiwa/km², ideal kota menengah (5.000–10.000 jiwa/km²), dan ideal rural (500 – 1.500 jiwa/km²).

Angka kepadatan penduduk diatas mencerminkan daya dukung yang berbeda untuk setiap wilayah. Kawasan metropolitan dianggap ideal apabila didukung dengan kualitas infrastruktur memadai. Kemudian, kota menengah dapat dikatakan lebih sehat. Sedangkan, Kawasan agraris mencerminkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Rentang ini dianggap mampu mendukung efisiensi transportasi publik, pemanfaatan infrastruktur kota, dan interaksi sosial-ekonomi yang dinamis. Di bawah 15.000 jiwa/km², kota berisiko mengalami *urban sprawl* yang inefisien; sementara di atas 45.000 jiwa/km², beban infrastruktur dan risiko *overcrowding* meningkat tajam.

Dalam memahami konteks daya dukung wilayah, gambar berikut menampilkan kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota di Jawa Barat dibandingkan dengan zona kepadatan ideal menurut fungsi wilayah. Gambar ini membantu melihat bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Jawa Barat berada dalam rentang ideal rural. Sedangkan, kota-kota besar seperti Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, dan Bogor sudah masuk kategori metropolitan dengan kepadatan di atas 11 ribu jiwa/km².

Gambar 57. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2024) Dibandingkan dengan Zona Ideal Daya Dukung



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

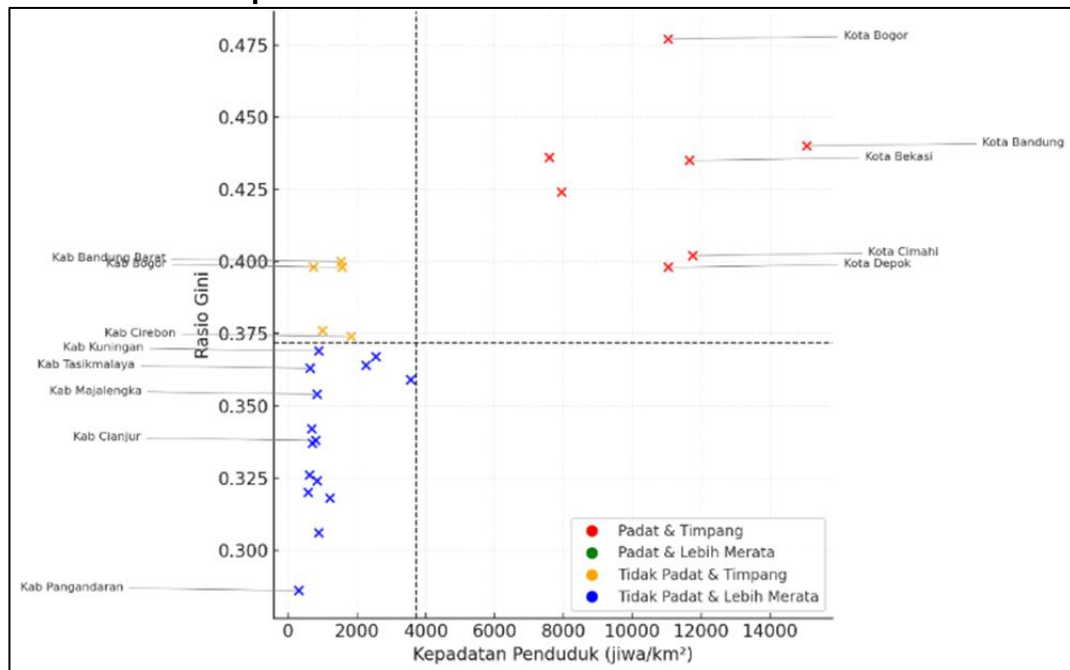
Gambar di atas menunjukkan adanya kesenjangan kepadatan penduduk yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Barat. Kota-kota besar seperti Bandung, Depok, Bekasi, Cimahi, dan Bogor memiliki kepadatan jauh di atas rata-rata provinsi, sementara kabupaten rural masih berada jauh di bawah standar ideal kota menengah. Hal ini mengindikasikan konsentrasi penduduk masih terpusat di wilayah perkotaan. Wilayah dengan kepadatan sangat tinggi (Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, dan Bogor) berpotensi mengalami tekanan terhadap infrastruktur, perumahan, transportasi, dan lingkungan. Wilayah rural dengan kepadatan rendah berpotensi menjadi *buffer zone* atau kawasan pengembangan baru, terutama untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi beban kota besar.

Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi di daerah perkotaan dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan risiko kemacetan, polusi, dan keterbatasan ruang terbuka hijau, serta memperbesar ketimpangan pendapatan. Hal ini selaras dengan urutan *Gini Ratio* di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh daerah perkotaan/metropolitan. Bahkan, untuk enam urutan dengan rasio tertinggi pun diisi oleh daerah perkotaan, yaitu Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi. Dengan demikian, semakin tinggi kepadatan penduduk akan semakin berpengaruh dalam meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Namun, kepadatan yang tinggi tidak hanya relevan dari sisi daya dukung, tetapi juga berkaitan secara langsung dengan ketimpangan. Maka dari itu,

pemetaan kuadran antara kepadatan penduduk dan *Gini Ratio* turut dilakukan agar terlihat variasi spasial hubungan antara keduanya. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh kota besar di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada kuadran padat–timpang. Sementara itu, daerah rural berada di kuadran tidak padat–lebih merata, meskipun sebagian besar masih dalam kondisi merata miskin.

Gambar 58. Kuadran Kepadatan Penduduk vs Ketimpangan (*Gini Ratio*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Gambar 58 terdiri atas empat kuadran yang merefleksikan kondisi dari setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kuadran 1 merupakan kuadran dengan kategori daerah yang memiliki kepadatan tinggi dan *Gini Ratio* tinggi. Ciri dari kuadran ini adalah kepadatan > 3.714 jiwa/km² dan *Gini Ratio* ≥ 0,372. Kuadran ini diisi oleh daerah-daerah perkotaan, yang terdiri atas Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon. Kuadran 1 diisi oleh wilayah kota atau metropolitan yang sangat padat dengan alasan kepadatan tinggi memperburuk kompetisi atas lahan, lapangan kerja, dan layanan publik. Pertumbuhan ekonomi perkotaan cenderung tidak inklusif, memperlebar jurang kaya–miskin.

Kuadran 2, yaitu kuadran berkategori kepadatan rendah dan *Gini Ratio* tinggi. Kuadran ini memiliki ciri kepadatan ≤ 3.714 jiwa/km² dan *Gini Ratio* < 0,372. Terdapat lima kabupaten yang terletak di kuadran 2, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kuningan. Kabupaten-kabupaten dengan kepadatan penduduk menengah tetapi memiliki *Gini Ratio* tinggi antara lain disebabkan oleh industrialisasi padat modal (Kabupaten

Karawang), efek aglomerasi ekonomi (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat), dan ketimpangan antarwilayah desa–kota dalam kabupaten (Kabupaten Bogor).

Kuadran 3 merupakan kuadran dengan kategori kepadatan rendah dan *Gini Ratio* rendah. Ciri dari kuadran ini umumnya kepadatan ≤ 3.714 jiwa/km² dan *Gini Ratio* $< 0,372$. Wilayah yang termasuk di dalam kuadran 3 antara lain Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya.

Kuadran 4, yang dikategorikan sebagai kuadran dengan kepadatan tinggi dan *Gini Ratio* rendah memiliki ciri kepadatan > 3.714 jiwa/km² dan *Gini Ratio* $< 0,372$. Berdasarkan ciri tersebut, tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang tergolong ke dalam kuadran ini. Ketiadaan wilayah dalam kuadran ini menunjukkan pola konsisten bahwa kepadatan tinggi hampir selalu diiringi ketimpangan pendapatan yang tinggi.

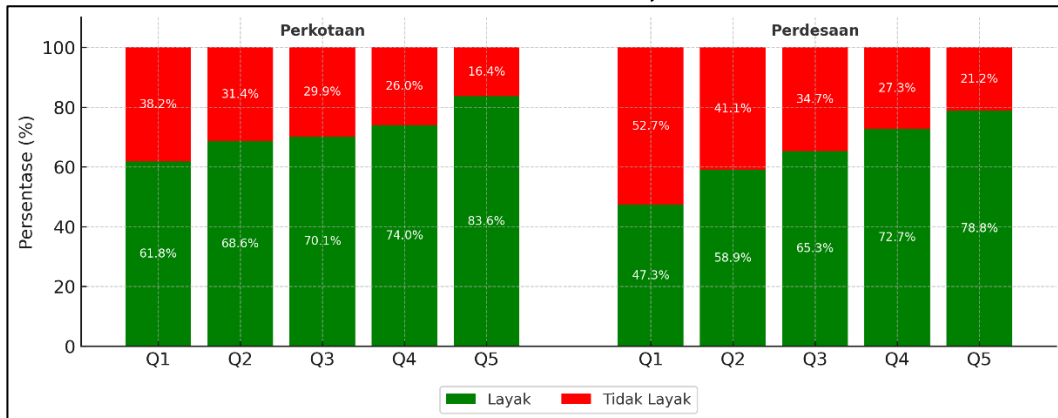
Kombinasi dua analisis di atas menegaskan bahwa kepadatan penduduk memiliki dua wajah, yakni di satu sisi diperlukan untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan kota, tetapi di sisi lain tanpa tata kelola yang inklusif, kepadatan justru memperlebar jurang ketimpangan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kepadatan harus mempertimbangkan fungsi wilayah, kapasitas daya dukung, serta strategi redistribusi yang sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.

9.2. Urbanisasi

Hasil regresi menunjukkan bahwa urbanisasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan. Salah satu dimensinya tercermin dari disparitas kualitas hunian antar kabupaten/kota di Jawa Barat. Fenomena ini semakin jelas jika ditelusuri melalui dimensi perumahan. Data Susenas 2024 memperlihatkan bahwa kualitas hunian antara perkotaan dan perdesaan menampilkan pola yang berbeda namun sama-sama mengindikasikan adanya ketimpangan.

Di kawasan perkotaan, proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak meningkat tajam seiring naiknya kuintil pendapatan. Pada kuintil terbawah, hanya sekitar 61,8 persen rumah tangga yang tinggal di hunian layak, sementara 38,2 persen sisanya masih berada di hunian tidak layak. Kondisi ini membaik secara konsisten di kuintil atas hingga mencapai 83,6 persen pada kuintil kelima. Pola ini menggarisbawahi jurang yang lebar antara kelompok miskin dan kaya di kota: kelompok kaya hampir seluruhnya memiliki hunian dengan standar SPM perumahan, sedangkan kelompok miskin terkonsentrasi di kawasan padat dan kumuh, atau tinggal di kontrakan dengan kondisi fisik bangunan yang tidak memadai.

Gambar 59. Hunian Layak dan Tidak Layak Menurut Kuintil Perkotaan dan Perdesaan Jawa Barat, 2024



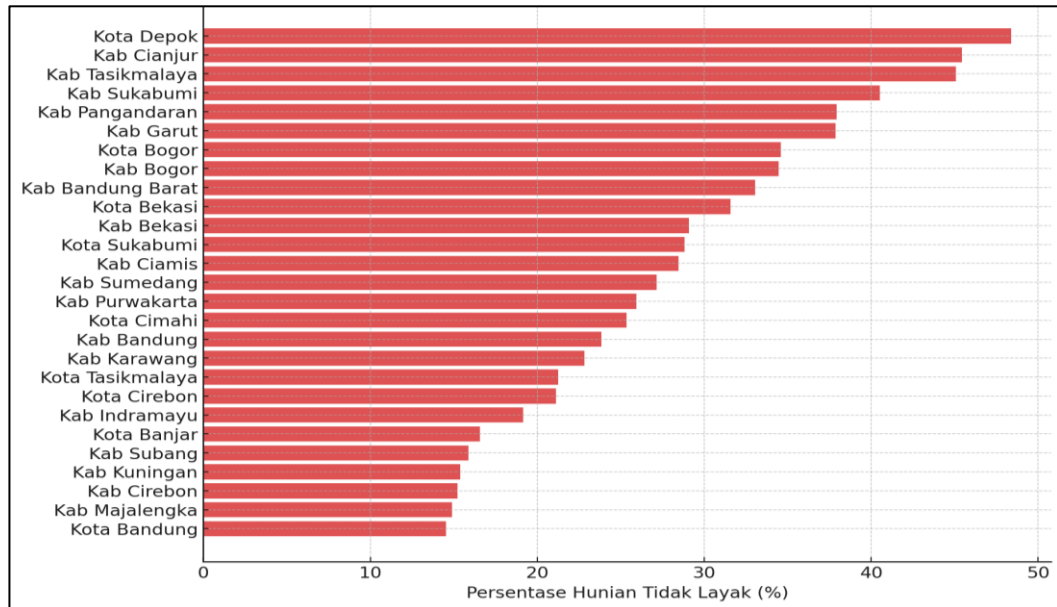
Sumber: BPS, Susenas (Diolah)

Sebaliknya, di perdesaan, permasalahan utama bukan terletak pada ketimpangan antar kelompok, melainkan rendahnya kualitas hunian secara merata. Pada kuintil pertama, hanya 47,3 persen rumah tangga yang tinggal di hunian layak, bahkan lebih rendah dibanding kota. Meskipun proporsinya meningkat menjadi 78,8 persen pada kuintil kelima, perbaikannya tidak setajam di perkotaan. Hal ini mencerminkan kondisi merata miskin: infrastruktur dasar perdesaan yang terbatas, seperti akses air bersih, sanitasi layak, listrik, dan material bangunan permanen menjadikan semua lapisan masyarakat di desa menghadapi keterbatasan yang relatif serupa.

Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa urbanisasi memang meningkatkan rata-rata akses hunian layak, tetapi pada saat yang sama memperlebar kesenjangan antar kelompok penduduk di wilayah perkotaan. Sementara itu, di perdesaan, meskipun ketimpangan antar kuintil lebih kecil, mayoritas masyarakat masih berjuang memenuhi standar hunian layak. Kedua kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan perumahan inklusif menjadi sangat penting untuk menekan ketimpangan yang diperburuk oleh proses urbanisasi di Jawa Barat.

Ketika pola ini diturunkan lebih rinci pada level kabupaten/kota, terlihat bahwa masalah hunian tidak layak memiliki karakter yang beragam sesuai konteks wilayah. Kota Depok mencatat persentase hunian tidak layak tertinggi, yakni sekitar 48,4 persen. Hal ini menarik karena Depok merupakan kota metropolitan dengan kepadatan sangat tinggi, yang seharusnya memiliki akses infrastruktur lebih baik. Tingginya angka ini menunjukkan adanya *backlog* perumahan yang serius di kawasan penyangga Jakarta, dimana permintaan hunian melonjak tetapi pasokan layak tidak seimbang.

Gambar 60. Persentase Hunian Tidak Layak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS, Susenas 2024 (diolah)

Disusul oleh beberapa kabupaten seperti Cianjur (45,4 persen), Tasikmalaya (45,1 persen), dan Sukabumi (40,5 persen), yang secara umum merefleksikan keterbatasan infrastruktur dasar di daerah perdesaan. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran juga tinggi (37,9 persen), mencerminkan kondisi merata miskin di mana sebagian besar rumah tangga masih menghadapi keterbatasan kualitas perumahan.

Sebaliknya, kota-kota besar seperti Bandung (14,3 persen), Cirebon (17,0 persen), dan Bekasi (29,6 persen) menunjukkan proporsi hunian tidak layak yang lebih rendah dibanding daerah rural. Hal ini mengindikasikan bahwa meski *backlog* perumahan tetap ada, proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak relatif lebih tinggi di pusat metropolitan.

Temuan ini sejalan dengan literatur. UN-Habitat (2016) menekankan bahwa urbanisasi tanpa kebijakan perumahan inklusif akan memperburuk ketimpangan kualitas hunian di kota. Di Indonesia, Firdaus & Haryo (2019) menemukan bahwa *backlog* perumahan menumpuk di kota-kota besar dan menengah, terutama bagi kelompok 40 persen terbawah. Hal ini persis terlihat di Jawa Barat: kota metropolitan seperti Depok, Bekasi, dan Bogor menghadapi *backlog* yang berat, sementara kabupaten rural tertinggal mengalami masalah merata miskin.

Jawa Barat juga memiliki tingkat urbanisasi keluar yang tinggi dan berdasarkan Data BP2MI menjadi kantong tenaga migran terbesar ketiga pada 2024 setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Muhamad, 2025). Sulitnya kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan ternyata juga telah memicu sebagian penduduk di tujuh belas kabupaten dengan pengeluaran riil per kapita terendah bermigrasi menjadi tenaga kerja migran di luar

negeri. Beberapa daerah menjadi kantong pekerja migran seperti kabupaten Indramayu, Cirebon, Subang, dan Majalengka. Pendorong utama masyarakat di daerah tersebut merantau bekerja di luar negeri adalah keterbatasan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka di daerahnya, dan budaya yang sudah turun temurun. Daerah yang ditinggalkan penduduknya bermigrasi biasanya daerah pertanian dan masyarakatnya berpendidikan rendah. Meskipun remitansi yang dikirim migran tersebut cukup besar namun lebih utamanya untuk pengeluaran konsumsi kebutuhan sehari-hari. Karena pemanfaatan aliran remitansi sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak dapat menggerakkan ekonomi daerahnya untuk lebih inovatif dan meningkatkan kompetensi penduduknya. Kondisi tersebut turut pemicu disparitas pengeluaran riil per kapita wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dimensi migrasi dan kependudukan memberikan gambaran tentang mobilitas sosial dan struktur keluarga. Proporsi rumah tangga migran di wilayah perkotaan sangat kecil, yakni 0,4 persen di B40 dan 0,21 persen di U20. Hasil regresi menunjukkan bahwa migran di wilayah perkotaan memiliki peluang lebih rendah untuk tergolong B40 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap U20. Sebaliknya, migran di wilayah perdesaan memiliki proporsi 9,98 persen di B40 dan 35,04 persen di U20, dengan pengaruh negatif terhadap B40 dan positif terhadap U20. Artinya, migrasi dari perdesaan umumnya dilakukan oleh individu atau keluarga yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan di daerah tujuan.

9.3. Demografi Rumah Tangga

Dimensi demografi rumah tangga menggambarkan karakteristik dasar yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga, seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, usia, status perkawinan, ukuran rumah tangga, dan rasio ketergantungan. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 9, kelompok B40 dan U20 menunjukkan pola yang berlawanan pada hampir seluruh variabel demografis. Proporsi kepala rumah tangga (KRT) perempuan pada kelompok B40 tercatat sebesar 9,14 persen, sedangkan pada kelompok U20 mencapai 12,46 persen. Hasil regresi menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala perempuan memiliki peluang lebih tinggi untuk tergolong dalam kelompok bawah (koefisien 0,253; signifikan pada $p < 0,05$) dan peluang lebih rendah untuk tergolong dalam kelompok atas (koefisien $-0,424$; $p < 0,01$). Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung lebih rentan secara ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan kesempatan kerja yang layak.

Rata-rata usia kepala rumah tangga pada kelompok B40 dan U20 relatif serupa, masing-masing 49,59 tahun dan 49,56 tahun. Namun, hasil regresi logit menunjukkan bahwa setiap pertambahan usia KRT menurunkan

probabilitas tergolong B40 ($-0,014$; $p < 0,01$) dan meningkatkan peluang tergolong U20 ($0,010$; $p < 0,01$). Hal ini dimungkinkan bahwa usia yang lebih tua berhubungan dengan pengalaman ekonomi dan stabilitas pendapatan yang lebih baik.

Meskipun proporsi kepala rumah tangga (KRT) lansia pada kelompok B40 sedikit lebih tinggi dibandingkan U20 (masing-masing 16,27 persen dan 14,7 persen), hasil regresi menunjukkan pola yang menarik. Variabel KRT lansia tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang menjadi B40, tetapi justru berpengaruh positif signifikan terhadap peluang tergolong U20 (koefisien $0,245$; $p < 0,01$). Temuan ini menggambarkan bahwa posisi ekonomi rumah tangga lansia di Jawa Barat tidak homogen, terdapat segmen lansia rentan sekaligus lansia mapan secara ekonomi.

Bagi kelompok lansia rentan, penurunan kapasitas fisik dan terbatasnya kesempatan kerja menyebabkan ketergantungan ekonomi pada anggota keluarga atau bantuan sosial. Mereka umumnya tinggal di pedesaan, memiliki tingkat pendidikan rendah, serta tidak terlindungi oleh sistem pensiun formal. Kelompok ini masih menghadapi risiko kemiskinan struktural. Sebaliknya, kelompok lansia yang tergolong U20 cenderung merupakan individu yang sebelumnya bekerja di sektor formal atau wirausaha, sehingga memiliki aset produktif, pendapatan pensiun, atau dukungan antargenerasi yang kuat. Koefisien positif pada U20 mencerminkan keberadaan kelompok lansia mapan tersebut, mereka bukanlah representasi mayoritas, tetapi cukup signifikan secara statistik untuk menunjukkan bahwa akumulasi aset sepanjang siklus hidup memberi perlindungan ekonomi di usia lanjut.

Temuan ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, dimensi kesejahteraan lansia sangat dipengaruhi oleh jejak ekonomi masa produktifnya, bukan sekadar oleh faktor usia. Kedua, sistem jaminan sosial dan pensiun di Indonesia yang belum universal menyebabkan ketimpangan antar-lansia semakin lebar: hanya mereka yang pernah bekerja di sektor formal atau memiliki tabungan yang dapat mempertahankan kesejahteraan di usia tua. Dengan demikian, kebijakan peningkatan kesejahteraan lansia di Jawa Barat perlu menitikberatkan pada dua arah: (1) memperkuat perlindungan sosial non-kontributif bagi lansia miskin dan rentan; serta (2) mendorong program tabungan dan jaminan hari tua sejak usia produktif, terutama bagi pekerja informal yang mendominasi struktur ketenagakerjaan provinsi ini.

Status perkawinan (tidak kawin) juga berpengaruh signifikan: rumah tangga dengan KRT tidak kawin memiliki peluang lebih besar tergolong B40 ($0,114$; $p < 0,01$) dan lebih kecil peluangnya menjadi U20 ($-0,061$; $p < 0,05$). Selain itu, ukuran rumah tangga yang lebih besar meningkatkan risiko kemiskinan dengan koefisien $0,523$ ($p < 0,01$) dan menurunkan peluang tergolong kelompok atas ($-0,517$; $p < 0,01$). Rasio ketergantungan juga memiliki arah

pengaruh serupa, yaitu positif terhadap B40 (0,615; $p < 0,01$) dan negatif terhadap U20 (-0,556; $p < 0,01$). Secara keseluruhan, rumah tangga dengan KRT perempuan, tidak kawin, ukuran keluarga besar, dan rasio ketergantungan tinggi memiliki risiko lebih besar tergolong dalam kelompok miskin.

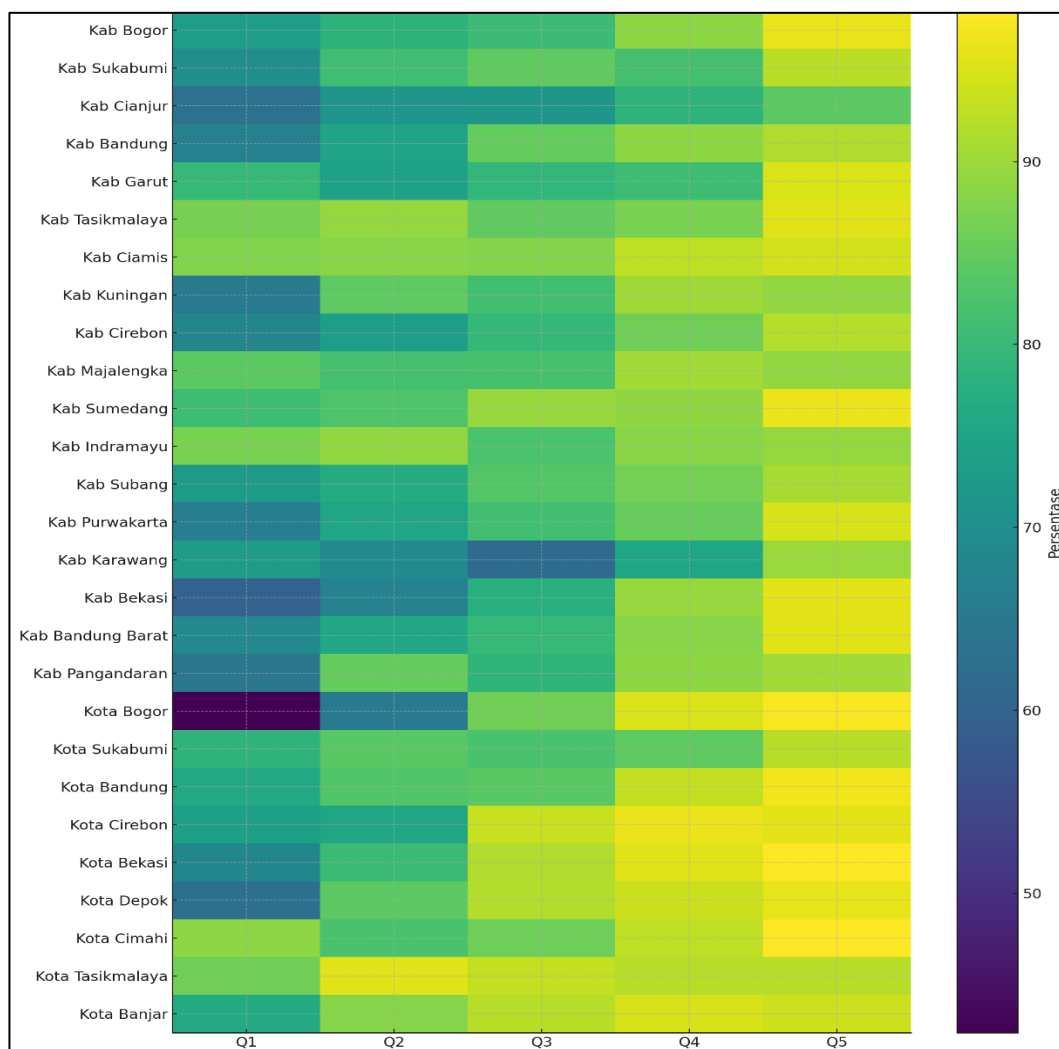
Selain itu, rasio ketergantungan juga menjadi penentu penting kesejahteraan. Rata-rata rasio ketergantungan di B40 mencapai 0,64 lebih tinggi dibandingkan 0,40 pada U20. Hasil regresi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap peluang tergolong B40 (0,615; $p < 0,01$) dan negatif terhadap U20 (-0,556; $p < 0,01$). Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi jumlah tanggungan tidak produktif, semakin besar beban ekonomi rumah tangga dan semakin kecil peluang mereka untuk naik kelas kesejahteraan.

9.4. Akses Keuangan dan Jaminan Sosial

Akses terhadap lembaga keuangan formal dan jaminan sosial mencerminkan tingkat inklusi ekonomi rumah tangga. Proporsi rumah tangga yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal (bank atau koperasi) pada kelompok B40 sebesar 72,35 persen, sedangkan pada kelompok U20 mencapai 88,84 persen.

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan rekening menurunkan peluang tergolong B40 (-0,652; $p < 0,01$) dan meningkatkan peluang tergolong U20 (0,974; $p < 0,01$). Demikian pula, kepemilikan jaminan kesehatan atau asuransi menurunkan peluang tergolong B40 (-0,222; $p < 0,05$), meskipun tidak signifikan terhadap peluang menjadi U20.

Gambar 61. *Heatmap* Kepemilikan Akun Bank Menurut Kuintil Kesejahteraan di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS, Susenas 2024 (diolah)

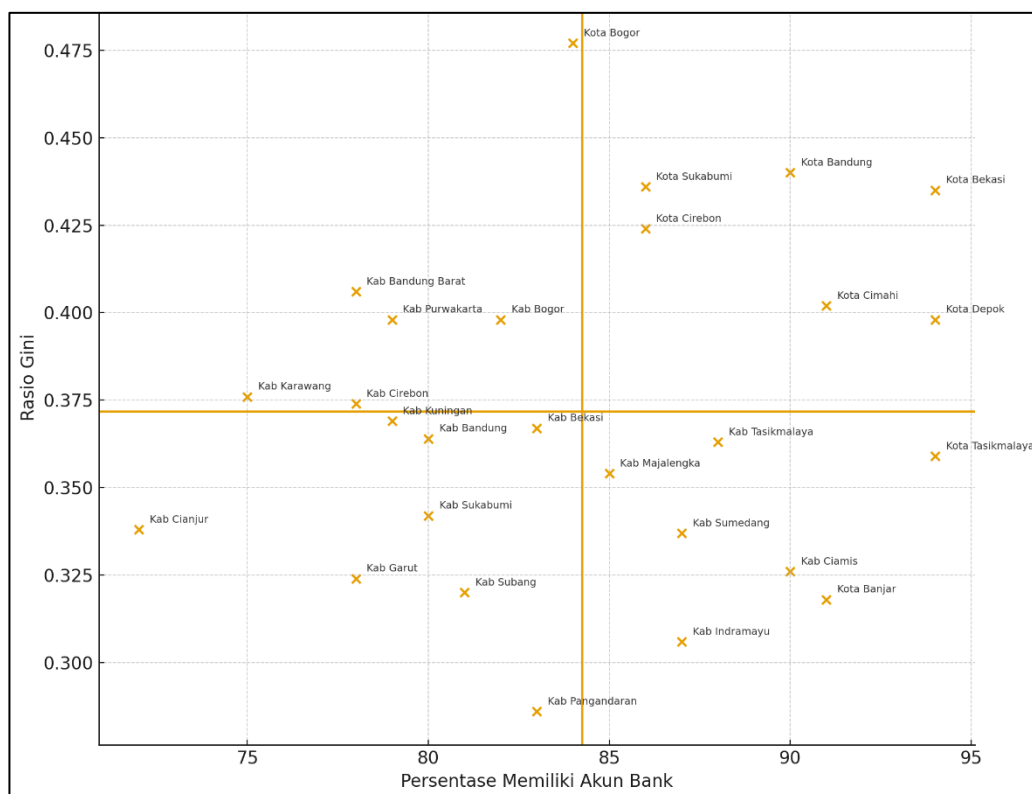
Grafik *Heatmap* akses akun bank berdasarkan kuintil kesejahteraan menunjukkan pola gradasi yang sangat jelas, di mana peningkatan tingkat kesejahteraan selalu beriringan dengan meningkatnya kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal. Hampir seluruh kabupaten dan kota memperlihatkan tren warna yang makin cerah dari Q1 menuju Q5, mencerminkan bahwa rumah tangga pada kuintil atas memiliki akses keuangan yang jauh lebih kuat dibanding kelompok bawah. Pada kuintil satu, terdapat variasi yang cukup besar antarwilayah: beberapa daerah seperti Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Indramayu sudah menunjukkan tingkat akses di atas delapan puluh persen, sementara daerah lain seperti Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi masih berada pada kisaran enam puluh persen atau bahkan lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesenjangan akses tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga karakteristik wilayah seperti urbanisasi, infrastruktur perbankan, dan kedekatan terhadap pusat layanan finansial. Karena rendahnya literasi keuangan dan akses perbankan, kelompok ini lebih mudah mengakses pada praktik pinjaman

informal dengan bunga tinggi yang diberikan secara pribadi dan mudah dan tanpa banyak persyaratan atau dikenal dengan “bank emok”. Pratik ini menjadi berbahaya karena sejenis rentenir dengan cara penagihan yang memaksa dan menimbulkan tekanan mental dan finansial kepada nasabah. Kondisi ini terjadi merata di lokasi kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumadang, Purwakarta, Subang, dan Bandung. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung telah berusaha untuk mengatasi jeratan bank emok dengan program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan untuk modal usaha. Selain itu, upaya untuk menjauhkan masyarakat dari penjaminan *online* (pinjol), Kepala Desa Dangdeur Kabupaten Sumedang sejak Bulan Agustus 2025 membuat terobosan menciptakan pasar tradisional kreatif di desa untuk menggerakkan ekonomi lokal dikenal pasar Sasagaran yang bukanya setiap hari Minggu. Para pelaku usahanya diseleksi dengan syarat tidak memiliki pinjaman *online*.

Memasuki kuintil dua hingga kuintil empat, hampir seluruh wilayah menunjukkan lonjakan signifikan dalam kepemilikan akun bank. Warna *Heatmap* mulai bergerak menuju hijau cerah yang menandakan tingkat akses finansial yang semakin merata di kelompok menengah. Namun, meskipun terjadi peningkatan yang cukup tajam, terdapat wilayah yang masih tertinggal di kuintil menengah seperti Kabupaten Karawang dan Kota Bogor, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi semata belum sepenuhnya menjamin tingginya inklusi keuangan.

Pada kuintil lima, *Heatmap* didominasi warna kuning cerah yang menunjukkan tingkat kepemilikan rekening di atas sembilan puluh persen di hampir semua kabupaten dan kota. Wilayah seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi mencapai tingkat akses hampir sempurna, menandakan integrasi penuh dalam sistem keuangan formal. Sementara itu, daerah seperti Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang, meskipun tetap meningkat signifikan, masih sedikit lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan bahwa inklusi keuangan masih sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan ekonomi, dan kelompok berpendapatan rendah tetap menjadi kelompok yang paling tertinggal dalam akses terhadap layanan perbankan formal. Setelah memperoleh gambaran posisi relatif setiap kabupaten dan kota melalui analisis kuadran, langkah selanjutnya adalah melihat variasi akses keuangan secara lebih rinci melalui visualisasi *Heatmap*.

Gambar 62. Analisis Kuadran Kepemilikan Akun Bank dan *Gini Ratio* di Jawa Barat, 2024



Sumber: BPS, Susenas 2024 (diolah)

Hasil pemetaan kuadran antara kepemilikan akun bank dan *Gini Ratio* menunjukkan hubungan yang tidak selalu linear antara inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan. Meskipun sebagian besar kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kepemilikan akun bank tinggi berada pada kelompok masyarakat yang lebih sejahtera, banyak di antaranya justru menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi merupakan contoh wilayah dengan kepemilikan akun bank di atas rata-rata namun tercatat memiliki *Gini Ratio* yang tinggi. Pola ini menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak otomatis berbanding lurus dengan penurunan ketimpangan pendapatan pada tingkat wilayah.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik sosial ekonomi wilayah perkotaan. Daerah dengan tingkat inklusi keuangan tinggi umumnya merupakan pusat ekonomi dengan aktivitas formal yang lebih dominan. Namun, wilayah tersebut juga memiliki struktur pendapatan yang lebih beragam, dengan kehadiran kelompok berpendapatan tinggi yang mendorong pelebaran jarak pendapatan antar rumah tangga. Dampaknya, meskipun akses terhadap layanan keuangan formal meningkat, kesenjangan antar kelompok tetap melebar karena sebagian besar manfaat layanan finansial (termasuk tabungan, kredit, dan instrumen keuangan lainnya) lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas.

Sebaliknya, beberapa daerah dengan tingkat kepemilikan akun bank yang rendah justru menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, seperti Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cianjur. Hal ini tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi yang lebih merata secara positif, melainkan mencerminkan homogenitas pendapatan pada wilayah pedesaan yang sebagian besar rumah tangganya berada pada kelompok pendapatan rendah. Dengan demikian, ketimpangan rendah pada daerah ini lebih berkaitan dengan ketiadaan kelompok berpendapatan tinggi daripada adanya distribusi pendapatan yang lebih adil.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi, tetapi belum cukup untuk menurunkan ketimpangan tanpa disertai peningkatan kualitas pekerjaan, pemerataan akses ekonomi, dan perluasan kesempatan pendapatan bagi kelompok berpendapatan rendah. Inklusi keuangan yang efektif membutuhkan intervensi yang tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga memastikan bahwa layanan keuangan termanfaatkan secara produktif oleh seluruh lapisan masyarakat.



Ringkasan Bab

- Kepadatan penduduk mendorong perbedaan struktur ekonomi antarwilayah. Wilayah padat penduduk cenderung memiliki ketimpangan yang lebih tinggi karena keragaman aktivitas ekonomi.
- Urbanisasi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam pemerataan kesejahteraan. Tidak semua kelompok mampu mengakses peluang yang tersedia di wilayah perkotaan.
- Akses layanan dasar dan layanan keuangan berbeda antara perkotaan-perdesaan dan antarkelompok kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerataan layanan dasar dan inklusi keuangan diperlukan untuk memperkuat kesempatan ekonomi bagi seluruh penduduk.

BAB X PENUTUP

10.1. Simpulan

Berdasarkan analisis kuantitatif yang menggabungkan pendekatan makro dan mikro, serta tinjauan lapangan yang dilakukan secara terbatas, kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi di Provinsi Jawa Barat merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Analisis makro menggunakan data panel 27 kabupaten/kota tahun 2015–2024 menguatkan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sumber daya manusia, struktur pasar kerja, dinamika fiskal daerah, serta karakter demografis wilayah. Variabel seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kedalaman kemiskinan, Indeks Pengetahuan, serta pengeluaran per kapita terbukti memiliki hubungan signifikan terhadap variasi Gini Rasio antarwilayah. Temuan model dinamis juga mengonfirmasi adanya persistensi ketimpangan dari waktu ke waktu, menandakan bahwa kesenjangan tidak semata dipicu kondisi tahun berjalan, melainkan merupakan akumulasi dari ketidaksamaan peluang yang telah berlangsung lama.

Analisis mikro melalui Susenas 2024 memberikan gambaran yang lebih konkret terkait karakteristik rumah tangga berdasarkan kelompok kesejahteraan. Perbedaan antara B40 dan U20 tampak jelas pada capaian pendidikan, jenis pekerjaan, kondisi perumahan, serta akses layanan dasar seperti sanitasi, air minum, rekening keuangan, dan asuransi. Rumah tangga B40 didominasi oleh pendidikan rendah, bekerja di sektor informal atau pertanian, serta tinggal pada hunian yang belum layak, sehingga kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan relatif terbatas. Sebaliknya, rumah tangga U20 memiliki pendidikan lebih tinggi, berada di pekerjaan formal atau usaha produktif, dan menikmati akses lebih luas terhadap layanan dasar serta jaminan sosial.

Dari perspektif wilayah, ketimpangan di Jawa Barat juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi karena konsentrasi aktivitas industri, jasa modern, dan peluang kerja bernilai tambah tinggi yang tidak dapat diakses merata oleh seluruh penduduk. Sementara itu, sejumlah kabupaten/kota yang berada pada kuadran kerentanan tinggi, ditandai dengan kapasitas ekonomi terbatas, keterbatasan akses layanan dasar, atau pertumbuhan yang melambat, menjadi wilayah yang membutuhkan prioritas intervensi pemerataan pembangunan. Sebaliknya, wilayah perdesaan cenderung memiliki ketimpangan yang lebih rendah karena struktur ekonomi yang homogen, meskipun tingkat kesejahteraan absolut relatif lebih rendah akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan peluang kerja formal.

Integrasi pendekatan makro, mikro, analisis kuadran, dan temuan lapangan memberikan dasar evidensial yang kuat untuk mendukung proses perumusan kebijakan penurunan ketimpangan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan lapangan kerja formal, penguatan perlindungan sosial, pemerataan layanan dasar, serta kebijakan fiskal daerah yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk mengurangi ketimpangan secara berkelanjutan. Rekomendasi yang disusun melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

10.2. Rekomendasi

Rekomendasi ini disusun secara terstruktur berdasarkan (1) dimensi analisis serta (2) karakteristik masing masing kabupaten atau kota. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi isu-isu strategis yang lebih spesifik sesuai konteks lokal, agar relevan dan dapat diaplikasikan bagi daerah. Berdasarkan hasil pemetaan kondisi dan tantangan yang dihadapi masing-masing wilayah, berikut diusulkan langkah-langkah intervensi agar lebih tepat sasaran untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di Jawa Barat. Berikut disampaikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, serta berkontribusi dalam penurunan *Gini Ratio* nasional.

Tabel 24 Rangkuman Isu Strategis dan Rekomendasi per Dimensi

Dimensi	Permasalahan Utama	Rekomendasi Strategis
<p>1. Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan tinggi di perkotaan akibat perbedaan kualitas tenaga kerja dan akses pekerjaan formal. • Produktivitas rendah di perdesaan, khususnya sektor pertanian. • UMKM menghadapi keterbatasan modal dan digitalisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri melalui program magang terstruktur di Perusahaan manufaktur dan jasa, skema guru tamu dari pelaku industri, dan penyusunan kurikulum Bersama dunia usaha. • Meningkatkan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> tenaga kerja lokal melalui balai Latihan kerja daerah yang bermitra dengan asosiasi industri, platform pelatihan daring, dan program pelatihan berbasis kebutuhan riil kawasan industri. • Memperkuat produktivitas pertanian melalui mekanisasi, pelatihan agribisnis, kemitraan off-taker dengan korporasi pangan, dan integrasi petani kecil ke dalam rantai pasok modern (retail, hotel, restoran).

Dimensi	Permasalahan Utama	Rekomendasi Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi UMKM melalui skema KUR tematik, inkubasi bisnis Bersama perbankan dan fintech, serta pendampingan pemasaran digital (marketplace, media sosial). • Mendorong investasi yang merata ke wilayah perdesaan dan non-kawasan industri dengan menyiapkan kawasan ekonomi local (sentra UMKM, agropolitan) dan paket insentif yang mengaitkan investor besar dengan kewajiban kemitraan UMKM lokal.
2. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pengetahuan rendah di sebagian kabupaten/kota. • Kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaan. • SDM perdesaan didominasi pendidikan rendah dan keterampilan dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk memanfaatkan kebijakan PSN "Sekolah Rakyat" dengan menjaring anak-anak usia sekolah utamanya dari keluarga desil 1, penyediaan beasiswa bersyarat, dan Kerjasama dengan organisasi Masyarakat untuk pendampingan anak tidak sekolah • Meningkatkan kualitas sekolah di perdesaan melalui penempatan guru penggerak, program pertukaran guru dengan sekolah unggulan di kota, penyediaan laboratorium digital, serta kemitraan CSR Perusahaan untuk penyediaan perangkat TIK. • Memperluas pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja dengan mendorong SMK dan BLK menjalin MoU magang industri, kelas industri Bersama Perusahaan, serta uji kompetensi yang diakui asosiasi profesi.

Dimensi	Permasalahan Utama	Rekomendasi Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan program literasi dan pendidikan nonformal untuk kelompok dewasa di perdesaan berbasis desa, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga pelatihan swasta. • Memperkuat layanan kesehatan primer, penanganan stunting, dan cakupan jaminan Kesehatan melalui perluasan Posyandu aktif, kemitraan dengan klinik dan rumah sakit swasta, serta digitalisasi layanan di daerah terpencil.
3. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan air minum layak, sanitasi, listrik, dan hunian layak pada rumah tangga B40. • Ketimpangan infrastruktur antarwilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pembangunan layanan dasar (air minum, sanitasi, listrik) di wilayah hinterland dan desa tertinggal melalui program padat karya, skema KPBU kecil, dan pelibatan BUMDes sebagai operator lokal. • Menata permukiman kumuh dan penyediaan hunian terjangkau di kota besar dengan memperluas program rumah susun sewa, dan kerjasama dengan pengembang swasta yang disyaratkan menyediakan porsi unit bagi MBR. • Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui peningkatan jalan, transportasi publik, dan jaringan digital. • Mendorong kolaborasi pemerintah daerah, BUMN, dan swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui forum investasi daerah, pipeline proyek KPBU, dan skema CSR yang terarah untuk layanan dasar di kantong kemiskinan.

Dimensi	Permasalahan Utama	Rekomendasi Strategis
<p>4. Sosial dan Perlindungan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bansos masih tidak tepat sasaran dan sebagian dinikmati kelompok sejahtera. • Pekerja informal belum terlindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan data untuk penajaman sasaran bansos melalui pemanfaatan DTSEN. • Memperkuat program bantuan adaptif bagi pekerja informal dan rumah tangga rentan melalui skema bantuan sementara saat ada guncangan, serta kerjasama dengan <i>platform</i> kerja digital dan koperasi untuk skema iuran ringan jaminan sosial. • Memperluas cakupan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dengan mendorong iuran subsidi bagi pekerja informal dan kemitraan dengan asosiasi usaha kecil. • Mengembangkan mekanisme pengaduan dan verifikasi berbasis desa secara digital yang dikelola Bersama pemerintah desa dan pendamping sosial untuk mencegah inclusion-exclusion error.
<p>5. Wilayah (Perkotaan–Perdesaan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan: ketimpangan tinggi karena polarisasi pekerjaan bernilai tambah tinggi. • Perdesaan: pendapatan rendah karena ketergantungan pada pertanian kecil. 	<p>Perkotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pendidikan unggulan bagi keluarga berpendapatan rendah melalui kuota afirmasi di sekolah favorit, program bimbingan belajar gratis bermitra dengan kampus dan skema magang kota bagi siswa SMK/ perguruan tinggi. • Menyediakan hunian terjangkau melalui program sewa-beli, kerjasama dengan pengembang swasta yang mewajibkan porsi unit untuk MBR, dan penataan kampung kota berbasis <i>community upgrading</i>. • Menata sektor informal agar lebih produktif melalui legalisasi dan penataan Lokasi usaha, pelatihan

Dimensi	Permasalahan Utama	Rekomendasi Strategis
		<p>manajemen usaha, serta kemitraan dengan platform digital.</p> <p>Perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses layanan dasar berbasis desa melalui pemanfaatan Dana Desa, BUMDes, dan kemitraan CSR perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah. • Menguatkan agroindustri dan diversifikasi ekonomi desa dengan membentuk kluster komoditas unggulan, unit pengolahan hasil pertanian, dan Kerjasama pemasaran dengan retail modern / pengepul besar. • Membangun konektivitas desa–kota untuk membuka akses pasar dan mobilitas kerja melalui penguatan transportasi perintis, feeder ke terminal, dan informasi lowongan kerja yang difasilitasi dinas tenaga kerja.

Tabel 25 Rangkuman Isu Strategis dan Rekomendasi per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Isu Strategis Utama	Rekomendasi Kebijakan yang Relevan
Kabupaten Indramayu	Termasuk kategori “merata miskin”: Gini rendah tetapi kedalaman kemiskinan tinggi (P1 2,05). Ekonomi masih sangat agraris.	Perluasan pekerjaan non-pertanian, modernisasi pertanian, dan percepatan layanan dasar (pendidikan & kesehatan). Penguatan UMKM dan inklusi keuangan.
Kabupaten Subang	“Merata miskin” (P1 1,63). UMKM rendah – Gini rendah. Wilayah agraris.	Penguatan UMKM, pelatihan agribisnis, mendorong industri pascapanen, dan peningkatan konektivitas desa–kota.
Kabupaten Cianjur	“Merata miskin” (P1 1,58). Tingkat pendidikan rendah. Wilayah selatan pesisir.	Perluasan akses pendidikan (terutama SMA), intervensi untuk anak tidak sekolah, pariwisata dan agroindustri sebagai motor ekonomi baru.
Kabupaten Sumedang	“Merata miskin” (P1 1,60). Akses pendidikan terkendala geografi (wilayah berbukit).	Solusi transportasi sekolah, pembangunan sekolah baru, dan pemanfaatan konektivitas tol untuk menarik investasi.
Kabupaten Bogor	UMKM tinggi – Gini rendah; sebagian wilayah berbasis industri.	Penguatan rantai pasok UMKM, pengendalian <i>urban sprawl</i> , dan peningkatan layanan dasar di wilayah pinggiran.
Kabupaten Bandung	Pendidikan tinggi – Gini rendah. Ekonomi sudah industri, tetapi tidak mendorong kesejahteraan signifikan.	Peningkatan kualitas industri padat karya, pemerataan sekolah bermutu, dan integrasi UMKM ke ekosistem industri.
Kabupaten Garut	UMKM tinggi – Gini rendah; wilayah pertanian dominan.	Penguatan koperasi, pengembangan komoditas unggulan, dan perbaikan konektivitas wilayah selatan.
Kabupaten Tasikmalaya	Pendidikan tinggi – Gini rendah; daerah agraris dengan UMKM relatif kecil.	<i>Scale-up</i> UMKM kreatif (batik, kerajinan), peningkatan digitalisasi usaha, dan penguatan akses pasar.

Kabupaten/Kota	Isu Strategis Utama	Rekomendasi Kebijakan yang Relevan
Kabupaten Ciamis	UMKM rendah – Gini rendah; daerah agraris.	Diversifikasi ekonomi desa, pengembangan pariwisata alam, dan perluasan pelatihan keterampilan.
Kabupaten Kuningan	Kemiskinan dalam cukup tinggi (P1 2,02) meski Gini sedang.	Intervensi kemiskinan ekstrem, modernisasi pertanian, serta peningkatan akses pendidikan desa.
Kabupaten Cirebon	Pendidikan rendah (6,54 persen tidak sekolah) dan ekonomi pertanian; UMKM tinggi – Gini rendah.	Literasi pendidikan, pelatihan kerja milenial, dan penguatan UMKM ekspor kecil (kuliner, batik).
Kabupaten Majalengka	Pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa Barat karena perkembangan wilayah Rebana.	Manajemen transformasi industri, upskilling tenaga kerja lokal, dan pengendalian ketimpangan kawasan baru.
Kabupaten Purwakarta	UMKM rendah – Gini rendah. Industri berkembang.	Integrasi UMKM dengan industri besar, program reskilling bagi pekerja lokal.
Kabupaten Karawang	Tidak sekolah tinggi (4,99 persen); kawasan industri besar; dualisme ekonomi.	Vokasi berbasis industri, digitalisasi UMKM, dan pengendalian ketimpangan pekerja formal-informal.
Kabupaten Bekasi	Tidak sekolah tinggi (4,93 persen); industri dominan; UMKM tinggi – Gini tinggi (kaya timpang).	Redistribusi kesempatan kerja formal, pelatihan keterampilan digital, dan peningkatan permukiman pekerja.
Kabupaten Bandung Barat	UMKM rendah – Gini rendah; sektor industri cukup besar.	Kembangkan UMKM industri pendukung, penguatan infrastruktur desa-kota.
Kabupaten Pangandaran	UMKM rendah – Gini rendah; kawasan pesisir selatan; pendidikan rendah.	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelatihan <i>hospitality</i> , dan perluasan sekolah menengah.
Kota Bogor	Gini tinggi (0,477); RLS tinggi; kota metropolitan.	Regulasi pasar kerja, perluasan perumahan terjangkau, dan penguatan UMKM perkotaan.

Kabupaten/Kota	Isu Strategis Utama	Rekomendasi Kebijakan yang Relevan
Kota Sukabumi	Gini tinggi (0,436); pendidikan tinggi; basis ekonomi kecil.	Diversifikasi ekonomi, penguatan sektor jasa, dan perbaikan mobilitas pekerja.
Kota Bandung	Gini tinggi (0,440); pusat ekonomi kreatif; pengeluaran tinggi.	Penguatan industri kreatif, pemerataan pendidikan, dan pengendalian harga permukiman.
Kota Cirebon	Gini tinggi; RLS tinggi; urbanisasi cepat.	Penguatan pemerataan layanan pendidikan, UMKM berbasis budaya, dan revitalisasi kawasan lama.
Kota Bekasi	UMKM tinggi – Gini tinggi; ekonomi dualistik.	Integrasi UMKM dengan <i>supply chain</i> industri, peningkatan keterampilan digital.
Kota Depok	Gini tinggi (0,398); kawasan pendidikan; ekonomi jasa.	Penguatan sektor ekonomi kreatif, pemerataan ruang kota, dan pembangunan transportasi publik.
Kota Cimahi	Gini tinggi (0,402); industri kreatif dan jasa meningkat.	Peningkatan skill digital, penguatan UMKM kuliner dan kreatif, serta pengendalian ketimpangan urban.
Kota Tasikmalaya	UMKM rendah – Gini rendah; pendidikan tinggi.	<i>Scale-up</i> UMKM kreatif, akses permodalan, peningkatan digital marketing.
Kota Banjar	UMKM rendah – Gini rendah; pengeluaran riil rendah.	Penguatan ekonomi lokal berbasis perdagangan, perbaikan akses pendidikan, dan pengembangan wirausaha baru.

DAFTAR REFERENSI

- Afif Dika. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010–2018. *Diponegoro journal of economics*. 11(3), 176-186.
- Ahdiat, A. (2023). *32% Warga Jawa Barat Tak Punya Jaminan Kesehatan, Tertinggi di Pulau Jawa* (2023). Jakarta: Katadata. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/29f957601dbad26/32-warga-jawa-barat-tak-punya-jaminan-kesehatan-tertinggi-di-pulau-jawa>
- Akupintar. (2024). *Kependudukan*. Diakses dari Belajar Pintar Materi SMP, SMA, SMK
- Alamanda. (2021). The effect of economic growth on income inequality: Panel data analysis from fifty countries. *Info Artha*, 5(1), 1–10.
- Amalia, C. R., Endarti, D., & Widayanti, A. W. (2021, Juli 7). Faktor Yang Memengaruhi Biaya Out of Pocket (OOP) Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Jalan: Analisa Data Sekunder Indonesia Family Life Survey Gelombang 4 (IFLS4). *Majalah Farmaseutik* Vol. 18 No. 3 : 307-314, 18, 307-314. Retrieved from file:///C:/Users/hp/Downloads/67648-278039-1-PB.pdf
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan*
- Ariasta, M. A. A., & Setiawati, R. I. S. (2024). Dampak TPT, IPM dan jumlah penduduk terhadap melebarnya ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 697–713.
- Awaliyah, L. F., & Arisetyawan, K. (2023). Perbandingan Kesenjangan Pendapatan Antar Generasi di Provinsi-Provinsi yang Ada di Pulau Jawa. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, III(3), 51-61.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka, 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2024). *Statistik Indonesia (SI) – bagian kependudukan*. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2019-2024*. *Badan Pusat Statistik*. Diakses dari

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025, Agustus 26). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat, 2024*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa--di-provinsi-jawa-barat--2024.html?year=2024>

Badan Pusat Statistik. (2025, Agustus). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat (%)*, 2021-2024. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/pengangguran>

Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 2). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2021-2024*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2025>

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Proporsi Pekerja Formal Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat (%)*, 2020-2024. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/en/statistics-table/2/OTYzIzI=/proporsi-pekerja-formal-menurut-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-barat.html>

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat (Persen)*, 2020-2024. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTI0IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-barat.html>

Badan Pusat Statistik. (2025, November 7). *Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, 2025*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTI5IzI=/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kegiatan.html>

- BPS. (2025, Januari 25). *Jumlah Industri Menurut Cabang Industri di Kota Depok (Unit), 2023*. Jakarta. Retrieved from <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg5Izl=/jumlah-industri-menurut-cabang-industri-di-kota-depok.html>
- Canh, N. P., Schinckus, C., Thanh, S. D., & Hui Ling, F. C. (2020). Effects of the internet, mobile, and land phones on income inequality and the Kuznets curve: Cross country analysis. *Telecommunications Policy*, 44(10), 102041. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102041>
- Cuesta, José; Negre, Mario. *Poverty and shared prosperity 2016 : taking on inequality* (English). Poverty and Shared Prosperity Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/242251476706821424>
- Damayanti, L., & Astuti, T. (2024). *Analisis determinan tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(2), 145–160.
- Databoks. (2019, September 16). *Jawa Barat Provinsi dengan Penduduk Terbanyak*. *Badan Pusat Statistik*. Diakses dari Jawa Barat Provinsi dengan Penduduk Terbanyak
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. (2023). *Peta Tutupan Lahan di Jawa Barat, 2023*. *Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat*. Diakses dari <https://singmanfaat.jabarprov.go.id/Galerituplah>.
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis pengaruh jumlah penduduk, upah minimum kabupaten, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015–2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(3), 1–8.
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis pengaruh jumlah penduduk, upah minimum kabupaten, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015–2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(3), 1–12.
- Gondauri, D. (2024). The impact of socio-economic challenges and technological progress on economic inequality: An estimation with the Perelman model and Ricci flow methods. *SocioEconomic Challenges*, 8(4), 161–176. [https://doi.org/10.61093/sec.8\(4\).161-176.2024](https://doi.org/10.61093/sec.8(4).161-176.2024)
- Handayani, R. (2020). Transisi Demografi dan Piramida Penduduk. In Modul Dasar-Dasar Kependudukan (pp. 10-11). *Universitas Esa Unggul*.

- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, VIII(3), 250-265.
- Jamiel, H. N., Anwar, N., Arifin, A., Yanti, R. A. E., & Ilah. (2022). Determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 10(2), 173–178
- Jamil, A. R., Law, S. H., Khair-Afham, M. S., & Trinugroho, I. (2024). Financial inclusion and income inequality in developing countries: The role of aging populations. *Research in International Business and Finance*, 67, 102110. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102110>
- Johansson, A. C., & Wang, X. (2014). Financial sector policies and income inequality. *China Economic Review*, 31, 367–378. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.06.002>
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Retrieved from file:///C:/Users/hp/Downloads/172231123666a86244b83fd8.51637104.pdf
- Kementerian Kesehatan. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Retrieved from file:///C:/Users/hp/Desktop/2025/KAJIAN%202025/PROFIL%20KESEHATAN%20INDONESIA%202023.pdf
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*.
- Lambin E. F., Turner B. L., Geist H. J., Agbola S. B., Angelsen A., Folke C., Bruce J. W., Coomes O. T., Dirzo R., George P. S. et al. (2001). The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. *Glob Environmental Change*. 11: 261-269.
- Lewis, W.A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Manchester School.
- Ma'arif, S. (2017). *Pemanfaatan dana remitansi tenaga kerja Indonesia Kabupaten Indramayu 2012-2016*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Retrieved from <https://repository.syekhnurjati.ac.id/12227/1/1.%20COVER.pdf>

- Merdeka.com. (2025, Januari 24). *Bukan Jakarta, Kota Termacet ke-12 di Dunia Ini Ada Indonesia Menurut TomTom Traffic Index 2024*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/gaya/bukan-jakarta-kota-termacet-ke-12-di-dunia-ini-ada-indonesia-menurut-tomtom-traffic-index-2024-290068-mvk.html>
- Muhamad, N. (2025). *Mayoritas Pekerja Migran Indonesia 2024 Berasal dari Pulau Jawa*. Jakarta: katadata.co.id. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/67846131833ce/mayoritas-pekerja-migran-indonesia-2024-berasal-dari-pulau-jawa>
- Muhamad, N. (2025). *Produktivitas Tenaga Kerja di 38 Provinsi Indonesia 2024, Jakarta Teratas*. Jakarta: katadata.co.id. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/67da74f8bdfd5/produktivitas-tenaga-kerja-di-38-provinsi-indonesia-2024-jakarta-teratas>
- Octavia, E. C., Firmansyah, A. A., Fatmala, R. D., Aisa, S. N., Ma'ruf, A., & Hamzah, A. F. (2024). The nexus of economic growth, Human Development Index, and unemployment to income inequality in East Java. *Growth, Equality, and Social Development Review*, 28(2), 1–15. <https://doi.org/10.24123/gesdr.v28i2.7002>
- Pauleit S., Ennos R., Golding Y. (2005). Modeling the environmental impacts of urban land use and land cover change-a study in Merseyside, UK. *Landscape and Urban Planning*. 71: 295-310. doi:10.1016/j.landurbplan.2004.03.009.
- Putri, & Natha. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1), 41–49.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 286–300.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 286–300.
- Sejati, D. P. (2020). Pengangguran Serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 11(3), 98-105.
- Sen, A. (1992). *Inequality reexamined*. Oxford University Press. ISBN 0-19-828334-2

- Septiawan, A., & Wijaya, S. H. (2021). *Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2019 Menggunakan Model Regresi Data Panel*. Seminar Nasional Official Statistics 2020: Statistic in the New Normal a Challenge of Big Data and Official Statistics (p. 451). Jakarta: Politeknik Statistika (STIS).
- Shafina, G. (2023). *10 Provinsi dengan Pengeluaran Kesehatan dari Kantong Pribadi Tertinggi 2022*. Jakarta: Good stats. Retrieved from <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-pengeluaran-kesehatan-dari-kantong-pribadi-tertinggi-2022-k6G09>
- Sutrisno, D. (2024). BPS: *Ada 658.831 Anak di Jabar yang Tidak Bersekolah*. Retrieved from <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/bps-ada-658-831-anak-di-jabar-yang-tidak-bersekolah?page=all>
- The World Bank. (November 2024). *Human Capital Index (HCI) (scale 0-1)*. The World Bank. Retrieved from https://humancapital.worldbank.org/en/indicator/WB_HCP_HCI
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. Pearson.
- Tuter, A. (2023, Februari 17). *Kementan Catat 70 Persen Petani Indonesia Berpendidikan Rendah*. Jakarta. Retrieved from <https://www.rri.co.id/nasional/166690/kementan-catat-70-persen-petani-indonesia-berpendidikan-rendah>
- Vionita, Y., & Artha, D. P. (2024). Analisis faktor-faktor ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4), 807–815.
- Wardhana, et al. (2013). Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 15(2), 111–118.*
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–56.